

Bidang Unggulan : Budaya dan Inovasi
799/Rumpun Manajemen/Administrasi Pendidikan

LAPORAN TAHUNAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT (PRODIRA) KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KONTEKS BUDAYA HUYULA DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI GORONTALO

(Tahun ke-1 dari Rencana 2 Tahun)

Tim Peneliti

			NIDN
1.	Dr. Arwildayanto, M.Pd	Ketua	0015097511
2.	Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd	Anggota	0007126605
3.	Warni Tune Sumar, S.Pd, M.Pd	Anggota	0024037003

Dibiayai oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : 077/SP2H/LT/DRPM/IV/2017
Oktober 2017

HALAMAN PENGESAHAN

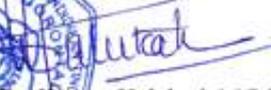
Judul : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT (PRODIRA)
KONTRIBUSINYA TERHADAPPENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT KONTEKS
BUDAYA HUYULA DALAM PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN DI PROVINSI GORONTALO

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr ARWILDAYANTO, S.Pd,M.Pd
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
NIDN : 0015097511
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Administrasi Pendidikan
Nomor HP : 081244093774
Alamat surel (e-mail) : arwildayanto@ung.ac.id

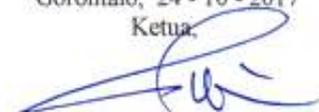
Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr NINA LAMATENGGO S.E., M.Pd
NIDN : 0007126605
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

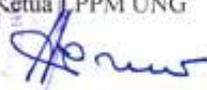
Anggota (2)
Nama Lengkap : WARNI TUNE SUMARS.Pd
NIDN : 0024037003
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp88.908.000
Biaya Keseluruhan : Rp236.820.000

Mengetahui,
Dekan FIP UNG

(Prof. Dr. Wenny Hulukati, M.Pd)
NIP.NIK 195709181985032001

Gorontalo, 24 - 10 - 2017
Ketua


(Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd)
NIP.NIK 195709152008121001

Menyetujui,
Ketua LPPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP.NIK 196804091993032001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT (PRODIRA) KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KONTEKS BUDAYA HUYULA DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI GORONTALO

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/ming)
1	Dr ARWILDAYANTO S.Pd, M.Pd	Ketua Pengusul	Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan Pendidikan	Universitas Negeri Gorontalo	18.00
2	Dr NINA LAMATENGGGO S.E., M.Pd	Anggota Pengusul	-	Universitas Negeri Gorontalo	15.00
3	WARNI TUNE SUMAR S.Pd, M.Pd	Anggota Pengusul	-	Universitas Negeri Gorontalo	15.00

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Kepala Sekolah, Guru, Anggota Komite Sekolah dan Siswa
4. Masa Pelaksanaan
Mulai tahun : 2017
Berakhir tahun : 2018
5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang
- Tahun ke-1 : Rp112,500,000
- Tahun ke-2 : Rp119,450,000
6. LokasiPenelitian
(lab/studio/lapangan)
Provinsi Gorontalo
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kepala SMA/SMK/MA, Guru, Siswa dan Orang Tuas Siswa
8. Temuan yang ditargetkan (produk atau masukan untuk kebijakan)
Mendapatkan informasi yang lebih kredibel secara ilmiah tentang efektivitas kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program pendidikan untuk Rakyat. Sekaligus mencermati kecenderungan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sebagai karakteristik budaya Huyula yang sudah menjadi tradisi turun temurun di tengah masyarakat Gorontalo.
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang mendukung pengembangan iptek)
Penelitian ini berkontribusi pada bidang manajemen pendidikan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan program pendidikan untuk rakyat (Prodira) guna mengukur efektivitasnya. Indikatornya partisipasi masyarakat, orang tua dan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan terus menerus ditingkat melalui pembetulan budaya Gotong Royong (Huyula) sebagai tradisi budaya Gorontalo
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara (ISSN 1410-3583) dan Journal of Management Education (ISSN 1052-5629)
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya
- Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional, tahun ke-2 Target: reviewed

- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi, tahun ke-1 Target: reviewed
- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi, tahun ke-2 Target: accepted/published
- Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional, tahun ke-1 Target: terdaftar
- Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional, tahun ke-2 Target: sudah dilaksanakan
- Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional, tahun ke-2 Target: terdaftar
- Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional, tahun ke-2 Target: belum/tidak ada
- Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Nasional, tahun ke-1 Target: terdaftar
- Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Nasional, tahun ke-2 Target: terdaftar
- Visiting Lecturer Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Visiting Lecturer Internasional, tahun ke-2 Target: belum/tidak ada
- Teknologi Tepat Guna, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Teknologi Tepat Guna, tahun ke-2 Target: belum/tidak ada
- Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial, tahun ke-1 Target: draft
- Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial, tahun ke-2 Target: penerapan
- Buku Ajar (ISBN), tahun ke-1 Target: editing/sudah terbit
- Buku Ajar (ISBN), tahun ke-2 Target: editing/sudah terbit
- Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), tahun ke-1 Target: Skala 6
- Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), tahun ke-2 Target: Skala 8

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan bentuk partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan di provinsi Gorontalo.

Penelitian ini direncanakan berlangsung dua tahun anggaran, dengan skenario tahun pertama, (1) mengidentifikasi dinamika yang berkembang terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi Gorontalo melaksanakan PRODIRA, (2) mengukur efektivitas kebijakan PRODIRA. Sedangkan tahun kedua dilakukan, (1) survey dinamika partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan sudah menjadi tradisi masyarakat Gorontalo, (2) analisis relasi efektivitas kebijakan PRODIRA dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks budaya huyula, (3) mengembangkan model peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan di Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixing method* yakni kuantitatif dan kualitatif atau dikenal dengan penelitian kombinasi. Metode kombinasi tidak seimbang (*concurrent embedded*). Dimana pendekatan kuantitatif dominan dilakukan pada tahun pertama dan pendekatan kualitatif dominan tahun kedua. Adapun pertimbangan *mixing method* digunakan agar peneliti pada tahun pertama dapat mengidentifikasi dan mengukur efektivitas kebijakan prodira yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk tahun kedua agar peneliti dapat mendalami konstruksi dinamika dan membuat model pengembangan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan sebagai identitas masyarakat Gorontalo dapat dipahami secara utuh (holistik). Kesemua pertimbangan dalam penelitian ini sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Gorontalo yakni pemberdayaan potensi daerah untuk penguatan budaya dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

Adapun hasil penelitian pada tahun pertama ini peneliti dapat informasi efektivitas kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Gorontalo tidak berkontribusi dalam peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan. Secara teknis pelaksanaan kebijakan PRODIRA berlangsung dengan baik, menghasilkan capaian target yang sudah di tetapkan terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo. Fenomena menarik terjadinya degradasi partisipasi yang mestinya dapat terus ditingkatkan, seiring dengan kemampuan pemerintah yang terbatas dalam pembiayaan pendidikan.

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan PRODIRA, Partisipasi Masyarakat, Budaya Huyula, dan Pembiayaan Pendidikan

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah patut kita haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian unggulan perguruan tinggi hibah Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Kemristek Dikti tahun 2017 ini, dengan judul Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Kontribusinya terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Peneliti menyadari sepenuhnya laporan ini masih harus disempurnakan lagi. Karena itu bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenaan membantu penelitian ini selesai tepat waktu diucapkan terima kasih yang tidak terkira. Semoga segala kebaikan dan komitmen ini meningkatkan sumber daya manusia dan pendidikan nasional diberikan amal yang setimpal oleh Allah SWT di kemudian hari.. Amin ya.

Selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian ini, antara lain

1. Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Kemristek Diktimembiayai
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo yang sudah memfasilitasi kegiatan penelitian ini
3. Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di seluruh SMA, SMK dan MA se Provinsi Gorontalo
4. Kepala Badan Kesbang Pol. Provinsi Gorontalo yang telah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk diberikan izin pelaksanaan penelitian.
5. Kepala sekolah, Guru, Bendahara dan Orang tua siswa atau pengurus komite di SMA, SMK dan MA se Provinsi Gorontalo yang berkenaan memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.
6. Segenap mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan yang sudah berkenaan turun ke lapangan untuk menghimpun data yang diperlukan
7. Anggota tim peneliti yang sudah berkolaborasi dan bekerjasama dalam penelitian ini.

Semoga laporan tahunan atau akhir penelitian tahap 1 dari 2 tahun yang direncanakan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Gorontalo dan peningkatan pembelajaran di jurusan manajemen pendidikan yang berbasis hasil riset khususnya pada Mata Kuliah Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan serta Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan yang peneliti ampuh (bina).

Gorontalo, Oktober 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	ii
RINGKASAN	vi
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Penelitian	7
C. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	8
D. Temuan (Hasil Yang di Targetkan)	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)	9
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan	23
Konteks Budaya Huyula	
C. Penelitian Terdahulu	27
D. Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian	29
E. Keterkaitan Roadmap Penelitian yang diusulkan dengan	30
Renstra LPPM UNG	
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	31
A. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	31
B. Manfaat Penelitian	31
BAB IV METODE PENELITIAN	33
A. Wilayah Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian Desain Kombinasi (<i>Concurrent Embedded</i>)	33
C. Langkah-langkah Penelitian Kombinasi Tidak Seimbang	36
(<i>Concurrent Embedded</i>) dan Pengembangan Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Model Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan	
D. Populasi, Sampel dan Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Instrumen Penelitian	45
G. Analisis Data Hasil Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	51
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	54

I. Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan	91
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran-saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Populasi Penelitian terdiri dari SMA/SMK/MA se Provinsi Gorontalo	38
Tabel 4.2 Jumlah Sampel Penelitian.....	39
Tabel 4.3. Daftar SMA/SMK/MA yang terpilih menjadi Sampel Penelitian	39
Tabel 4.4 Skala Liker Jawaban Responden	42
Tabel 4.5 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Efektivitas Kebijakan PRODIRA	45
Tabel 4.6 Data uji Coba Instrumen Pada Kepala Sekolah, Guru, Bendahara..... dan Orang Tua Siswa (Komite Sekolah) di SMA/SMK dan MA Se Provinsi Gorontalo	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Instrumen Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X_1)	47
Tabel 4.8 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Partisipasi Masyarakat	49
Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan	
Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Instrumen Partisipasi Masyarakat..... Konteks Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)	50
Tabel 4.10 Bobot atau skor alternative jawaban responden	51
Tabel 4.11 Sistem Pengkodean Analisis Data	54
Tabel 5.1 Statistics masing-masing variabel	59
Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peningkatan Partisipasi	60
Masyarakat Kontek Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan	
Tabel 5.3 Masyarakat dan orang tua mensikapi kebijakan PRODIRA	61
Tabel 5.4 Sikap masyarakat dan orang tua siswa terhadap..... kebijakan PRODIRA	62
Tabel 5.5 Kesadaran masyarakat dan orang tua siswa pada konteks..... budaya huyula dalam pembiayaan Pendidikan	63
Tabel 5.6 Kesadaran terhadap pembiayaan pendidikan menjadi..... tanggung- jawab bersama	63
Tabel 5.7 Tolong menolong yang dilakukan masyarakat dan orang tua	65
siswa konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan	

Tabel 5.8 Budaya tolong menolong dalam pembiayaan pendidikan	66
Tabel 5.9 Keaktifan Berpartisipasi masyarakat dan orang tua..... siswa berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan	68
Tabel 5.10 Keaktifan masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi	68
dalam pembiayaan pendidikan	
Tabel 5.11 Rekapitulasi Hasil Skor tentang Partisipasi Masyarakat	69
dalam Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan	
Tabel 5.12 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Efektivitas	70
Kebijakan PRODIRA	
Tabel 5.13 Keselarasan regulasi yang mengatur dan tujuan.....	72
dilaksanakannya kebijakan PRODIRA	
Tabel 5.14 Analisis keselarasan regulasi dan tujuan kebijakan PRODIRA	72
Tabel 5.15 Skor Jawaban Responden tentang target capaian	75
kebijakan PRODIRA	
Tabel 5.16 Target capaian kebijakan PRODIRA	75
Tabel 5.17 Skor Jawaban Responden tentang pengelolaan	76
kebijakan PRODIRA	
Tabel 5.18 Pengelolaan kebijakan PRODIRA	77
Tabel 5.19 Sasara penggunaan anggaran PRODIRA di	83
SMA, SMK dan MA se Provinsi Gorontalo	
Tabel 5.20 Skor Jawaban Responden tentang pengawasan	85
kebijakan PRODIRA	
Tabel 5.21 Kepengawasan kebijakan PRODIRA	86
Tabel 5.22 Rekapitulasi Hasil Skor tentang Efektivitas Kebijakan.....	87
PRODIRA berdasarkan analisis data kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif	
Tabel 5.23 Analisis Varians Untuk Kebartian Uji Kelinearan Regresi	88
Tabel 5.24 Correlations Variabel Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)	90
dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)	
Tabel 5.25 Uji Keberartian koefisien korelasi X, Y dengan Uji t.....	90

Tabel 5.26 Pembagian urusan layanan pendidikan antara pemerintah pusat,..... provinsi dan kabupaten atau kota	93
Tabel 5.27 Anggaran Kebijakan PRODIRA dari tahun 2011-2016	97
Tabel 5.28 Tren Kenaikan Dana BOS dari tahun 2012-2017	111
Tabel 5.29 Jumlah dana PRODIRA yang di terima beberapa SMA, SMK dan MA di Provinsi Gorontalo	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian	30
Gambar 4.1. Metode penelitian Kombinasi <i>Concurrent Embedded</i> , yang diadaptasi dari pemikiran Sugiyono.	36
Gambar 4.2 Langkah-langkah Penelitian Kombinasi Tak Seimbang (<i>Concurrent Embedded</i>) dan Pengembangan Model Rekayasa Sosial Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan	37
Gambar 4.3 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif,	53
diadaptasi dari Miles & Huberman.	
Gambar 4.4 Diagram Alir Model Efektivitas Kebijakan PRODIRA di SMA, SMK dan MA Provinsi Gorontalo Kontribusinya Terhadap Partisipasi Masyarakat konteks Budaya Huyula dalam pembiayaan pendidikan.	57
Gambar 5.1. Histogram Skor Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)	60
Gambar 5.2 Spanduk yang dipajang di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo	67
Gambar 5.3. Histogram Skor Variabel Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)	71
Gambar 5.4 Organisasi Pelaksana/Tim manajemen PRODIRA di tingkat Provinsi Gorontalo	78
Gambar 5.5 Kadis Dikpora Provinsi Gorontalo, Drs. Arfan Arsyad, M.Pd menyampaikan materi dalam Studium General tentang PRODIRA	81
Gambar 5.6 Keselarasan Payung Hukum PRODIRA	95
Gambar 5.7 Grafik Trend Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Gorontalo	96
Gambar 5.8 Grafik Kecendrungan kenaikan RLS dan HLS	97
Gambar 6.1 Tahapan Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2018	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kisi-kisi Instrumen Penelitian	131
Lampiran II Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	132
Lampiran III Instrumen Penelitian	136
Lampiran IV Rekapitulasi Data Penelitian	141
Lampiran V Distribusi Frekuensi Masing-masing	144
Lampiran VI Analisis Uji Persyaratan	147
Lampiran VII Perhitungan Bentuk Persamaan Regresi dan Uji Keberartian `	148
Lampiran VIII Analisis Pengujian Hipotesis	152
Lampiran IX Susunan Oganisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	153
Lampiran X Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	154
Lampiran XI Surat Pernyataan Ketua Peneliti	169
Lampiran XII Permohonan Rekomendasi Penelitian	170
Lampiran XIII Surat Rekomendasi Penelitian	171
Lampiran XIV Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo	172
Lampiran XV Surat Pengantar Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan merupakan salah satu faktor sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia untuk menumbuhkembangkan potensi yang ada. Hal ini tertuang dengan tegas dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dimana tugas negara yang diwakili pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Instrumen dan langkah konkrit mencerdaskan kehidupan bangsa diwujudkan melalui proses pendidikan. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif dan mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut sekolah merupakan salah satu jalur penyelenggaraan operasional pendidikan.

Dari tujuan pendidikan nasional di atas, penyelenggaraan pendidikan menjadi kebutuhan masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraannya. Hal ini terkandung dalam amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen IV pasal 31 antara lain; (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

Turunan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 di atas diperkuat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 34

menyatakan, bahwa (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Amanat di atas memberikan konsekuensi pada pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasi dana bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai konsekuensi wajib belajar yang menjadi komitmen pemerintah. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan pembiayaan pendidikan dasar merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam standar minimum. Agar setiap warga Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan minimal pada level pendidikan dasar sebagai persiapannya menjalani kehidupannya yang terbebas dari buta aksara, maupun persiapan melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Upaya strategis ini tentu perlu melibatkan semua komponen masyarakat, baik yang berada di dalam sekolah maupun dilingkungan sekolah.

Program wajib belajar pada level pendidikan dasar tentu harus dibarengi dengan peningkatan pembiayaan pendidikan secara nasional. Disamping perlu disertai implementasi yang lebih strategis demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) memberikan kerangka hukum dan visi mengenai standar dan kualitas pendidikan, yang memerlukan langkah-langkah strategis dan konkrit untuk mewujudkannya.

Komitmen pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan wajib belajar pada level pendidikan dasar merupakan pondasi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 pasal 7 ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional, (3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan

dan Belanja daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dalam kebijakan pelaksanaan wajib belajar yang lebih tinggi, dari kemampuan pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah diberikan diskresi untuk menyelenggarakan program wajib belajar pada jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pasal 7 ayat (4) berbunyi Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan (5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal implementasi wajib belajar mengambil langkah akseleratif. Hal ini didorong dengan komitmen yang kuat termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025 dengan visi **Gorontalo Maju dan Mandiri**. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal; (2) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal; dan (3) Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Amanah. Turunannya diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2017, dimana program prioritas pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2017, antara lain 1) program Semua Bisa Sekolah (SBS), 2) pemberdayaan Potensi Pemuda Gorontalo berbasis entrepreneur, 3) penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT), 4) pemberian beasiswa Gorontalo SIAP dan Gorontalo Unggul, 5) pemberian tunjangan kinerja bagi guru di daerah terpencil, 6) penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun, 7) Penuntasan Buta Aksara, dan 8) peningkatan mutu dan relevansi.

Penuntasan wajib belajar 9 Tahun dan rintisan Wajib Belajar 12 tahun yang direncanakan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 9a Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Secara nasional kebijakan rintisan Wajar 12 tahun sudah mulai dilakukan sejak tahun 2012 dengan program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira). Sedangkan secara nasional

program pendidikan gratis baru di mulai tahun 2013 dengan penganggaran Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS). Kebijakan R-Bos menjadi lokomotif Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mulkirom selaku penanggungjawab Program Indonesia Pintar di Kemendikbud (Berita Antara, 23 Juni 2015) menjelaskan menyatakan bahwa program wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang secara nasional sudah diterapkan sejak tahun 2013, dimana pola pendanaannya baru sebatas untuk siswa. Mulai tahun 2016 anggaran untuk menuntaskan Wajar 12 tahun mengakomodir seluruh biaya operasional SMA/SMK dan MA.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah cepat (akseleratif) melalui Program Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira) menyediakan bantuan operasional bagi sekolah menengah, terdiri dari SMA/LB/SMK/MA sejak tahun 2012. Pemberian biaya operasional SMA/SMK/MA tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012-2017 Bab IV - 2 Kebijakan Prodira ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Landasan filosofis pemberian anggaran Prodira itu, karena urusan pendidikan sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu tugas pokok dan fungsi dalam layanan pendidikan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan layanan dan urusan pendidikan menengah dengan berbagai kendala yang dihadapi diantaranya; adanya keterbatasan akses pendidikan dasar di daerah terpencil, rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Jenjang SMP, SM dan PT, masih tingginya angka putus sekolah, kinerja dan kualifikasi Guru, belum efektifnya pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan oleh pemerintah Kab/Kota se Provinsi Gorontalo, belum maksimalnya program beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah, Minimnya prestasi siswa dalam olahraga dan kesenian, belum semua memiliki fasilitas olahraga yang memadai.

Berbagai kendala di atas dan merespon wajib belajar 12 Tahun Pemerintah Gorontalo melaksanakan PRODIRA yang diawali dengan kebijakan program Pendidikan Gratis” dalam bentuk program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang menjadi tema pembangunan pemerintah provinsi Gorontalo sejak tahun 2012 sampai 2017. Kebijakan ini didasari berapa pertimbangan antara lain bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah. Sebagai provinsi yang baru berkembang, Gorontalo sangat membutuhkan fokus dan sasaran pembangunan yang

dapat mempengaruhi sektor lain secara signifikan dan akseleratif. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia yang telah menjadi salah satu motor penggerak, perlu dipertajam melalui layanan pendidikan gratis bagi masyarakat sampai pada jenjang pendidikan menengah.

Political will pemerintah provinsi Gorontalo membuat program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang tercantum dalam pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diilhami dari pemikiran bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (lihat pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pemikiran lainnya yang menjadi landasan hadirnya program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo adalah keinginan pemerintah daerah membuat kebijakan yang pro rakyat, mengurangi beban rakyat dalam pembiayaan pendidikan. Karena selama ini teridentifikasi salah satu sumber masalah rendahnya mutu pendidikan ternyata disebabkan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dengan kebijakan menghilangkan berbagai hambatan biaya (*cost barrier*) bagi orang tua peserta didik, dalam rangka meningkatkan jumlah peserta didik sampai jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK dan MA) yang berasal dari keluarga miskin, sehingga kewajiban belajar 12 tahun dapat diselesaikan lebih awal daripada program Pemerintah Pusat. Hambatan orang tua siswa yang kurang mampu terdiri atas tiga jenis pembiayaan pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orang tua peserta didik, yaitu biaya operasi satuan pendidikan, biaya pribadi dan biaya investasi. Kebijakan PRODIRA memperkecil hambatan biaya bagi keluarga miskin, maka diharapkan seluruh anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan yang sudah ditarget minimal menyelesaikan pendidikan menengah 12 tahun. Dengan demikian untuk melaksanakan amanat konstitusi, Pemerintah Provinsi Gorontalo secara bertahap membebaskan seluruh beban biaya operasional satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang SMA, SMK dan MA

Ironinya lagi dukungan pembiayaan pendidikan dari masyarakat, orang tua siswa juga semakin menurun seiring dengan gencarnya politisasi program pendidikan untuk rakyat yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo. Masyarakat menilai biaya pendidikan semuanya sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Padahal harapan pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa beban pembiayaan pendidikan bukan tugas Negara dan pemerintah daerah semata, melainkan menjadi

tanggungjawab bersama dengan masyarakat untuk itu diperluka Akselarasi program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) merupakan kebijakan pendidikan wajib belajar oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sampai jenjang Sekolah Menengah dalam konteks masih dalam pembiayaan standar, terdapat juga beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik.

Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi Gorontalo lebih akselaratif menyukseskan pembiayaan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK dan MA dengan mengakomodir beban biaya yang ada di masyarakat dan orang tua diberikan insentif pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masuk dalam mata anggaran program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang digulirkan oleh Gubernur Gorontalo Drs. Rusli Habibie, M.Ap dan Wakil Gubernur Dr. Idris Rahim, MM (Gorontalo Post, Senin 20/Februari/2012).

Tujuan utama dari Prodira adalah membantu orang tua/wali murid agar tidak lagi terbebani dengan pungutan-pungutan sekolah yang bersifat operasional dan personalia. Arfan Arsyad (Gorontalo Post, Senin 13 Desember 2012) menjelaskan bahwa PRODIRA merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 yang dananya dianggarkan melalui anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Untuk mendukung implementasi PRODIRA telah disusun buku panduan dengan maksud agar program berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, implementasi di lapangan bisa saja berbeda dengan apayang sudah dirumuskan. Misalnya di Pemerintah Kota Gorontalo, pernah tidak berkenaan menerima dana tersebut, karena perbedaan dalam menterjemahkan maksud PRODIRA. Pemerintah Kota memandang bahwa program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) itu bukan merupakan pendidikan gratis. Sehingga pemerintah kota menggunakan istilah lain yang setara dengan PRODIRA yakni pendidikan bersubsidi. Pemerintah Daerah memberikan subsidi (bantuan biaya kepada sekolah bagi orang tua siswa yang tidak mampu), sekaligus orang tua yang mampu bisa juga berpartisipasi untuk mengurangi biaya yang menjadi beban orang tua yang tidak mampu, sehingga masih memungkinkan terjadi subsidi silang. Sehingga dapat membedakan masyarakat yang ekonomi tinggi dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan kebijakan pendidikan gratis yang diakomodir dalam anggaran PRODIRA untuk pemerintah Kota Gorontalo belum

bisa dilaksanakan. Sejak terjadi pergantian kepemimpinan pemerintah Kota Gorontalo ke Bapak Marten Taha, kebijakan PRODIRA langsung dilaksanakan.

Uraian kondisi dan fenomena di atas bahwa kebijakan pendidikan di Provinsi Gorontalo ini menjadi menarik untuk diteliti, karena anggaran yang disediakan cukup besar. Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan APBD untuk sektor pendidikan sebesar yakni Rp. 135.953.437.500 (Gorontalo Post, Senin 20 Februari 2012). Ditambah lagi pembiayaan program pendidikan untuk rakyat (Prodira) tahun 2013 dialokasikan APBD sebesar Rp 51 Milyar dan tahun 2014 sebanyak Rp. 46 Milyar. Pertanyaan yang sering muncul dibenak masyarakat awam, apakah intervensi pembiayaan ini mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat usia sekolah yang secara simultan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan pendidikan suatu daerah

Dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dijelaskan bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) dari tahun ke tahun, termasuk di dalamnya Provinsi Gorontalo dimana usia sekolah yang menerima dana Prodira berkisar 16-18 tahun APS tahun 2012 sebesar 57,82% mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 69,12% (BPS Gorontalo, 2016;28).

Peningkatan APS di lembaga pendidikan ini menjadi fenomena yang ikut mendorong bagi peneliti melakukan kajian lebih lanjut tentang efektivitas kebijakan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) pada tingkat SMA, SMK dan MA di Provinsi Gorontalo. Dalam konteks lainnya peneliti tertarik juga mengkaitkan peningkatan APS, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun ke tahun tentu tidak hanya didukung dengan kebijakan PRODIRA dari pemerintah Provinsi, tentunya ada sumber pembiayaan lainnya yang turut serta memberikan kontribusi yakni dari masyarakat Gorontalo yang terkenal dengan budaya huyula (gotong royong) yang dijunjung tinggi. Untuk itu peneliti mencoba menelusuri efektivitas kebijakan PRODIRA berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat Gorontalo dalam pembiayaan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keselarasan kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA, SMK, dan MA di Provinsi Gorontalo ?

2. Bagaimana target capaian kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo ?
3. Bagaimana pengelolaan kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/ SMK/MA di Provinsi Gorontalo ?
4. Bagaimana kepengawasan kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo
5. Bagaimana model pengembangan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo?

C. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan memiliki nilai-nilai urgensi (keutamaan), antara lain :*pertama* mendapatkan informasi yang valid tentang efektivitas kebijakan PRODIRA, dan tingkat partisipasi masyarakat dan orang tua konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan. *Kedua* membuat pengembangan model peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan sebagai bentuk tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa, *ketiga* memperkaya khasana sumber belajar yang dilakukan dalam kelas berbasis riset terutama pada mata kuliah manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. *Keempat*, mahasiswa dilatih berkomunikasi, berhubungan dengan pihak sekolah bagaimana mendapatkan data, mengumpulkannya dan memanfaatkan untuk analisis penelitian (*best practice*).

D. Temuan (Hasil Yang di Targetkan)

Hasil yang diharapkan dari temuan penelitian yang diharapkan adalah tersedianya informasi yang objektif mengenai keefektifan implementasi kebijakan PRODIRA pada tingkat SMA, SMK dan MA di Provinsi Gorontalo serta beberapa informasi tentang partisipasi masyarakat dan orang tua siswa konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan Termasuk Pengembangan model peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)

1. Memahami Konsepsi Kebijakan

Memahami secara komprehensif makna efektivitas kebijakan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA), dipandang penting untuk memahami terlebih dahulu tentang konsepsi kebijakan itu sendiri. Karena banyak ragam pemahaman tentang kebijakan yang dilahirkan oleh berbagai pakar. Suharno (2009:11) mencermati istilah kebijakan, penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan *grand design*. Sehingga menimbulkan berbagai konsepsi yang berbeda, namun memiliki orientasi dan tujuan yang sama

Untuk itu, perlu dirunutkan penggunaan istilah kebijakan dan program karena berkaitan dengan istilah yang ada dalam penelitian ini. Kebijakan dan program merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang disengaja dengan variasi intensitas yang berbeda-beda, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada organisasi itu. Kebijakan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan. Sedangkan program membutuhkan dorongan, maupun implementasi kebijakan.

Secara sederhana bisa dipahami konsepsi kebijakan (*policy*) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya) atau sering kali juga disebutkan banyak pihak sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Friedrick dalam (Winarno, 2002:16) memperkuat definisi kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi masalah dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran ataupun maksud tertentu. Hal senada disampaikan Anderson dalam Nurcholis, H. (2009: 263) bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Tidak jauh dari konsepsi kebijakan diatas, Amara Raksasataya dalam Suwitri S. (2008:6), juga mendefenisikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu, kebijakan memuat tiga elemen yaitu: 1) tujuan tertentu yang ingin dicapai, 2) serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan, 3) usulan tindakan dapat dari perseorangan atau kelompok dari dalam maupun luar organisasi, dan 4) penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Inputnya bisa bersumber dari manusia maupun bukan manusia. Begitu juga Nurcholis(2009:263)mencermati kebijakan lazimnya digunakan dalam kaitan dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan-peraturan.

Dari berbagai pengertian yang diuraikan pakar di atas, dapatlah ditarik benang merah kebijakan itu merupakan segala tindakan atau kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu dengan berbagai prosedur, strategi, dan diperkuat dengan aturan-aturan untuk memecahkan berbagai masalah guna diimplementasikan dalam bentuk program. Oleh karena itu, kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahapan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi (Soehartono, 2007:36). Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk diketahui makna efektivitas kebijakan itu sendiri. Karena efektivitas menjadi unsur pokok menentukan tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan di dalam setiap organisasi berupa kegiatan ataupun program sudah tercapai atau belum.

Disamping itu, Budi Winarno (2007:15)mencermati kebijakan (*policy term*) bisa digunakan dalam lingkup yang luas seperti pada kebijakan luar negeri maupun dalam negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Indonesia, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti kebijakan pemerintah tentang debirokritisasi dan deregulasi, termasuk kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo.

2. Kebijakan PRODIRA oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

Untuk mengetahui efektivitas kebijakan PRODIRA, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran umum (profil) dari kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan pemerintahan Ruslie Habibe dan Idris Rahim yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017.

Kebijakan PRODIRA di Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program penyelenggaraan layanan pendidikan gratis yang diamanatkan secara tegas dalam Undang-undang Tahun 1945 Amandemen III Pasal 31 ayat 2 yang mengatakan, setiap warga Negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Negara membiayainya. Turunannya, diterbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 34 menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan Gender, upaya untuk melaksanakan amanat tersebut.

Jusdin Puluhulawa (2013:3) menyatakan kebijakan program pendidikan gratis yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sering disebut Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS), adalah satu upaya pemerintah pusat dalam mengimplementasikan konstitusi tentang hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Program pendidikan gratis yang dilaksanakan secara nasional belum sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bahkan ke perguruan tinggi sekalipun. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil inisiatif kebijakan dalam bidang pendidikan sebagai program unggulan pemerintahan Rusli Habibie dan Idris Rahim dengan melaksanakan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam perjalanan istilah pendidikan gratis itu diganti dengan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA)

Kebijakan PRODIRA dilandasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasal 13 menyatakan bahwa telah

mendesentralisir beberapa urusan wajib ke daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota, antara lain urusan tentang pendidikan. Kebijakan desentralisasi urusan ini telah memberikan keleluasaan wewenang bagi pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah turut bertanggung jawab pada perkembangan pendidikan di daerahnya. Olehnya itu muncul kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, berdasarkan peraturan daerah (PERDA) masing-masing. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah melaksanakan Pendidikan Gratis melampaui dari kebijakan nasional tentang wajib belajar 9 Tahun. Dimana beberapa daerah memiliki inisiatif untuk melaksanakan pendidikan gratis sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Salah satu pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pendidikan lebih progresif adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dilandasi juga dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat (PRODIRA), dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa Layanan Pendidikan Gratis adalah layanan pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen melaksanakan program pendidikan gratis bagi masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang SMA atau sederajat. Kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan gratis, merupakan salah satu program unggulan Gubernur Gorontalo. Program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo telah diimplementasikan sejak bulan Januari 2012 diharapkan dapat memberikan pelayanan pendidikan secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA atau sederajat.

Bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program layanan pendidikan gratis sampai jenjang SMA atau sederajat dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK dan MA dalam Rangka Program Pendidikan Gratis Provinsi Gorontalo. Selanjutnya dirubah menjadi Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 yang menjadikan pendidikan untuk rakyat dan kesehatan gratis menjadi program unggulan.

Konsepsi PRODIRA sudah dijelaskan secara utuh dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 menyatakan bahwa Program Pendidikan untuk Rakyat yang selanjutnya disingkat PRODIRA adalah penyelenggaraan program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, serta memberikan biaya peningkatan mutu pada jenjang pendidikan dasar dan insentif bagi pendidik PAUD.

Jadi pada prinsipnya PRODIRA merupakan program yang terintegrasi dengan program layanan pendidikan gratis dalam bentuk pemberian bantuan operasional pada satuan pendidikan untuk peningkatan pelayanan di bidang pendidikan (Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo, 2012;4). Hal ini sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, yaitu Gorontalo Cerdas dan Berkarakter 2019 dengan misi; 1) percepatan penyelenggaraan pendidikan Gorontalo yang merata bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan, 2) mewujudkan insan pendidikan yang professional dan berkarakter, 3) mewujudkan tata kelola pendidikan dan pembinaan kepemudaan, keolahragaan serta kebudayaan daerah yang transparan, partisipatif dan responsif gender, 4) menciptakan harmonisasi kebijakan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang proporsional dan berkelanjutan dengan pemerintah daerah Kabupaten-Kota se-Provinsi Gorontalo (DIKBUDPORA, 2014; 1-2)

Dengan demikian layanan pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang berkualitas memerlukan pengelolaan dan sumber daya manusia yang sangat besar, oleh karena itu harus dirumuskan strategi yang tepat sejalan dengan berbagai kendala sumber daya manusia dan pembiayaan yang akan dihadapi. Sehingga dalam upaya mewujudkannya dapat ditempuh dengan cara yang efektif dan efisien.

Fungsi dilaksanakannya kebijakan PRODIRA oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dapat dicermati dalam buku Juknis PRODIRA, antara lain a) sebagai upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang gratis, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat, b) sebagai penunjang program pendidikan nasional diantaranya pendidikan menengah universal

yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan (DIKBUDPORA, 2014;2).

Tujuan diselenggarakannya Kebijakan PRODIRA yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor : 188.4/Dikbudpora/172.a/Dikmen/I/2014 dijelaskan bahwa tujuan kebijakan Prodira adalah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (2014;2). Kegiatan PRODIRA berlokasi di 5 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi Gorontalo. Secara umum tujuan Program Pendidikan untuk Rakyat adalah: a) meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, b) meningkatkan layanan pada semua jenjang pendidikan untuk terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan, c) membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta terhadap biaya operasional satuan pendidikan (DIKBUDPORA, 2014;2).

Adapun ruang lingkup kebijakan PRODIRA, terdiri dari program kurikulum, program ketenagaan, program pemeliharaan dan pengadaan sarana/prasarana, program manajemen sekolah. Sasarana PRODIRA itu harus didasari pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Sekolah/Madrasah, Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Adapun komposisi ruang lingkup pendanaan, terdiri dari a) prioritas untuk kegiatan penyelenggaraan kurikulum dengan memperhatikan persentase sebagai berikut; 1) program kurikulum \geq 20 % (minimal 20%), program ketenagaan \leq 35% (maksimal 35%), program pemeliharaan dan pengadaan sarana/prasarana \leq 30% (Maksimal 30%), program manajemen sekolah =15% (maksimal 15%). Untuk lebih detailnya silahkan dilihat komposisi sasaran Prodira dalam lampiran penelitian ini, b) biaya pengganti transport guru non PNS dan tenaga kependidikan dari tempat tinggal ke sekolah/madrasah, c) biaya transport pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang diberi tugas tertentu harus mengikuti standar biaya umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Sasaran kebijakan PRODIRA adalah menyentuh layanan semua satuan pendidikan mulai pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta mendapatkan program pendidikan gratis yang merupakan bagian dari program kerja pemerintah provinsi Gorontalo. Adapun sasaran kegiatan dalam pelaksanaan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yakni: a) memberikan biaya/bantuan operasional sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA, b) memberikan biaya/bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar, c) menyediakan biaya administrasi kegiatan Kabupaten/Kota dan Administrasi kegiatan di Provinsi Gorontalo, d) penyediaan sarana RKB SMA/SMK, e) peningkatan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan (GUDACIL), f) insentif guru kontrak, g) insentif pendidik PAUD, h) BOS untuk SD/SDLB/MI, i) BOS untuk SMP/SMLB/MTs, j) BOP untuk PAUD.

Sedangkan anggaran PRODIRA di provinsi Gorontalo sejak tahun 2012 sampai sekarang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo yang dititipkan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Gorontalo. Adapun anggaran PRODIRA terdistribusi untuk; 1) biaya operasional SMA/SMK/MA, 2) biaya peningkatan mutu guru, 3) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dan 4) insentif PAUD (DIKBUDPORA, 2014; 15).

Komponen biaya operasional non personalia untuk jenjang SMA/SMK pada Program Pendidikan Gratis (PRODIRA) yang dibiayai oleh Provinsi Gorontalo, terdiri 1) alat tulis kantor (ATK), 2) biaya pengayaan/tambahan jam mengajar, 3) biaya ekstrakurikuler, 4) biaya pemeliharaan gedung, 5) Biaya Pengadaan Bahan/Alat Praktek, 6) biaya Pemeliharaan Peralatan Laboratorium/IT, 7) Biaya PLN, PDAM dan telepon, 8) biaya koordinasi 9) biaya rapat, 10) biaya Prakerin (Khusus SMK)

Komponen dana PRODIRA diatas merupakan subsidi kepada SMA/SMK/MA berdasarkan jumlah siswa, guna membebaskan semua siswa dari pungutan/iuran yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dan dapat meningkatkan layanan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya jenjang SMA/SMALB/MA. Bantuan operasional sekolah khususnya pada jenjang SMA/SMALB/MA berdasarkan jumlah siswa pada setiap sekolah dengan persyaratan sekolah dapat menerima siswa dari keluarga miskin yang ingin bersekolah. Alokasi dana setiap sekolah/madrasah ditetapkan berdasarkan data siswa setiap tahun

pelajaran yang sedang berjalan, jika kurang siswanya 50 orang, maka alokasi anggaran menjadi 50 orang pertahun (patokan minimum). Alokasi dana Prodira ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikbudpora dengan pertimbangan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan relevansi pendidikan sehingga terjadi pemerataan dalam pendidikan. Disamping itu, ditingkat SMA/SMK/MA penyediaan sarana ruang kelas baru (RKB) bersumber dari dana Prodira merupakan wadah untuk menampung siswa miskin agar mereka mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah khususnya di jenjang pendidikan menengah. Persyaratan penyediaan sarana RKB di SMA/SMA-LB/SMK dan MA yang mesti dipenuhi dalam pencairan anggaran Prodira, antara lain a) sekolah mempunyai lahan/lokasi yang akan dibangun, b) mempunyai siswa miskin mampu minimal 25 orang, c) pihak sekolah dan komite membuat surat pernyataan persetujuan pembangunan ruang kelas baru, d) pengadaan meubelair ruang kelas baru merupakan tanggungjawab pemerintah kota/kabupaten, e) besaran subsidi ditentukan dinas Pendidikan, f) pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, g) pihak sekolah akan menerima RKB dalam bentuk hibah barang.

Penggunaan dana PRODIRA untuk peningkatan kesejahteraan guru SMA/SMA-LB/SMK/MA yang berada di daerah kabupaten terpencil dengan status non PNS sebagai tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan tugas profesionalnnya. Kriteria guru yang menerima tunjangan Guru Daerah Terpencil (GUDACIL) pada tingkat SMA/SMK/LB/SMK/MA, terdiri : a) mengabdikan di sekolah yang sama minimal 3 tahun berturut, b) memiliki SK penetapan sebagai Guru Tetap Non PNS, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Yayasan, c) memiliki SK Pembagian Tugas Mengajar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, d) kualifikasi pendidikan guru minimal S1/D.IV, e) bagi lulusan SMA/ sederajat yang sementara mengikuti perkuliahan, dapat dipertimbangkan dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa dan surat pernyataan sedang mengikuti kuliah dari pejabat perguruan tinggi, f) jam mengajar minimal 18 jam, g) besaran subsidi guru/bulan ditentukan Dikbudpora, h) subsidi untuk memenuhi kebutuhan guru dalam rangka melaksanakan tugas profesionalismenya.

Penggunaan anggaran PRODIRA di Provinsi Gorontalo dipergunakan untuk subsidi Guru yang berstatus non PNS yang bertugas di SMA/SMALB/SMK/dan MA negeri atau swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Adapun kriteria guru SMA/SMA-LB/SMK/MA yang berhak menerima insentif guru kontrak dari dana Prodira, adalah sebagai berikut : a) Guru Non PNS (GNP) yang berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap (GTT) sekolah negeri dan/atau swasta, b) memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), d) Guru yang belum tersertifikasi, e) besaran subsidi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Dikbudpora, f) subsidi untuk guru kontrak ini dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan guru melaksanakan tugas profesionalisnya.

Sedangkan ketentuan yang harus diikuti sekolah penerima dana PRODIRA, menerima PRODIRA dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut; 1) sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik, 2) sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas, masih memungut pungutan/sumbangan/iuran pada periode sebelumnya yang dikarenakan terdapat selisih antara RKAS (kebutuhan riil sekolah) dan dana BOS, sekolah masih harus mengikuti ketentuan : a) apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana PRODIRA (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain, b) bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana PRODIRA digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana PRODIRA yang diterima sekolah

3. Efektivitas Kebijakan PRODIRA

Isu efektivitas menjadi jargon yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Tidak terkecuali pelaksanaan berbagai program di lembaga pendidikan, sehingga mengandung banyak pemahaman dan perspektif dari berbagai pihak yang terkait dengan efektivitas kebijakan itu sendiri. Fenomena yang sering disaksikan adalah sedikit orang yang dapat memaksimalkan keefektifan itu sesuai dengan konsepnya. Sehingga makna efektivitas itu, sering kali masih menjadi sebuah

pemaknaan yang bersifat *eklusive* (sulit diraih). Impaknya, efektivitas kebijakan yang dilaksanakan organisasi atau lembaga pendidikan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Keanekaragaman pemahaman tentang efektivitas kebijakan itu, juga terlihat dari berbagai konsepsi yang dihadirkan pada pakar memahami efektivitas itu sendiri.

Misalnya, Miftahul Ulum (2014:4) mendefinisikan efektivitas sebagai taraf tercapainya hasil. Pemahaman ini sering juga dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun keduanya memiliki perbedaan. Dimana efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil dengan membandingkan antara input dan outputnya. Senada dengan ini, Bernard dalam Nurudin (2007:25) menjelaskan makna efektif dan efisien itu, *when a specific desired and is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequence of the action are more important than the attainmen of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequence are unimportant or trival the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective it specific objective. It is efficient if is satisfiec the motivates of the aim whatever it is effective or not.*

Di sisi lainnya efektivitas juga menjadi konsep kausal secara esensial, di mana hubungan maksud hingga tujuan (*means to end relationship*), dan hubungan sebab-akibat (*cause-effect relationship*). Keberhasilan organisasi, institusi melaksanakan kebijakan berupa program atau pekerjaan tertentu sangat tergantung dari efektivitas yang dicapai. Oleh sebab itu, efektivitas sangat penting bagi unit kerja apapun baik lembaga pemerintahan maupun swasta agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholdernya, dalam urusan layanan publik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran (Halim, A., 2002:14-15).

Oleh karena itu, kebijakan tentunya memiliki unsur kesengajaan, berupa perencanaan, pengelolaan dan evaluasi terhadap program atau kegiatan itu sendiri untuk diteruskan atau dihentikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman Carl Friedrich dalam (Wahab, 2004:3) bahwa kebijakan efektif itu bila suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Mahmudi (2005) dalam Adhayani dan Kusumah. (2015:38) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara *output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Masih terkait dengan pencapaian tujuan, Robbins (1990:49) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu tingkat dimana suatu organisasi atau institusi dapat merealisasikan tujuannya.

Disamping itu, Siagian (2001) dalam Edi S (2012:86) mendefinisikan efektivitas bukan saja dilihat dari konteks pencapaian tujuan juga bisa dilihat dari sisi pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan target sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas itu menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya target, sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati target sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Penilaian efektivitas juga seringkali menggunakan konsep optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dicapai. Seperti dijelaskan. Steers R. M. (1985:47) bahwa ukuran untuk efektivitas organisasi dapat dicermati dari sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Efektifitas manajemen organisasi dalam melaksanakan kebijakan setiap tahapannya berproses pada tataran *das sollen* dan *dassein* dengan indikator-indikator *input, proses, out put*, dan *out come* dari kegiatan maupun program-program yang dilaksanakan.

Berkenaan dengan kebijakan yang diambil pemerintah tentu berkaitan dengan pembiayaan dan kepuasan warganya. Oleh sebab itu, barometer terhadap efektifitas kebijakan bisa dilihat dari kualitas pengelolaan program yang dibiayai, ketepatan komponen pembiayaan, sosialisasi, transparansi yang berujung pada kepuasan dari kebijakan yang diimplementasikan memungkinkan penggalan dana yang lebih maksimal dari sumber lainnya yakni masyarakat. Sekaligus efektivitas pembiayaan itu terkait juga dengan bentuk monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari kebijakan itu. Seperti yang dijelaskan Blaug, Mark (1992:121) bahwa *cost*

effectiveness is the appropriate evaluation technique in such all cases. Hal tersebut sesuai yang diutarakan oleh McMillan & Schumacher (2001:550), yang mengatakan bahwa Cost effectiveness analysis (CE) compares program outcomes (effectiveness) with the costs of alternative program when the objectives of different programs are similar and when common measure of effectiveness are used. Effectiveness could be measured by standardized achievement test, psychological test, or physical test. Outcome measures need not be converted to monetary values, and the analysis is replicable”.

Efektivitas pembiayaan seperti kebijakan PRODIRA oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo tentu memberikan efek semangat kerja dan motivasi, ketercapaian tujuan yang dibiayai, ketepatan waktu, serta ketepatan pendayagunaan biaya, dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diberikan biaya. Mardiasmo (2002:105) mencermati efektivitas sebagai bentuk penggunaan anggaran yang harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik, kata anggaran disini merupakan sumber dari dana masyarakat (*public money*) yang dimana diharapkan menghasilkan *output* yang maksimal atau berdaya guna. Hal ini sejalan dengan pendapat Ariel Sharon Sumenge (2013:75) dimana efektivitas kebijakan itu berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) realisasi dana itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas disini tentu lebih berkaitan dengan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam program. Sehingga segenap rencana kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan itu mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan (*spending wisely*) itu.

Hoogerwerf (1983) menjelaskan beberapa faktor penentu efektivitas kebijakan terwujud, antara lain akurasi rumusan dan keselarasan kebijakan, kelengkapan informasi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yang dikembangkan, kualitas intelektual dan moralitas para pelaksana kebijakan. Dunn (2003), Hewlett, Michael & M. Ramesh. (2003) menjelaskan kegagalan suatu kebijakan seringkali dipengaruhi kondisi lingkungan itu sendiri. Disamping itu, Edwards III, George C. (1980) mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan, rumusan kebijakan, komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya,

perilaku, pelaksana kebijakan dan struktur organisasi pelaksana kebijakan (Irawan, B., 2016:122).

Di luar keempat faktor diatas, lingkungan kebijakan juga menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan itu terwujud. Dimana lingkungan kebijakan yang dimaksud disini adalah persepsi masyarakat tentang suatu kebijakan, kepedulian dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dirumuskan, sistem sosial yang berlaku dimasyarakat, tatanan politik, sistem ekonomi yang kondusif atau tidak kondusif, system hukum dan peradilan yang berlaku di masyarakat. Irawan, B. (2016;123) menjelaskan bahwa lingkungan kebijakan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan dan perilaku pelaksana kebijakan. Misalnya dukungan masyarakat atau para politisi di parlemen terhadap kebijakan Program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) lemah dapat menimbulkan hambatan dalam implementasinya. Ketidakpedulian masyarakat atau stakeholder sekolah juga dapat menimbulkan tidak adanya kontrol masyarakat yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan sistem hukum dan peradilan yang lemah dapat mendorong para pelaksana kebijakan tersebut tidak melaksanakan kebijakan dengan baik.

Analisis keefektifan biaya seperti pada kebijakan PRODIRA, memungkinkan pembuat kebijakan dapat secara sistematis mempertimbangkan dampak dari biaya terhadap alternatif-alternatif yang berbeda dalam hal membuat keputusan yang layak, untuk memperkirakan beberapa kemungkinan hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya (*cost*) pendidikan yang dikeluarkan diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

4. Aspek Penentu Efektivitas Kebijakan PRODIRA

Untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang konsepsi efektivitas kebijakan PRODIRA, bisa terlebih dahulu menelusuri pemahaman Gibson (1996) dalam Siswadi. Edi (2012:90), mencermati beberapa aspek yang menentukan efektivitas kebijakan, yakni: 1) layanan, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk menghasilkan sejumlah jasa dan mutu output sesuai dengan permintaanlingkungan, 2) efisiensi, adalah merupakan perbandingan (*ratio*) antara output dengan input, 3) kepuasan, merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 4) keunggulan, adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan

benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal, 5) pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Pengukuran efektivitas kebijakan sangat penting, karena merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi, atau rencana lainnya yang dipikirkan secara bersama-sama atau oleh pimpinan (Wahab, B., 2004:3).

Disamping itu, Steers, R M (1995:3-5) mengemukakan tiga aspek yang sangat menentukan efektivitas kegiatan, yaitu: 1) optimisasi tujuan, 2) perspektif sistem pengelolaan yang berlaku, dan 3) tekanan terhadap perilaku orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Untuk mencermati aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dapat dilihat dari keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk diukur, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga menentukan ukuran efektivitas suatu kebijakan biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula. Ukuran efektivitas bermacam-macam. Etzioni, Amitai (1985:227) mengatakan efektivitas diukur dengan a) adaptasi; b) integrasi; c) motivasi; dan d) produk. Lebih lanjut, Gibson (1996:28) mengatakan Efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain a) produktivitas; b) kualitas; c) efisiensi; d) fleksibilitas; e) kepuasan; f) keunggulan; dan g) pengembangan.. Ukuran atau kriteria efektivitas lebih lanjut menurut Gibson (1996:34) berupa indikator efektivitas yang dapat diukur 1) produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan, 2). kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 3) efisiensi yaitu merupakan perbandingan (*ratio*) antara output dengan input, 4) fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi, 5) kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 6) keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, 7) pengembangan yaitu merupakan mengukur

kemampuan organisasi. untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.(Gibson 1989).

Dari segenap uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan PRODIRA adalah keselarasan kebijakan dengan berbagai regulasi yang ada, tujuan pendidikan nasional, guna mencapai target yang diformulasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan komitmen untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dalam Implementasinya memperhatikan komponen biaya yang dibutuhkan, sosialisasi, dan transparansi. Agar tidak terjadi penyimpangan maka dilakukan kepengawasan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan tindak lanjut untuk keberlanjutan program.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan Konteks Budaya Huyula

Dalam kebijakan PRODIRA peran serta masyarakat diperlukan, karena pendidikan bukan hanya kewajiban pemerintah, sekolah dan guru semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat (Direktorat TK/SD, Puskur, UNESCO & UNICEF, 2003). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah Subakir & Sapari, (2001) dalam Mulyasa (2005:28). Selama ini, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dipandang masih rendah. Hasil riset Balitbang Diknas RI (dalam Nurcholis, H.; 2009) menunjukkan penilaian guru tentang tingkat partisipasi orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah (rata-rata 57,1%) dan sangat rendah dalam hal menentukan kebijakan program sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan iklim sekolah. Partisipasi orang tua siswa yang sangat tinggi ialah dalam mengawasi mutu sekolah, pertemuan komite sekolah, pembayaran dan bentuk iuran bulan dan sumbangan uang gedung untuk siswa baru.

Pada satu sisi, peran serta masyarakat adalah penting, namun di sisi lain besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tersebut, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat (Mulyasa, 2005). Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu merumuskan secara jelas mengenai bentuk partisipasi dan tugas operasional organisasi yang mewadahi peranserta masyarakat tersebut. Sebagai acuan yang dirujuk untuk peningkatan peranserta masyarakat adalah pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan,

kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selanjutnya, dalam pasal 56 dinyatakan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan bisa dalam bentuk dukungan finansial maupun nonfinansial. Partisipasi masyarakat disini memberikan pesan bahwa warga sekolah dan masyarakat mesti terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengevaluasian pendidikan disekolah (Depdiknas 2007:46).

Talizuduhu (1990:103) menjelaskan partisipasi secara formal adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional memberikan sumbangan pada proses pengambilan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatannya melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan tugasnya. Hal senada diungkapkan Suherlan dalam Ningrum, H. A. (2014:29) mengartikulasikan partisipasi dalam pembiayaan pendidikan bisa dipraktekkan dalam bentuk penyediaan dana atau penghematan dana sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat pada layanan pendidikan.

Uraian partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di atas bisa dilihat dari amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki konsekuensi ada hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Kewajibannya adalah memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan berpartisipasi dalam pendidikan masyarakat bisa meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan menurut Rosyada, Dede (2007:21) adalah keikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah, atau dewan pendidikan daerah. Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan

perencanaan pendidikan, tidak saja dalam perencanaan makro tetapi sampai pada kebijakan restrukturisasi kurikulum....”.

Komite sekolah menjadi badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah (Depdiknas; 2002a).

Senada dengan pandangan diatas, Keith Davis dalam Sastropetro (1988:16) menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah dapat berupa a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, b) sumbangan spontan berupa uang dan barang, c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan biasanya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (pihak ketiga), d) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat, e) sumbangan dalam bentuk kerja, f) aksi masa g) mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa mandiri dan h) membangun proyek komunitas yang bersifat otonom.

Bentuk lainnya partisipasi masyarakat dalam layanan pendidikan bisa berupa a) sumbangan tenaga fisik, b) sumbangan finansial, c) sumbangan material, d) sumbangan moral (nasihat, petuah, amanat), e) sumbangan keputusan. Sedangkan jenis partisipasi yang bisa dilakukan meliputi: a) pikiran, b) tenaga, c) tenaga dan pikiran, d) keahlian, e) barang, f) uang (Keith Davis dalam Sastropetro, 1988:16).

Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam layanan pendidikan meliputi: kewajiban menjaga kelestarian sekolah, membantu sekolah dalam mengembangkan informasi berkaitan dengan peningkatan yang dimiliki dan diunggulkan sekolah, masyarakat harus terlibat, peduli dan merasa memiliki segala fasilitas yang ada dilingkungan sekolah, sehingga bisa terjaga dan dapat digunakan untuk kebutuhan pembelajaran, dan juga masyarakat harus membantu pihak sekolah dalam bentuk moral dan finansial atau pembiayaan pendidikan.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat diatas, di Gorontalo terkenal dengan sebutan *Huyula* (gotong royong). Masyarakat Gorontalo memiliki tradisi gotong royong dikenal dengan istilah Budaya *Huyula*, ciri khas kepribadian masyarakat yang telah dibina secara turun temurun. Yayasan 23 Januari 1942 (1982;9) menjelaskan Budaya *Huyula* bagi masyarakat Gorontalo merupakan suatu sistem tolong menolong antara anggota-anggota masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial melalui ikatan keluarga tetangga dan kerabat.

Mochtar (Mohammad, 2005:320) menjelaskan budaya *Huyula* adalah pernyataan kebersamaan dalam membangun, atau kebiasaan memusyawarahkan setiap kebijakan yang akan diambil yang berhubungan dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan. Budaya *Huyula* berbentuk musyawarah dalam hal merumuskan kebijakan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan demi kepentingan bersama. Hal yang sama diungkapkan oleh Daulima (2004:82) menjelaskan *Huyula* berarti adalah melakukan suatu pekerjaan bersama oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat dalam arti saling membantu dan timbal balik.

Budaya *Huyula* bagi masyarakat Gorontalo penerapannya dapat dilihat dalam berbagai perspektif, diantara dikenal dengan *Ambu*, merupakan kegiatan saling menolong untuk kepentingan bersama, *Hileya* merupakan kegiatan menolong secara spontan, 3) *Ti'ayo* merupakan kegiatan tolong menolong untuk mengerjakan pekerjaan seseorang. Budaya *Huyula* terkait dengan kesediaan mengerjakan pekerjaan seseorang. Dalam penelitian ini Budaya *Huyula* yang ditelaah adalah budaya gotong royong dalam pembiayaan pendidikan sehingga konsepsi pemahaman dimasyarakat lebih terfokus bahwa pendidikan itu menjadi tanggungjawab bersama bukan pemerintah pusat maupun pemerintah semata. Harus dibarengi dengan solidaritas, kesadaran, semangat tolong menolong, menghormati dan menyayangi yang menjadi karakteristik masyarakat Gorontalo. Memang diakui sejak isu pendidikan gratis terjadi penurunan luar biasa partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Sejatinya pendidikan gratis tidak membuat masyarakat yang memiliki ekonomi lebih ikut serta menikmati. Perlu ada dorongan kesadaran (*awardness*) memberi dan menyumbangkan biaya untuk proses pendidikan jauh lebih hebat dari pada mereka menerima, padahal di tempat lainnya masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kebijakan PRODIRA tersebut.

Dari uraian diatas dapat diambil suatu sintesis bahwa partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan konteks Budaya *Huyula* adalah bentuk turut sertanya seseorang atau kumpulan masyarakat baik secara mental maupun emosional dilandasi kesadaran kultural (budaya) gotong royong untuk memberikan sumbangan baik moral maupun materil dalam bentuk dana atau penghematan dana mulai dari proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan pengawasan program, termasuk aktif mendukung atau mengkritisi kebijakan PRODIRA, bahagia dapat membantu warga sekolah yang kurang mampu baik dari kalangan keluarga atau masyarakat miskin lainnya.

C. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo) oleh Jusdin Puluhulawa dan Moh. Rusdiyanto Puluhulawa (2013) menyimpulkan bahwa;
 - a) Kebijakan pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sangat ideal dan mulia, tapi pada tataran implementasi kebijakan masih ditemukan adanya hambatan dan gesekan dari sisi koordinasi pemerintahan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan para bupati/walikota, baik secara teknis maupun secara administratif oleh karena belum adanya regulasi yang tegas memberi tugas-tugas pemerintahan ke pemerintah kab/kota,
 - b) Anggaran operasional implementasi kebijakan pendidikan gratis bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Provinsi Gorontalo dalam bentuk hibah, yang diserahkan langsung melalui rekening sekolah, tanpa adanya potongan. Anggaran ini sifatnya bantuan operasional ke sekolah menengah atas atau yang sederajat. Penetapan anggaran setiap satuan pendidikan bagi SMA atau sederajat Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/pertahun/siswa. Sedangkan satuan pendidikan kejuruan atau SMK Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/pertahun/siswa. Nominal ini belum menjangkau kebutuhan operasional sekolah, sehingga masih ada praktek pungutan dari pihak sekolah, sekalipun ada isyarat melarangnya,
 - c) Desain kebijakan pendidikan gratis adalah program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah atas, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), Sekolah bertaraf internasional (SBI) dan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Desain kebijakan ini lebih dikenal dengan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA). Namun pada tataran implementasi kebijakan pendidikan gratis ini kenyataannya masih terjadi inkonsistensi dalam penyelenggaraannya ke kelompok sasaran. Hal ini menunjukkan adanya implementasi kebijakan pendidikan gratis untuk bantuan operasional ke satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat,
 - d) Organisasi pelaksana atau tim manajemen yang dibentuk oleh Gubernur Gorontalo menunjukkan lebih membangun hubungan koordinatif secara tidak langsung dengan tim manajemen satuan pendidikan dalam hal ini sekolah, melalui organisasi pelaksana di Kabupaten/Kota. Oleh karena secara khirarhi atasan langsung sekolah/madrasah adalah pemerintah Kab/Kota/ dan Kementerian agama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan Peraturan

daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat, pada pasal 13 dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 186/07/VI/2013 tentang pembentukan tim manajemen, bahwa struktur organisasinya hanya sampai tingkat Kab/Kota, e) Pengalokasian biaya operasional satuan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dilihat secara total besarnya cukup membebani APBD. Dilihat distribusinya persiswa/semester/sekolah nominalnya masih kecil. Besarnya biaya dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, namun kenyataannya pada tataran implementasi berbeda. Biaya operasional yang diterima oleh sekolah/madrasah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan; 1) penyelenggaraan kurikulum, 2) ketenagaan, 3) pemenuhan sarana pendidikan dan rehabilitasi, 4) kegiatan kesiswaan, diprioritaskan melaksanakan program yang berkaitan dengan pendidikan karakter, dan 5) manajemen sekolah/madrasah, f) Berhasil tidaknya implementasi sebuah kebijakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dapat diukur pada beberapa variabel: 1) Variabel sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: a) kesukaran teknis khususnya persyaratan penyaluran dan pencairan dana, b) keragaman perilaku kelompok sasaran dalam hal ini pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah Kab/Kota, c) persentase kelompok sasaran dalam hal ini siswa dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan d) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan dalam target capaian program layanan pendidikan gratis. 2) Variabel kemampuan kebijakan mensistematisasi proses implementasi mencakup: a) kejelasan dan konsistensi tujuan program kebijakan pendidikan gratis, b) ketepatan alokasi sumber daya khususnya penentuan nominal dan waktu pencairan, c) keterpaduan hirarkhi di antara lembaga pelaksana/organisasi baik ditingkat provinsi maupun ditingkat Kab/Kota sampai ke sekolah, d) aturan keputusan/rumusan kebijakan dari badan pelaksana/tim manajemen, e) rekrutmen pejabat pelaksana/tim manajemen, dan f) akses formal pihak luar/aduan masyarakat. 3) Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: a) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan teknologi, b) dukungan publik/masyarakat, c) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok masyarakat, d) dukungan dari pejabat atasan/aktor, dan e) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana/aktorkebijakan, g) Guna tertib pengelolaan

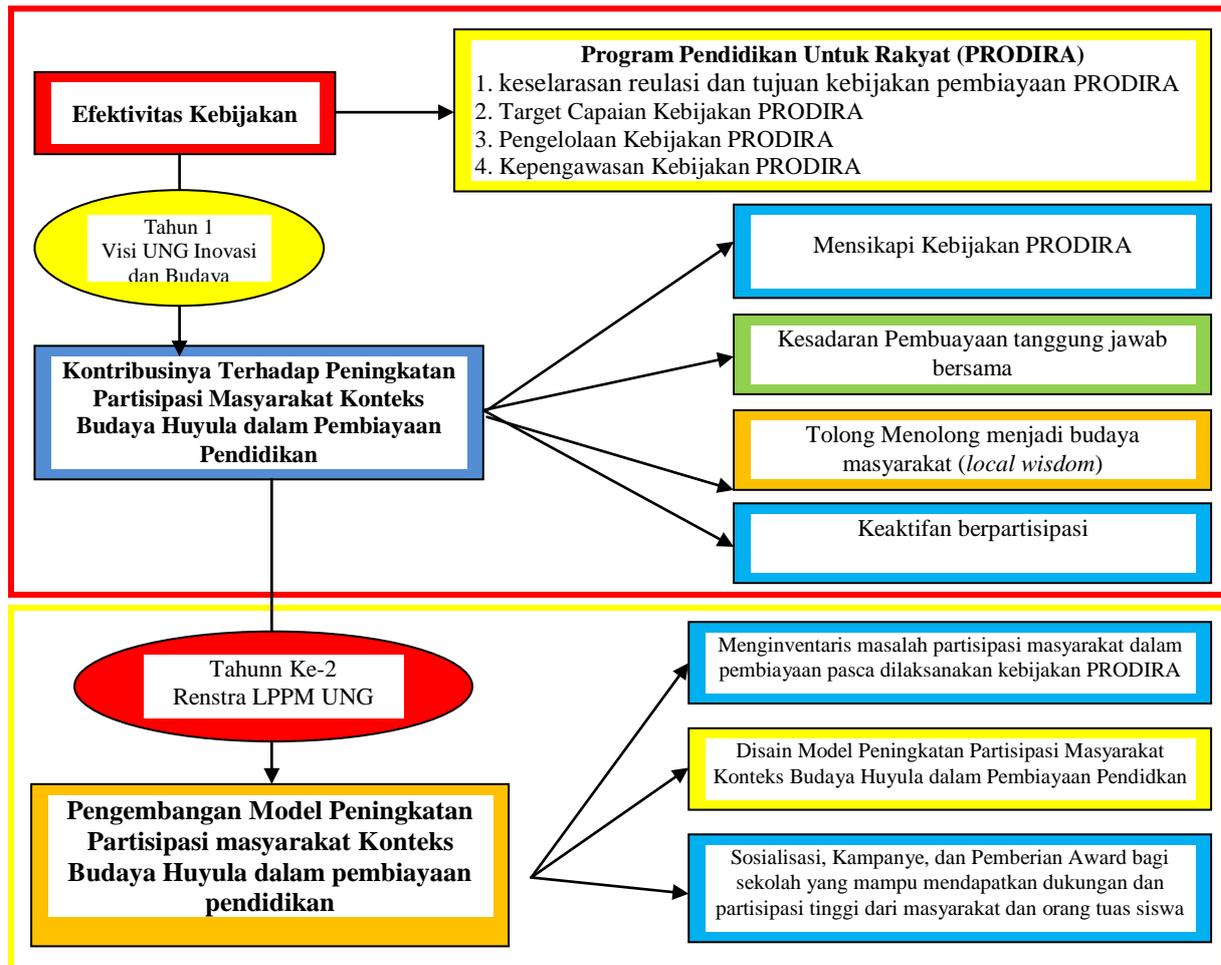
keuangan, satuan pendidikan wajib melakukan pencatatan baik dana yang masuk dan keluar guna kepentingan pertanggungjawaban dan evaluasi.

2. Evaluasi Implementasi Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) di SMA Se-Provinsi Gorontalo (Disertasi Warni T. Sumar, 2017) menyimpulkan bahwa a) program PRODIRA di SMA se-Provinsi Gorontalo diperoleh skor keseluruhan komponen konteks 62% berada pada kategori mendukung, b) komponen input 76% berada pada kategori mendukung pelaksanaan PRODIRA di SMA Se Provinsi Gorontalo, c) komponen proses sangat mendukung 82% pelaksanaan PRODIRA di SMA, d) komponen product 76% mendukung pelaksanaan PRODIRA.

D. Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian

Peta jalan (*roadmap*) penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai bentuk akselerasi pemerataan pendidikan bagi peningkatan mutu sumber daya manusia. Kebijakan PRODIRA menjadi program unggulan dan dialokasikan anggaran yang lebih besar, tentu sebuah *political will* yang perlu didukung semua pihak sebagai stimulus munculnya responsibilitas masyarakat untuk bertanggungjawab menyelenggarakan dan membiayai pendidikan. Kenapa dikatakan stimulus, karena sifatnya pemantik untuk mendapatkan lompatan yang jauh ke depan dalam upaya mendistribusikan layanan pendidikan yang berkeadilan untuk semua masyarakat tanpa kecuali. Seklaigus memberikan kesempatan bagi semua anak usia sekolah, minimal menempuh pendidikan sampai jenjang SMA, SMK dan MA. Dengan tingkat pendidikan minimal setara dengan SMA atau sederajat, menjadi solusimencegah kemiskinan. Karena mereka sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta akses ekonomis ke berbagai sektor dunia kerja dan industri.

Stimulus yang ingin didapatkan pemerintah daerah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo melalui PRODIRA agar masyarakat dan orangtua siswa memiliki kekuatan ekonomi yang mapan dan mampu membiayai sendiri kehidupannyamelalui tingkat pendidikan anak-anaknya yang sudah memadai. Adanya kesadaran kolektif ini, jiwa tolong menolong pun akan tumbuh dan terpatri dalam hati serta pikiran masyarakat. Oleh karena itu, dirancang *roadmap* penelitian ini yang berlangsung selama 2 tahun anggaran, seperti dijelaskan pada gambar 2.1 dibawah ini sebagai berikut :



Gambar 2.1. Roadmap Penelitian

E. Keterkaitan Roadmap Penelitian yang diusulkan dengan Renstra LPPM UNG

Dari roadmap penelitian diatas, bisa dipahami bahwa penelitian ini fokus pada kajian kebijakan publik dan relasinya dengan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan budaya huyula sebagai keunikan dan kekayaan masyarakat (*local wisdom*) Provinsi Gorontalo. Hal ini sejalan dengan rencana strategis (Renstra) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki tema unggulan penelitian dosen yakni “Strategi pemberdayaan potensi daerah untuk penguatan budaya dan kesejahteraan masyarakat”. Turunan dari tema unggulan ini memiliki 7 (tujuh) bidang diantaranya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pengembangan kebijakan dan pengembangan budaya sebagai entitas dari masyarakat Gorontalo yang terkenal dengan nilai-nilai budaya, seperti huyula masih dipegang teguh secara kokoh (RIP LPPM 2015-2035, 2015;78-79).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini dapat mengidentifikasi perumusan dan efektivitas kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekaligus dapat merekonstruksi dinamika disertai dengan pembuatan model pengembangan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan sebagai identitas masyarakat Gorontalo dapat dipahami secara utuh (holistik).

Sedangkan tujuan penelitian ini secara khusus dapat mengetahui:

1. Keselarasan kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA, SMK, dan MA di Provinsi Gorontalo.
2. Target capaian kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo.
3. Pengelolaan kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo.
4. Kepengawasan kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo
5. Dinamika partisipasi masyarakat konteks budaya huyula mendukung pembiayaan pendidikan di tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo?
6. Hambatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo?
7. Model pengembangan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo?

B. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan pembiayaan pendidikan, antara kaub::

1. Kemenristek Dikti dapat menaikkan reputasi perguruan tinggi dengan output hasil penelitian ini bisa dipublis di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

2. Kemendikbud RI dapat menjadikan hasil riset ini sebagai rujukan bahwa pembiayaan pendidikan itu bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakat apalagi orang tua tentu penting membangkitkan kesadaran kolekti agar mereka yang memiliki ekonomi kuat tidak dibebaskan, melainkan memberikan bantuan agar sekolah bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya untuk akselerasi maupun peningkatan mutu pendidikan.
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan dalam peningkatan pengelolaan program rintisan maupun wajib belajar 12 tahun pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA khususnya di Propinsi Gorontalo.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menjadikan referensi hasil penelitian ini bagi kesuksesan dalam melaksanakan PRODIRA ke depannya
5. Sekolah melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana PRODIRA di tingkat sekolah
6. Komite Sekolah dapat menggalang peranserta masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.
7. Masyarakat, sebagai informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Prodira pada tingkat SMA di Propinsi Gorontalo.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dengan pertimbangan, a) pelaksanaan kebijakan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang di pimpin Rusli Habibie dan Idris Rahim periode 2012-2017, b) kebijakan PRODIRA ini dilaksanakan di seluruh SMA/SMK/MA/LB se Provinsi Gorontalo, c) dukungan pengambil keputusan kebijakan PRODIRA yang kooperatif dalam memberikan informasi dan data tentang PRODIRA di Provinsi Gorontalo. Atas dasar itu, penelitian ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menjangkau beberapa target lokasi pengelola Program PRODIRA di dinas pendidikan dan Pengelola PRODIRA di SMA/SMK/MA/LB, maupun stakeholder pendidikan yang terkait, seperti tokoh masyarakat yang menjadi pengurus Komite Sekolah, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh politik, serta tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengetahui kebijakan PRODIRA sebagai program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun lokasi penelitian selama 2 tahun sejak 2017 dan 2018 akan menjangkau beberapa instansi yang terkait dengan efektivitas kebijakan PRODIRA di wilayah Provinsi Gorontalo.

B. Pendekatan Penelitian Desain Kombinasi (*Concurrent Embedded*)

Penelitian ini ingin mengetahui efektivitas kebijakan, yang dipandang sebagai bagian dari penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, komponen pembiayaan yang diatur dalam kebijakan, ketepatan penggunaan dana, transparansi, akuntabilitas pengelolaan menunjang implementasi kebijakan PRODIRA, kontribusi kebijakan dan perbaikan kebijakan PRODIRA untuk program yang berkelanjutan, dan menemukan model pengembangan partisipasi masyarakat dalam konteks budaya huyula mendukung pembiayaan pendidikan di SMA/SMK/MA.

Mengingat cakupan penelitian efektivitas kebijakan PRODIRA dan kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan ini sangat luas. Maka direncanakan pelaksanaan penelitiannya dalam waktu yang panjang yakni 2 (dua) tahun, untuk dapat menghasilkan rekomendasi

yang berbasis pada data empiris, dan didukung dengan berbagai dokumen yang syah serta menyakinkan dari berbagai stakeholder sebagai sasaran dari perubahan yang diharapkan dari kebijakan PRODIRA itu, maka penelitian ini menggunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai.

Secara keseluruhan proses penelitian ini menggunakan metode gabungan yakni dari metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). John W. Creswell (2009;2) menyatakan *mixed methods is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative forms of research*. Metode kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan atau bersamaan

Sugiyono (2016;397) menjelaskan penggunaan dua metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sering disebut sebagai *mixed methods*. (metode kombinasi). Tujuannya digunakan metode penelitian secara bersama-sama, atau berurutan dalam suatu penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif (Sugiyono, 2016;19). Disamping itu Tashakkori dan Creswell dalam Donna M Mertens (2010) dalam Sugiyono (2016;19) menjelaskan pemahamannya tentang metode kombinasi (*mixed methods*) sebagai *research in which the investigator collects and analyzes data, integrates the finding, and draws inference using both qualitative and quantitative methods to answers research question in a single study* (Penelitian kombinasi itu merupakan penelitian yang prosesnya mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode kombinasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada suatu proyek/ kegiatan penelitian.

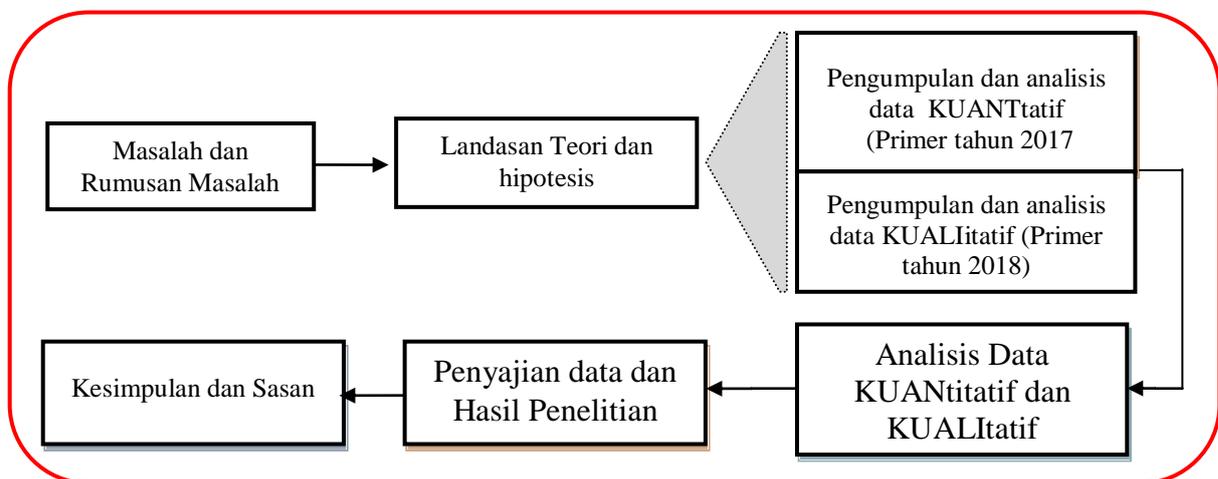
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kombinasi (*mixed*) dengan disain atau model *concurrent embedded* (campuran tidak berimbang). Menurut Sugiyono (2016;537) metode kombinasi model atau disain *concurrent embedded* (campuran tidak berimbang) adalah metode penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan cara mencampur. Dimana kedua metode kuantitatif dan kualitatif digunakan tidak seimbang. Penelitian ini, tahun pertama (2017) menggunakan metode penelitian 70% menggunakan metode kuantitatif dan 30% metode kualitatif. Penelitian ini tahun 2017 menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey sebagai metode primer nanti didukung dengan data-data yang diambil melalui metode kualitatif. Sebaliknya tahun kedua (2017) metode kualitatif 70% dan metode kuantitatif 30%.

Berdasarkan uraian di atas, pada tahap pertama ini, tahun 2017 metode penelitian model *concurrent embedded*, menggunakan metode kuantitatif sebagai metode primer. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah metode survey. Menurut, Irianto (2010:123) menyatakan bahwa metode survey adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. Metode survey yang digunakan ini untuk membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang ditentukan. Disamping itu, Kerlinger (1973:42) menyatakan bahwa *survey research studies large and small population (or universes) by selecting and studying samples chosen from the population of sociological and psychological variabel*. Adapun metode survey yang dilaksanakan menggunakan metode korelasional yang dirancang untuk mengetahui kontribusi variabel yang berbeda dalam suatu populasi yang diteliti. Secara operasional metode survey dengan teknik korelasional juga digunakan untuk mengungkap secara kuantitatif, besaran signifikansi kontribusi variabel efektivitas kebijakan PRODIRA (X) terhadap variabel partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan (Y). Diamping itu, untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif, maka dilakukan pengamatan tentang kebijakan PRODIRA menggunakan metode kualitatif guna mengetahui efektivitas kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Gorontalo, pemahaman stakeholder tentang kebijakan PRODIRA, komponen input kebijakan PRODIRA, komponen proses kebijakan PRODIRA, komponen hasil kebijakan PRODIRA, dan komponen dampak perubahan dari kebijakan PRODIRA akan memperkuat temuan dari metode kuantitatif yang dilakukan.

Sedangkan tahun kedua (2018) difokuskan untuk mengetahui komponen dampak atau kontribusi kebijakan PRODIRA terhadap partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan yang sudah berurat dan berakar dalam tradisi masyarakat Gorontalo. Sekaligus mengembangkan model peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan (pendanaan) pendidikan di Gorontalo sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk mengetahui model partisipasi masyarakat masyarakat Gorontalo dalam pembiayaan pendidikan konteks budaya Huyula, peneliti merancang menggunakan metode kualitatif lebih dominan sebanyak 70%. Penggunaan metode kualitatif ini, sejalan dengan pemikiran Sugiyono (2004:10) yang menyatakan bahwa untuk menggambarkan keadaan yang

sebenarnya (*naturalistik*) di lapangan tentang efektivitas kebijakan PRODIRA penggunaan metode kualitatif yang lebih dominan. Dengan metode kualitatif ini, peneliti dapat mendalami dinamika partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan sekaligus merumuskan model partisipasi yang cocok dengan harapan regulasi, institusi dan tradisi.

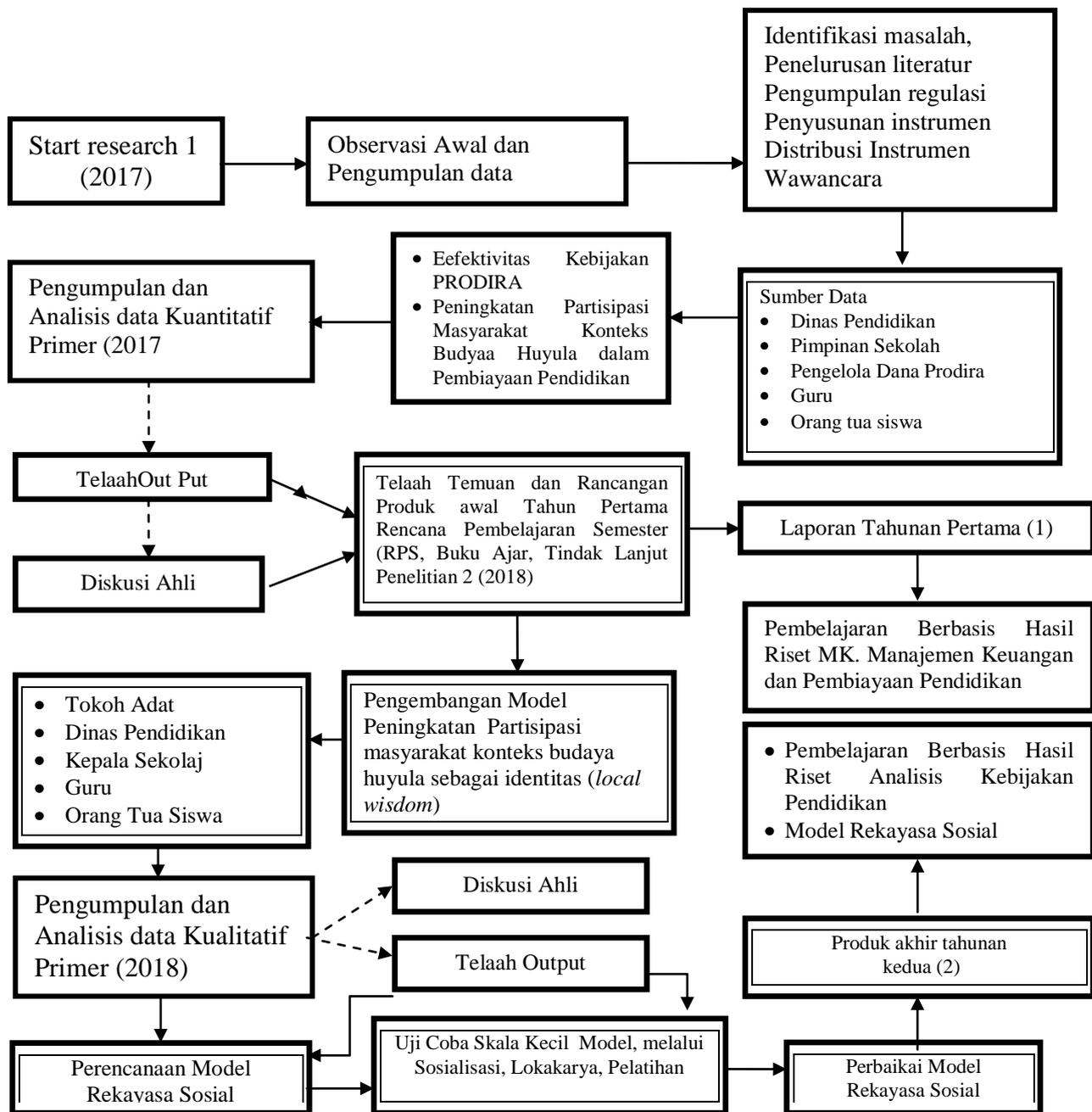
Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan desain kombinasi (*Concurrent Embedded*) menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif tidak berimbang, tahun pertama (2017) dimana metode kuantitatif sebagai primer dan tahun kedua (2018) metode kualitatif sebagai metode primer. Karena penelitian ini direncanakan untuk 2 tahun (*multi year*), yakni tahun 2017 dan 2018, maka disain penelitian yang akan dilaksanakan selama 2 tahun dapat dijelaskan dalam gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 4.1. Metode penelitian Kombinasi *Concurrent Embedded*, yang diadaptasi dari pemikiran Sugiyono, (2016;538)

C. Langkah-langkah Penelitian Kombinasi Tidak Seimbang (*Concurrent Embedded*) dan Pengembangan Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Model Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

Adapun langkah-langkah penelitian kombinasi tidak seimbang ini ini akan berlangsung selama 2 (dua) tahun dengan berbagai kegiatan dan objek yang diteliti serta output kegiatan secara keseluruhan, dapat dilihat dari bagan alir penelitian di bawah ini.



Gambar 4.2 Langkah-langkah Penelitian Kombinasi Tak Seimbang (*Concurrent Embedded*) dan Pengembangan Model Rekayasa Sosial Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

D. Populasi, Sampel dan Informan Penelitian

1. Populasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tahun 2017 ini dalam bentuk kombinasi (*mixed*) metode kuantitatif dan kualitatif tidak seimbang yang sering disebut banyak pihak

sebagai disain *concurrent embedded*. Tahun 2017 ini peneliti menempatkan metode kuantitatif sebagai metode primernya. Populasi sasaran untuk penelitian ini adalah terdistribusi sesuai dengan metode kuantitatif yang ditetapkan sebagai metode primer menggunakan teknik survey untuk mengetahui efektivitas kebijakan PRODIRA (X) dan kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan (Y).

Untuk mendapatkan informasi yang memadai dari variabel yang diteliti, maka populasi penelitian ini adalah bagi para pihak yang berada di sekolah yang memiliki informasi memadai (cukup) tentang efektivitas kebijakan PRODIRA dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, yakni seluruh kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, dan komite sekolah yang ada di SMA/SMALB/SMK/SMKLB se Provinsi Gorontalo, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Populasi Penelitian terdiri dari SMA/SMK/MA se Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	SMA	SMK	MA	Jumlah
1.	Kota Gorontalo	7	9	7	23
2.	Kab. Bone Bolango	9	7	5	21
3.	Kabupaten Gorontalo	17	13	14	44
4.	Kabupaten Boalemo	7	9	5	21
5.	Kab. Pohuwato	6	11	6	23
6.	Kab. Gorontalo Utara	13	6	4	23
Provinsi Gorontalo		59	55	41	155

Sumber : Diolah Peneliti dari Data Primer Dikbudpora dan Kemenag Gorontalo, 2017

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah perwakilan dari jumlah populasi sebagai subjek penelitian. Arikunto (2006;107) menjelaskan bahwa bila subjek lebih dari 100 orang atau unit kerja, maka sampel penelitian bisa diambil antara 10-15% atau 20-25 atau lebih. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik "*probability sampling*". Sugiyono (2016;300) menjelaskan teknik *probability sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih. Perhitungan sampel secara proporsional berdasarkan keterwakilan masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo, maka ditetapkan sampel penelitian ini sebanyak 20% dari populasi SMA.SMK/dan MA yang ada. Sehingga didapatkan angka dari sekolah yang ada tahun 2017 sebanyak

155 unit diambil 20%, maka yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 32 unit sekolah. Dari 32 sekolah yang terpilih menjadi sampel penelitian diambil secara proporsional dari masing-masing Kabupaten dan Kota, juga atas kemudahan dan kesediaan pihak sekolah memberikan informasi sesuai dengan persoalan yang diteliti. Adapun sekolah-sekolah yang terpilih menjadi sampel penelitian tiap kabupaten, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.2. di bawah ini :

Tabel 4.2. Jumlah Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Sampel 20%	Sekolah yang bersedia menjadi sampel
1.	Kota Gorontalo	23	5	6
2.	Kab. Bone Bolango	21	4	5
3.	Kabupaten Gorontalo	44	9	9
4.	Kabupaten Boalemo	21	4	4
5	Kab. Pohuwato	23	5	4
6.	Kab. Gorontalo Utara	23	5	4
	Provinsi Gorontalo	155	32	32

Sumber : Analisis peneliti dari data Dikbudpora Provinsi Gorontalo 2017 (lihat portal resmi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Se- Provinsi Gorontalo, <http://siap-ppdb.com>).

Penentuan SMA, SMK dan MA yang mewakili masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) dimana semua sekolah memiliki kedudukan dan peran yang sama mewakili. Pemilihan sekolah tersebut mempertimbangkan kemudahan dan kesediaan bekerjasama memberikan data yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian ini dilakukan. Adapun sekolah yang terpilih sebagai sampel penelitian, bisa dijelaskan dalam tabel 4.3 dibawah ini

Tabel 4.3. Daftar SMA/SMK/MA yang terpilih menjadi Sampel Penelitian

No	Tim Pengelola PRODIRA di Dinas Pendidikan	Alamat
Kota Gorontalo 5 Sekolah		
1	SMA Negeri 1 Kota Gorontalo	Jl. M.T. Haryono 8, Kec Kota Selatan,
2	SMA Negeri 3 Kota Gorontalo	Jl. Raden Saleh, Limba U2, Kec. Kota Selatan,
3	SMA Negeri 4 Kota Gorontalo	Jl. Brigjend Piola Isa Kel. Wongkaditi Timur Kota Utara
4	SMK Negeri 1 Kota Gorontalo	Jl. Ternate Kelurahan Tapa Kec Sipatana
5	SMK Negeri 3 Kota Gorontalo	Jl. Bali No. 2 Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah
6	SMK Tirtayasa Gorontalo	Jl. Bali III No.2 Kel Pulubala Kota Gorontalo
Kabupaten Bone Bolango 5 Sekolah		
7	SMA Negeri 1 Bonepantai	Jl. Siswa No. 25 Desa Bilungala
8	SMA Negeri 1 Tapa	Jl. Tapa-Kabila No. 57 A Desa Bulotalangi Barat Kec Bulango Timur
9	SMK Negeri 1 Bone Pantai	Jl. Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Tihu Kec. Bone

		Pantai
10	SMK Negeri Model Gorontalo	Jl. Muchli Rahim Panggulo Barat Kec. Botupingge
11	SMK Negeri 1 Bulango Utara	Jl. Dulamayo No. 3 Desa Boidu Kec. Bulango Utara
Kabupaten Gorontalo 9 Sekolah		
12	SMA Negeri 1 Limboto	Jl. Ahmad A. Wahab No. 13 Limboto
13	SMA Negeri 1 Telaga	Jl. Jend. Sudirman, Mongolato, Kec. Telaga
14	SMA Negeri 1 Telaga Biru	Jl. Ahmad Hiola Desa Ulapato A Kec. Telaga Biru
15	SMA Negeri 1 Tibawa	Jl. L. Palalu Desa Isimu Utara Kec. Tibawa
16	SMA Negeri 1 Tilango	Jalan Rajawadi Palapa
17	SMA Negeri 1 Dungaliyo	Jl. Raja Bobihoe Kec. Dungaliyo
18	SMK Negeri 1 Batudaa	Jl. Idhar Hinta Desa Dunggala Kec. Batudaa
19	SMK Almamater Telaga	Jl. Almamater Telaga Desa Bulila Kec. Telaga
20	SMKS Gotong Royong Gorontalo Telaga	Jl. Rambutan Kel. Tomulabutao Kec. Dungi
Kabupaten Boalemo 4 Sekolah		
21	SMA Negeri 1 Paguyaman,	Jl. Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman
22	SMA Negeri 1 Tilamuta,	Jl. Siswa No. 2 Desa Limbato Kec. Tilamuta
23	SMK Negeri 1 Boalemo	Jl.
24	MA Negeri 1 Paguyaman	Jl. Trans Sulawesi Desa Molombulahaer Kec. Paguyaman
Kabupaten Pohnuato 4 Sekolah :		
25	SMA Negeri 1 Marisa,	Jl. Trans Sulawesi 20, Teratai, Marisa,
26	SMA Negeri 1 Buntulia	Jl. Kawah 125 Desa Sipatana Kec. Buntulia, Pohnuato
27	MAN Negeri 1 Pohnuato	Jl. Siswa No 78 Desa Soginti Kec. Pohnuato
28	SMK Negeri 1 Marisa	Jl. Trans Sulawesi Desa Teratai Kec. Marisa Pohnuato
Kabupaten Gorontalo Utara 3 Sekolah		
29	SMA Negeri 1 Gorontalo Utara	Jl. Siswa 284, Moluo, Kwandang,
30	SMA Negeri 5 Gorontalo Utara	Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang
31	SMA Negeri 6 Gorontalo Utara	Desa Tolanga Kecamatan Anggrek
32	SMA Negeri 7 Gorontalo Utara	Jl. Benteng Undango Desa Botungbungo

Sumber ; Analisis Peneliti dari berbagai sumber

Dari 32 Sekolah yang terpilih menjadi unit analisis, masing-masingnya ditetapkan sampel penelitian adalah kepala sekolah, masing-masing diwakili satu orang bendahara sekolah, guru, dan komite sekolah atau orang tua siswa yang ada di SMA/SMK/MA/LB. Jadi tiap sekolah yang terpilih didapatkan sampel sebanyak 4 orang. Total sampel penelitian ini berjumlah 32 Sekolah x 4 orang berjumlah 128 orang.

3. Informan

Melengkapi data yang diambil melalui metode kuantitatif, maka dipandang perlu didukung dengan metode kualitatif. Pada Metode kuantitatif sudah didapatkan subjek atau sampel penelitian sebanyak 32 SMA/SMK/MA. Sedangkan pada metode kualitatif menurut Nasution (1988;32) yang dapat dijadikan subjek atau sampel penelitian adalah hanya sumber yang dapat memberi informasi. Sampel itu dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sering dilakukan sampel yang dapat diwawancarai dipilih secara “*purposive*” bertalian dengan tujuan tertentu. Begitu juga Bogdan dan Biklen (1998;21) menyatakan bahwa responden terpilih

diminta untuk menunjuk orang lain, dan seterusnya. Proses seperti ini disebut “*snow-ball sampling*” yang dilakukan secara serial atau berurutan. Untuk memperoleh informasi tertentu sampling dapat dilakukan sampai taraf “*redudancy*” ketuntasan atau kejenuhan, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Informan kunci yakni Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Tim Manajemen PRODIRA Provinsi Gorontalo, Tim Manajemen PRODIRA Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, kepala dan sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara guru dan pengurus komite sekolah yang diambil secara *purposive*.

Informan pertama yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sebagai informan kunci. Berdasarkan wawancara pertama, Kadis Dikpora menunjuk Sekretaris Dikpora, Tim Manajemen PRODIRA Provinsi, Tim Manajemen PRODIRA Kabupaten dan Kota untuk diwawancarai selanjutnya. Jumlah informan tetap yang diwawancarai terus bertambah sesuai dengan anjuran informan.

Faisal (1990:73) menjelaskan bahwa dalam menetapkan informan, kriteria yang diperhatikan : a) subjek yang sudah cukup lama menyatu dengan suatu kegiatan PRODIRA yang menjadi sasaran penelitian, b) subjek yang masih terlibat secara aktif dalam Manajemen PRODIRA dalam kegiatan sasaran penelitian, c) subjek yang bersifat “lugu” dalam memberikan informasi, d) subjek yang mempunyai cukup banyak waktu untuk memberikan informasi, dan e) subjek yang sebelumnya tergolong masih “asing” bagi peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Sugiyono (2011:187) menjelaskan ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara dan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Guna memperoleh data tentang efektivitas kebijakan PRODIRA, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain dengan kuesioner.

Metode kuantitatif yang dilaksanakan, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Guna pengumpulan data statistik berupa kontribusi variabel independen (bebas) efektivitas kebijakan PRODIRA (X) terhadap variabel independen (terikat) partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan (Y).

Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda dengan menggunakan skala pengukuran, dengan 5 (lima) pilihan jawaban yang dirancang dan dikembangkan melalui analisis teoritis gunakan menentukan validitas konstruks, yaitu teori-teori yang melandasinya dan selanjutnya dibuat sintesis dari variabel diikuti penentuan indikator dari masing-masing variabel. Adapun skala penilaian yang dirancang terdiri dari 5 (lima) kategori pilihan jawaban, yaitu 1) Selalu, 2) Sering, 3) Kadang-kadang, 4) Jarang, dan 5) Tidak Pernah. Setiap pilihan jawaban diberikan bobot yang berbeda seperti dijelaskan dalam tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4. Skala Liker Jawaban Responden

No	Pilihan	Kode	Bobot
1	Selalu	SL	5
2	Sering	SR	4
3	Kadang-Kadang	KK	3
4	Jarang	JR	2
5	Tidak Pernah	TP	1

Kuesioner ini digunakan pada tahun pertama penelitian ini (2017), guna pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (angket) kepada responden yang ada di 32 unit SMA/SMK/MA. Respondennya terdiri dari kepala sekolah, guru, bendahara, dan pengurus Komite Sekolah (orang tua siswa siswa) diambil secara acak sederhana (*simple random sampling*), setelah itu dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui efektivitas kebijakan PRODIRA dari sisi pemahaman stakeholder sekolah dan kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan.

Sedangkan untuk tahun kedua (2018), peneliti menggunakan kuesioner untuk mengetahui partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Kuesioner ini di disain secara menyeluruh agar dapat diketahui efektivitas dari kebijakan PRODIRA dan kontribusinya sesuai dengan tujuan program itu dilaksanakan.

2. Observasi

Prosedur lainnya yang digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan PRODIRA yakni melalui observasi berperanserta (*participant observation*). Guba dan Lincoln (1981), menyatakan observasi berperanserta dilakukan dengan alasan; a) pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, b) teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebenarnya, c) pengamatan digunakan untuk mengecek keabsahan data, d) teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit, dan e) dalam kasus tertentu penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Dalam penelitian ini bentuk berperanserta peneliti lakukan secara pasif sesuai dengan apa yang dianjurkan Spradley (1980), yaitu pada partisipasi pasif peneliti hadir dalam situasi sosial yang diteliti, tetapi tidak berpartisipasi atau tidak berinteraksi dengan orang-orang yang sedang diteliti. Partisipasi pasif itu, dilakukan melalui observasi dan membuat catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data (Bogdan & Biklen, 1998). Catatan lapangan dibuat dengan mempedomani prinsip a) identifikasi bahasa, yaitu mengidentifikasi bentuk bahasa yang digunakan, b) verbatim, yaitu mencatat ucapan atau perkataan sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang dijadikan sumber informasi, dan c) konkrit, yaitu menggunakan bahasa yang konkrit bukan hanya memberi nama pada suatu tindakan (Spradley, 1980). Catatan lapangan ditulis dalam buku yang sudah disediakan khusus untuk keperluan tersebut. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian tetap memperhatikan etika penelitian sehingga tidak mengganggu dan merugikan pihak yang diteliti.

Kegiatan Observasi, catatan lapangan peneliti lakukan pada dua (2) tahun kegiatan penelitian guna memperkuat apa yang menjadi sintesis dari instrumen. Adapun objek-objek yang di observasi, maupun catatan lapangan yang dikumpulkan sesuai dengan kisi-kisi instrumen penelitian, yang sudah terdistribusi berdasarkan waktu pelaksanaan penelitian.

3. Wawancara

Di samping melakukan penyebaran instrumen dan observasi berperan serta, untuk mengumpulkan data penelitian ini, juga dilakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan penelitian, yaitu orang-orang yang dianggap

potensial, dalam memberikan banyak informasi mengenai efektivitas kebijakan PRODIRA di lapangan, dan kontribusinya terhadap partisipasi masyarakat konteks budaya Huyula dalam pembiayaan pendidikan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara formal maupun informal sehingga dapat diungkapkan pendapat informan mengenai efektivitas kebijakan PRODIRA di tingkat SMA/SMK/MA. Wawancara dilakukan berulang kali sampai diperoleh gambaran yang jelas dan berkesesuaian dengan sintesis instrumen, observasi dan catatan lapangan.

4. Dokumentasi

Selain melakukan observasi berperan serta dan wawancara mendalam, untuk mengumpulkan data penelitian ini juga dilakukan studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dana PRODIRA. Dokumen yang dipelajari adalah a) regulasi PRODIRA, b) petunjuk teknis PRODIRA, c) tim manajemen PRODIRA di sekolah d) laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah, e) jumlah guru dan murid, dan f) daftar sarana dan prasarana sekolah yang dibiayai dana PRODIRA, g) kebijakan komite sekolah dan lain-lainnya

5. Triangulasi

Pengumpulan data berikutnya adalah melakukan *triangulasi* berupa pengecekan tingkat keterpercayaan data dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi, metode dan teori-teori yang relevan dengan objek yang diteliti. Denzin dalam Patton (1987:327-331) menjelaskan bahwa triangulasi dapat dibedakan dalam empat macam yakni pemeriksaan data dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidikan dan teori. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan berupa pemeriksaan menggunakan sumber dan metode. Pemeriksaan menggunakan sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari seorang informan dengan informan lainnya. Contoh wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, kebenaran pernyataannya di cek dengan pendapat kepala sekolah, guru dan bendahara sekolah. Sedangkan pemeriksaan menggunakan metode, triangulasi dilakukan dengan metode pengumpulan data yang berbeda (observasi, wawancara dan dokumentasi). Misalnya, melalui wawancara wakil kepala sekolah menyatakan bahwa sasaran dana PRODIRA sudah tepat berdasarkan juknis yang ada. Untuk membuktikan pernyataan Wakil Kepala Sekolah itu dilakukan analisis dokumentasi berupa jumlah dana yang diterima dengan siswa yang menerimanya.

F. Instrumen Penelitian

1. Pengembangan Instrumen

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel bebas; efektivitas kebijakan PRODIRA (X) dan variabel Terikat; partisipasi masyarakat konteks huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y), sebagai berikut :

a. Instrumen Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)

1). Defenisi Konseptual

Efektivitas kebijakan PRODIRA merupakan keselarasan kebijakan PRODIRA dengan berbagai regulasi yang ada, tujuan pendidikan nasional, guna mencapai target yang diformulasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan komitmen untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dalam Implementasinya memperhatikan komponen biaya yang dibutuhkan, sosialisasi, dan transparansi. Agar tidak terjadi penyimpangan maka dilakukan kepengawasan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan tindak lanjut untuk keberlanjutan program

2) Defenisi Operasional

Indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan PRODIRA mencakup: a) Keselarasan kebijakan PRODIRA, b) Target Capaian, c) Pengelolaan, d) Kepengawasan yang diukur dengan menggunakan skala Likert

3). Kisi-kisi Instrumen Efektivitas Kebijakan PRODIRA

Berdasarkan defenisi konseptual dan defenisi operasional variabel efektivitas kebijakan PRODIRA, maka dapat dibuatkan kisi-kisi instrument sebagaimana dimuat dalam tabel 4.5 dibawah ini

Tabel 4.5 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Efektivitas Kebijakan PRODIRA

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item	No. Item
Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)	Keselarasn Kebijakan PRODIRA	Keselarasn kebijakan PRODIRA dengan regulasi	2	1, 2
		Tujuan kebijakan PRODIRA	5	3-7
	Target Capaian	Indeks Pembangunan Manusia	6	8-14
		Komitmen Stakeholder Pendidikan	2	15-16
		Pengelolaan	Komponen PRODIRA	2
	Sosialisasi kebijakan PRODIRA		3	19-21
	Transparansi		3	22-24
	Kepengawasan PRODIRA		Monitoring	2
		Evaluasi	5	27-31
		Keberlanjutan	2	32-33

4). Hasil Uji Coba Instrumen

a) Pengujian Validitas Butir Soal

Instrumen yang valid merupakan alat ukur yang baik untuk mendapatkan data. Valid disini bermakna instrument dapat digunakan untuk yang seharusnya diukur. Sebelum instrument digunakan secara menyeluruh, maka diperlukan pengujian validitas butir soal yang diukur menggunakan validitas internal consistency dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 20,0. Hasil Perhitungan, dibandingkan dengan tabel r Product Moment. Apabila r hitung lebih besar daripada r tabel, maka butir instrument tersebut dinyatakan valid, jika tidak valid maka akan di drop (dikeluarkan).

Uji Validitas dalam penelitian ini hanya menyangkut content validity dengan langkah sebagaimana mendapatkan pertimbangan tim pakar dan teman sejawat yang menguasai lingkup kajian penelitian dan metodologi. Hasil penelitian ini dinyatakan valid bila terdapat kesamaan antar data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan untuk menguji kesahihan butir secara empirik, maka dilakukan uji coba instrumen kepada 30 orang responden di luar sekolah yang direncanakan sebagai tempat penelitian. Pemilihan responden uji coba diambil sama seperti rencana penelitian yakni kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa (komite sekolah). Adapun sekolah yang ditetapkan sebagai tempat uji coba instrument, sebagai berikut

Tabel 4.6 Data uji Coba Instrumen Pada Kepala Sekolah, Guru, Bendahara dan Orang Tua Siswa (Komite Sekolah) di SMA/SMK dan MA Se Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Jumlah Responden
1	SMA Negeri 2 Kota Gorontalo	4
2	SMK Negeri 2 Kota Gorontalo	4
3	SMKS Gotong Royong	3
4	MA Muhammadiyah Kota Gorontalo	4
5	SMK Tridharma UNG	3
6	SMK Kesehatan Bakti Nusantara	4
7	SMA Negeri 1 Kabila	4
8	SMK Negeri 1 Suwawa	4
Jumlah		30 orang

Sumber : Analisis Peneliti, 2017

Untuk menguji validitas butir instrumen, selanjutnya diujicobakan, dan dianalisis item dengan rumus *Pearson Product Moment*. Analisis item dengan menghitung korelasi antara skor butir instrument dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,361 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas yang baik. Namun bila korelasi dibawah 0,361 maka dapat disimpulkan butir instrument tersebut tidak valid. Lebih jelas diuraikan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7. Hasil Uji Coba Instrumen Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X_1)

No. Instrumen	r tabel	r hitung	Signifikan atau tdk signifikan	Valid atau Tidak Valid
1	0,361	0,669	Signifikan	Valid
2	0,361	0,725	Signifikan	Valid
3	0,361	0,702	Signifikan	Valid
4	0,361	0,695	Signifikan	Valid
5	0,361	0,708	Signifikan	Valid
6	0,361	0,675	Signifikan	Valid
7	0,361	0,771	Signifikan	Valid
8	0,361	0,534	Signifikan	Valid
9	0,361	0,641	Signifikan	Valid
10	0,361	0,603	Signifikan	Valid
11	0,361	0,437	Signifikan	Valid
12	0,361	0,649	Signifikan	Valid
13	0,361	0,518	Signifikan	Valid
14	0,361	0,212	Tidak Signifikan	Tidak Valid
15	0,361	0,668	Signifikan	Valid
16	0,361	0,487	Signifikan	Valid
17	0,361	0,696	Signifikan	Valid
18	0,361	0,597	Signifikan	Valid
19	0,361	0,634	Signifikan	Valid
20	0,361	0,663	Signifikan	Valid
21	0,361	0,643	Signifikan	Valid
22	0,361	0,759	Signifikan	Valid
23	0,361	0,414	Signifikan	Valid
24	0,361	0,629	Signifikan	Valid
25	0,361	0,680	Signifikan	Valid
26	0,361	0,676	Signifikan	Valid
27	0,361	0,814	Signifikan	Valid
28	0,361	0,782	Signifikan	Valid
29	0,361	0,216	Tidak Signifikan	Tidak Valid
30	0,361	0,787	Signifikan	Valid
31	0,361	0,647	Signifikan	Valid
32	0,361	0,731	Signifikan	Valid
33	0,361	0,472	Signifikan	Valid
34	0,361	0,738	Signifikan	Valid
35	0,361	0,788	Signifikan	Valid

b) Pengujian Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas instrument dimakna sebagai bentuk keterterimaan dari sebuah instrument berdasarkan statistik. Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* (satu kali pengukuran) diolah dengan menggunakan SPSS versi 20,0 diperoleh nilai koefisien *reliabilitas Alpha Cronbach*. Hasil koefisien reliabilitas (Alpha) dapat dikatakan instrument yang akan digunakan

handal, artinya suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data atau mengukur obyek koefisien reliabilitas $\alpha >$ dari *alpha cirrectit alpha item correlation*.

Koefisien reliabilitas dengan perhitungan yang diperoleh selanjutnya ditafsirkan dengan kriteria yang telah ditentukan, jika α lebih kecil dari 0,80 maka dinyatakan tidak reliable, dan sebaliknya jika α sama dengan atau lebih besar dari 0,80 maka dinyatakan reliable. Hasil pengujian reliabilitas instrument penelitian $r_1 = 0,961$ berarti lebih besar dari kriteria indeks koefisien reliabilitas. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, instrument dapat dipercaya dan dapat dipakai selanjutnya.

b. Instrumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)

1) Defenisi Konseptual

Partisipasi Masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan adalah persepsi stakeholder sekolah terhadap bentuk keikutsertaan seseorang atau kumpulan masyarakat baik secara mental maupun emosional dilandasi kesadaran kultural (budaya) gotong royong untuk memberikan sumbangan baik moril maupun materil dalam bentuk dana atau penghematan dana mulai dari proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan pengawasan program, termasuk aktif mendukung atau mengkritisi kebijakan PRODIRA, bahagia dapat membantu warga sekolah yang kurang mampu baik dari kalangan keluarga atau masyarakat miskin lainnya

2) Defenisi Operasional

Indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan, mencakup : a) mensikapi kebijakan PRODIRA, b) kesadaran pembiayaan tanggungjawab bersama, c) tolong menolong jadi budaya masyarakat (*local wisdom*), dan d) keaktifan berpartisipasi yang diukur menggunakan skala Likert.

3) Kisi-kisi instrumen Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan defenisi konseptual dan defenisi operasional variabel partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan,

maka dapat dibuatkan kisi-kisi instrument sebagaimana dimuat dalam tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan.

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item	No. Item
Partisipasi Masyarakat kontek budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan	Mensikapi Kebijakan	Mendukung kebijakan	3	1-3
	PRODIRA	Mengkritisi	4	4-7
	Kesadaran	Memahami keterbatasan	4	8-11
	Pembiayaan	pemerintah membiayai pendidikan		
	Tanggung jawab	Kebahagiaan dapat membiayai pendidikan	3	12-14
	Bersama	Membantu Keluarga dan orang lain	2	15-16
	Tolong Menolong	Membantu Sekolah	2	17-18
	Jadi Budaya Masyarakat (<i>local wisdom</i>)	Menghargai semua kalangan	2	19-20
	Keaktifan	Berbagi Beban biaya	3	21-23
	Berpartisipasi			

4). Hasil Uji Coba Instrumen

a) Pengujian Validitas Butir Soal

Untuk menguji kesahihan butir secara empirik, maka dilakukan uji coba instrumen kepada 30 orang responden di luar sekolah yang direncanakan sebagai tempat penelitian. Pemilihan responden uji coba diambil sama seperti rencana penelitian yakni kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa (komite sekolah) seperti yang tertera pada tabel 3.5 sebelumnya

Untuk menguji validitas butir-butir instrumen, maka selanjutnya diujicobakan, dan dianalisis item dengan rumus *Pearson Product Moment*. Analisis item dengan menghitung korelasi antara skor butir instrument dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,361 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang cukup kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas yang baik. Namun bila korelasi dibawah 0,361 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid. Untuk lebih detailnya dapat dijelaskan dalam tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9. Hasil Uji Coba Instrumen Partisipasi Masyarakat Konteks Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)

No. Instrumen	r tabel	r hitung	Signifikan atau tdk signifikan	Valid atau Tidak Valid
1	0,361	0,654	Signifikan	Valid
2	0,361	0,483	Signifikan	Valid
3	0,361	0,402	Signifikan	Valid
4	0,361	0,537	Signifikan	Valid
5	0,361	0,515	Signifikan	Valid
6	0,361	0,397	Signifikan	Valid
7	0,361	0,462	Signifikan	Valid
8	0,361	0,766	Signifikan	Valid
9	0,361	0,825	Signifikan	Valid
10	0,361	0,601	Signifikan	Valid
11	0,361	0,629	Signifikan	Valid
12	0,361	0,522	Signifikan	Valid
13	0,361	0,806	Signifikan	Valid
14	0,361	0,927	Signifikan	Valid
15	0,361	0,908	Signifikan	Valid
16	0,361	0,760	Signifikan	Valid
17	0,361	0,682	Signifikan	Valid
18	0,361	0,724	Signifikan	Valid
19	0,361	0,599	Signifikan	Valid
20	0,361	0,450	Signifikan	Valid
21	0,361	0,299	Tidak Signifikan	Tidak Valid
22	0,361	0,741	Signifikan	Valid
23	0,361	0,699	Signifikan	Valid
24	0,361	0,773	Signifikan	Valid
25	0,361	0,632	Signifikan	Valid
26	0,361	0,770	Signifikan	Valid
27	0,361	0,786	Signifikan	Valid
28	0,361	0,748	Signifikan	Valid
29	0,361	0,621	Signifikan	Valid

b) Pengujian Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan berdasarkan statistic menggunakan rumus Alpha Cronbach (satu kali pengukuran). Pengolahan menggunakan SPSS versi 20,0 diperoleh nilai koefisien *reliabilitas Alpha Cronbach*. Hasil koefisien reliabilitas (Alpha) dapat dikatakan instrumen yang akan digunakan handal, artinya suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data atau mengukur obyek koefisien reliabilitas $\alpha >$ dari *alpha cirrectit alpha item correlation*.

Perhitungan koefisien reliabilitas yang diperoleh selanjutnya ditafsirkan dengan kriteria yang telah ditentukan, jika $\alpha < 0,80$ maka dinyatakan tidak reliabel, dan sebaliknya jika $\alpha \geq 0,80$ maka dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas instrument penelitian $r_1 = 0,957$ berarti $>$ dari kriteria indeks koefisien reliabilitas. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, instrumen dapat dipercaya dan dapat dipakai selanjutnya.

G. Analisis Data Hasil Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

1. Analisis Data Hasil Penelitian Kuantitatif tahun pertama (2017)

Adapun teknik analisis data yang dilakukan pada tahun pertama (2017) adalah analisis data hasil penelitian kuantitatif, kecendrungan datanya masih dalam bentuk data kasar yang masih memerlukan interpretasi lebih lanjut. Untuk itu diperlukan analisis data yang merupakan sebuah proses yang sangat penting karena dengan melakukan analisa, maka data yang diperoleh dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 1988:405). Analisis data dalam penelitian tahun pertama menggunakan pendekatan, terdiri dari 1) analisis statistik dan 2) analisis deskriptif.

Analisis statistik, terdiri dari: 1) seleksi data dan klasifikasi data, 2) pengolahan data dan pengorganisasian data dengan menghitung jumlah skor item instrumen dan skor jawaban dari responden. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan seleksi dengan cara memeriksa instrument secara cermat, apakah instrument terkumpul semua atau tidak. Dari 32 sekolah yang menjadi lokasi penelitian, setiap sekolah dipilih 4 orang yang akan mengisi instrumen penelitian, jadi jumlah responden terpilih sebanyak 128 orang. Namun yang mengembalikan instrumen secara utuh dan mengisi dengan sempurna sebanyak 116 orang responden. Dari segi jumlah dipandang sudah representative. Sekaligus karena keterbatasan waktu untuk menunggu responden mengisi dan mengembalikannya, maka dipandang 116 responden sudah cukup. Proses klasifikasi atau mengelompokkan data dilakukan berdasarkan cakupan pada kisi-kisi instrumen penelitian dengan menentukan bobot alternative jawaban dan kategori jawaban responden berdasarkan Skala Likert (lihat tabel 4.4 sebelumnya terus di konversikan dengan nilai untuk mengetahui indeks persepsi atau pandangan kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa atau pengurus komite sekolah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10 Bobot atau skor alternative jawaban responden

Alternatif Jawaban	Bobot atau Skor	Kategori hasil konversi
Selalu (SL)	5	Sangat Baik
Sering (SR)	4	Baik
Kadang-Kadang (KK)	3	Cukup Baik
Jarang (JR)	2	Kurang Baik
Tidak Pernah (TP)	1	Sangat Tidak Baik

Langkah kedua, pengolahan data dilakukan dengan beberapa proses;

- a) menentukan arti atau makna setiap item instrument dan membuat kesimpulan berdasarkan arti jawaban responden dengan teliti dan sistematis serta menghubungkan keseluruhan dengan menggunakan rumus *Weighted Means Scores* (WMS), sebagai dikemukakan Sudjana (2005;67) sebagai berikut :

$$\bar{x} = \frac{\sum Xi}{N}$$

Keterangan :

\bar{x} = Skor rata-rata yang dicari

X_i = Jumlah skor gabungan (hasil frekuensi dengan bobot nilai untuk setiap alternatif jawaban)

N = Jumlah responden

- b) Dilanjutkan dengan menghitung persentase masing-masing indikator menggunakan rumus persentase (%) sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% \quad \text{selanjutnya di konversikan ke formula} \quad X = \frac{\sum(F.X)}{N} \times 100\%$$

Keterangan : P = persentase

X = Rata-rata

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

$\sum(F.X)$ = Jumlah skor kategori jawaban

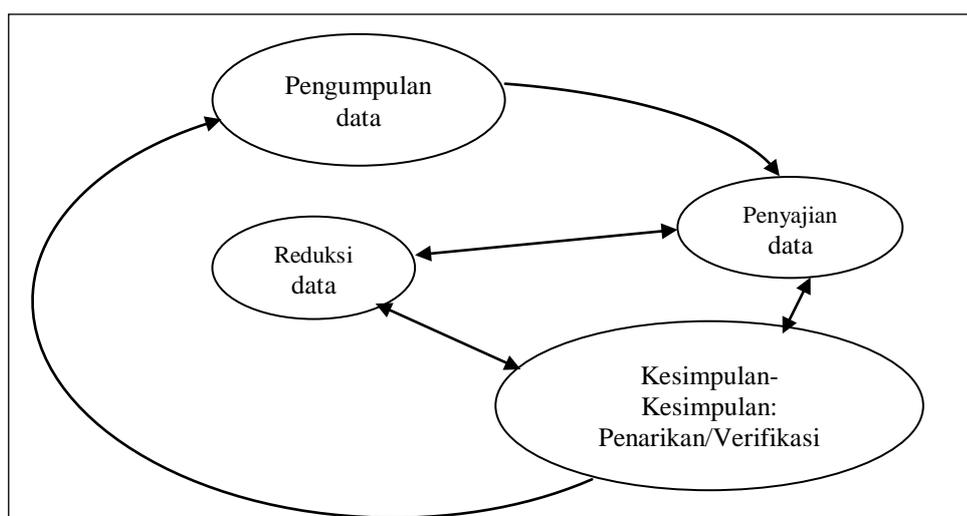
- c) Peneliti mengkolerasikan dengan tolak ukur pemberian makna untuk setiap alternatif jawaban responden sesuai dengan criteria yang sudah ada. Sehingga untuk mengetahui Efektivitas kebijakan PRODIRA dan Partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut 86-100%=sangat baik, 76-85% = baik, 60-75% = cukup, 45-59% = kurang baik dan < 45% = sangat tidak baik.

Langkah selanjutnya melakukan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data pada variabel yang akan diteliti yaitu efektivitas kebijakan PRODIRA dengan indikator, keselarasan kebijakan PRODIRA, target capaian, pengelolaan, kepengawasan PRODIRA dan variabel partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan dengan indikator, mensikapi kebijakan PRODIRA, Kesadaran pembiayaan pendidikan tanggungjawab bersama, tolong menolong jadi budaya masyarakat (*local wisdom*), dan keaktifan berpartisipasi. Adapun proses analisis deskriptif yang dilakukan adalah;

- a. Membuat distribusi frekuensi skor masing-masing variabel
- b. Perhitungan nilai kecendrungan sentral dan standar deviasi nilai variabel X dan Y guna untuk mengetahui kecendrungan persepsi stakeholder pendidikan di SMA/SMK dan MA se Provinsi Gorontalo tentang efektivitas kebijakan PRODIRA dan kontribusinya terhadap partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan di provinsi Gorontalo..
- c. Pengujian persyaratan analisis uji normalitas dan uji homogenitas, uji independensi variabel bebas dan uji linearitas.
- d. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis korelasi, regresi sederhana dan ganda serta korelasi parsial. Semua pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 0,05% atau $\alpha = 0,05$. Dengan ketentuan sebagai berikut ”
 - 1) Analisis korelasi sederhana, dilakukan untuk mengetahui besarnya r_{y_1} , $r^2_{y_1}$.
 - 2) Analisis Regresi sederhana, dilakukan untuk mengetahui kontribusi variabel efektivitas kebijakan PRODIRA (X) terhadap partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan di Provinsi Gorontalo (Y)

2. Kualitatif (Tahun Kedua 2018)

Sedangkan pada tahap kedua (2018) penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode primer, analisis data yang digunakan adalah model interaktif mengadaptasi pendapat Miles & Huberman, 1994:12) menempuh tiga langkah, yaitu; a) reduksi data, b) penyajian data, dan c) penarikan kesimpulan/verifikasi, sebagaimana dijelaskan dalam gambar 3.2 dibawah



Gambar 4.3. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif, diadaptasi dari Miles & Huberman (1994:12).

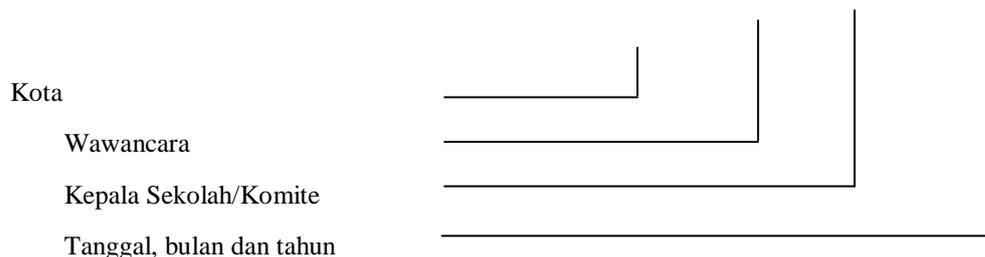
Pengkodean dibuat berdasarkan; fokus penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan lokasi penelitian. Pengkodean yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11 Sistem Pengkodean Analisis Data

No.	Aspek Pengkodean	Kode
	Fokus Penelitian: ✓ keselarasan reulasi dan tujuan kebijakan pembiayaan PRODIRA ✓ Target Capaian Kebijakan PRODIRA ✓ Pengelolaan Kebijakan PRODIRA ✓ Kepengawasan Kebijakan PRODIRA ✓ Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan ✓ Hambatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembiayaan Pendidikan ✓ Model Pengembangan Partisipasi masyarakat	KES TAR KEL KEP DIN HAM MOD
	Teknik Pengumpulan Data: ✓ Wawancara ✓ Observasi ✓ Dokumentasi	W O D
	Sumber Data: ✓ Kepala Sekolah ✓ Guru ✓ Bendahara sekolah ✓ Komite Sekolah ✓ Dinas Pendidikan Provinsi ✓ Dinas Pendidikan Kabupaten ✓ Dinas Pendidikan Kota	KS G BS KoSe DPP DPKa DPKo

Pengkodean tersebut digunakan dalam kegiatan analisis data. Kode fokus penelitian digunakan untuk mengelompokkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian, pada bagian akhir catatan lapangan/transkrip wawancara dicantumkan; kode lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, tanggal, bulan dan tahun.

Contoh penerapan kode dan cara membacanya adalah sebagai berikut:



H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memenuhi kriteria yang dianjurkan Lincoln dan Guba (1985), yaitu; 1) kredibilitas (validitas internal), 2) transferabilitas (validitas eksternal), 3) dependabilitas (reliabilitas), dan 4) konfirmabilitas (objektivitas);

a. Kredibilitas

Kredibilitas (validitas internal) dalam penelitian ini dipenuhi melalui beberapa kegiatan. *Pertama*, aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan temuan dan interpretasi yang akan dihasilkan lebih terpercaya terdiri dari; a) memperpanjang masa observasi, b) melakukan pengamatan yang terus menerus, dan c) melakukan triangulasi.

Kedua, aktivitas yang ditujukan untuk melakukan pemeriksaan eksternal (*external check*) terhadap temuan penelitian dilakukan dengan cara *peer debriefing*. Ada beberapa tujuan dari *peer debriefing*, yaitu; a) membantu menjaga kejujuran peneliti karena *the inquirer's biased are probed*, makna-makna dieksplorasi, dan dasar-dasar interpretasi serta diklarifikasi, b) memberikan pengenalan dan pencarian kesempatan untuk menguji hipotesis kerja yang mungkin muncul dalam pikiran peneliti, dan c) memberikan kepada peneliti suatu kesempatan untuk *chatarsis*, dengan demikian dapat menjernihkan pikiran dari emosi dan perasaan yang mungkin *clouding good judgement* (Lincoln & Guba, 1985).

Ketiga, melakukan *member checks* sehingga data yang dikumpulkan dari informan lebih valid. *Member checks* dilakukan dengan cara meminta kesediaan informan membaca ulang hasil wawancara yang sudah dituangkan ke dalam transkrip sehingga diperoleh masukan untuk perbaikannya. Umumnya, informan banyak memberikan koreksi tentang bahasa yang dipaparkan pada saat wawancara. Perbaikan transkrip wawancara segera dilakukan berdasarkan masukan dari informan. Apabila informan tidak merasa keberatan, maka kepadanya diminta untuk memaraf pada bagian akhir transkrip wawancara yang dikoreksinya. Namun, tidak semua informan bersedia melakukan hal tersebut. Salah satu contoh hasil koreksi informan terhadap transkrip wawancara yang sudah diparaf dapat dilihat pada bagian lampiran.

b. Transferabilitas

Transferabilitas (validitas eksternal) menjawab persoalan sampai sejauh mana hasil penelitian “ditransfer” pada beberapa konteks lain. Namun, menurut Lincoln dan Guba (1985), bukanlah tugas peneliti untuk memberikan *index of transferability*, tanggung jawabnya adalah memberikan *data base* yang dapat membuat pertimbangan transferabilitas temuan potensial. Pemenuhan kriteria transferabilitas dalam penelitian ini dengan memberikan deskripsi yang rinci (*thick description*).

c. Dependabilitas

Untuk memenuhi kriteria dependabilitas (reliabilitas) digunakan salah satu teknik yang disarankan Guba (Lincoln dan Guba, 1985), yaitu dengan cara audit temuan (*the inquiry audit*).

d. Konfirmabilitas

Pemenuhan kriteria konfirmabilitas (objektivitas) dimaksudkan untuk melihat objektivitas temuan penelitian yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilihat keabsahan yang menyangkut dengan relevansi data, penggunaan teknik analisis yang cermat, interpretasi data secara benar, dan rumusan kesimpulan yang benar-benar didukung oleh data yang lengkap. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemenuhan kriteria konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data dan temuan dengan ahli.

I. Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

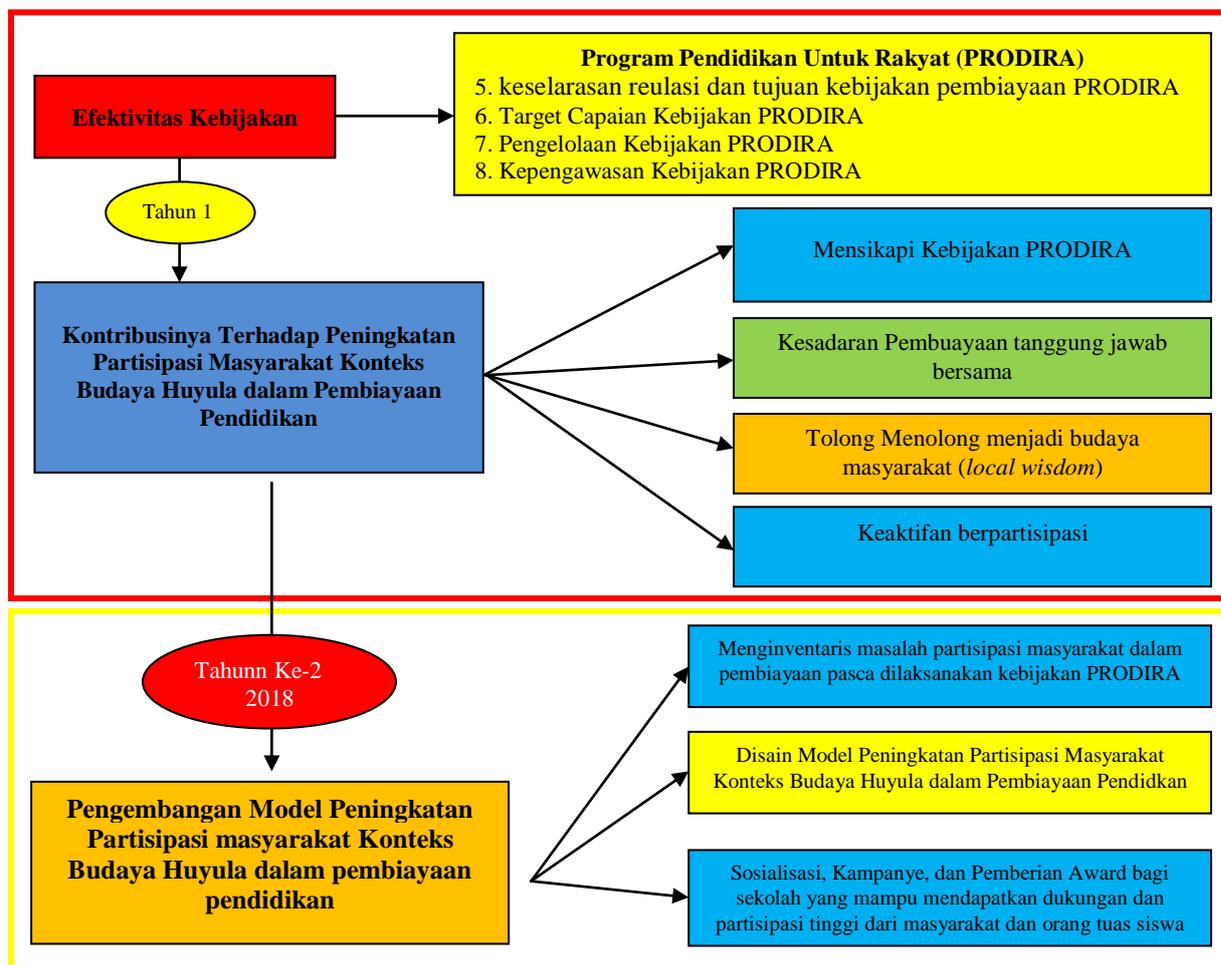
Tahun kedua (2018) juga dilakukan pengembangan model partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Sekolah memiliki beberapa kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika didukung oleh pembiayaan pendidikan yang memadai. Pembiayaan kebutuhan sekolah tersebut tidak mungkin disediakan sendiri oleh sekolah, oleh karena itu sekolah membutuhkan pembiayaan dari berbagai komponen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui pendanaan pendidikan antara lain pemberian subsidi terhadap sekolah, pemberian pembiayaan PRODIRA dan lainnya.

Disamping itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, yakni bersumber dari nilai-nilai luhur masyarakat Gorontalo yang terkenal dengan budaya *huyula* (gotong royong) sebagai karakter kolektif yang sudah tertanam dan terpatrit dalam diri masyarakat. Selama ini pemerintah Pusat dengan program wajib belajar 12 tahun, didukung kebijakan pemerintah provinsi Gorontalo dengan pembiayaan PRODIRA. Semua itu baru dalam kapasitas membiayai kebutuhan standar minimum dari pelaksanaan pendidikan.

Untuk akselerasi, meningkatkan dan menjaga mutu yang baik tentu perlu menggerakkan semaksimal mungkin potensi pembiayaan dari masyarakat Gorontalo yang sangat besar, karena kemampuan pemerintah terbatas. Untuk menggerakkan dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa di Provinsi Gorontalo dipandang perlu melakukan terobosan melalui pendekatan budaya (*cultural approach*), yang selama ini dikenal dengan budaya Gotong Royong yang sudah terpatrit dalam diri dalam jiwa masyarakat.

Makanya dalam kegiatan penelitian di tahun 2018 dikembangkan model peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sebagai bentuk kesadaran (*awardness*), maupun aktualisasi (*actualization*) dari nilai-nilai kultural masyarakat Gorontalo. Adapun bentuk atau pola pengembangan model peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dijelaskan dalam gambar 3.3 dibawah ini :



Gambar 4.4. Diagram Alir Model Efektivitas Kebijakan PRODIRA di SMA, SMK dan MA Provinsi Gorontalo Kontribusinya Terhadap Partisipasi Masyarakat konteks Budaya Huyula dalam pembiayaan pendidikan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya secara berturut-turut. yang meliputi: 1) deskripsi data, 2) pengujian persyaratan analisis, 3) pengujian hipotesis. Ketiga langkah-langkah ini akan menggunakan pendekatan kombinasi. Selanjutnya pembahasan hasil dan keterbatasan penelitian

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Deskripsi data masing-masing variabel dimaksudkan untuk menggambarkan kecenderungan atau *trend* dari jawaban responden terhadap variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel terikat (*dependen*), yaitu peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan, dan variabel bebas (*independen*), yaitu efektivitas kebijakan PRODIRA (X) yang akan dipaparkan dalam bentuk statistik deskriptif dan diperkuat analisis persentase diikuti dengan dukungan penelitian kualitatif berupa wawancara, pengamatan dan dokumentasi lainnya. Sehingga deskripsi dari metode kombinasi ini lebih lengkap dan mendalam setiap indikator dari masing-masing variabel yang diteliti.

Deskripsi data hasil penelitian didapatkan dari analisis temuan hasil penelitian yang diolah menggunakan SPSS versi 20.00 terhadap variabel yang diteliti yakni Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X) dan variabel Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y). Deskripsi atau gambaran masing-masing variabel tersebut meliputi skor tertinggi (*maximum*), skor terendah (*minimum*) rata-rata skor (*mean*), nilai yang sering muncul pada jawaban pada jawaban responden (*modus*), median, standar deviasi, dan rentangan atau *ranges* total jumlah. Data skor masing-masing variabel yang diambil dari responden (kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa atau salah seorang pengurus komite sekolah, menjadi dasar untuk menganalisis, yang merupakan hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS versi 20,00 yang disajikan dalam tabel 5.1 dbawah ini.

Tabel 5.1 Statistik masing-masing variabel

		Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)	Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula Dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)
N	Valid	116	116
	Missing	0	0
Mean		194.66	80.93
Std. Error of Mean		3.374	1.800
Median		197.00	81.00
Mode		152 ^a	93
Std. Deviation		36.341	19.388
Variance		1320.680	375.908
Skewness		-.150	.212
Std. Error of Skewness		.225	.225
Kurtosis		-.936	.190
Std. Error of Kurtosis		.446	.446
Range		153	96
Minimum		103	41
Maximum		256	137
Sum		22580	9388
10		146.70	55.10
25		165.00	68.00
Percentiles	50	197.00	81.00
	75	227.00	93.00
	90	245.30	104.30

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

a. Variabel Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)

Berdasarkan penelitian yang melibatkan 116 orang, terdiri dari kepala sekolah, guru, bendaharawan dan orang tua siswa (pengurus komite sekolah) melalui penyebaran angket sebagai sumber data penelitian diperoleh skor data variabel Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan skor tertinggi (maksimum) = 137, skor terendah (minimum) = 41, rata-rata skor (*mean*) = 80,93, persentase perbandingan rata-rata skor dengan skor maksimum = $80,93/137 \times 100 = 59,07\%$, nilai yang sering muncul pada jawaban responden (modus) = 93, nilai tengahnya (median) = 81, varian sampel = 375,908, simpangan baku (standar deviasi) = 19,38 dan range =

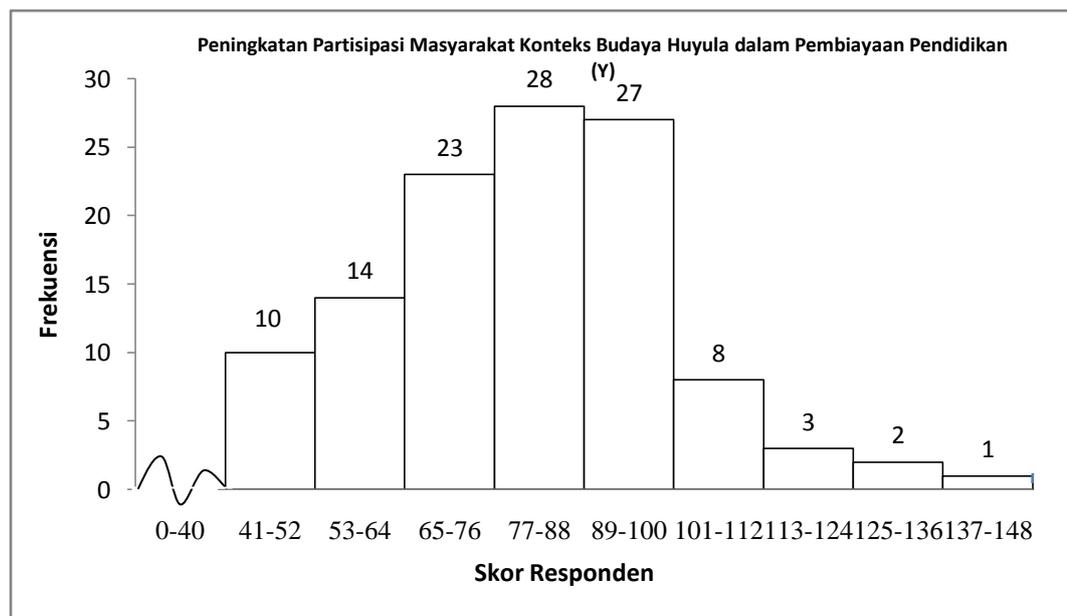
96. Adapun distribusi frekuensi skor dari variabel peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan, dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2 : Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kontek Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

No	Interval	Frekuensi Absolute (Fa)	Frekuensi Relatif (Fr)	Frekuensi Kumulatif Absolute	Frekuensi Kumulative Relatif	X	Fx	Fx (x)
1	41-52	10	8,6	10	8,6	-3	-30	90
2	53-64	14	12,1	24	20,7	-2	-28	56
3	65-76	23	19,8	47	40,5	-1	-23	23
4	77-88	28	24,1	75	64,6	0	0	0
5	89-100	27	23,3	102	87,9	1	27	27
6	101-112	8	6,9	110	94,8	2	16	32
7	113-124	3	2,6	113	97,4	3	9	17
8	125-136	2	1,7	115	99,1	4	8	32
9	137-148	1	0,9	116	100	5	5	25
N=116							$\Sigma fx = -16$	$\Sigma fx^2 = 302$

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan data frekuensi absolute peningkatan partisipasi masyarakat konteks Budaya Huyula dalam pembiayaan pendidikan di Provinsi Gorontalo (Y) menunjukkan terdapat 28 (24,1%) responden yang berada dalam kelompok rata-rata, 27 (23,3%) berada di atas rata-rata, dan 23 (19,8%) dibawah rata-rata. Penyebaran distribusi skor variabel peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan dapat ditampilkan seperti pada gambar 5.1 di bawah ini;



Gambar 5.1. Histogram Skor Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari deskripsi data variabel peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari kecenderungan jawaban responden dari berbagai indikator, antara lain : a) mensikapi kebijakan PRODIRA, b) kesadaran pembiayaan tanggung jawab bersama, c) tolong menolong jadi budaya masyarakat (*local wisdom*), d) keaktifan berpartisipasi sebagai berikut:

1) Mensikapi Kebijakan PRODIRA

Partisipasi masyarakat dalam konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan dilihat dari sikap masyarakat terhadap kebijakan PRODIRA. Gambaran sikap masyarakat terhadap kebijakan PRODIRA yang wakili oleh kepala sekolah, guru, bendaharawan dan orang tua siswa atau pengurus komite sekolah dapat dilihat dalam tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3 Masyarakat dan orang tua mensikapi kebijakan PRODIRA

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
1	Masyarakat dan orang tua siswa pro aktif mendukung kebijakan pembiayaan pendidikan gratis berupa Program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) di sekolah	61	35	17	2	1
2	Masyarakat dan orang tua siswa menyikapi pemenuhan pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 menuju 12 tahun dilakukan secara bertahap, kebijakan PRODIRA membantu biaya operasional sekolah SMA/SMK/MA adalah langkah percepatan yang tepat	48	49	13	2	4
3	Masyarakat dan orang tua siswa memandang pencapaian sekolah yang unggul dan berkualitas disamping ada dana PRODIRA masih perlu dukungan biaya dari orang tua siswa dan masyarakat	38	33	24	10	11
4	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PRODIRA di sekolah agar berjalan sesuai Juknis yang ada	32	43	23	7	11
5	Masyarakat dan orang tua siswa memberikan solusi untuk keberhasilan implementasi kebijakan PRODIRA di sekolah	22	43	31	11	9
6	Masyarakat dan orang tua siswa enggan untuk membantu biaya pendidikan di sekolah karena kebijakan pendidikan gratis (PRODIRA) sudah memenuhi seluruh kebutuhan biaya di sekolah	31	31	24	3	2
7	Masyarakat dan orang tua siswa melapor jika ada sekolah meminta bantuan yang mewajibkan orang tua dan masyarakat lainnya	30	37	23	11	5

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang sikapnya terhadap kebijakan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel 5.4 di bawah ini

Tabel 5.4. Sikap masyarakat dan orang tua siswa terhadap kebijakan PRODIRA.

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
1	61	305	35	140	17	51	2	4	1	1	116	501	86,38	Sangat Baik
2	48	240	49	196	13	39	2	4	4	4	116	483	83,27	Baik
3	38	190	33	132	24	72	10	20	11	11	116	425	73,27	Baik
4	32	160	43	172	23	69	7	14	11	11	116	426	73,44	Baik
5	22	110	43	172	31	93	11	22	9	9	116	406	70	Cukup
6	31	155	31	124	24	72	3	6	2	2	116	359	61,89	Cukup
7	30	150	37	148	23	69	11	22	5	5	116	394	67,93	Cukup
Rata-rata = $516,18/7=73,74$ %													Baik	

Berdasarkan analisis skor data diatas dapat diperoleh persentase skor sikap masyarakat dan orang tua siswa terhadap kebijakan PRODIRA (pendidikan gratis) adalah 73,74% yang berarti berada pada kategori Baik.

Hal senada disampaikan orang tua siswa di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo mengenai sikapnya terhadap kebijakan PRODIRA yakni :

Kami sebagai orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas sangat terbantu dengan kebijakan PRODIRA. Apalagi paitua (suami) tidak memiliki pendapatan tetap, tentunya dengan bebasnya biaya sekolah disini kami sangat tertolong sekali (RDWOT/MK/2017)

Disamping itu dijelaskan oleh salah seorang pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 3 Kota Gorontalo

Alhamdulillah kami mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi berupa dana PRODIRA. Meskipun terbatas, tetapi telah membantu kami dalam melaksanakan berbagai program sekolah dan kami dilibatkan dalam penyusunan program sekolah (RDWKS/MK/2017).

2) Kesadaran Pembiayaan Tanggung jawab Bersama

Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan konteks huyula bisa dicermati dari adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan atau partisipasi dari semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena tanggungjawab terhadap layanan pendidikan bukan saja oleh pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga masyarakat dan orang tua. Gambaran tentang kesadaran masyarakat Gorontalo terhadap pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama menurut kepala sekolah, guru, bendaharawan dan orang tua siswa, terlihat pada tabel 5.5 di bawah ini

Tabel 5.5 Kesadaran masyarakat dan orang tua siswa pada konteks budaya huyula dalam pembiayaan Pendidikan.

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
8	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi memberikan beasiswa ataupun penghargaan kepada guru, yang berpartisipasi memajukan sekolah	4	7	13	18	74
9	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi memberikan beasiswa ataupun penghargaan kepada siswa yang berprestasi, mengharumkan nama sekolah di tingkat daerah, provinsi maupun nasional	11	10	11	21	63
10	Masyarakat dan orang tua siswa merasa nyaman membiayai pendidikan anak-anaknya di sekolah ini	29	30	19	15	23
11	Masyarakat dan orang tua siswa membantu biaya pendidikan dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk membiayai pendidikan siswa yang kurang mampu	7	9	25	21	53
12	Masyarakat dan orang tua siswa merasa tidak ada pungutan sekolah ini karena sudah ada dana Prodira	62	21	14	6	13
13	Masyarakat dan orang tua siswa membantu membiayai pendidikan bagi anggota keluarganya yang kurang mampu.	7	22	26	16	45
14	Masyarakat dan orang tua siswa membantu mencari solusi biaya pendidikan bagi keluarganya yang terdekat yang kurang mampu dari sisi ekonomi	7	16	33	27	33

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang kesadaran masyarakat dan orang tua siswa dari konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, seperti tergambar dalam tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6. Kesadaran terhadap pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
8	4	20	7	28	13	39	18	36	74	74	116	197	33,96	Sangat Tidak Baik
9	11	55	10	40	11	33	21	42	63	63	116	233	40,17	Sangat Tidak Baik
10	29	145	30	120	19	57	15	30	23	23	116	375	64,65	Cukup
11	7	35	9	36	25	75	21	22	53	53	116	221	38,10	Sangat Tidak Baik
12	62	310	21	84	14	42	6	12	13	13	116	461	79,48	Baik
13	7	35	22	88	26	78	16	32	45	45	116	278	47,93	Kurang Baik
14	7	35	16	64	33	99	27	54	33	33	116	285	49,14	Kurang Baik
Rata-rata = $353,43/7=50,49$ %													Kurang Baik	

Berdasarkan analisis skor data diatas dapat diperoleh persentase skor kesadaran masyarakat dan orang tua siswa konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama adalah 50,49% yang berarti berada pada kategori kurang Baik atau rendah. Fakta ini tentu menjadi peringatan dini bagi pengambil keputusan untuk menggenjot partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pembiayaan pendidikan. Sekaligus direncanakan tahun 2018 penelitian lanjutan ini berupa pengembangan model peningkatan kesadaran masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab dalam pembiayaan pendidikan agar mendapatkan hasil maksimal. Saat ini pembiayaan yang digelontarkan pemerintah pusat dan daerah masih berada pada pemenuhan standar pembiayaan minimum dengan target capaian maksimum, tentu masih jauh dari harapan. Keikutsertaan masyarakat dan orang tua siswa bertanggungjawab dalam pembiayaan pendidikan diyakini bisa menggerakkan layanan pendidikan lebih cepat dan maksimal sesuai harapan semua pihak. Hal ini juga terungkap dari wawancara peneliti dengan ibu RS salah seorang pengurus komite SMA Negeri 3 Kota Gorontalo rendahnya kesadaran akan tanggungjawab pembiayaan menurutnya:

Kalau dulu sebelum adanya dana PRODIRA, komite sekolah terlibat langsung dalam pembiayaan pendidikan menentukan besarnya biaya per siswa per tahun. Tapi sekarang saya kurang tahu bagaimana keterlibatan komite (RDWK/2017).

Hal senada di perkuat salah seorang Guru menyatakan rendahnya kesadaran masyarakat atau orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan disebabkan:

Dana PRODIRA, guru tidak perlu susah-susah lagi mengumpulkan dana dari siswa atau orang tua siswa untuk kepentingan pembelajaran sudah tersedia dan dianggarkan, kami tinggal meminta ke Bendahara dengan persetujuan kepala sekolah (RDWG/2017).

3) **Tolong Menolong Jadi Budaya Masyarakat (*local wisdom*)**

Partisipasi masyarakat konteks Budaya Huyula dalam pembiayaan pendidikan bisa diamati dan dicermati dari kebiasaan tolong-menolong yang sudah menjadi perilaku kolektif (*collective behavior*) masyarakat Gorontalo juga tumbuh untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi semua pihak dalam pembiayaan pendidikan. Perilaku tolong

menolong (budaya *huyula*) yang sudah menjadi nilai *collective value* akan memudahkan menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi melengkapi, mencukup, memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan bagi kelompok ekonomi lemah atau miskin agar lebih akseleratif mencapai pemerataan dan mutu pendidikan yang terbaik.

Oleh karena cara pandang masyarakat membantu dan menolong sesama warga masyarakat yang membutuhkan pendidikan lebih mulia untuk terus dilestarikan dan ditingkatkan. Karena karakteristik tolong menolong dari masyarakat Gorontalo merupakan nilai (*value*) baik yang sudah ada sejak dulunya sebagai kekuatan kultural menggerakkan masyarakat dalam membiayai pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari orang tua yang memiliki keterbatasan secara ekonomi. Untuk melihat gambaran perilaku tolong-menolong yang dilakukan masyarakat dan orang tua siswa dalam memenuhi pembiayaan pendidikan bagi sesama, maka bisa dilihat dari jawaban responden pada tabel 5.7 di bawah ini.

Tabel 5.7 Tolong menolong yang dilakukan masyarakat dan orang tua siswa konteks budaya *huyula* dalam pembiayaan pendidikan.

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
15	Masyarakat dan orang tua siswa membantu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan solusinya bagi orang lain yang kurang mampu dari sisi ekonomi	4	15	29	28	40
16	Masyarakat dan orang tua siswa mendorong saling membantu dalam meringankan biaya pendidikan dengan “ <i>Torang Samua Basaudara</i> ”	6	22	25	21	42
17	Masyarakat dan orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan biaya yang belum terpenuhi dari dana Prodira maupun dana Bantuan operasional sekolah (BOS) untuk mencapai mutu yang terbaik	8	21	32	17	38
18	Komite sekolah berpartisipasi membangun sarana dan prasarana sekolah sesuai standar kualitas terbaik	23	28	26	19	20
19	Komite sekolah membantu memberikan solusi bagi sekolah dalam memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah guna menggenjot prestasi dan reputasi sekolah	26	27	33	16	14
20	Masyarakat dan orang tua siswa menghormati perbedaan status ekonomi orang tua siswa dalam membiayai pendidikan mereka yang kurang mampu diprioritaskan mendapatkan dana Prodira	27	45	22	12	45

21	Masyarakat dan orang tua siswa yang memiliki kelebihan rezeki senang membawakan makanan bagi guru dan siswa pada event-even yang dilaksanakan sekolah	5	18	40	25	28
22	Masyarakat dan orang tua siswa yang kurang mampu dari sisi ekonomi bersedia bekerja gotong royong membangun sekolah jika dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi kami membantu biaya pendidikan di sekolah	3	27	26	28	31
23	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi menyediakan bahan bangunan sekolah jika belum tersedia anggarannya	6	6	14	28	76

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang perilaku masyarakat dan orang tua siswa berupa budaya tolong menolong (*huyula*) dalam pembiayaan pendidikan, seperti tergambar dalam tabel 5.8 di bawah ini

Tabel 5.8 Budaya tolong menolong dalam pembiayaan pendidikan

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
15	4	20	15	60	29	87	28	56	40	40	116	263	45,34	Kurang baik
16	6	30	22	88	25	75	21	42	42	42	116	277	47,76	Kurang baik
17	8	40	21	84	32	96	17	34	38	38	116	292	50,34	Kurang baik
18	23	115	28	112	26	78	19	38	20	20	116	363	62,59	Cukup
19	26	130	27	108	33	99	16	32	14	14	116	383	66,03	Cukup
20	27	135	45	172	22	66	12	24	45	45	116	442	76,21	Baik
21	5	25	18	72	40	120	25	50	28	28	116	295	50,86	Kurang baik
22	3	15	27	108	26	78	28	56	31	31	116	288	49,65	Kurang Baik
23	6	30	6	24	14	56	28	56	76	76	116	236	40,68	Sangat tidak baik
Rata-rata = $489,46/9=54,38$ %													Kurang Baik	

Berdasarkan analisis skor data diatas dapat diperoleh persentase skor perilaku tolong menolong masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan adalah 54,38%, berarti berada pada kategori Kurang Baik. Kondisi ini perlu telaah mendalam melalui riset lanjutan tahun 2018.

Terjadinya degradasi perilaku tolong-menolong oleh masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan menurut salah seorang Guru SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, disampaikan bahwa

Orang tua siswa yang berhimpun dalam komite sekolah dalam perencanaan pembiayaan sekolah tidak lagi memaparkan program untuk penetapan besarnya biaya pendidikan yang menjadi tanggungjawab orang tua siswa, sehingga tertanam persepsi semua biaya sudah disediakan pemerintah untuk apalagi sumbangan atau partisipasi (RDWG/TM/2017).

Penurunan perilaku tolong menolong oleh masyarakat dan orang tua siswa juga diperkuat oleh pernyataan guru di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo yang menyatakan :

Jika sekolah menghimpun bantuan/sumbangan mengadakan kegiatan atau program yang tidak ada pembiayaannya di PRODIRA, tidak berapa lama, sekolah sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, supaya tidak cari masalah, maka kami hanya mengadakan kegiatan jika ada anggarannya di PRODIRA, takut meminta bantuan ke masyarakat nanti dianggap pungutan liar (RDWG/TM/2017).

Ancaman pungutan liar (pungli) oleh sekolah dan instansi terkait menjadi andalan bagi orang tua siswa dan masyarakat untuk tidak berpartisipasi, seakan-akan kebutuhan pembiayaan sekolah sudah terpenuhi semuanya dengan dana PRODIRA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Seperti terlihat dari spanduk yang menghiasi di semua SMA, SMK dan MA di antaranya yang terpajang di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo bawah ini :



Gambar 5.2 spanduk yang dipajang di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo

4) Keaktifan Berpartisipasi

Partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan bisa dilihat dari aktivitas dan keaktifan masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan, baik secara moril maupun materil misalnya bermusyawarah, mencari sponsor, urung rembuk, gotong royong, sumbangan dan lainnya. Untuk mengetahui keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan, maka bisa dilihat dari jawaban responden pada tabel 5.9 di bawah ini

Tabel 5.9 Keaktifan Berpartisipasi masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
24	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi dalam berbagai event sekolah dengan mensponsori kegiatan sekolah	6	21	31	31	27
25	Masyarakat dan orang tua siswa bersemangat mencari donasi dari berbagai perusahaan atau badan hukum yang memiliki dana sosial untuk pendidikan (<i>corporate social responsibility</i>)	4	9	12	31	60
26	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi dalam bentuk gotong royong membersihkan lingkungan sekolah guna mengurangi biaya operasional sekolah	4	9	15	36	52
27	Masyarakat dan orang tua siswa mengkritisi jika pengelolaan keuangan sekolah tidak transparan	20	39	24	13	20
28	Masyarakat dan orang tua siswa aktif bermusyawarah dan berdiskusi membahas kemajuan sekolah.	17	43	26	18	12

Berdasarkan tabel 5.9 di atas, langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang keaktifan berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan, seperti tergambar dalam tabel 5.10 di bawah ini

Tabel 5.10 Keaktifan masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
24	6	30	21	84	31	93	31	62	27	27	116	296	51,03	Kurang baik
25	4	20	9	36	12	36	31	62	60	60	116	214	36,90	Sangat Tidak Baik
26	4	20	9	36	15	45	36	72	52	52	116	225	38,79	Sangat Tidak Baik
27	20	100	39	156	24	72	13	26	20	20	116	374	64,48	Cukup
28	17	85	43	172	26	78	18	36	12	12	116	383	66,03	Baik
Rata-rata = $257,23/5 = 51,45\%$													Kurang Baik	

Berdasarkan analisis skor data diatas dapat diperoleh persentase skor keaktifan masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan adalah 51,45% berarti berada pada kategori kurang Baik. Hal ini diungkapkan salah seorang guru di SMA Negeri 1 Kwandang, antara lain

Partisipasi masyarakat dan orang tua di sekolah tinggi berkenaan dengan pengawasan dana PRODIRA atau pun dana BOS, tapi kalau inisiatif untuk aktif memikirkan atau membantu sekolah menjadi sekolah unggul dengan menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung atau mencari sponsor yang bisa membantu sekolah kelihatan belum tumbuh dengan baik (RDWG/KB/2017).

Disamping itu salah seorang guru SMK Negeri 1 Marisa ZK menyatakan :

Keaktifan masyarakat dan orang tua siswa mengalami penurunan dengan adanya kebijakan PRODIRA, rapat yang diundang kepala sekolah dan ketua komite seringkali orang tua atau wali orang tua tidak hadir dengan alasan ada acara di tempat, sibuk, dan sering diwakili oleh orang lain (RDWG/KB/2017).

Dari semua data di atas, dapat direkapitulasi partisipasi masyarakat dan orang tua siswa konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan di Provinsi Gorontalo di analisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.11 di bawah ini.

Tabel 5.11 Rekapitulasi Hasil Skor tentang Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

No	Aspek	Hasil Analisis Kuantitatif	Hasil Analisis Kualitatif
1	Mensikapi Kebijakan Prodira	73,74%	Sikap stakeholder SMA, SMK dan MA terhadap kebijakan PRODIRA baik, merasa terbantu dan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga
2	Kesadaran Tanggung jawab Bersama Pembiayaan	50,49%	Kebijakan PRODIRA tidak beririsan dengan kebermanfaatan yang dirasakan warga dengan kesadaran pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama. Terjadinya penurunan tanggungjawab bersama. PRODIRA sudah memenuhi semua kebutuhan
3	Tolong Menolong Jadi Budaya Masyarakat (<i>local wisdom</i>)	54,38%	Munculnya persepsi semua biaya pendidikan sudah ditanggung pemerintah. Jika ada sumbangan berarti ada pungutan liar (pungli)
4	Keaktifan berpartisipasi	51,45%	Menurunkan tingkat partisipasi ditandai dengan kehadiran rapat, partisipasi menyampaikan asirasi dan lainnya
Rata-Rata		230,36/4=57,59	Kurang Baik

Berdasarkan tabel 5.11 di atas dapat diketahui bahwa responden menyatakan bahwa partisipasi masyarakat konteks huyula dalam pembiayaan pendidikan berdasarkan skala penilaian maka tergolong dalam kondisi kurang baik dengan perolehan skor rata-rata 57,59. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai konsekuensi tanggungjawab bersama terhadap pendidikan antara pemerintah dan masyarakat serta orang tua. Untuk itu, penelitian ini perlu dilanjutkan pada tahun 2018 guna mendapatkan model pengembangan partisipasi masyarakat dengan menggenjot *awardness* dan pendekatan kultural yakni budaya huyula yang sejak dulu tertanam dalam diri masyarakat Gorontalo.

b. Variabel Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)

Berdasarkan penelitian yang melibatkan 116 orang, terdiri dari kepala sekolah, guru, bendaharawan dan orang tua siswa (pengurus komite sekolah) melalui penyebaran angket sebagai sumber data penelitian diperoleh skor data variabel Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X) skor tertinggi (maksimum) = 256, skor terendah (*minimum*) = 103, rata-rata skor (*mean*) = 194 persentase perbandingan rata-rata skor dengan skor maksimum = $194/256 \times 100 = 75,78\%$, nilai yang sering muncul pada jawaban responden (*modus*) = 152, nilai tengahnya (*median*) = 197, varian sampel = 132,68, simpangan baku (*standar deviasi*) = 36,34 dan range = 153.

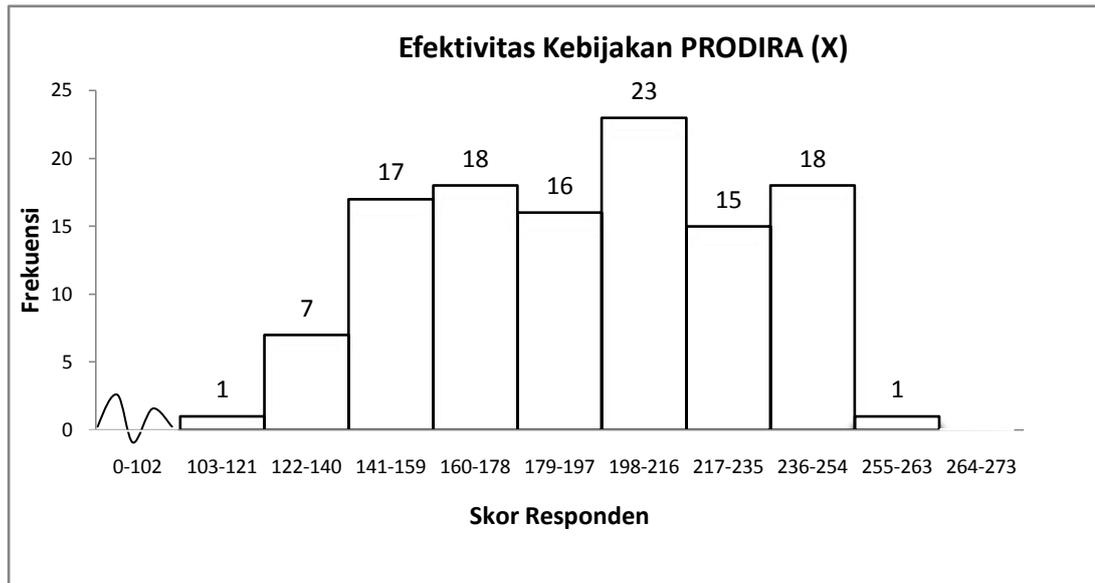
Adapun distribusi frekuensi skor variabel efektivitas kebijakan PRODIRA, dapat dilihat pada tabel 5.12 di bawah ini.

Tabel 5.12 : Distribusi Frekuensi Skor Variabel Efektivitas Kebijakan PRODIRA.

No	Interval	Frekuensi Absolute (Fa)	Frekuensi Relatif (Fr)	Frekuensi Komulatif Absolute	Frekuensi Komulatif Relatif	X	Fx	Fx (x)
1	103-121	1	0,9	1	0,9	-5	-5	25
2	122-140	7	6,0	8	6,9	-4	-28	112
3	141-159	17	14,7	25	21,6	-3	-51	153
4	160-178	18	15,5	43	37,1	-2	-36	72
5	179-197	16	13,8	59	50,9	-1	-16	16
6	198-216	23	19,8	82	70,7	0	0	0
7	217-235	15	12,9	97	83,6	1	15	15
8	236-254	18	15,5	115	99,1	2	36	72
9	255-263	1	0,9	116	100	3	3	9
N=116							$\Sigma fx = -82$	$\Sigma fx^2 = 474$

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 5.12 di atas menunjukkan data frekuensi absolute variabel efektivitas kebijakan PRODIRA (X) terdapat 23 orang (19,9%) responden yang berada dalam kelompok rata-rata, 15 orang (12,9%), berada di ataskelompok rata-rata, dan 16 orang (13,8%) dibawah kelompok rata-rata. Penyebaran distribusi skor variabel efektivitas kebijakan PRODIRA dapat ditampilkan seperti pada gambar 5.3 di bawah ini.



Gambar 5.3. Histogram Skor Variabel Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari deskripsi data variabel efektivitas kebijakan PRODIRA dapat dilihat dari kecenderungan jawaban responden dari berbagai indikator, antara lain : a) keselarasan kebijakan PRODIRA, b) target capaian PRODIRA, c) pengelolaan PRODIRA, d) pengawasan PRODIRA, sebagai berikut :

1) Keselarasan Kebijakan PRODIRA

Efektivitas Kebijakan PRODIRA tergambar dari keselarasan regulasi dan tujuan yang menjadi landasan pelaksanaan PRODIRA. Keselarasan regulasi itu, bisa dicermati dari peraturan yang di atasnya, maupun kaidah-kaidah normatif yang berlaku di masyarakat Provinsi Gorontalo. Kebijakan PRODIRA dilandasi berbagai Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo berkenaan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) PRODIRA. Semua aturan (regulasi) itu menjadi dasar pelaksanaan kebijakan PRODIRA.

Disamping itu, keselarasan regulasi kebijakan PRODIRA juga bisa dicermati dari tujuan PRODIRA dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sampai jenjang tertinggi, memberikan layanan pemerataan pendidikan yang terjangkau untuk semua, meringankan biaya pendidikan bagi orang tua siswa yang kurang mampu, memberikan

kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menghilangkan atau mengurangi pungutan liar yang terjadi diberbagai sekolah.

Adapun gambaran pandangan Kepala Sekolah, Guru, Bendahara, dan Orang Tua Siswa (Komite Sekolah) terhadap keselarasan regulasi yang mengatur dan tujuan dilaksanakannya kebijakan PRODIRA dapat digambarkan melalui sajian hasil jawaban 116 orang responden yang bersedia memberikan informasi dapat dilihat pada tabel 5.13 dibawah ini

Tabel 5.13. Keselarasan regulasi yang mengatur dan tujuan dilaksanakannya kebijakan PRODIRA.

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
1	Peraturan daerah tentang kebijakan Prodira (pendidikan gratis) selaras dengan berbagai peraturan dan perundang-undang yang berlaku.	76	24	11	4	1
2	Petunjuk Teknis (Juknis) Prodira memberikan informasi yang jelas dan dapat menghindari dari kesalahan pengelolaan.	86	25	4	1	0
3.	Kebijakan Prodira meningkatkan kesadaran pentingnya menempuh Pendidikan bagi stakeholder sampai jenjang tertinggi.	60	40	11	5	0
4.	Kebijakan Prodira memberikan layanan pemerataan pendidikan yang terjangkau, Semua Bisa Sekolah (SBS) SMA/SMK/MA.	75	32	8	1	0
5.	Kebijakan Prodira meringankan biaya pendidikan bagi orang tua siswa yang kurang mampu	81	23	12	0	0
6	Kebijakan Prodira memberikan kesempatan bagi warga melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	50	46	14	4	2
7	Kebijakan Prodira menghilangkan atau mengurangi pungutan liar di sekolah.	70	26	16	4	0

Berdasarkan tabel 5.13 di atas langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan Kepala Sekolah, Guru, Bendahara, dan Orang Tua Siswa (Komite Sekolah) terhadap keselarasan regulasi yang mengatur dan tujuan dilaksanakannya kebijakan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel 5.14 di bawah ini

Tabel 5.14. Analisis keselarasan regulasi dan tujuan kebijakan PRODIRA

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
1	76	380	24	96	11	33	4	8	1	1	116	518	89,31	Sangat Baik
2	86	430	25	100	4	12	1	2	0	0	116	544	93,63	Sangat Baik
3	60	300	40	160	11	33	5	10	0	0	116	503	86,72	Sangat Baik
4	75	375	32	128	8	24	1	2	0	0	116	529	91,21	Sangat Baik
5	81	405	23	92	12	36	0	0	0	0	116	533	91,90	Sangat Baik
6	50	250	46	184	14	42	4	8	2	2	116	486	83,79	Baik
7	70	350	26	104	16	48	4	8	0	0	116	510	87,78	Sangat Baik
Rata-rata = $624,34/7=89,19\%$													Sangat Baik	

Berdasarkan analisis skor data diatas dapat diperoleh persentase skor pencapaian keselarasan kebijakan PRODIRA (pendidikan gratis) dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan yang ingin dicapai sebesar 89, 19% artinya berada pada kategori Sangat Baik.

Data tentang keselarasan kebijakan PRODIRA dengan berbagai regulasi juga terungkap melalui wawancara Peneliti II (Warni Tune Sumar) dengan Kepala Sekolah SMK Almamater Kabupaten Gorontalo yang menjelaskan sebagai berikut

Walaupun sudah ada payung hukumnya mengisyaratkan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) terlihat pemerintah daerah masih sulit untuk membiayai kebutuhan anggaran pendidikan (Dok Disertasi Warni T Sumar, 2017)

Regulasi mengenai kebijakan PRODIRA juga dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Gorontalo bahwa

Persoalan anggaran pendidikan memang sangat menjadi sorotan dalam pelaksanaan otonomi daerah, walaupun sudah ada payung hukumnya mengisyaratkan anggaran pendidikan dengan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap pemerintah daerah masih terlihat sulit mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar itu dengan alasan pendidikan sekarang merupakan seremonial saja (Dok Disertasi Warni T Sumar, 2017)

Begitu juga dengan tujuan kebijakan PRODIRA, dapat dijelaskan dari hasil wawancara Peneliti II (Warni Tune Sumar) dengan kepala SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango dalam rangka menyelesaikan disertasinya terungkap bahwa:

Program unggulan Provinsi Gorontalo adalah pendidikan diantara empat program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dengan tujuan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Gorontalo dan pemerataan pendidikan sehingga masyarakat tidak tertinggal. Dengan adanya PRODIRA di sekolah tidak boleh lagi ada pungutan liar (Pungli). Bentuk partisipasi harus berdasarkan kemampuan orang tua siswa. Karena kewajiban anak untuk sekolah sudah termasuk pada PRODIRA (Dok Disertasi Warni T Sumar, 2017)

Disamping itu diperkuat hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Gorontalo yang menjelaskan sebagai berikut

Pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo adalah program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua siswa, atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah atas. Program pendidikan gratis berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, terjangkau, bermutu dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat (Dok Disertasi Warni T Sumar, 2017)

Tujuan Kebijakan PRODIRA di Gorontalo yang paling prinsip adalah menghilangkan pungutan liar dari pihak sekolah dalam memberikan layanan, sebagaimana dijelaskan oleh Guru SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai berikut:

Status ekonomi orang tua rata-rata di sekolah kami itu berasal dari orang tua yang bekerja di bidang pertanian, perdagangan pasar keliling dan sebagian dari orang tuanya PNS, bahkan ada juga anak pejabat tetapi dengan adanya PRODIRA pihak sekolah tidak berani memungut biaya dalam bentuk apapun ke orang tua siswa. Walaupun kegiatan ekstrakurikuler, kecuali ada inisiatif dari orang tua siswa untuk membiayai anaknya ikut dalam kegiatan sekolah (Dok Disertasi Warni T Sumar, 2017)

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ketua Komite SMA Negeri 1 Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

Saya sebagai Ketua Komite sekolah ini tidak berani memungut dana pendidikan ke orang tua siswa, karena disini salah ngomong ke orang tua siswa sudah langsung sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Oleh sebab itu, saya tidak berani mengambil resiko. Disekitar sekolah ini ada tinggal pejabat, perusahaan besar, pertokoan tapi saya tidak berani melakukan tindakan menyetujui penambahan dana (Dok Disertasi Warni T Sumar, 2017)

2) Target Capaian

Target Capaian dari kebijakan PRODIRA secara eksplisit terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo, termasuk komitmen pemerintah Ruslie Habibie dan Idris Rahim untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun indikator peningkatan IPM itu tergambar dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Peningkatan Partisipasi Sekolah (APS), Peningkatan Angka Kelulusan (AL), Penurunan Angka Putus Sekolah (DO), Penuntasan Buta Aksara, Penuntasan Wajib Belajar, dan peningkatan komitmen orang tua dalam pembiayaan

pendidikan. Pandangan terhadap aspek peningkatan IPM Provinsi Gorontalo yang menjadi target dari kebijakan PRODIRA, menurut Kepala Sekolah, guru, Bendahara, dan Orang tua Siswa atau Komite Sekolah dapat tergambar dari skor jawaban yang ada dalam tabel 5.15 di bawah ini

Tabel 5.15 Skor Jawaban Responden tentang target capaian kebijakan PRODIRA

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
8	Kebijakan PRODIRA meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA/SMK/MA	32	48	23	12	1
9	Kebijakan PRODIRA meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa SMA/SMK/MA	28	52	32	3	1
10	Kebijakan PRODIRA meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	44	42	20	10	0
11	Kebijakan PRODIRA meningkatkan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA tiap tahunnya	34	47	22	11	2
12	Kebijakan PRODIRA menurunkan Angka Putus Sekolah (DO) siswa SMA/SMK/MA	49	35	28	3	1
13	Kebijakan PRODIRA menuntaskan buta aksara tingkat SMA/SMK/MA	42	41	28	4	1
14	Kebijakan PRODIRA menuntaskan wajib belajar 12 tahun	58	44	10	2	2
15	Kebijakan PRODIRA Meningkatkan komitmen partisipasi orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dalam pembiayaan Pendidikan	25	23	42	21	5

Berdasarkan tabel 5.15 di atas langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responde tentang target capaian kebijakan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel 5.16 di bawah ini

Tabel 5.16. Target capaian kebijakan PRODIRA

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
8	32	160	48	192	23	69	12	24	1	1	116	446	76,90	Baik
9	28	140	52	208	32	96	3	6	1	1	116	451	77,76	Baik
10	44	220	42	168	20	60	10	20	0	0	116	460	79,31	Baik
11	34	160	47	188	22	66	11	22	2	2	116	438	75,52	Baik
12	49	245	35	140	28	84	3	6	1	1	116	476	82,07	Baik
13	42	210	41	164	28	84	4	8	1	1	116	467	80,52	Baik
14	58	290	44	176	10	30	2	4	2	2	116	502	86,56	Sangat Baik
15	25	125	23	92	42	126	21	42	5	5	116	390	67,25	Cukup
Rata-rata = $625,89/8=78,24\%$													Baik	

Berdasarkan analisis skor data diatas dapat diperoleh persentase skor capaian kebijakan PRODIRA dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebesar 78,24% artinya berada pada kategori Baik.

Analisis ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti II (Warni Tune Sumar) dengan beberapa informan yang berada di SMA/SMK dan MA terkait capaian kebijakan PRODIRA meningkatkan indeks pemangunan manusia (IPM) Provinsi Gorontalo, antara lain hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang menjelaskan :

Kondisi pendidikan di Gorontalo dengan adanya Program PRODIRA yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Rusli Habibie merupakan suatu keberhasilan dalam upaya membangun kualitas pendidikan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu masih dibawah rata-rata setelah adanya PRODIRA itu sudah meningkat, dilihat dari angka IPM Gorontalo selama di pimpin oleh Drs. Rusli Habibie tahun 2013 menetapkan target IPM mencapai 71,76. Dengan adanya PRODIRA dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dalam mengelola dana PRODIRA (RDWK/TC/2017)

Disamping itu, capaian yang ingin diraih dari kebijakan PRODIRA adalah masyarakat bisa mengembangkan potensi dan hidup mandiri, sebagaimana dijelaskan Bendaharawan Sekolah SMA Negeri 1 Telaga Biru sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Gorontalo, dibawah kepemimpinan Rusli Habibie telah mencanangkan pendidikan gratis kepada masyarakat dengan membebaskan biaya operasional sekolah. Bantuan Biaya operasional ini dalam bentuk dana Hibah agar warga dalam mengembangkan potensi dirinya dan dapat hidup mandiri (RDWB/TC/2017).

3) Pengelolaan Kebijakan PRODIRA

Efektivitas kebijakan PRODIRA dilihat dari pengelolaannya, sehingga bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Pengelolaan PRODIRA yang baik tentunya juga akan mampu memuaskan para pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui gambaran pandangan kepala sekolah, guru, bendaharawan dan orang tua siswa (pengurus komite sekolah) terhadap pengelolaan kebijakan PRODIRA, dapat dilihat dari tabel 5.17 dibawah ini.

Tabel 5.17 Skor Jawaban Responden tentang pengelolaan kebijakan PRODIRA

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
16	Pembentukan tim pengelola PRODIRA merujuk pada Juknis PRODIRA	17	32	35	20	12
17	Kelembagaan (struktur organisasi) tim manajemen PRODIRA di Provinsi, Kabupaten dan Kota bekerja baik	60	39	11	5	1
18	Tim Manajemen mensosialisasikan kebijakan PRODIRA memenuhi kebutuhan biaya siswa (unit cost) setiap tahunnya	44	27	30	8	7
19	Internalisasi kebijakan PRODIRA melalui Bimtek dan Pendidikan Pelatihan (Diklat) dilakukan secara periodic	26	57	24	6	3
20	Tiap tahun ajaran baru sosialisasi kebijakan PRODIRA dipublikasikan melalui media cetak agar semua masyarakat mengetahuinya	49	33	26	6	2
21	Sosialisasi Juknis dan ketentuan PRODIRA melalui Buku saku atau buku panduan tersedia secara memadai	49	45	13	9	0
22	Tim manajemen PRODIRA memberikan kemudahan akses data (pelayanan)	53	44	14	5	0
23	Pengelolaan PRODIRA di sekolah dipersiapkan dengan format pembukuan yang standar (baku) untuk tertib administrasi (akuntabilitas)	74	36	6	0	0
24	Pengelola PRODIRA menyampaikan pelaporan data pelaksanaan secara periodik 2 kali setahun	81	30	4	0	1
25	Pendistribusi dana PRODIRA tepat waktu sesuai dengan Juknis yang ada	23	53	33	5	2

Berdasarkan tabel 5.17 di atas, langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang pengelolaan kebijakan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel 5.18 di bawah ini

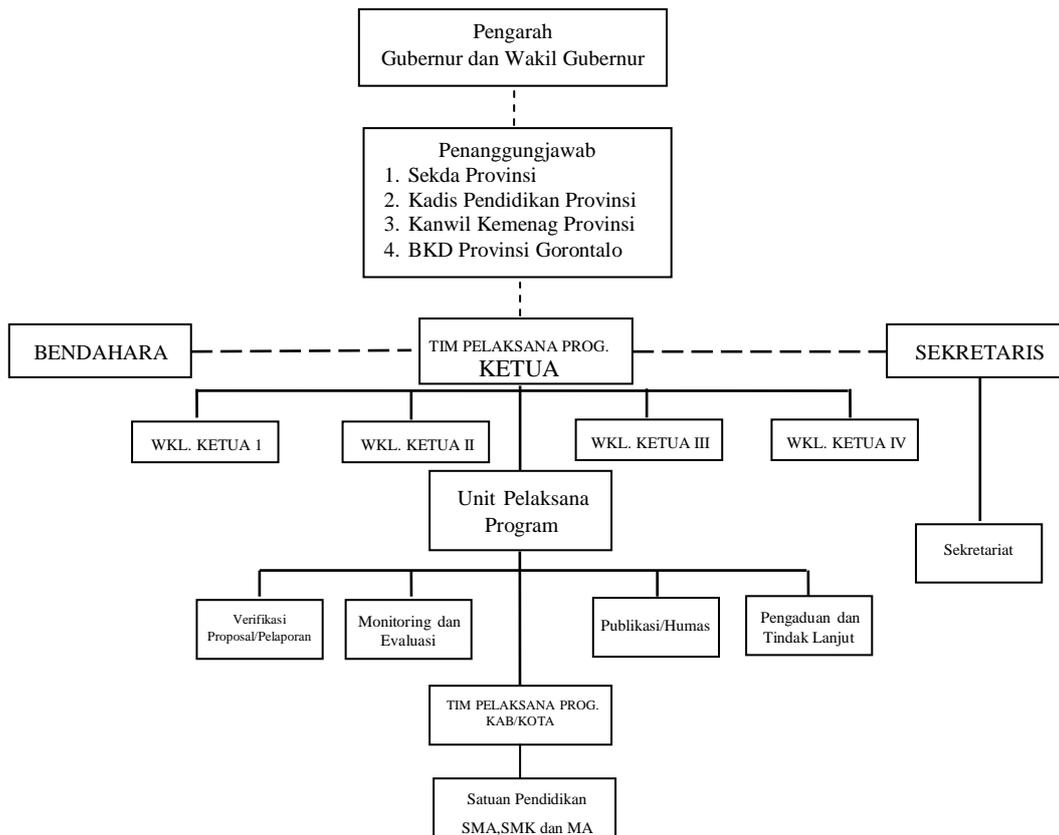
Tabel 5.18. Pengelolaan kebijakan PRODIRA

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
16	17	85	32	128	35	105	20	40	12	12	116	370	63,79	Cukup
17	60	300	39	156	11	33	5	10	1	1	116	500	86,21	Sangat Baik
18	44	220	27	108	30	90	8	16	7	7	116	441	76,03	Baik
19	26	130	57	228	24	72	6	12	3	3	116	445	76,72	Baik
20	49	245	33	132	26	78	6	12	2	2	116	469	80,86	Baik
21	49	245	45	180	13	39	9	18	0	0	116	482	83,10	Baik
22	53	265	44	176	14	42	5	10	0	0	116	493	85	Baik
23	74	370	36	144	6	18	0	0	0	0	116	532	91,72	Sangat Baik
24	81	405	30	120	4	12	0	0	1	1	116	538	92,75	Sangat Baik
25	23	115	53	212	33	99	5	10	2	2	116	438	75,51	Cukup
Rata-rata = $811,69/10=81,17\%$													Baik	

Berdasarkan analisis skor data diatas dapat diperoleh persentase skor target pengelolaan kebijakan PRODIRA (pendidikan gratis) sebesar 81,17% artinya berada pada kategori Baik. Tercapainya pengelolaan kebijakan PRODIRA dengan baik, didukung oleh organisasi pelaksana manajemen PRODIRA yang memiliki tugas melakukan koordinasi pada tataran implementasi kebijakan PRODIRA dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat sekolah penerima hibah.

Ditingkat Provinsi Gorontalo, telah dibentuk organisasi pelaksana manajemen PRODIRA terdiri dari Tim pengarah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Penanggungjawab; Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Keuangan Daerah, Tim Pelaksana Program; Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Unit Data; Unit Monitoring dan Evaluasi, Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Unit Publikasi/Humas.

Tugas tim manajemen PRODIRA Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Adapun struktur organisasi tim manajemen PRODIRA di tingkat Provinsi Gorontalo, dijelaskan di bawah ini



Gambar 5.4. Organisasi Pelaksana/Tim manajemen PRODIRA di tingkat Provinsi Gorontalo (SK Gubernur Gorontalo, No. 186/07/VI/2013)

Tugas dan tanggungjawab organisasi pelaksana (tim manajemen) ditingkat Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Kadis DIKPORA Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/DIKPORA/172.a/DIKMEN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA), yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada tim manajemen kabupaten/kota dan sekolah/madrasah;
- b. Mempublikasikan penyelenggaran PRODIRA
- c. Menerima dan menilai proposal satuan pendidikan yang diusulkan dan direkomendasikan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Kanwil.
- d. Mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa dari Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi
- f. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Dok. Juknis PRODIRA, 2014:9).

Turunan dari Tim Manajemen Provinsi Gorontalo, dibentuk juga Tim Manajemen Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari penanggungjawab; Sekretaris

Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama. Sedangkan tugas tim manajemen PRODIRA di Kabupaten/Kota antara lain

- a. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Tingkat Provinsi
- b. Melakukan sosialisasi kepada tim manajemen sekolah (Madrasyah).
- c. Mengumpulkan dan mengupdate data jumlah siswa dari sekolah/Madrasah
- d. Mengusulkan dan merekomendasikan sekolah/madrasah calon penerima biaya operasional sekolah.
- e. Melakukan pembinaan kepala sekolah/madrasah dalam hal pengelolaan dana dan pelaporan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi sekolah /madrasah yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana semester berikutnya
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi
- g. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Dok. Juknis PRODIRA, 2014;12)

Dalam melaksanakan tugas di atas tim manajemen PRODIRA di tingkat Kabupaten/Kota harus memperhatikan, antara lain :

- a. Tidak diperkenankan melakukan pengutan dalam bentuk apapun terhadapsekolah.
- b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa disekolah penerima atau mengarahkan pengadaan barang/jasa kepada penyedia barang/jasatertentu.
- c. Mendorong dan memantau sekolah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap penggunaan danaPRODIRA.(Dok.Juknis PRODIRA, 2014:12)

Sedangkan tim manajemen PRODIRA ditingkat sekolah atau madrasah terdiri dari, penanggung jawab PRODIRA beranggotakan kepala sekolah/madrasah, ketua program studi atau salah seorang guru, dan bendahara sekolah/madrasah. Tugas dan tanggung jawab tim manajemen PRODIRA di tingkat sekolah/madrasah yaitu;

- a. mengisi dan menyerahkan data sekolah/madrasah secara lengkap kepada tim manajemen Kabupaten/Kota dan kepada tim manajemen provinsi;
- b. Membuat RKAS yang mencantumkan seluruh sumber penerimaan sekolah/madrasah.
- c. Melaporkan perubahan data siswa setiap 6 (enam) bulan kepada tim manajemen Kabupaten/Kota dan tim manajemenprovinsi.

- d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada
- e. Mengelola dana prodira secara bertanggungjawab dan transparan
- f. Mengumumkan jumlah dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah/madrasah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah/madrasah dan ketua komite sekolah/madrasah.
- g. Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana yang diterimanya.
- h. Membuat laporan penggunaan dana, diserahkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk direkomendasikan ke DIKPORA Provinsi Gorontalo.
- i. Melakukan pembukuan keuangan secara tertib dan transparan.
- j. Wajib mencatat dan melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana PRODIRA ke dinas pendidikan Kab/Kota dan Provinsi; (Dok, Juknis PRODIRA, 2014:13)

Ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh manajemen tim manajemen PRODIRA di tingkat sekolah/madrasah sebagai berikut :

- a. Memastikan keakuratan data siswa sebelum diajukan ke dinas pendidikan Kab/Kota.
- b. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelolasekolah/madrasah.
- c. Dilarang mengarahkan dan/atau bertindak sebagai distributor dan pengecer barang/jasa terkait dengan dana PRODIRA.
- d. Bersedia mengembalikan sisa anggaran ke kas daerah yang disebabkan oleh kesalahan penyaluran oleh pihak penyalur (Dok. Juknis PRODIRA, 2014:13)

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Kebijakan PRODIRA di pandang stakeholder pendidikan baik juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa pihak, seperti yang diungkapkan kepala sekolah SMA 3 Kota Gorontalo, antara lain :

Sasaran penganggaran terhadap pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 3 didasarkan juknis PRODIRA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Besarnya anggaran untuk delapan (8) standar nasional pendidikan telah diberikan porsi masing-masing. Untuk program kurikulum minimal 20% dari dana, program ketenagaan maksimal 35%, pengadaan sarana prasarana maksimal 30%, pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal 30% dan program manajemen sekolah maksimal 15% (Dok, Tesis Hadidjah Mootinelo, 2015:52).

Selanjutnya informan bendahara PRODIRA SMA Negeri 3 Kota Gorontalo menyatakan bahwa :

Dengan adanya PRODIRA, penganggaran pembiayaan pendidikan dilakukan di awal tahun pelajaran (awal semester), dialokasikan pada aspek yang harus segera dipenuhi dan rutin setiap tahun, seperti kurikulum, pembinaan, siswa, pemeliharaan bangunan dan sarana dan prasarana sekolah (RDWG/PK/2017)

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menterjemahkan kebijakan PRODIRA di berbagai tingkatan oleh tim manajemen PRODIRA, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di sekolah/madrasah, maka Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo melaksanakan lokakarya, pelatihan dan sosialisasi tentang kebijakan Pendidikan Gratis dan PRODIRA ke stakeholder pendidikan guna mendapatkan masukan bagi perbaikan serta mendapatkan dukungan positif, seperti pada gambar 5.4 berikut ini



Gambar 5.4. Kadis Dikpora Provinsi Gorontalo, Drs. Arfan Arsyad, M.Pd menyampaikan materi dalam Studium General tentang PRODIRA (Sumber <https://b3wpgorontalo.wordpress.com/2013/04/25/lokakarya-monev-program-pendidikan-di-provinsi-gorontalo>)

Dalam penetapan besaran alokasi dana PRODIRA yang dihibahkan ke sekolah diatur dalam petunjuk teknis, sebagai berikut :

Tiap sekolah/madrasah dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data siswa setiap tahun pelajaran yang sedang berjalan dan untuk sekolah/madrasah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 50 orang maka alokasi anggarannya ditetapkan menjadi 50 orang pertahun (Dok. Juknis PRODIRA, 2014;14)

Proses pencairan dana PRODIRA untuk SMA/MA/SMALB/SMK, diatur sebagai berikut :

Pencairan dana dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan bendahara sekolah/madrasah, dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sekolah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Dana harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun (Dok. Juknis PRODIRA, 2014;18

Pengelolaan kebijakan PRODIRA memberikan fleksibilitas dalam penentuan sasaran pemanfaatan dana, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis,

dana PRODIRA harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen sekolah/madrasah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Sasarannya untuk penyelenggaraan kurikulum $\geq 20\%$, ketenagaan $\leq 35\%$, pemenuhan sarana pendidikan dan rehabilitas $\leq 35\%$ serta manajemen sekolah = 15% (Dok. Juknis PRODIRA, 2014, 19).

Data lainnya yang memperkuat hasil analisis deskriptif dan wawancara terbukti dari data yang dikumpulkan di lapangan menunjukkan porsi anggaran PRODIRA untuk delapan (8) standar nasional pendidikan dari berbagai sekolah menengah atas atau sederajat di Provinsi Gorontalo terdistribusi sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis), jika terjadi pergeseran disebabkan adanya kebutuhan yang menjadi prioritas, seperti dijelaskan dalam tabel 5.19 di bawah ini :

Tabel 5.19 Sasara penggunaan anggaran PRODIRA di SMA, SMK dan MA se Provinsi Gorontalo

No	Nama Sekolah Penerima Dana Prodira	Tahun 2012 (%)				Tahun 2013 (%)				Tahun 2014 (%)				Tahun 2015 (%)			
		KK ≥20%	KT ≤35%	PS ≤30%	MS =15%												
1	SMK Negeri 1 Batudaa	15%	50%	25%	10%	15%	50%	25%	10%	20%	50%	20%	10%	30%	10%	45%	15%
2	MA Muh. Kota Gto	20,1%	46,5%	25,9%	7,5%	4,7%	55,1%	36,1%	4,1%	5,2%	64,62%	27,48%	2,8%	11,8%	49,1%	20,8%	18,3%
3	SMA Negeri 1 Telaga	-	-	-	-	30%	20%	35%	15%	30%	20%	35%	15%	75%	-	-	25%
4	SMA Negeri 3 Kota Gto	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	35%	30%	15%	-	-	-	-
5	SMK Negeri 1 Bonepantai	-	-	-	-	-	-	-	-	43%	28%	14%	16%	35%	30%	30%	6%
6	SMK Tirtayasa Gto	-	-	-	-	100%	-	-	-	96%	4%	-	-	100%	-	-	-
7	SMK Almamater	10%	50%	30%	10%	10%	50%	30%	10%	10%	50%	30%	10%	10%	50%	30%	10%
8	SMK Negeri 3 Kota Gto	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	10%	40%	20%	30%	10%	40%	20%
9	SMK Kesehatan Bakti	-	-	-	-	8,2%	14,1%	74,1%	3,6%	17,3%	4,6%	71,7%	6,4%	14,9%	17,5%	54,6%	2,9%
10	SMA Negeri 1 Limboto	-	-	-	-	40%	12%	40%	8%	20%	25%	28%	27%	15%	61%	10%	14%
11	SMA Negeri 1 Tapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	35%	30%	15%
12	SMA Negeri 5 Gorut	25%	30%	25%	20%	25%	30%	25%	20%	25%	30%	25%	20%	-	-	-	-
13	SMA Negeri 6 Gorut	20%	30%	30%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	30%	30%	20%
14	SMA Negeri 7 Gorut	15%	20%	35%	30%	15%	20%	35%	30%	15%	20%	35%	30%	-	-	-	-
15	SMA Negeri 1 Telaga Biru	20%	30%	35%	15%	20%	30%	35%	15%	20%	30%	35%	15%	20%	30%	35%	15%
16	SMA Negeri 1 Tilango	50%	25%	15%	10%	50%	25%	15%	10%	50%	25%	15%	10%	50%	25%	15%	10%
17	SMA Negeri 1 Tilamuta	20%	15%	57,8%	7,2%	21,1%	7,1%	39,1%	10,7%	21,6%	30,8%	29,9%	13,3%	16,2%	40,7%	30,1%	13%
18	SMK Negeri 1 Boalemo	30%	25%	20%	25%	30%	25%	20	25%	30%	25%	20	25%	-	-	-	-
19	SMA Negeri 1 Tibawa	30%	35%	20%	15%	30%	35%	20%	15%	30%	35%	20%	15%	30%	35%	20%	15%

Sumber : Dianalisis dari data yang dikumpulkan bersama instrument penelitian, 2017 menunjukkan fleksibilitas sasaran pemanfaatan dana PRODIRA

Ketentuan lainnya dalam penggunaan dana PRODIRA di sekolah, dijelaskan bahwa

Apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada ketenagaan maka dapat ditambahkan pada program pemeliharaan saran/prasarana atau kurikulum (Dok. Juknis PRODIRA, 2014;19)

Berjalannya dengan Baik Pengelolaan kebijakan PRODIRA juga diungkapkan oleh salah seorang Bendahara di SMK Almamater Gorontalo:

Sebelum menerima dana PRODIRA yang dibentuk adalah panitia khusus PRODIRA dibuktikan dengan SK. Sebagai Bendahara saya bertugas membuat Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), untuk mengupdate data siswa guna diusulkan ada tim manajemen sekolah yang akan diusulkan ke tim manajemen Provinsi dan saya melakukan koordinasi dengan baik bersama tim manajemen PRODIRA Kabupaten maupun Provinsi (Dok Disertasi Warni T Sumar, 2017).

Disamping itu salah seorang informan dari guru SMA Negeri 3 Kota Gorontalo juga menyampaikan bahwa :

Pengelolaan PRODIRA dibarengi dengan pelatihan yang dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran dan awal semester, tetapi ada juga yang mengikuti diklat dan seminar di luar sekolah. Untuk di dalam sekolah kami diberikan biaya transport sedangkan untuk keluar sekolah dananya diambil dari sumber dana lainnya. (RDWG/2017)

4) Kepengawasan

Efektivitas kebijakan PRODIRA juga dilihat dari proses kepengawasan yang dilakukan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi program-program yang dibiayai dan dilaksanakan. Untuk mengetahui gambaran pandangan dan persepsi Kepala Sekolah, Guru, Bendaharawan dan Orang Tua Siswa (Pengurus Komite Sekolah), dapat dilihat dari tabel 5.20 di bawah ini.

Tabel 5.20 Skor Jawaban Responden tentang kepengawasan kebijakan PRODIRA

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
26	Tim manajemen PRODIRA menyiapkan instrumen pengaduan atau kontak telpon untuk mendapatkan informasi tentang layanan Prodira	42	40	25	8	1
27	Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban dana PRODIRA per semester disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	96	19	1	0	0
28	Pengawasan pengelolaan dana PRODIRA di sekolah mencermati ketepatan tujuan, sasaran, dan tepat pengelolaan dana.	75	36	4	1	0
29	Pemberian sanksi bagi oknum pengelola dana PRODIRA di sekolah dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.	66	30	11	6	3
30	Tim manajemen PRODIRA di Kabupaten dan Kota melakukan pembinaan pengelolaan keuangan (Asistensi) di sekolah guna mencegah penyimpangan	52	44	14	6	0
31	Tim manajemen PRODIRA di sekolah melakukan pelatihan pengelolaan keuangan dana Prodira agar tertib administrasi	40	47	24	4	1
32	Tim manajemen PRODIRA Kabupaten/Kota melakukan <i>umpan balik untuk pengembangan (Feedback for improvement)</i> pelaksanaan Prodira di sekolah	34	54	23	3	2
33	Tim manajemen PRODIRA Kabupaten dan /atau Provinsi Gorontalo memberikan penghargaan bagi sekolah yang berhasil memaksimalkan pengelolaan Prodira di sekolah	17	24	33	19	23

Berdasarkan tabel 5.20 di atas, langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang kepengawasan kebijakan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel 5.21 di bawah ini

Tabel 5.21. Kepengawasan kebijakan PRODIRA

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
26	42	210	40	160	25	75	8	16	1	1	116	462	79,65	Baik
27	96	480	19	76	1	3	0	0	0	0	116	559	96,38	Sangat Baik
28	75	375	36	144	4	12	1	2	0	0	116	535	92,24	Sangat Baik
29	66	330	30	120	11	33	6	12	3	3	116	498	85,86	Sangat Baik
30	52	260	44	176	14	42	6	12	0	0	116	490	84,48	Baik
31	40	200	47	188	24	72	4	8	1	1	116	469	80,86	Baik
32	34	170	54	216	23	69	3	6	2	2	116	463	79,83	Baik
33	17	85	24	96	33	99	19	38	23	23	116	341	58,80	Kurang Baik
Rata-rata = $658,10/8=82,26\%$													Baik	

Berdasarkan analisis skor data diatas dapat diperoleh persentase skor target kegiatan kepengawasan kebijakan PRODIRA (pendidikan gratis) adalah 82,26% yang berarti berada pada kategori Baik.

Temuan di atas didukung dengan hasil wawancara yang menjelaskan kegiatan kepengawasan itu dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dijelaskan salah seorang guru SMA Negeri 1 Kota Gorontalo, sebagai berikut :

Komponen utama yang dimonitor oleh tim manajemen PRODIRA di sekolah sebagai berikut :

Jumlah dana yang diterima sekolah, disalurkan untuk apa saja, bentuk layanan dan penanganan pengaduan masyarakat atau orang tua, administrasi keuangan atau pembukuan (RDWG/2017)

Disamping itu, dijelaskan juga oleh Kepala SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango, bahwa

Bentuk evaluasi PRODIRA dilakukan oleh tim manajemen PRODIRA pada tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi dilakukan setiap triwulan dan pada akhir semester, laporan pertanggungjawaban dana PRODIRA sangat strategis dan untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban menjadi syarat cairnya dana PRODIRA setiap triwulan (Dok Disertasi Warni T Sumar, 2017).

Mengenai frekuensi pelaporan dana PRODIRA, diungkapkan kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, sebagai berikut:

Pelaporan dana PRODIRA dilaksanakan 2 (dua) kali sesuai dengan tahapannya. Pertama awal semester genap dan kedua awal tahun pelajaran semester ganjil. Laporan dibuat beberapa rangkap untuk dinas pendidikan Kota Gorontalo, Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi (RDWG/2017))

Adapun pihak-pihak yang turut serta dalam pengawasan dana PRODIRA juga dijelaskan oleh Sekretaris Dinas DIKPORA Provinsi Gorontalo, antara lain

Pengawasan PRODIRA terdiri dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal dan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota dan Provinsi kepada sekolah/madrasah. Pengawasan fungsional terdiri dari Inspektorat Provinsi Gorontalo sesuai kebutuhan, pengawasan fungsional eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan PRODIRA di sekolah/madrasah (Dok. Juknis PRODIRA, 2014;27)

Dari semua data di atas, maka dapat direkapitulasi efektivitas kebijakan PRODIRA, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.22 di bawah ini

Tabel 5.22 Rekapitulasi Hasil Skor tentang Efektivitas Kebijakan PRODIRA berdasarkan analisis data kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif

No	Aspek	Hasil Analisis Kuantitatif	Hasil Analisis Kualitatif
1	Keselarasan Kebijakan Prodira	89,19 (Sangat Baik)	Regulasi yang mengaturnya kebijakan PRODIRA lengkap ada Juknis, Perda Pergub dan berkesesuaian dengan perundang-undangan di atasnya
2	Target Capaian	78,24 (Baik)	Capaian untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, ditandai dengan meningkatkannya APK, APM, APS, Angka Kelulusan, menurunnya angka putus sekolah (DO), menuntaskan buta aksara dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun
3	Pengelolaan	81,17 (Baik)	Pengelolaan sudah merujuk ke Juknis, dan diberikan keluwesan dalam penggunaan atau sasaran dana PRODIRA dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan
4	Kepengawasan	82,26 (Baik)	Kepengawasan melalui tindakan evaluasi dan monitoring berjalan dengan baik sesuai dengan juknis PRODIRA
	Rata-Rata	$339,86/4=82,72$ (Baik)	Secara kualitatif kebijakan PRODIRA berjalan dengan baik berdasarkan regulasi, mencapai target dan tujuan yang sudah ditetapkan, pengelolaan dan kepengawasan dilaksanakan sesuai Juknis.

b. Pengujian Persyaratan Analisis

Untuk memenuhi ketentuan dalam melakukan analisis data penelitian tentang efektivitas kebijakan PRODIRA kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan di Provinsi Gorontalo, maka diperlukan beberapa pengujian terhadap data penelitian, yakni uji statistic yang dipersyaratkan antara lain 1) Uji Normalitas Data, dan 2) Uji Linearitas Data. Untuk lebih jelas, akan diuraikan hasilnya sebagai berikut :

e. Uji Normalitas Data

Pegujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *test correction lilliefor significance*. Uji normalitas analisis ini digunakan dalam menguji kenormalan data yang diperoleh dari data sampel penelitian yang meliputi variabel efektivitas kebijakan PRODIRA (X) kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyulan dalam pembiayaan pendidikan (Y). Persyaratan analisis digunakan sebagai berikut :

H_0 = Populasi berdistribusi normal

H_1 = Populasi tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian adalah H_0 diterima jika $L_{hitung} < L_{tabel}$ artinya populasi terdistribusi normal, dan H_0 ditolak jika skor $L_{hitung} \geq L_{tabel}$ artinya H_1 diterima, berarti populasi tidak terdistribusi normal. Dalam penelitian ini $n > 30$ atau $n = 116$ rang sehingga untuk taraf nyata $\alpha = 0,05$ yang dipilih, maka skor $L_{tabel} = 0,886$. Berdasarkan perhitungan normalitas statistic SPSS versi 20.00 data sebagaimana tertera pada lampiran penelitian diperoleh pengujian normalitas efektivitas kebijakan PRODIRA dengan peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan menggunakan analisis liliefors dari kolom terakhir diperoleh skor $L_{hitung} = 0,164$, skor $L_{tabel} = 0,886$. Artinya skor $L_{hitung} = 0,164 < L_{tabel(0,05)} = 0,886$ dengan dengan dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya data populasi variabel efektivitas kebijakan PRODIRA diterima berarti datanya terdistribusi dengan normal.

f. Ujia Linearitas Data

Pengujian linearitas dilakukan menggunakan rumus persamaan regresi sederhana $\hat{Y} = 64,89 + 0,076X$ dengan pengujian keberartian terdapat pada tabel 5.23.

Tabel 5.23 Analisis Varians Untuk Kebartian Uji Kelinearan Regresi

Sumber Variasi	Dk	JK	KT	F
Total	116	803010	803010	
Regresi (a)	1	759.780,552	759.780,552	2,355
Regresi (b/a)	1	875,082	875,082	
Residu	114	42,354,366	371,529	
Tuna Cocok	$79-2=77$	789,90	10,258	0,033
Kekeliruan	$116-79=37$	11.474	310,108	

Berdasarkan tabel 5.23 di atas kelihatannya bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ ini berarti bahwa persamaan regresi sederhana $\hat{Y} = 64,89 + 0,076X$ adalah signifikan baik dalam taraf kepercayaan 95% apalagi 99%. Karena $\alpha = 0,05$, dengan dk pembilang 77 dan dk penyebut 37, dari daftar distribusi frekuensi di dapat $F_{hitung(77,37)} = 1,95$ (dengan interpolasi). Untuk kelineraan di dapat $F = 0,033$ dan lebih kecil dari 1,95. Jadi hipotesis model regresi linear diterima, sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk mencari model regresi non linear

c. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis guna melakukan pengujian kontribusi variabel efektivitas kebijakan PRODIRA (X) terhadap variabel Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y). Untuk mendapatkan angka besaran kontribusi variabel X terhadap variabel Y maka terlebih dahulu dicari ada tidak hubungan variabel X terhadap variabel Y menggunakan formula Korelasi *Pearson Product Moment* (PPM), sedangkan untuk menentukan kontribusi variabel X terhadap Y digunakan formula korelasi sederhana.

Supaya pengujian hipotesis data lebih akurat, maka dilakukan dengan menggunakan Correlation dan coefficient, dirumuskan sebagai berikut :

$H_0 = r = 0 =$ Tidak ada hubungan variabel X dengan Y

$H_1 : r \neq 0 =$ Ada hubungan variabel X dengan Y

Untuk menetapkan hipotesis berdasarkan kriteria pengujian signifikan dengan cara manual maupun program SPSS versi 20.00 ketentuan skor probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan skor probabilitas Sig. atau ($0,05 \leq \text{Sig}$), maka H_0 di terima dan H_1 di tolak. Dengan demikian tidak signifikan artinya tidak ada hubungan antara variabel X dengan Y dan jika skor probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan skor probabilitas Sig atau ($0,05 \geq \text{Sig}$), maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, dengan demikian signifikan artinya ada hubungan antara variabel X dengan Y.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS versi 20.00 untuk mengetahui hubungan Variabel efektivitas kebijakan PRODIRA (X) dengan variabel peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan(Y) dapat dilihat pada tabel 5.24 dibawah ini

Tabel 5.24 : Correlations Variabel Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X) dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)

		Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan (Y)
Efektivitas Kebijakan PRODIRA (X)	Pearson Correlation	1	.192*
	Sig. (2-tailed)		.039
	N	116	116
Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan	Pearson Correlation	.192*	1
	Sig. (2-tailed)	.039	
	N	116	116

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel 5.24 di atas dapat diketahui *Pearson Correlation* (r_{xy}) = 0,192. Angka ini berarti kedua variabel mempunyai korelasi yang sangat lemah karena dibawah 0,5. Sedangkan tanda “*” menunjukkan bahwa semakin baik efektivitas kebijakan PRODIRA, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan.

Tabel 5.25 Uji Keberartian koefisien korelasi X, Y dengan Uji t

r_{xy}	T	Tarf Signifikansi		Keterangan
		$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$	
0,192	2,094	2,358	3,162	Signifikan

Berdasarkan tabel 5, 25 kelihatan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ini berarti bahwa koefisien korelasi 0,192 antara variabel efektivitas kebijakan PRODIRA dengan variabel peningkatan partisipasi masyarakat kontek budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan tidak signifikan pada taraf kepercayaan 95% dan 99%. Dengan demikian hubungan antara variabel efektivitas kebijakan PRODIRA dengan variabel peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan tidak signifikan

Berdasarkan analisis perhitungan di atas jelas hipotesis yang menyatakan efektivitas kebijakan PRODIRA memiliki kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan tidak diterima dalam taraf kepercayaan 95% bahkan 99%. Ditolaknya hipotesis, maka upaya

mencari besaran kontribusinya variabel efektivitas kebijakan PRODIRA terhadap variabel peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan tidak perlu dilakukan lagi. Artinya efektivitas kebijakan PRODIRA tidak berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan.

B. Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini akan dibahas, antara lain 1) efektivitas kebijakan PRODIRA pada tingkat SMA, SMK dan MA di Provinsi Gorontalo, 2) peningkatan partisipasi masyarakat kontek budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan, dan 3) efektivitas kebijakan PRODIRA kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan. Untuk lebih detailnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas kebijakan PRODIRA pada tingkat SMA, SMK dan MA di Provinsi Gorontalo

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas kebijakan PRODIRA pada tingkat SMA, SMK dan MA di Provinsi Gorontalo. Dari defenisi konseptual dan operasional yang membangun konstuksi pemahaman tentang efektivitas kebijakan PRODIRA dapat dilihat dari keselarasan kebijakan dengan berbagai regulasi yang ada, tujuan pendidikan nasional, guna mencapai target yang diformulasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan komitmen untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dalam implementasi kebijakan PRODIRA tersebut harus memperhatikan komponen biaya yang dibutuhkan, sosialisasi, dan transparansi. Agar tidak terjadi penyimpangan maka dilakukan kepengawasan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan tindak lanjut guna keberlanjutan program maupun pergantiannya. Adapun temuan-temuan menarik yang perlu dilakukan pembahasan lanjutan antara lain.

a. Keselarasan kebijakan PRODIRA pada tingkat SMA, SMK, dan MA di Provinsi Gorontalo.

Keselarasan kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Gorontalo pada jenjang pendidikan SMA, SMK dan MA serta LB dilihat dari berbagai regulasi yang ada di pemerintah pusat, maupun peraturan yang daerah

yang menjadi turunannya, menurut kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa (pengurus Komite Sekolah) berada pada skor 89,19, artinya berada pada kategori Sangat Baik. Penilaian ini memberikan makna kebijakan PRODIRA dilandasi argumentasi dan regulasi yang mengaturnya sudah memadai baik hubungannya dengan perundang-undangan di tingkat nasional, maupun peraturan daerah sebagai turunannya. Kebijakan PRODIRA sebagai bentuk intervensi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memberikan layanan pendidikan gratis pada jenjang yang lebih tinggi dari layanan pendidikan yang diberikan pemerintah pusat, yakni setingkat SMA, SMK dan MA serta LB di pandang sudah relevan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya diturunkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, pasal 11 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi, ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kebijakan turunannya adalah desentralisasi pendidikan ke daerah yang diatur melalui Undang -undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan tanggal 30 September 2014 memberikan kewenangan sekaligus kewajiban kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna kepentingan masyarakatnya, termasuk didalamnya urusan pendidikan yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat 1 pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negarayang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Dasar dan Menengah.

Berbagai produk perundang-undangan diatas saling memperkuat atas hak publik dan kewajiban pemerintah (pusat, maupun daerah) dalam memberikan layanan pendidikan, maka dilakukan pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang membagi urusan wajib dan urusan pilihan. Pendidikan masuk kategori Urusan Wajib (Said, A. R. A. 2015;594), sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.26 dibawah ini.

Tabel 5.26 Pembagian urusan layanan pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota

Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1. Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus	Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2. Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3. Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	–	–
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.
5. Perizinan Pendidikan	Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan asing.	Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota

Sumber :<https://akhmadsudrajat.wordpress.com>

Dalam memenuhi kewajiban memberikan layanan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2), Undang-undang Sisdiknas dan Undang-undang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan pusat membuat kebijakan wajib belajar (Wajar) 9 tahun untuk tingkat SD dan SMP. Pembiayaanya diberikan melalui skim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah dilakukan sejak tahun 2005. Selanjutnya tahun 2012 pemerintah menyalurkan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) bagi Sekolah

Menengah Atas sebagai bentuk kelanjutan peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun yang dilaksanakan sejak tahun 2013. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa, rintisan bantuan operasional sekolah (R-BOS) untuk SMA/SMK sebenarnya sudah mulai tahun 2012 sebesar Rp 120.000 per siswa tiap tahun di tambah untuk Januari-Juni 2013, dikucurkan rintisan BOS SMA/SMK Rp 60.000 per siswa. Mulai Juli 2013 dikucurkan BOS untuk mendukung pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun yang besarnya Rp 1 juta per siswa tiap tahun (Kompas, 9 Oktober 2012)

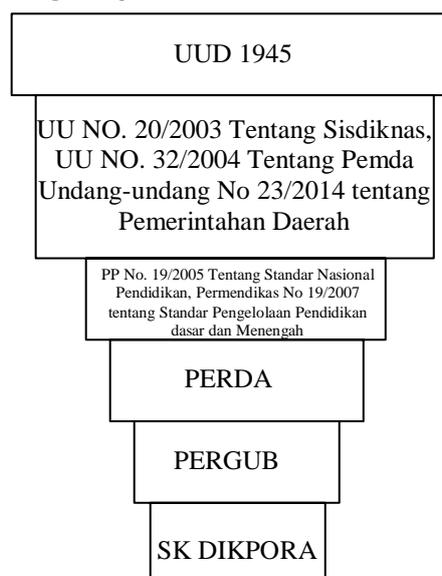
Penyaluran BOS ke seluruh SMA, SMK dan MA efektif berjalan sejak tahun 2016. Seiring pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Yudistira Wahyu Widiasana (Kamis, 15/9/2016) mengatakan bahwa Kemendikbud sedang berusaha mencapai usia pendidikan minimal 12 tahun. Sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah Program Indonesia Pintar (PIP). Sekaligus implementasi dari Nawacita yang digulirkan Presiden Jokowi yakni wajib belajar 12 tahun dan Implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Dari penjelasan di atas, memberikan makna bahwa kebijakan pendidikan gratis oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dikemas dalam PRODIRA merupakan kebijakan yang akseleratif dan proaktif untuk pelaksanaan wajar 12 tahun, yang sudah dimulai sejak tahun 2012. Kebijakan PRODIRA merupakan irisan dari program pendidikan gratis yang dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo No. 09a Tahun 2012 tentang penyelenggaraan program pendidikan gratis (berita daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 No 09a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pergub ini sebagai payung hukum ketika pertama kali rumusan kebijakan pendidikan gratis. Selanjutnya Kebijakan PRODIRA ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat (PRODIRA), dimana dijelaskan dalam ketentuan umum bahwa Layanan Pendidikan Gratis adalah layanan pendidikan yang membebaskan

peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.

Bentuk komitmen Pemprov. Gorontalo dalam melaksanakan program pendidikan gratis bagi masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang SMA atau sederajat. Kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan gratis, merupakan salah satu program unggulan Gubernur Gorontalo diatur melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK dan MA dalam Rangka Program Pendidikan Gratis Provinsi Gorontalo yang selanjutnya dirubah menjadi Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 yang menjadikan pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) menjadi program unggulan. Serta pelaksanaan pengelolaan kebijakan PRODIRA diatur dalam petunjuk teknis PRODIRA oleh dinas terkait yakni melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Nomor 188.4/DIKBUDPORA/ 172.a/DIKMEN/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PRODIRA Tahun Anggaran 2014

Untuk lebih jelasnya keselarasan regulasi yang mengatur kebijakan PRODIRA bisa dilihat urutan dan hierarki payung hukum implementasinya digambarkan 5.6 sebagai dijelaskan dibawah ini :



Gambar 5.6 Keselarasan Payung Hukum PRODIRA (dimodifikasidari Puluhulawa 2013;46)

Berdasarkan payung hukum di atas, menunjukkan bahwa kebijakan PRODIRA merupakan implementasi dari kebutuhan utama yang sangat mendasar dan strategis bagi masyarakat dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia dan menuntaskan program Wajib belajar 12 tahun yang sudah diatur undang-undang, sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah melakukan akselerasi dan peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat lainnya di Provinsi Gorontalo

b. Target capaian kebijakan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo.

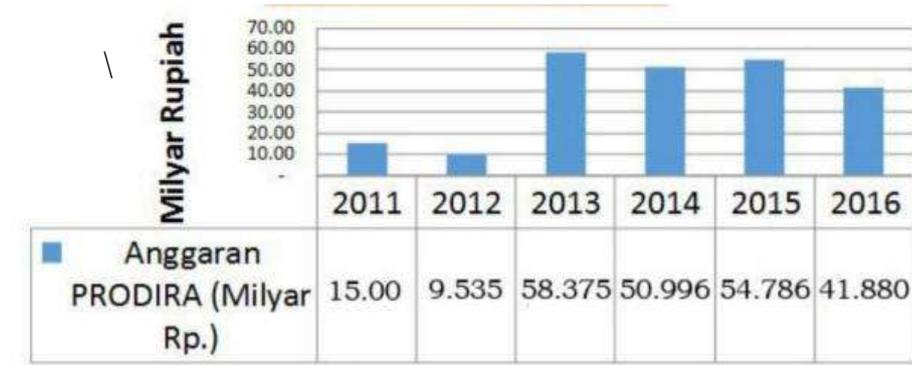
Target capaian kebijakan PRODIRA mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo berada pada skor 78,24 artinya berada pada kategori Baik dalam memberikan layanan pendidikan wajib belajar pada tingkatan 12 tahun. Hal ini didukung dari Tren peningkatan Human Development Index (HDI) yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2017 mengalami peningkatan yang signifikan seperti yang digambarkan pada gambar 5.7.grafik di bawah ini.



Gambar 5. 7 Grafik Trend Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Gorontalo
(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017)

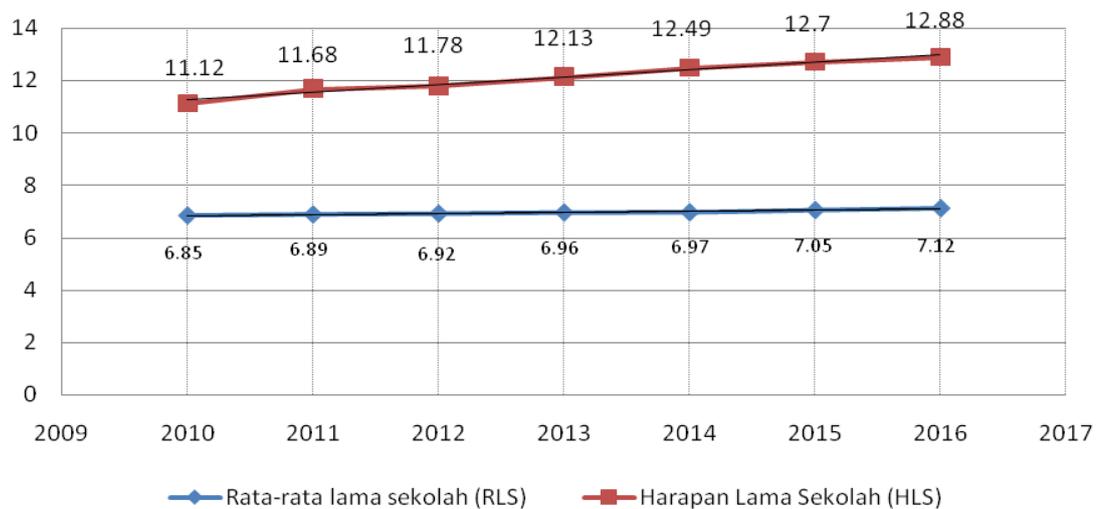
Peningkatan HDI atau IPM Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontribusi kebijakan PRODIRA yang sudah menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai sekarang melalui dinas Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan Olahraga, seperti yang dijelaskan dalam tabel 5.29.

Tabel 5.27 Anggaran Kebijakan PRODIRA dari tahun 2011-2016



Sumber : Dikbudpora Provinsi Gorontalo, 2016

Lebih lanjut hasil laporan Badan Pusat Statistik Gorontalo menyatakan bahwa peningkatan HDI atau IPM Gorontalo didukung dari sisi peningkatan pengetahuan warga masyarakat Gorontalo, terdiri dari dua indikator yaitu Rata-rata Durasi Sekolah (RLS) dan Ekspektasi Sekolah (HLS) meningkat, seperti yang diilustrasikan pada gambar grafik di bawah ini.



Gambar 5.8 Grafik Kecenderungan kenaikan RLS dan HLS

Hasil penelitian ini juga selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan Warni T. Sumar (2017) menjelaskan bahwa penerapan PRODIRA di SMA terpilih di Provinsi Gorontalo mampu meningkatkan kondisi pendidikan, dukungan 75%, indeks pendidikan 63% dukungan, program unggulan provinsi Gorontalo. Dukungan 72%. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dikbudpora Provinsi Gorontalo Weny Liputo (2016;2) menjelaskan kebijakan PRODIRA dalam meningkatkan HDI Gorontalo terlihat dari aspek rata-rata panjang sekolah

yang mengalami kenaikan signifikan yaitu tahun 2011 sekitar 8,2 tahun. Kemudian, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 sudah mencapai rata-rata 12.88 tahun, artinya terus meningkat, dan sudah di atas angka nasional 9,2 tahun. Hal serupa didukung oleh penelitian Meylina Nikensari dan Kuncara (2013,77-102) menyimpulkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM, dimana setiap perubahan terjadi pada belanja pemerintah daerah untuk sektor pendidikan akan diikuti oleh perubahan IPM. Dari uji t, dari hasil perhitungan penelitiannya disimpulkan sebagian variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan berpengaruh IPM ($T \text{ hitung } 3,023 > t \text{ tabel } 1,674116$), sementara belanja pemerintah daerah untuk sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM ($t \text{ hitung } 0,412 < t \text{ tabel } 1,674116$) [38]. Hal ini terbukti BPS Provinsi Gorontalo mengakui kenaikan RLS dan HLS berdampak positif terhadap perkembangan pemerintah dalam pendidikan beberapa tahun lalu. Terlihat juga dari laporan BPS Gorontalo (2016;16) menjelaskan kontribusinya terhadap populasi berusia 15 tahun ke atas bisa membaca dan menulis sudah mencapai 98,44%. Warga berusia 16-18 tahun sebanyak 7 dari 10 orang masih bersekolah. Ini tentu saja dari dukungan dana PRODIRA yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ekosiswoyo, Kardoyo, dan Raharjo (2008;1-6) menjelaskan bahwa manfaat ekonomi dari investasi pendidikan (*rate of return*) seperti kebijakan PRODIRA, lebih tinggi dari pada investasi fisik dengan rasio rata-rata 15,3% dan 9,1%. Jadi investasi Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui kebijakan dana PRODIRA merupakan pilihan tepat untuk melakukan investasi di bidang pendidikan Gorontalo yang sangat menguntungkan generasi ke depan semakin produktif dalam bekerja. Dwi Atmanti dan Hastarini (2005:30-39) menjelaskan bahwa kebijakan investasi melalui PRODIRA oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sejalan dengan asumsi dasar teori Human Capital yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sarana sekolah, meningkatkan kemampuan kerja, produktivitas dan tingkat pendapatan, serta menunda penerimaan pendapatan selama satu tahun di bidang pendidikan.

Kebijakan PRODIRA yang membebaskan biaya operasional siswa sampai tingkat SMA, SMK dan MA LB tentu memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan tingkat SMA, SMK, dan MA, LB bahkan ke universitas. Karena kebijakan pemerintah seperti ini tentu mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya stimulus pemerintah yang menyediakan pembiayaan pendidikan melalui kebijakan PRODIRA adalah investasi makro jangka panjang, manfaat investasi ini hanya dapat dirasakan setelah beberapa dekade (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013; 77-102).

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia sejak tahun 1960 yang menetapkan empat kriteria untuk pengembangan sumber daya manusia, termasuk 1) kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang kejuruan dan teknologi; 2) perluasan pendidikan dasar dan menengah, Tingkat pengembalian) sehubungan dengan biaya yang lebih rendah. 4) keadilan dan keadilan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk pengembangan sumber daya manusia lainnya, baik secara geografis, sosial dan ekonomi (Psacharopoulos, George, 1994:1325-1343)

Dengan demikian, Pemprov Gorontalo sudah berada di jalur yang tepat untuk menempatkan pendidikan sebagai program unggulan jelas bahwa kebijakan PRODIRA di tingkat SMA/SMK/MA mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo. Apalagi jika disusul dengan peningkatan kesadaran masyarakat ikut dalam pembiayaan akselerasi yang bisa diraih akan melebihi bila hanya bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat yang memiliki ekonomi kuat untuk mendukung upaya dan program pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi dan kreativitas mengembangkan kebijakan PRODIRA untuk mencapai target menuju bangsa Indonesia yang sangat kompetitif tahun 2025 (Muhammad Ali 2009;1).

c. **Pengelolaan kebijakan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/ SMK/MA di Provinsi Gorontalo.**

Pengelolaan kebijakan PRODIRA (pendidikan gratis) oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dari pandangan kepala sekolah, guru, bendahara, dan orang tua siswa atau komite sekolah berada pada angka 81,17% atau kategori Baik. Hal ini tentu didukung dengan adanya petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo berdasarkan keputusan Nomor 188.4/DIKBUDPORA/172.a/DIKMEN/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PRODIRA Tahun Anggaran 2014. Pelaksanaan PRODIRA sudah mengacu pada Juknis yang sudah diterbitkan, Juknis itu fleksibel dalam menentukan porsi pembiayaan, sehingga sekolah memiliki kelonggaran (lihat tabel 5.18) untuk melakukan pergeseran penggunaan anggarannya sesuai kebutuhan sekolah dalam batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Untuk lebih memahami konsepsi pelaksanaan kebijakan PRODIRA, dilakukan kegiatan lokakarya, pelatihan maupun sosialisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tanggal 25 Februari 2012 di Gedung Musdalifah Kota Gorontalo melakukan sosialisasi pengelolaan dana PRODIRA. Menurut Wakil Kepala Dikpora Provinsi Gorontalo Sumarwoto menjelaskan tujuan dilaksanakan sosialisasi pengelolaan dana PRODIRA itu, untuk melakukan sejumlah langkah antisipatif sebagai upaya menghindari adanya kesalahan atau bahkan penyimpangan dalam pengelolaan dana Program Pendidikan Gratis (PRODIRA). Langkah-langkah tersebut di antaranya dengan menyosialisasikan petunjuk teknis Program Pendidikan Gratis. Program pendidikan gratis (PRODIRA) ini merupakan program yang mulia. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sukses. Kuncinya para penerima dan pengelola dana program pendidikan gratis ini dapat memegang teguh petunjuk teknis. “Tujuannya agar pelaksanaan program ini berjalan sukses dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari (Info Publik, Senin 27 Februari 2012

Dalam buku JUKNIS PRODIRA sudah dijelaskan organisasi pelaksana, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan pelaporan, pengawasan serta sanksi. Begitu juga format pembukuan untuk membantu pengelolaan kebijakan PRODIRA berjalan dengan baik.

Dari sekian banyak yang terkait dengan pengelolaan Kebijakan PRODIRA untuk dilakukan pembenahannya adalah tim pengelola atau manajemen dari semua tingkatan harus perlu dilakukan pembinaan tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari, karena kebijakan PRODIRA mendapat perhatian publik.

d. Kepengawasan kebijakan pembiayaan PRODIRA pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo

Penelitian menemukan kegiatan kepengawasan kebijakan PRODIRA (pendidikan gratis) sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentu didukung oleh kerja tim manajemen PRODIRA secara berjenjang. Bentuk kepengawasan juga dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas DIKPORA memberikan perhatian yang tinggi terhadap PRODIRA, hal ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan PRODIRA, Selasa 8 Juli 2014. Dalam sambutannya Gubernur Pentingnya PRODIRA dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan 12 tahun serta mendorong angka partisipasi sekolah yang tinggi, karena ini menjadi salah satu dari empat program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur Idris Rahim menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengawasi pelaksanaan PRODIRA karena kebijakan ini menekankan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) karena provinsi Gorontalo tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) seperti Kalimantan dan Papua untuk kita fokus mencetak SDM yang unggul dan bisa bersaing dengan daerah lainnya. (Gorontalo, Post, 8 Juli 2014). Hal ini juga tertuang dalam Juknis PRODIRA bahwa pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan PRODIRA disekolah. Dilakukan oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah (madrasah), kabupaten dan kota serta Provinsi (Dikpora, 2014;27).

Kepengawasan PRODIRA mesti mengintensifkan hal-hal yang dilarang dalam penggunaan dana PRODIRA, diantaranya

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan\
- b. Disimpan di rekening pribadi kepala sekolah atau bendahara
- c. Dipinjamkan ke pihak lain.
- d. Membiayai kegiatan di luar RKAS dan kegiatan lain yang tidak menjadi prioritas sekolah/madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi bandi, studi tour dan sejenisnya
- e. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Provinsi atau pihak lain, kecuali untuk menanggung siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

- f. Digunakan untuk memberikan sumbangan dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan.
- g. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (kecuali untuk investarisir sekolah/madrasah).
- h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- i. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lainnya terkecuali dalam bentuk dana sharing.
- j. Digunakan untuk membiayai pihak lain di luar sekolah/madrasah misalnya tim monev PRODIRA, komite sekolah/madrasah dan lainnya (Diknas DIKPORA Gorontalo, 2017;21)

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

a. Mensikapi Kebijakan PRODIRA

Implementasi sebuah kebijakan di masyarakat atau orang tua siswa, sudah tentu disikapi dengan pemahaman yang berbeda, ada yang pro dan ada yang kontra. Karena menurut Thurstone sikap itu sebagai bentuk derajat efek positif dan efek negatif terhadap suatu objek psikologis (Edwards, 1957 dalam Elisa dan Wrastari, 2013). Tidak terkecuali sikap masyarakat dan orang tua siswa terhadap kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Gorontalo. Sikap masyarakat dan orang tua siswa bisa berbeda-beda. Hal itu merupakan kondisi alamiah yang terjadi terhadap suatu kebijakan yang dihadirkan pemerintah atau pejabat yang memiliki kewenangan. Menurut Saragih, S. (2006:4) sikap masyarakat atau orang tua siswa itu merupakan suatu kecenderungan dari orang per orang untuk menerima atau menolak sesuatu, konsep, atau kumpulan ide oleh pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan.

Sarwono (2002) dalam Hakim, AM. (2014;4) juga mencermati ciri khas dari sikap adalah terhadap objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, dan benda) dan mengandung penilaian setuju-tidak setuju atau suka-tidak suka. Perbedaan terletak pada proses selanjutnya dan penerapan konsep tentang sikap, serta mengenai proses terjadinya sebagian besar pakar berpendapat bahwa sikap adalah sesuatu yang dipelajari (bukan bawaan). Oleh karena itu, sikap dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi, dan diubah. Sikap berbeda dengan sifat karena sifat merupakan bawaan yang sulit untuk diubah.

Terkait dengan kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan orang tua siswa menyikapi kebijakan PRODIRA berada pada angka 73,74% atau kategori baik. Tentu ini memberikan pesan bahwa masyarakat dan orang tua siswa menerima kebijakan dan memiliki implikasi dalam kehidupan masyarakat. Karena sikap orang tua siswa atau masyarakat menerima itu sangat menentukan perilaku mereka dan juga sangat mempengaruhi tanggapannya terhadap turunan masalah-masalah dari kebijakan PRODIRA tersebut.

Sejalan dengan temuan penelitian Arfan Arsyad (2016;1197) menjelaskan bahwa kebijakan PRODIRA perlu dukungan warga dengan meningkatkan sikap positif kepala sekolah, orang tua siswa dalam menerima PRODIRA akan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif untuk rasa aman bagi kepala sekolah dalam menyelenggarakan manajemen PRODIRA di sekolah. Rasa aman, mendorong kepala sekolah menerima dengan baik dana PRODIRA tersebut, rasa aman itu juga didukung dari kejelasan pengelolaan anggaran sehingga tidak berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari bagi pihak-pihak yang mengelolanya.

b. Kesadaran Pembiayaan Pendidikan Menjadi Tanggungjawab Bersama

Diatas sudah di jelaskan bahwa sikap masyarakat dan orang tua siswa terhadap kebijakan PRODIRA berada pada kategori Baik. Semestinya diikuti dengan perilaku berupa kesadaran masyarakat dan orang tua dalam pembiayaan pendidikan sebagai tanggungjawab bersama. Menurut Mas S.R (2013;186) sebagai amanat dari asal 46 UUSPN yang menyebutkan: (a) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, (b) pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Namun realitasnya kesadaran masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan masih belum sesuai dengan harapan yakni sebesar 50,49% yang berarti berada pada kategori Kurang Baik. Fakta ini sejalan dengan pandangan Harianto (2001) yang menjelaskan bahwa terdapat spekulasi jika sikap seseorang terhadap suatu hal dapat diketahui, tindakan yang dapat dilakukannya dapat diduga. Namun, dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang akan tidak sejalan dengan sikapnya. Oleh karena itu, muncul keraguan terhadap konsistensi hubungan antara sikap dan perilaku seseorang (Harihanto, 2001 dalam Hakim AM 2014;4).

Dari pandangan di atas, bisa dimaknai bahwa sikap positif dan merasa terbantu dari kebijakan PRODIRA tidak selamanya liner dengan kesadaran yang tinggi terhadap partisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Misalnya tidak diikuti dengan kemauan dan kesadaran berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan yang sudah digelorkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini terbukti dari riset yang dilakukan ini sikap positif dan baik terhadap kebijakan PRODIRA belum seirama dengan peningkatan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan

Mestinya peran serta masyarakat melalui kesadaran sangat dibutuhkan, tapi sangat tergantung pada kemampuan Negara, pemerintah daerah dan persepsi yang terbangun dalam masyarakat dan orang tua siswa tentang peran Negara dan pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan. Jika kemampuan Negara dan pemerintah daerah dipandang bisa memenuhi seluruh kebutuhan dalam layanan pendidikan akan menentukan seberapa besar partisipasi dan kesadaran masyarakat diperlukan dalam mendanai program-program tersebut. Persepsi tentang peran Negara dan pemerintah daerah sangat menentukan tingkat kesadaran dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. (Aulia, S. 2013:206).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Arfan Arsyad selaku mantan Kepala Dinas DIKPORA Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa sudah diduga akan terjadi penurunan kesadaran berpartisipasi karena masyarakat umumnya memandang semua biaya pendidikan itu sudah terpenuhi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi disetiap sekolah sudah dipajang spanduk larangan melakukan pungutan. Padahal berbeda pemahamannya antara pungutan dan kesadaran berpartisipasi. Tapi bagi masyarakat memberikan sesuatu ke sekolah bisa dikategorikan pungutan. Padahal tidak, jika dengan kesadaran dan tidak ada kaitannya dengan mempengaruhi atau mengarahkan kebijakan sekolah pada hal-hal tertentu itulah yang dikenal dengan kesadaran berpartisipasi. (Konfirmasi, Selasa, 17 Oktober 2017).

Semua fenomena di atas menjadi daya dorong terjadi penurunan kesadaran masyarakat dan orang tua siswa untuk berpartisipasi kalau sudah dibiayai seluruhnya untuk apa lagi biaya dari masyarakat bisa berpotensi menjadi pungutan liar (pungli) oleh aparat sekolah.

c. Tolong Menolong jadi Budaya Masyarakat (*Local Wisdom*)

Tolong menolong dikalangan masyarakat Gorontalo merupakan budaya yang sudah turun-temurun diwariskan dan menjadi tradisi masyarakat (*local wisdom*).

Budaya itu dikenal dengan istilah budaya huyula, atau budaya saling membantu, tolong menolong (Annas dan Wahyuni, 2015:1). Budaya Huyula merupakan bagian dari tiga belas jenis tatanan budaya masyarakat Gorontalo, yakni *huulunga, huuyula, hiimbunga, tiaya, dembulo, duuluhu, deepita, tilmoa, heelya, baayawa, bubaya, hiyo dan antu* (Lamusu, 2011:1). Budaya tolong-menolong menjadi kepribadian masyarakat Gorontalo yang dibina secara turun temurun, mulai dari perjuangan menentang kolonialisme, dan mempertahankan kemerdekaan. (Yunus, R. 2016:70).

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penurunan nilai-nilai tolong-menolong yang dilakukan masyarakat dan orang tua siswa terutama dalam pembiayaan pendidikan yakni mencapai angka 54,38% atau berada pada kategori Kurang Baik. Kecendrungan penurunan ini tentu tidak sejalan dengan sistem tolong menolong yang sudah terpatrit selama ini, baik antara anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial melalui ikatan tetangga dan kerabat dalam masyarakat Gorontalo. Peneliti menyaksikan sendiri tingginya rasa tolong menolong warga Gorontalo saat memberikan bantuan Gempa bagi masyarakat Sumatera Barat 30 September 2009, seminggu setelah kejadian, peneliti menyampaikan ke Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo sebagai ungkapan rasa empati kepada korban gempa di Ranah Minang. Maka perlu di rancang kegiatan malam amal. Dalam pikiran kami waktu itu tidak akan mampu terkumpul dana sebanyak Rp 125 juta. Sebuah prestasi dan semangat gotong royong yang begitu dahsyat dalam bentuk spontan dari masyarakat.

Ironinya saat ini terjadi penurunan semangat gotong royong dan perilaku saling membantu di tengah masyarakat Gorontalo, tetapi juga melanda semua daerah di Indonesia. Hal ini menurut Arif (2011:1) disebabkan dinamika zaman globalisasi sudah merubah cara pandang masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit mengalami perubahan sebagai akibat dari modernisasi. Jadi, tidaklah mengherankan apabila di berbagai kota-kota besar nilai-nilai pengabdian, kesetiakawanan dan tolong-menolong mengalami penurunan sehingga yang nampak adalah perwujudan kepentingan diri sendiri dan rasa individualis yang menonjol. (ARIF, A. 2010:1).

Begitu juga penyebab dari praktek pendidikan masyarakat dan orang tua yang semakin tidak peduli (*no care*) dengan pembiayaan pendidikan karena sejak beberapa tahun belakangan ini gencar sekali kampanye pendidikan gratis. Masyarakat dan orang tua merasa nyaman dengan pendidikan gratis yang dibuat pemerintah,

khususnya di sekolah negeri. Apalagi selain itu adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang membuat siswa terfasilitasi untuk sekolah tanpa terkendala biaya (Harian Republika, Sabtu 21 Januari 2017). Untuk provinsi Gorontalo kekurangan dana pendidikan dari pemerintah pusat dibantu lagi melalui pembiayaan kebijakan PRODIRA. Sehingga LP2G Provinsi Gorontalo menilai begitu nikmat Dana PRODIRA daerah (LP2G, 16 Juli 2012).

Efeknya pada masyarakat dan orang tua siswa dengan adanya pendidikan gratis, kebijakan PRODIRA, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada prinsipnya sangat menguntungkan siswa dan orang tua siswa. Namun, bagi guru dan kepala sekolah, pendidikan gratis ini membuat guru-guru yang potensial sulit berinovasi untuk meningkatkan kualitas muridnya. Karena ketika mereka ingin menyelenggarakan ekstrakurikuler olahraga, kesenian, matematika, dan IPA tentu memerlukan pembiayaan tambahan. Sementara para guru tidak boleh memungut dana apa pun dari siswa.

Dengan kebijakan pendidikan gratis menyebabkan sekolah sulit melakukan pengembangan. Baik dalam bentuk memperbaiki atau membangun fasilitas penunjang sekolah untuk meningkatkan pelayanan karena dananya tidak tersedia. Jika guru dan kepala sekolah meminta bantuan dana dari orang tua siswa, atau masyarakat biasanya akan ada pihak yang melaporkan guru dan kepala sekolah tersebut kepada atasannya. Akibatnya, guru atau kepala sekolah mendapatkan sanksi. Dari pada mendapatkan sanksi, maka guru yang potensial dan kepala sekolah lebih memilih pasif dalam pengembangan kualitas sekolah. Efeknya, kualitas pendidikan dan siswa, khususnya di sekolah negeri, mulai menurun.

Jika dikaji lebih mendalam, efek dari pendidikan gratis itu, telah mengurangi penerapan pendidikan karakter, yaitu sikap gotong royong dan tolong menolong di sekolah, baik oleh siswa maupun orang tua siswa dan masyarakat. Padahal banyak orang tua siswa yang ingin membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tentu diberikan ruang dan kesempatan oleh pemerintah bahkan menganjurkan orang tua berpartisipasi membantu pendanaan pendidikan. Namun, selama ini budaya gotong royong dan tolong-menolong hampir punah (Harian Republika, Sabtu 21 Januari 2017). Hal ini juga terjadi akibat kebiasaan masyarakat Indonesia lebih suka memposisikan diri sebagai yang ditolong bukan yang menolong

sehingga tidak terjadi budaya tolong-menolong di sekolah. Mentalitas seperti ini sebenarnya sangat berbahaya untuk Indonesia pada masa depan.

Dampak menurunnya kualitas ini di sekolah-sekolah negeri yang mengandalkan biaya dari pemerintah pusat dan daerah. Turunannya banyak orang tua siswa yang mampu secara ekonomi lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta walaupun membayar. Hal ini sebenarnya menjadi masalah besar bagi sekolah negeri ini. Jika sekolah negeri cenderung tidak bermutu, pemerataan pendidikan berkualitas sulit diwujudkan karena sekolah negeri sebagai ujung tombak pendidikan tidak bisa memberikan pendidikan berkualitas.

Disisi lainnya masalah penerapan pendidikan karakter siswa dan orang tua siswa tidak terbangun dengan baik. Hal ini terjadi, karena pendidikan gratis melarang sekolah meminta bantuan dana dari orang tua siswa. Kalau sekolah melakukannya, terkena sanksi. Ada sebuah kejadian, seorang kepala sekolah diberi hukuman atasannya dengan menjadi guru kembali. Atasannya itu mendapat laporan dari orang tua siswa bahwa sang kepala sekolah meminta sumbangan untuk membangun mushala sekolah. Kejadian serupa dalam bentuk yang lain banyak terjadi semenjak diterapkannya pendidikan gratis atau kebijakan PRODIRA di Provinsi Gorontalo.

Untuk menggerakkan semangat gotong royong, tolong-menolong dalam pembiayaan pendidikan. Kita mengapresiasi kebijakan Kemendikbud memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Kemendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa Sumbangan Pendidikan, Bantuan Pendidikan, dan bukan Pungutan. Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan.

Selama ini bantuan dari dan oleh masyarakat atau orang tua siswa dipandang sebagai pungutan. Padahal jelas berbeda antara bantuan dan pungutan. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah sudah dijelaskan bedanya, bantuan pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik/orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat/lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Kemudian Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan (Desliana Maulipaksi, 2017)

Dengan penjelasan di atas sekolah, orang tua siswa dan masyarakat bisa membedakan dengan bijak mana sumbangan dalam berpartisipasi, dan pungutan yang tidak dibolehkan. Pemerintah tentu mengizinkan dan menganjurkan orang tua/masyarakat berpartisipasi membantu pendanaan pendidikan. Namun, selama ini budaya gotong royong, tolong-menolong hampir punah di masyarakat akibat kampanye pendidikan gratis yang berlebihan melampaui makna dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi standar pembiayaan maksimum untuk mutu terbaik sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Marhawati (2016) merekomendasikan kiranya nilai-nilai budaya Huyula yang sudah menjadi nilai kolektif masyarakat Gorontalo menjadi dasar bagi para kepala sekolah untuk memaksimalkan dukungan, partisipasi, meningkatkan jiwa tolong menolong sesama warga dalam memenuhi pembiayaan pendidikan menuju pendidikan yang berkualitas baik. Ada delapan jenis kegiatan Huyula yang bisa dilakukan diantaranya: *Ambu* (mengumpul); *Ti'ayo* (memanggil tiba-tiba); *Timo'a* (mengumpul dalam bentuk materi); *Hileiya* (memindahkan); *Dembulo* (menutup); *Duluhu* (jalan dipinggiran); *Hulunga* (ramai-ramai); dan *Himbunga* (memulai sesuatu yang baru). Kegiatan-kegiatan huyula ini menjadi pemantik munculnya kesadaran kolektif, dan meningkatnya partisipasi warga dalam membantu sekolah membiayai kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan inovasi, kreativitas dan pembaharuan lainnya guna meningkatkan prestasi dan reputasi sekolah. Kepala sekolah memiliki peran strategis menggenjot budaya tolong menolong terpatri dengan baik dihati warga sekolah, orang tua siswa dan masyarakat untuk mendapatkan dukungan partisipasi dalam pembiayaan pendidikan.

d. Keaktifan Partisipasi

Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa keaktifan masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan sebesar 51,45% berarti berada pada kategori Kurang Baik. Kondisi ini menjadi keprihatinan semua pihak, rendahnya keaktifan partisipasi yang ditampilkan masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan menjadi lonceng mundurnya dunia pendidikan kita. Untuk itu, harus dicarikan model yang cocok dengan kondisi dan nilai-nilai yang ada dipegang teguh masyarakat yang di sekitar sekolah guna menggenjot partisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Ada beberapa contoh sekolah-sekolah yang sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pembelajaran maupun pembiayaan pendidikan di sekolah

Misalnya, Gagasan pembiayaan pendidikan seikhlasnya yang digagas Ridwan Hasan Saputra (2017; 1). Konsepsi pembiayaan pendidikan seikhlasnya dalam rangka meningkatkan partisipasi dan gotong royong dari masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Gagasan ini sebagai sebuah solusi alternatif dalam menghadapi polemik pembiayaan pendidikan di Indonesia. Selama ini setiap sumbangan atau partisipasi oleh masyarakat dan orang tua siswa seringkali dipandang sebagai pungutan liar (pungli). Untuk menghindari dari stigma pungli itu, maka gagasan pembiayaan pendidikan seikhlasnya menjadi sebuah tawaran terbaik baik masyarakat dan orang tua siswa. Dimana sekolah mempersilakan semua peserta didik memberikan sumbangan pendidikan kepada sekolah/lembaga sesuai kemampuan dan keikhlasannya. Bagi yang tidak mampu, sesuai aturan berlaku, jika tidak memberikan sumbangan pun tidak masalah (gratis). Dengan sistem ini, semua masih tetap bisa bersekolah dan orang tua yang ingin membantu sekolah masih tetap terfasilitasi. Sumbangan orang tua bisa digunakan membantu ekstrakurikuler dan pengembangan fasilitas penunjang sekolah. Bagi sekolah yang mempunyai dana sumbangan berlebih, bisa membantu sekolah lain yang masih kekurangan karena minimnya sumbangan dari orang tua. Pengelolaan dana ini bisa diatur Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan kota/kabupaten untuk level yang lebih tinggi. Anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, peluang korupsi dan penyelewengan lainnya bisa dihindari. Pendidikan seikhlasnya menumbuhkan kesadaran masyarakat pendidikan tidak hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga kebutuhan masyarakat. Kesadaran ini bisa

menumbuhkan budaya gotong royong dan tolong-menolong yang bisa mendatangkan keberkahan dalam bentuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Keberkahan ini yang sudah mulai dilupakan guru, orang tua siswa, bahkan para pengambil kebijakan dalam pendidikan. Keberkahan ini bisa menghindarkan peserta didik dari kenakalan remaja saat ini, seperti tawuran ataupun narkoba. Bahkan, keberkahan ini bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas dalam berbagai bidang.

Disamping itu, kita bisa mengambil contoh terbaik (*best practice*) yang dilakukan SMA Negeri Bali Mandara di Kecamatan Kubutambahan, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali yang siswanya 100% berasal dari keluarga miskin mampu menggali dukungan orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya dalam memenuhi biaya pendidikan. SMA Negeri Bali Mandara yang didirikan Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Sampoerna Academy merupakan salah satu dari 21 sekolah di Indonesia yang memperoleh apresiasi dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Karena telah melaksanakan program keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran, menggenjot partisipasi orang tua, para pejabat, pengusaha, atau tokoh masyarakat untuk memberikan motivasi pada peserta didik sekaligus menghimpun dana bagi kebutuhan sekolah. Melalui kelas inspirasi, peserta didik dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan untuk menjadi bekal di masa mendatang. Sekaligus sekolah dapat donasi dari tokoh-tokoh yang diundang, karena sudah melihat dan merasakan kedekatannya dengan sekolah tersebut. Sehingga setiap tokoh yang dijadikan model inspirasi, juga menjadi donator membantu sekolah. Tentu pola ini perlu dilakukan oleh banyak sekolah, agar sekolah tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun daerah semata dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Dari *best practice* ini kita yakin masyarakat dan orang tua siswa bisa digenjot partisipasinya dalam pembiayaan pendidikan.

3. Efektivitas Kebijakan PRODIRA Kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan.

Setelah dilakukan uji hipotesis didapatkan data bahwa hubungan X terhadap Y tidak signifikan, artinya efektivitas kebijakan PRODIRA tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan.

Semakin banyak anggaran PRODIRA atau sejenisnya dari BOS yang disiapkan pemerintah membuat stigma pembiayaan pendidikan sudah ditanggung semuanya oleh pemerintah semakin tinggi. Sehingga memunculkan pemahaman dan pandangan dan berdampak pada ketidakpedulian masyarakat dan orang tua siswa terhadap pembiayaan pendidikan. Untuk aspek lainnya memang efektivitas kebijakan PRODIRA sudah memberikan kontribusi, seperti dijelaskan Arfan Arsyad (2016;1194) bahwa efektivitas PRODIRA memberikan pengaruh langsung positif terhadap kinerja sekolah, karena diketahui PRODIRA berorientasi pada penyediaan sumber daya pendidikan seperti hibah dana operasional, pembelajaran, pembinaan ketenagaan, pembinaan kesiswaan, hibah RKB, dan manajemen. Kontribusi PRODIRA itu, jika didukung dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tentu hasilnya akan lebih akseleratif memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Karena potensi pembiayaan pendidikan dari masyarakat sangat besar. Disamping itu anggaran yang disediakan pemerintah, dan pemerintah daerah sangat terbatas, masih jauh dari kecukupan untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan perhitungan kebutuhan pendidikan menengah, biaya operasional non personalia per siswa per tahun mencapai Rp3 juta (Billy Antoro, 2015). Namun, kini, pemerintah hanya bisa menyediakan Rp1,4 juta per siswa per tahun yang disediakan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seperti yang dijelaskan dalam tabel 5.28 di bawah ini

Tabel 5.28 Tren Kenaikan Dana BOS dari tahun 2012-2017

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Rp. 800.000
SMP/MTS	Rp. 710.000	Rp. 710.000	Rp. 710.000	Rp.1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp.1.000.000
SMA/MA/ SMK	Rp. 770.000	Rp. 770.000	Rp. 1.000.000	Rp.1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp.1.400.000

Sumber : Analisis Peneliti dari berbagai sumber , 2017

Khusus pembiayaan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat lainnya. Dana BOS yang diberikan tidak tersedia untuk semua sekolah. Karena masih terkendala dengan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun sampai tahun 2015. Jadi sebelumnya pembiayaan operasional sekolah dari BOS hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu sebagai bentuk Rintisan-BOS. Di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2012 sudah dilaksanakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sederajat lainnya dengan label PRODIRA yang membantu biaya non operasional sekolah, Anggaran yang digelontarkan bersumber dari APBD seperti pada tabel 5.31.

Tabel 5.29 Jumlah dana PRODIRA yang di terima beberapa SMA, SMK dan MA di Provinsi Gorontalo

No	Sekolah	Tahun 2012	Murid	Tahun 2013	Murid	Tahun 2014	Murid	Tahun 2015	Murid
1	SMA Negeri 1 Gorontalo	Tidak Ada	0	Rp. 241.750.000,-	879	Rp. 344.400.000,-	971	Rp. 300.650.000,-	1134
2	SMA Negeri 2 Kota Gorontalo	Tidak Ada	0	Rp. 212.750.000,-	861	Rp. 259.900.000,-	863	Tidak Ada	0
3	SMA Negeri 3 Gorontalo	Tidak Ada	0	Rp. 243.000.000,-	876	Rp. 258.000.000,-	985	Rp. 143.386.842,-	1057
4	SMA Negeri 4 Kota Gorontalo	Tidak Ada	0	Rp. 303.500.000,-	607	Rp. 352.500.000,-	569	Rp. 152.670.000,-	285
5	SMK Negeri 1 Kota Gorontalo	Tidak Ada	0	Rp.687.300.000,-	2291	Rp.1.681.750.000,-	2,140	Rp. 715.920.000,-	2,383
6	SMK Negeri 2 Kota Gorontalo	Tidak Ada	0	Rp. 212.400.000,-	708	Rp. 351.162.000,-		Rp. 272.070.000,-	
7	SMK Negeri 3 Kota Gorontalo	Tidak Ada	0	Rp. 393.000.000,-	1310	Rp. 446.000.000,-	1,224	Rp. 350.000.000,-	1,268
8	SMK Gotong Royong Gorontalo	Rp. 709.700.000,-		Rp. 565.400.000,-	636	Rp. 443.880.000,-		Rp. 183.900.000,-	
9	MA Muhammadiyah Kota Gorontalo	Rp. 129.500.000,-	157	Rp. 105.500.000,-	145	Rp. 104.700.000,-	184	Rp. 87.000.000,-	180
10	SMK Tridharma UNG	Tidak Ada	0	Rp. 16.500.000,-	66	Rp. 36.300.000,-		Tidak Ada	0
11	SMK Kesehatan Bakti Nusantara	Tidak Ada	0	Rp. 90.600.000,-	302	Rp. 225.719.850,-		Rp. 129.285.000,-	
12	SMK Tirtayasa Gorontalo	Tidak Ada	0	Rp. 46.800.000,-	156	Rp. 129.960.000,-	163	Rp. 99.150.000,-	201
13	SMA Neg 1 Bonepantai	Rp. 434.500.000,-	396	Rp. 341.750.000,-	453	Rp. 289.500.000,-	506	Rp. 140.840.000,-	520
14	SMA Negeri 1 Tapa	Tidak Ada	0	Rp. 125.250.000,-	504	Tidak Ada	0	Rp. 152.685.000,-	364
15	SMK Neg 1 Bonepantai	Tidak Ada	0	Rp. 56.100.000,-	187	Rp. 130.320.000,-	181	Rp. 87.000.000,-	146
16	SMK Negeri Model Gorontalo	Tidak Ada	354	Rp. 120.300.000,-	394	Rp. 136.080.000,-	385	Rp. 65.100.000,-	354
17	SMK Negeri 1 Bulango Utara	Rp. 474.300.000,-	374	Rp. 376.800.000,-	417	Rp. 300.600.000,-	421	Rp. 147.150.000,-	397
18	SMA Negeri 1 Kabila	Rp. 850.000.000,-	866	Rp. 669.000.000,-	852	Rp. 569.100.000,-	955	Tidak Ada	935
19	SMK Negeri 1 Suwawa	Rp. 818.400.000,-	682	Rp. 877.450.000,-	797	Rp. 760.710.000,-	869	Tidak Ada	898
20	SMA Negeri 1 Limboto	Tidak Ada	0	Rp. 576.474.577,-	789	Rp. 495.900.000,-	872	Rp. 213.940.000,-	874
21	SMA Negeri 1 Telaga	Tidak Ada	0	Rp. 425.000.000,-	760	Rp. 492.000.000,-	873	Rp. 216.115.000,-	941
22	SMA Negeri 1 Telaga Biru	Rp. 399.250.000,-	378	Rp. 312.500.000,-	452	Rp. 266.700.000,-		Rp. 127.270.000,-	
23	SMA Negeri 1 Tibawa	Rp. 247.000.000,-	247	Rp. 259.200.000,-	324	Rp. 604.000.000,-	302	Rp. 362.400.000,-	302
24	SMA Negeri 1 Tilango	Rp. 40.000.000,-	40	Rp. 35.000.000,-	50	Rp. 77.100.000,-	52	Rp. 74.295.000,-	106
24	SMA Negeri 1 Dungaliyo	Rp. 692.750.000,-		Rp. 551.750.000,-		Rp. 466.800.000,-		Rp. 179.555.000,-	

20	SMK Negeri 1 Batudaa	Rp. 319.800.000,-	706	Rp. 660.300.000,-	790	Rp. 577.000.000,-	765	Rp. 265.150.000,-	855
21	SMK Almamater Telaga	Rp. 205.800.000,-	202	Rp. 174.600.000,-	172	Rp. 170.440.000,-	280	Rp. 118.184.650,-	270
22	SMK Gotong Royong Gorontalo	Rp. 709.700.000,-		Rp. 565.400.000,-	636	Rp. 443.880.000,-		Rp. 183.900.000,-	
23	SMA Negeri 1 Paguyaman	Tidak Ada	530	Rp. 382.000.000,-	514	Rp. 329.400.000,-	563	Rp. 157.170.000,-	598
24	SMAN Negeri 1 Tilamuta	Rp. 703.000.000,-	703	Rp. 802.000.000,-	802	Rp. 555.000.000,-	925	Rp. 220.000.000,-	907
25	SMK Negeri 1 Boalemo	Rp. 867.600.000,-	723	Rp. 658.200.000,-	658	Rp. 455.840.000,-	648	Rp. 193.300.000,-	651
26	MA Negeri 1 Paguyaman	Tidak Ada	0	Rp. 28.500.000,-	190	Tidak Ada	0	Rp. 25.800.000,-	51
27	SMA Negeri 1 Marisa	Rp. 645.000.000,-	630	Rp. 531.250.000,-	660	Rp. 479.000.000,-	760	Rp. 212.330.000,-	905
28	SMA Negeri 1 Buntulia	Rp. 302.500.000,-	310	Rp. 241.250.000,-	315	Rp. 177.000.000,-	336	Rp. 75.900.000,-	330
29	MAN Negeri 1 Pohuwato	Rp. 120.600.000,-	185	Rp. 93.150.000,-	207	Rp. 83.700.000,-	239	Rp. 99.135.000,-	250
30	SMK Negeri 1 Marisa	Rp. 390.000.000,-	780	Rp. 174.000.000,-	862	Rp. 189.600.000,-	650	Rp. 201.900.000,-	593
31	SMA Negeri 1 Gorontalo Utara	Rp. 826.500.000,-	342	Rp. 432.500.000,-	281	Rp. 534.600.000,-	324	Rp. 103.980.000,-	345
32	SMA Negeri 5 Gorontalo Utara	Rp. 573.000.000,-	615	Rp. 295.500.000,-	591	Rp. 350.400.000,-	620	Rp. 152.025.000,-	619
33	SMA Negeri 6 Gorontalo Utara	Rp. 265.000.000,-	265	Rp. 221.000.000,-	277	Tidak Ada	293	Tidak Ada	303
34	SMA Negeri 7 Gorontalo Utara	Rp. 18.000.000,-	38	Rp. 21.000.000,-	61	Rp. 31.600.000,-	99	Rp. 59.805.000,-	162

Dari distribusi dana BOS dan Dana PRODIRA untuk siswa di SMA, SMK dan MA di pandang belum memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikand di sekolah menjadi sekolah berkualitas baik. Karena jika dibandingkan dengan negara Finlandia, menurut Suwarna, Budi (2017) Beda jauh sekali konsep pendidikan gratis yang dicananangkan di Indonesia. Pemerintah Finlandia melaksanakan pendidikan gratis dengan pembiayaannya maksimal, dimana pemerintah menyediakan anggaran 5.200 uero atau sekitar Rp. 70 juta per siswa per tahun Artinya setiap tahun ada 52.000 murid, anggaran yang disediakan pemerintah mencapai Rp. 3,64 triliun per tahun(dalam Kompas, Senin 19 November 2007). Di Indonesia bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika digabungkan dalam waktu bersamaan diberikan, masih jauh dari apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Jadi pemerintah memberikan ruang dan kesempatan bagi sekolah menghimpun dan menerima sumbangan atau bantuan dari masyarakat, sangat diharapkan dan perlu diorganisir dengan sehingga tidak masuk kategori pungutan liar (pungli) yang bisa berimplikasi hukum bagi pengelola sekolah.

Penjelasan diatas memperkuat analisis bahwa mengandalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat maupun hibah dari pemerintah daerah, seperti PRODIRA menjadikan layanan pendidikan menengah tidak akan maksimal. Akhirnya menghasilkan kualitas yang tidak baik, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi masih ada pejabat di berbagai daerah tidak konsisten dan komitmen mengalokasikan APBD nya sebesar 20%. Seperti di jelaskan Mendikbud Muhajir Effendy bahwa pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih ada yang belum konsisten dalam mengalokasi 20 % anggaran pendidikan. Karena 20% anggaran pendidikan dari APBD masih menyertakan dana dari pusat berupa DAK maupun DAU. Bagi yang sudah komitmen perlu diberikan anugerah (*award*) berupa Kawastara Pawitra.

Selain itu Mendikbud memandang kepala sekolah bisa menggali dana masyarakat. Karena kepala sekolah tidak sekadar guru, tapi juga sebagai manajer. Mendikbud berjanji tidak akan menghentikan dana BOS jika ada sekolah yang mampu menggali dana dari masyarakat. Menurutnya sekolah tidak mungkin maju kalau hanya mengandalkan BOS. Jadi harus ada upaya penggalan dana dari masyarakat salah satunya alumni, orang tua siswa dan masyarakat yang memiliki empati dan kepedulian kepada sekolah (krjogya.com, Minggu 16 Oktober 2016)

Jika diperhatikan sekolah yang dibiayai masyarakat dengan tarif yang memadai justru lebih berkembang dan maju serta memiliki daya saing tinggi lulusannya. Ternyata menurut Supoyo (2015;7-9) Sekolah Dasar Ta'mirul Islam Surakartatingkat partisipasi orang tua dan masyarakat sekitarnya sangat tinggi. Hal ini disebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Akuntabilitas keuangan pihak sekolah diwujudkan melalui transparansi keuangan yang diterima sekolah mampu mendorong peningkatan partisipasi orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan. Dikaitkan dengan budaya *huyula* (gotong royong), hal ini seirama bahwa masyarakat akan berbondong-bondong berpartisipasi jika apa yang diberikan dikelola dengan baik, penuh keterbukaan dan disampaikan secara periodik atau berkela. Sehingga masyarakat dan orang tua siswa yang memberikan sumbangan merasa puas atas apa yang diberikan. Mereka merasakan manfaat dan perubahan yang terjadi dari bantuan atau sumbangan yang diberikan ke sekolah

Nilai-nilai keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan sekolah ini juga sejalan dengan pandangan Radu (2011) yang dikutip dari penelitiannya yang berjudul "*Parental involvement in schools: A study of resources, mobilization, and inherent inequality*" menyimpulkan bahwa: 1) ada dua faktor yang secara jelas

mempengaruhi keterlibatan orang tua siswa secara aktif dalam pendidikan di sekolah. Faktor tersebut adalah perasaan mampu dan upaya penggalangan yang dilakukan oleh sekolah; 2) Mobilisasi yang dilakukan sekolah dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi orang tua siswa dalam pendidikan. Dengan adanya upaya penggalangan dana baik melalui keikhlasan, mengundang sebagai tokoh, memberikan penghargaan (award) juga berupa akuntabilitas akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah.

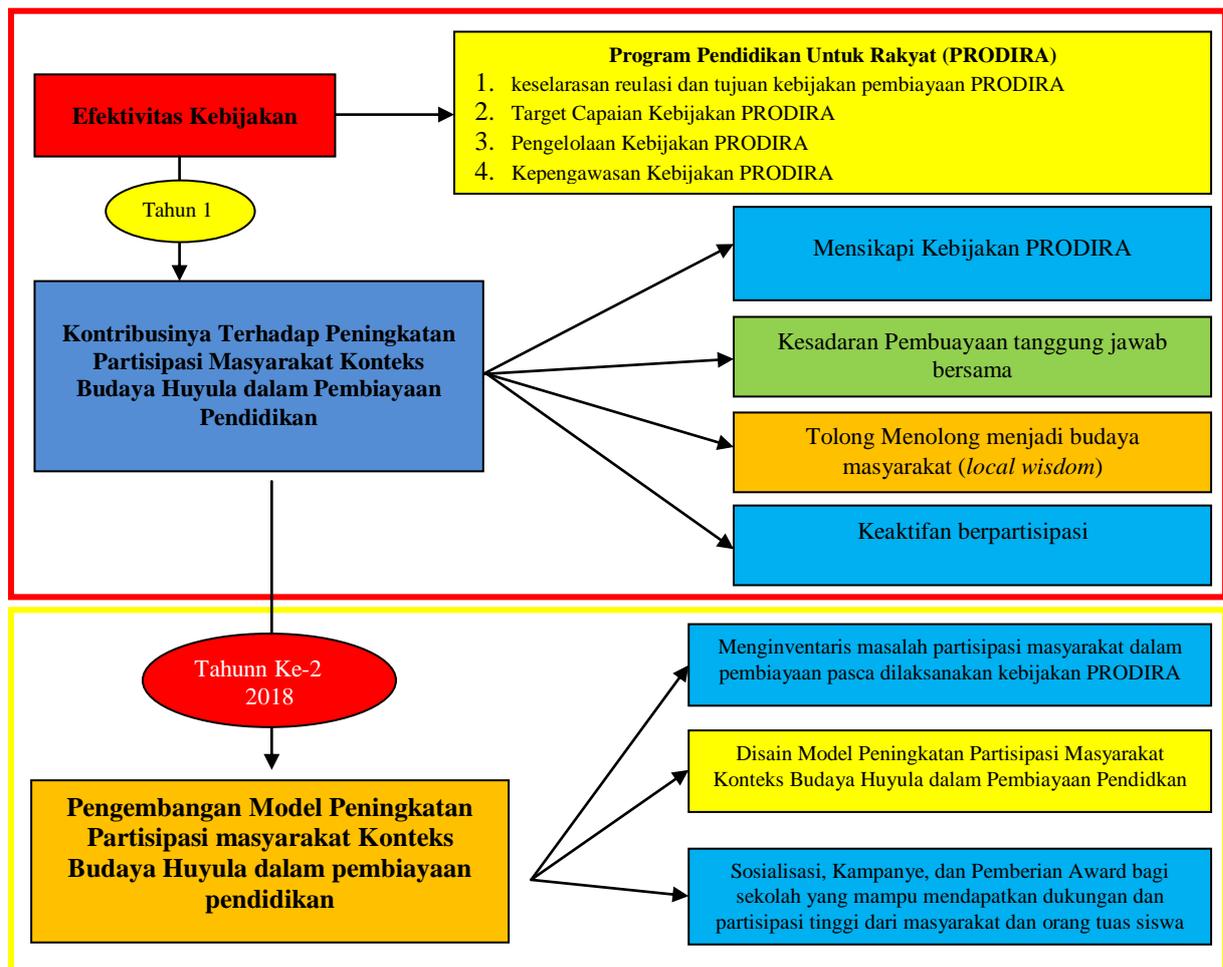
Temuan lainnya yang menarik dari penelitian ini adalah terjadinya degradasi partisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini terjadi seiring dengan kuatnya sosialisasi tidak boleh ada pungutan (Berita Antar, Selasa, 8 Juli 2014) yang menyatakan pihak sekolah diingatkan untuk tidak menarik pungutan sekolah untuk ekstrakurikuler atau apapun, tidak boleh lagi, pembiayaan sekolah harus sudah menggunakan dana PRODIRA. Termasuk pajangan spanduk STOP PUNGLI, LAPORKAN PUNGLI, TIM SAPU BERSIH (SABER) PUNGLI dan lainnya sangat menghantui komponen sekolah. Dari pada bermasalah hukum biar saja apa yang ada dalam anggaran yang ada program dijalankan. Sehingga kurang muncul kreativitas, inovasi dan prestasi dari warga sekolah.

Jika kita bandingkan sekolah negeri dan swasta yang sumber pembiayaan dari orang tua siswa dan masyarakat seperti Sekolah Dasar Ta'mirul Islam Surakarta, Al-Azhar, Al-Izhar, Al-Ishlah di berbagai daerah, Sekolah dalam naungan Bina Nusantara (BINUS) dan lainnya bisa lebih unggul dari sekolah negeri yang menerima biaya operasional sekolah (BOS), dan dana hibah dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini selaras dengan report penelitian Aulich (2010) berjudul "*Governance Through Community Partnerships: A Model for Public Funding of Private Schools in Australia*". Tingginya dukungan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan bisa melampaui tujuan awal dari pemberian subsidi dan dana hibah oleh pemerintah. Keberhasilan sekolah swasta didukung juga oleh kemitraan dengan berbagai pihak menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang lebih tepat didukung oleh akuntabilitas sekolah berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan publik kepadanya.

Untuk itu, hasil penelitian ini menjadi informasi penting melakukan disain suatu model peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Sintesis peneliti dengan keberhasilan PRODIRA saat ini bisa melampaui angka partisipasi sekolah (APS) secara nasional, tentu dengan dukungan pembiayaan pendidikan dari masyarakat dan orang tua siswa gerakan dan kemampuan sekolah untuk meningkatkan mutu, prestasi dan reputasinya akan semakin mudah dicapai.

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahapan penelitian berikutnya, khususnya tahun kedua adalah melakukan disain pengembangan model peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan di Provinsi Gorontalo, sebagaimana disajikan pada gambar 6.1 dibawah ini



Gambar 61. Tahapan Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2018

Pada tahun kedua, penelitian dan pengembangan model peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan akan dilaksanakan dengan berbagai tahapan, sebagai berikut

1. Menginventarisir masalah partisipasi masyarakat konteks budaya huyula di SMA SMK dan MA se Provinsi Gorontalo

Hasil penelitian tahun pertama 2017 menunjukkan fakta bahwa partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan berada pada angka 57,59% artinya berada pada kategori kurang baik. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan semua pihak. Agar tanggungjawab pendidikan bisa dirasakan oleh masyarakat dan orang tua siswa maka perlu digenjot peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan. Persoalan yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat perlu didalami kembali melalui penelitian lanjutan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis guna memahami apa yang sesungguhnya ada dalam pikiran masyarakat. Dari survey yang dilakukan tahun 2017 sudah didapatkan fakta awal yang memperkuat dugaan bahwa sejak dikampanyekannya pendidikan gratis, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sejenis hibah lainnya yang membebaskan siswa serta orang tua siswa dalam membiayai operasional sekolah telah terbangun konstruksi berpikir masyarakat semua pembiayaan pendidikan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Apalagi diperkuat dengan spanduk-spanduk larangan pungutan liar (pungli) di sekolah ancamannya sangat serius terhadap pihak-pihak yang dilaporkan baik dalam bentuk sanksi administratif sampai pemberhentuan tidak hormat.

Dinamika ini menarik seiring dengan keterbatasan pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah tentu masih memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan berbagai terobosan inovasi dan kreativitas yang jelas tetap memerlukan pembiayaan tambahan. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencabut larangan bagi orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi. Sebaliknya pemerintah justru mendorong dan menganjurkan agar orang tua siswa dan masyarakat turut serta dalam membiayai kebutuhan sekolah. Untuk itu dipandang perlu melakukan inventarisasi kembali masalah yang turut serta menurunkan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan

2. Disain Pengembangan Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

Ada beberapa disain pengembangan model yang sudah ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, menggunakan pendekatan cultural yakni bersumber dari nilai-nilai budaya huyula yang sudah diterima dengan baik dan menjadi cirri khas kebudayaan masyarakat Gorontalo. Dari berbagai best practice yang pernah dilakukan pengelola sekolah bisa menjadi masukkan dalam mendisain pengembangan model yang akan diterapkan, antara pembiayaan pendidikan seikhlasna, mengundang tokoh masyarakat untuk menjadi tokoh inspiratif sekaligus donator sekolah dalam menutupi berbagai kekurangan sekolah dalam membiayai kegiatan yang bersifat inovasi, kreativitas dan kebersamaan lainnya.

3. Sosialisasi, Kampanye dan Pemberian Award sekolah yang sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Output pengembangan model peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan disosialisasi, dikampanyekan dan sekolah-sekolah yang sukses meningkatkan indeks partisipasi masyarakat dan orang tuas siswa dalam pembiayaan pendidikan. Sosialisasi di lakukan dalam skala kecil, sedang dan besar sehingga menyentuh semua lapisan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Kegiatan lainnya yang direncanakan dilakukan tahun 2018 adalah kampanye dengan melibatkan tokoh masyarakat yang sudah selesai dengan pekerjaan dan ekonomi keluarga untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Disamping itu memberikan award atau penghargaan bagi sekolah –sekolah yang sukses mendapatkan dukungan berupa bantuan uang masyarakat dan pengelolaan keuangan sekolah secara efektif dan efisien diberikan apresiasi berupa “*theasury award*” atau dengan label lainnya (baca Gorontalo Post, Jum’at 25 Agustus 2017; 7) atau anugerah Kawastara Pawitra yang diberikan Mendikbud kepada kepala daerah yang komitmen mengalokasikan anggarannya 20% untuk fungsi pendidikan.

Diseminasi hasil penelitian ini direncanakan akan dipresentasikan di forum International conference dan publikasi artikel akan dimuat dalam jurnal bereputasi internasional bereputasi. Sekaligus target tambahan bisa menghasilkan buku ajar mata kuliah analisis kebijakan pendidikan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada tujuan dan hasil yang didapatkan dari penelitian tentang Efektivitas Kebijakan PRODIRA Kontribusinya terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan di SMA, SMK dan MA se Provinsi Gorontalo

1. Penelitian tahun pertama ini didapatkan informasi yang sangat berharga, dimana kebijakan PRODIRA sudah berjalan efektif berada angka 82,72% atau kategori baik. Sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) berada diatas pada pertumbuhan nasional
2. Partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan belum sesuai harapan berada pada angka 57,59% atau kategori kurang baik. Sehingga menjadi pekerjaan pengelola pendidikan di SMA, SMK dan MA berupaya mencari solusi agar terjadi peningkatan partisipasi, kepedulian dan empati masyarakat dan orang tua terhadap kegiatan dan pembiayaan pendidikan di sekolah.
3. Kontribusi efektivitas kebijakan PRODIRA belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa. Karena selama ini mereka sudah nyaman dengan menerima bantuan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dalam pikirannya dan pandangannya pembiaayaan itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Apalagi pemasangan spanduk larangan pungli memberikan sugesti ketidakberanian warga sekolah mencari sumbangan atau peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa.
4. Pendekatan kultural dalam peningkatan partisipasi masyarakat belum tersentuh secara maksimal, padahal potensi kontribusi masyarakat dan orang tua siswa membiayai kebutuhan sekolah untuk meningkatkan kualitas terbaik mencapai prestasi dan reputasi sangat besar sekali.. Kalau hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah Provinsi seperti Pembiayaan PRODIRA tujuannya untuk pemerataan pendidikan dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi siapa saja bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian efektivitas kebijakan PRODIRA dan kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan

1. Keberlanjutan penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan disain pengembangan model peningkatan partisipasi masyarakat konteks budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan. Guna mendapatkan akselerasi dalam peningkatan mutu, kreasi, inovasi dan kreativitas warga sekolah.
2. Dilihat dari perspektif tanggungjawab pelaksanaan pendidikan, maka sudah semestinya potensi yang di masyarakat dan orang tua siswa diberdayakan untuk mendapatkan dukungan dan pembiayaan pendidikan. Karena kemampuan financial pemerintah terbatas sudah semestinya masyarakat dan orang tua sama-sama bertanggungjawab atas keberhasilan sekolah memberikan layanan pendidikan terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayani, M., & Kusumah, R. (2015). *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak (Survei pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara)*.
- Agus Irianto. (2010), *Statistika Konsep, Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group
- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi*. Grasindo.
- Aminullah, M. & AJ Suhardjo, M. A. (2002). *Sikap dan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan lingkungan tingkat dasar:: Studi kasus pada program pendidikan lingkungan dan pengembangan Media Care International Indonesia di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Annas, F. B., & Wahyuni, E. S. 2015. Analisis Eksistensi Kearifan Lokal Huyula Desa Bongoime Provinsi Gorontalo. *Jurnal Penyuluhan*, 10 (1).
- Antara, (Selasa, 8 Juli 2014) *Pemprov Gorontalo Evaluasi PRODIRA*, <http://www.antaragorontalo.com/berita/6699/pemprov-gorontalo-evaluasi-prodira>
- Arfan Arsyad. 2016. Influence of Knowledge of Management, Principals Attitude and Effectiveness of PRODIRA Toward school Performance in Gorontalo Provincial, *Jurnal Ilmiah Education Management* Volume 7 Nomor 1 Desember 2016. Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Arfan Aryad. 2012. *Pemerintah Kabupaten Teken MoU Terkait Program Pendidikan Gratis*, Gorontalo Post, Senin 13 Desember 2012. Gorontalo
- ARIF, A. 2010. *Hubungan antara kecerdasan emosi dengan intensi altruisme pada siswa SMA N 1 Tahunan Jepara* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Armstrong, Michael. 1990. *Manajemen Sumber Daya manusia* (Alih bahasa Ali Sofjan dan Haryanto). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77-102.

- Aulia, S. 2013. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1).
- Aulich, Chris. 2010. "Governance Through Community Partnerships: A Model for Public Funding of Private Schools in Australia" *Australian Journal of Public Administration* Vol. 1 No. 1, 2010, pp: 1-15, <http://www.proquest.umi.com> diakses pada 22 Agustus 2014.
- Azhar Kasim. 1989. *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. 2017. *Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo 2016*. Grafika Karya: Gorontalo .
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2010-2016*, Grafika Karya: Gorontalo.
- Billy Antoro. 2015. Janji Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Gratis, Pemda Harus Siapkan Anggaran Pendidikan dari APBD, <http://www.dadangjsn.com/2015/05/janji-wajib-belajar-wajar-12-tahun.html>, diakses 23 September 2017
- Blaug, Mark. 1992. *The Methodology of Economics*, Cambridge: Cambridge University Press
- Bogdan, R. & Biklen, S.K. 1998. *Qualitative Research for Education and Instruction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Boy, D., & Siringoringo, H. 2011. Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi orang tua murid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 14(2).
- Coombs, H. Philip & Hallak Jacques, 1972. *Managing Educational Cost*, Oxford University Press.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Los Angeles
- Daulima F. 2004. *Aspek-aspek Budaya Masyarakat Gorontalo, Banthayo Pobo'ide Limboto, Fitrah*
- Depdiknas. 2002a. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen-Direktorat SLTP.
- Depdiknas. 2007. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Desliana Maulipaksi. 2017. Ini Bedanya Sumbangan, Bantuan, dan Pungutan Pendidikan, Kemendikbud RI; <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/ini-bedanya->

sumbangan-bantuan-dan-pungutan-pendidikan diakses Jumat tanggal 22 September 2017

- Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo. (2012). *Juknis Program Pendidikan Gratis*, Gorontalo. DIKBUPORA Provinsi Gorontalo,
- Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo. (2014), *Petunjuk Teknis Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)*, Gorontalo.: DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo,
- Direktorat TK/SD, Pusat Kurikulum, UNESCO & UNICEF. (2003). *Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar melalui Manajemen Berbasis Sekolah dan Peran serta Masyarakat*. Jakarta: Paket Pelatihan. Tidak dipublikasikan..
- Dwi Atmanti dan Hastarini. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 30-39.
- Dwiyanto, B. M. (2011). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 239-256.\
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy* Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Elisa, S. & Wrastari, A. T. (2013). Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, 2(01).
- Ester Lince Napitupulu. (2012). *BOS SMA dikururkan*, Kompas, 9 Oktober 2012.
- Etzioni, Amitai. (1985). *Organisasi-Organisasi Modern (terjemahan Wijaya)*.. Jakarta: UI Press.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Firmansyah, M. (2016). *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Gedeian, Arthur G. (1991). *Organization Theory and Design*. University of Colorado at Denver.
- Gorontalo Post. (2017). *Theasury Award, Potret Kinerja Keuangan Negara*, Gorontalo Post, Jumat, 25 Agustus 2017. Gorontalo
- Gorontalo Post, (2012), *Program Pendidikan untuk Rakyat*, Gorontalo Post, Senin 20 Februari 2012. Gorontalo

- Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. 1981. *Effective Evaluation.Improving the Usefulness of Evaluation Results through Responsive and Naturalistic Approaches*. San Fransisco: Jossey-Bass, Inc.
- Hadidjah Mootinelo. 2015. *Dampak Kebijakan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) terhadap Pengelolaan Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Hakim, A. M. 2014. *Persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Wonorejo*, .Doctoral dissertation, Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hewlett, Michael & M. Ramesh. 2003. *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: University Press
- Hogwood, Brian, W. 1984. *Policy Analysis for The Real World*. London: Oxford University.
- Hoogerwerf A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Penerjemah: R.L.L. Tobing. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ilham, N. Siregar, H. & Priyarsono, D. S. 2016. Efektivitas kebijakan harga pangan terhadap ketahanan pangan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 157-177.
- Info Mendikbud.com, Minggu 16 Oktober 2016, *Mendikbud; Sekolah tidak mungkin maju kalau hanya mengandalkan BOS*, diakses tanggal 24 Maret 2017
- Info Publik (Media online, Senin 27 Februari 2012), *Dikpora Gorontalo Antisipasi Penyimpangan Dana Prodira*, Humas dan MC Prov Gorontalo
- Irawan, B. 2016. Meningkatkan efektifitas kebijakan konversi lahan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 26, No. 2, pp. 116-131).
- Irianto, H. Y. B. 2010. *Kebijakan pendidikan dalam konteks desentralisasi pembangunan manusia*.
- Jusdin Puluhulawa, dan Moh. Rusdiyanto Puluhulawa. 2013. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di ProvinsiGorontalo)*, FIS UNG: Gorontalo.
- Kast, F.E & Rosenzweig, J.E. 1974. *Organization and Management: A System Approach*. New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Katz, D & Kahn, R.L. 1966. *The Social Psychology of Organization*. New York: John Wiley & Sons
- Kerlinger, F. 1973. *The Structure of Scientific revolution*, Chicago University of Chicago Press.

- KR.Yogya.com, 2016. *Mendikbud Izinkan Kepsek Gali Dana Masyarakat*, [http://krjogja.com/web/news/read/12770/Mendikbud Izinkan Kepsek Gali Dana Masyarakat](http://krjogja.com/web/news/read/12770/Mendikbud_Izinkan_Kepsek_Gali_Dana_Masyarakat). Diakses 22 September 2017.
- Kurniady, D. A. 2017. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(1), 174-181.
- Lamusu, Sance. A. 2011 Kerjasama dan Tolong Menolong dalam Tatanan Budaya Gorontalo, *Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*, Vol. 1 Nomor 1 September 2011.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. 2016. Rencana Induk Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo 2015-2035, UNG Press; Gorontalo
- Lembaga Penelitian pengabdian pada adysrstlit UNG. 2016. *Panduan Pelatihan Metodologi Penelitian dan Klinik Proposal*, Lemlit UNG: Gorontalo
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publication, Inc.
- LP2G. 2012. Nikmatnya PRODIRA, Sumber: <https://b3wpgorontalo.wordpress.com/2012/07/16/nikmatnya-prodira/diakses> Jum'at 22 September 2017
- M. Ghofar, (23 Juni 2015) *Kemendikbud; Wajib Belajar dimulai tahun 2016*, Sumber: <http://www.antaraneews.com/berita/503076/kemendikbud-wajib-belajar-12-tahun-dimulai-2016>.
- M. Ghoffar. 2015. *Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016*, Berita Antara Selasa 23 Juni 2015, sumber: <http://www.antaraneews.com/berita/503076/kemendikbud-wajib-belajar-12-tahun-dimulai-2016>
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Marhawati, B. 2016. *Implementasi Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Nilai-nilai Budaya Huyula di Daerah Terpencil Gorontalo*. DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM.
- Mas, S. R. 2013. Partisipasi Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *el-hikmah*. ejournal.uin-malang.ac.id
- Mcmillan, J.H., & Schumacher, S. 2001. *Research in education: A conceptual introduction*. New York: Longman.
- Memi Loma. 2013. *Implementasi Program One Village One Product (OVOP) Melalui Koperasi (Studi Kasus Pengembangan Produk Olahan Rosella di Kabupaten Bintan*, Tesis Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. (2nd ed.). London: Sage Publications.
- Mohammad F et al. 2005. *Menggagas Masa Depan Gorontalo*, Yogyakarta: HPMIG Press.
- Muhadjir, N. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyasa. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. 1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Jemmars.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ningrum, H. A. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri) Di Kelurahan Karang Anyar Samarinda Ulu.. e *Journal Sosiologi*, 2012 (3): 1-24 ISSN 0000-0000, ejournal.pin.or.id
- Nurcholis, H. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah* , Jakarta: Grasindo
- Paisal, P. 2016. Paiya Lohungo Lopoli Menemukan Petuah Bijak Agama dan Keagamaan dalam Pantun Khas Gorontalo. *Al-Qalam*, 19(2), 275-284.
- Panggulu, Y. T. 2013. Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal ACTA Diurna*, 2 (4).
- Parkinson, C. Northcote. 1984. *Parkinson's Law*. New York: Ballantine Books.
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press.
- Pascale, Richard & Arthos, A. 1981. *The Art of Japanese management*, Boston: Simon & Schuster.
- Patton, M.Q. 1987. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hill, CA: Sage Publication.
- Perrow, Charles. 1979. *Complex Organizations: A Critical Essay*. 2nd ed. Glenview, Il. : Scott, Foresman & Comp.
- Peters, Thomas J. Waterman, Robert H. 1982. *In Search of Excellence: Lesson from America's Best Run Companies*. New York : Harper & Row, Pub.
- Psacharopoulos, G. 1994. Returns to investment in education: A global update. *World development*, 22(9), 1325-1343.

- Radu, Bogdan Mihai. 2011. "Parental involvement in schools: A study of resources, mobilization, and inherent inequality" *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology* Vol. 2 No. 2, 2011, pp: 103-115, <http://www.proquest.umi.com>. diakses pada 24 April 2017.
- Ridwan Hasan Saputra. 2017. Pendidikan seikhlasnya, *Republika*, 21 Januari 2017; Jakarta sumber: <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/17/01/21/ok4mk618-pendidikan-seikhlasnya>, diakses Jum'at tanggal 22 September 2017.
- Robbin, Stephen P., (1990), *Organization Theory, Structure, Design, and Application*, third edition, USA: Prentice Hall, Inc.
- Rosyada, Dede. 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis-Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Said, A. R. A. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia*, 9(4).
- Saragih, S. 2006. Menumbuhkembangkan Berpikir Logis dan Sikap Positif terhadap Matematika melalui Pendekatan Matematika Realistik. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional (551-565)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas.
- Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.
- Siswadi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif dan Prima*. Bandung: Mutiara Press.
- Soehartono, Irawan. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung,
- Sondang P, Siagian. 2007. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Steers, R.M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga,
- Sudjana. 1996. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suharno 2009, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sumenge, A. S. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Surotinojo, I. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS) di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Suwarna, Budi 2007. *Sekolah Gratis Bukan Mimpi*. Kompas, Senin 19 November 2007; Jakarta.
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Thalib, M. C. *Protection of Domestic Workers in Local Cultural Historical Perspective at Gorontalo City*
- Ulum, M. dan NISWAH, F. 2014. Efektivitas Remunerasi di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 2(2).
- Wahab, S., Abdul. 1991. *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, I. G. N. 2008. *Efektivitas program layanan jarum dan alat suntik steril (L, JSS) dari sudut pandang para stakeholder (studi kasus di puskesmas kecamatan tebet)* (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana).
- Warni Tune Sumar, 2017, *Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) di SMA se Provinsi Gorontalo*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Winarno Budi. 2007. *Teory dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Perindo;
- Yayasan 23 Januari 1942. (1982). *Perjuangan Rakyat di Daerah Gorontalo, Menentang Kolonialisme dan Mempertahankan Negara Proklamasi*. Jakarta: Gobel Dharma Nusantara
- Yunus, R. 2016. Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1).
- Internet :
- <https://akhmatsudrajat.wordpress.com>, Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, di akses tanggal 22 September 2017
- <http://edukasi.kompas.com>, BOS SMA Dikururkan, diakses tanggal 9 Oktober 2012.

<https://psmk.kemdikbud.go.id>, Kemdikbud upayakan wajib belajar 12 tahun melalui PIP, diakses Kamis 15 September 2016.

<http://gorontaloprov.go.id>, angka rata-rata lama sekolah di Gorontalo melebihi nasional, di akses tanggal 24 September 2017

Perundang-undangan dan Turunan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta: Diperbanyakoleh Departemen Komunikasi dan Informatika.*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif

Peraturan. Pemerintah Nomor 47. tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Jakarta: Depdiknas.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9a Tahun 2012 tentang Pendidikan Gratis.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK dan MA dalam rangka Program Pendidikan Gratis Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pendidikan untuk Rakyat bagi Sekolah Jenjang Menengah se Prioinsi Gorontalo.

Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 186/07/VI/2013 tentang Pembentuk Tim Manajemen

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/DIKPORA/23.B/SEK/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA), Gorontalo; Dikbudpora Gorontalo Press.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/Dikbudpora/172.a/Dikmen/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan untuk Rakyat Tahun Anggaran 2014. Gorontalo; Dikbudpora Gorontalo Press

LAMPIRAN-LAMPPIRAN

Lampiran I Kisi-kisi Instrumen Penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT (PRODIRA) KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KONTEKS BUDAYA HUYULA DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI GORONTALO

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Banyak Item	No. Item	Skala	Responden
1.	Efektivitas Kebijakan Prodira	Keselarasn Kebijakan Prodira	Keselarasn kebijakan pProdira dengan regulasi	2	1, 2	1-5	Kepsek, Guru, Bendahara dan Orang Tua Siswa (Komite Sekolah)
			Tujuan kebijakan Prodira	5	3-7	1-5	
		Target Capaian	Indeks Pembangunan Manusia	7	8-14	1-5	
			Komitmen Stakeholder Pendidikan	1	15	1-5	
			Pengelolaan	Komponen Prodira	3	16-18	
		Sosialisasi kebijakan Prodira		3	19-21	1-5	
		Transparansi		4	22-25	1-5	
		Kepengawasan Prodira	Monitoring	1	26	1-5	
			Evaluasi	5	27-31	1-5	
			Keberlanjutan	2	32-33	1-5	
JUMLAH				33			
2.	Partisipasi Masyarakat kontek Budaya huyula dalam pembiayaan pendidikan	Mensikapi Kebijakan Prodira	Mendukung kebijakan	3	1-3	1-5	Kepsek, Guru, Bendahara dan Orang Tua Siswa (Komite Sekolah)
			Mengawasi	4	4-7	1-5	
		Kesadaran Pembiayaan Tanggung jawab Bersama	Memahami keterbatasan pemerintah membiayai pendidikan	4	8-11	1-5	
			Kebahagiaan dapat membiayai pendidikan	3	12-14	1-5	
		Tolong Menolong Jadi Budaya Masyarakat (<i>local wisdom</i>)	Membantu Keluarga dan orang lain	3	15-17	1-5	Dilanjutkan dengan wawancara
			Berbagi Beban Biaya	6	18-23	1-5	
		Keaktifan berpartisipasi	Menghargai semua kalangan	3	24-26	1-5	
			Intensitas partisipasi	2	27-28	1-5	
JUMLAH				28			

Sumber : Analisis Peneliti, 2017

Lampiran II Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN VARIABEL X (EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PRODIRA)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	146.9667	224.309	.669	.959
VAR00002	146.5667	221.426	.725	.959
VAR00003	146.6333	224.171	.702	.959
VAR00004	147.0000	219.931	.695	.959
VAR00005	147.1333	218.464	.708	.959
VAR00006	146.8333	222.971	.675	.959
VAR00007	147.1000	222.024	.771	.959
VAR00008	146.7000	224.355	.534	.960
VAR00009	146.8333	225.937	.641	.960
VAR00010	146.6333	225.826	.603	.960
VAR00011	146.6000	228.662	.437	.961
VAR00012	146.8667	222.671	.649	.960
VAR00013	146.6000	227.283	.518	.960
VAR00014	146.5667	233.013	.212	.962
VAR00015	146.8667	223.361	.668	.959
VAR00016	146.8333	226.557	.487	.960
VAR00017	146.9333	221.237	.696	.959
VAR00018	146.8667	223.706	.597	.960
VAR00019	146.8000	224.648	.634	.960
VAR00020	146.7000	224.907	.663	.960
VAR00021	146.9333	224.409	.643	.960
VAR00022	146.8000	222.441	.759	.959
VAR00023	147.0667	228.133	.414	.961
VAR00024	147.0000	220.552	.629	.960
VAR00025	147.0333	221.620	.680	.959
VAR00026	146.7667	218.806	.676	.959
VAR00027	146.5333	222.533	.814	.959
VAR00028	146.6333	220.240	.782	.959
VAR00029	146.6000	232.938	.216	.962
VAR00030	147.1000	218.162	.787	.959
VAR00031	147.2333	220.461	.647	.960
VAR00032	146.4333	224.530	.731	.959
VAR00033	146.7000	224.976	.472	.961
VAR00034	146.7000	222.355	.738	.959
VAR00035	146.9667	213.757	.788	.959

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.961	35

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
151.1333	236.533	15.37964	35

ANALISIS VALIDITAS INSTRUMEN PARTISIPASI MASYARAKAT KONTEKS BUDAYA HUYULA DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (Y)

Responden	Nomor item pertanyaan																													Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	4	4	3	3	3	3	4	1	1	3	2	5	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	2	3	4	86
2	5	5	3	5	5	3	2	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	136
3	3	2	3	4	2	3	3	1	1	3	1	4	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	3	3	67
4	3	3	3	4	3	1	2	2	1	3	1	4	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	67
5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	2	3	3	5	5	4	3	4	5	5	3	5	3	4	2	3	4	4	5	118
6	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	2	3	3	5	5	4	3	4	5	5	3	5	3	4	2	3	4	4	5	118
7	5	1	5	5	5	3	3	5	5	5	2	3	3	5	5	4	3	4	5	5	3	5	3	4	2	3	4	4	5	114
8	5	5	2	5	5	3	4	5	5	5	2	3	3	5	5	4	3	4	5	5	3	5	3	4	2	3	4	4	5	116
9	4	5	5	5	5	5	4	2	5	5	5	5	2	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	132
10	5	4	5	4	5	3	5	5	3	5	5	4	5	4	5	2	5	4	5	2	5	4	3	5	2	5	3	5	4	121
11	5	5	3	5	2	5	4	5	5	4	3	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	132
12	3	3	1	2	2	1	3	1	1	4	2	1	1	2	1	3	2	3	4	4	4	3	2	2	2	1	1	2	3	64
13	3	3	1	2	2	3	3	1	1	4	2	1	1	2	1	3	2	3	4	4	4	3	2	2	2	1	1	2	4	67
14	3	2	1	2	2	1	2	1	1	4	2	1	1	2	1	3	2	3	4	4	4	4	2	2	2	1	1	2	4	62
15	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	4	3	1	1	1	1	4	4	1	3	4	2	102
16	3	1	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	2	2	2	2	4	4	4	3	2	2	2	4	2	3	4	4	3	72
17	3	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	2	55
18	5	2	5	5	5	5	3	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	2	3	2	62
19	5	3	4	4	2	2	2	1	1	3	3	5	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	2	4	3	4	4	5	4	94
20	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	3	53
21	5	5	4	4	4	3	4	3	5	4	2	5	4	4	4	4	5	3	3	5	4	4	2	2	2	2	3	5	5	109
22	5	2	5	5	5	2	3	1	1	2	2	5	1	1	2	1	1	2	1	4	1	2	1	2	1	1	1	5	4	69
23	5	2	4	4	3	4	4	2	2	2	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	97

24	3	3	2	3	3	4	4	1	2	2	1	4	1	1	1	2	1	1	3	4	3	1	2	2	1	1	2	2	4		64	
25	5	4	5	3	3	4	4	1	4	4	1	5	3	3	3	3	3	5	4	5	3	1	2	1	1	5	4	4		96		
26	5	4	3	4	4	3	2	1	1	5	1	5	3	2	1	1	2	2	2	5	3	2	1	2	1	2	2	4	5		78	
27	3	3	5	1	1	3	4	1	1	4	2	1	2	2	2	2	4	4	4	3	2	2	2	4	2	3	4	4	3		78	
28	5	3	3	3	4	5	4	3	4	3	3	4	3	4	3	2	5	5	4	3	2	4	3	3	4	2	3	4	3		101	
29	5	2	3	2	4	5	3	3	4	3	3	4	3	5	3	2	4	4	5	4	3	4	3	3	4	3	2	3	4		100	
30	5	4	2	4	3	3	2	1	3	2	3	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4	1	3	1	2	2	2	2	3	4		76
Jumlah	128.0	103.0	101.0	109.0	103.0	95.0	95.0	72.0	82.0	108.0	69.0	99.0	73.0	89.0	81.0	83.0	91.0	99.0	110.0	111.0	93.0	97.0	72.0	90.0	72.0	72.0	86.0	108.0	115.0		3,948.0	
r hitung	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6		0.6	
r tabel	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	
Keterangan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	TV	V	V	V	V	V	V	V	V		V	
Reliability	0,957																															

ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT (PRODIRA)

Respon den	Nomor Item Pertanyaan																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	4	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4
2	3	2	4	2	2	3	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	2	3	1	3	3	5	2	1	4	5	4
3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4	3	4	3	2	3	4	3
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	3	4	5	5	5
5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	3	4	4	5	5	5	4	4	3	5	4	5
6	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	5	4	3	3	3	4	3	5	3	4	4	5	3	4	4	2	3
7	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5
8	3	4	4	3	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Lampiran III Instrumen Penelitian



Perihal : Permohonan bantuan pengisian angket penelitian

Kepada Yth,

Bapak dan Ibu Kepala, Guru, Bendahara dan Orang Tua Siswa SMA/SMK/MA Se-Provinsi Gorontalo

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa dipandang perlu melaksanakan penelitian dipadukan dengan kegiatan penelitian. Hal inilah yang mendorong kami untuk menyelesaikan penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa serta dalam rangka penyelesaian mata kuliah Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira) Kontribusinya Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Gorontalo”**. Penelitian ini juga dibiayai Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Kemristek Dikti tahun anggaran 2017.

Untuk terselenggaranya kegiatan penelitian ini, kami mohon bantuan bapak dan Ibu Kepala Sekolah, guru, bendaharawan sekolah, dan orang tua siswa atau pengurus komite sekolah, kiranya berkenaan memberikan informasi yang utuh, menyeluruh dan komprehensif berkenaan dengan kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira) yang sudah berjalan sejak tahun 2012 yang lalu sampai sekarang. Informasi ini sangat penting bagi kami untuk memberikan masukan dan saran-saran yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo maupun sekolah yang menerima dana PRODIRA. Sekaligus informasi ini menjadi dokumen penting dalam menyusun kebijakan pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017-2022.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari bapak dan Ibu kepala sekolah, guru, bendaharawan dan orang tua siswa (pengurus komite sekolah) yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dosen dan mahasiswa untuk mengumpulkan dokumen dan informasi yang diperlukan, disampaikan ucapan terima kasih. Insya Allah semua ini bernilai ibadah. Amin

Gorontalo, 4 Mei 2017

Tim Peneliti,

Dto

Dr. Arwildayanto, M.Pd

Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd

Warni Tune Sumar, S.Pd, M.Pd

DAFTAR PERTANYAAN INSTRUMEN PENELITIAN

Data Responden (Mohon diisi untuk pengelompokkan jawaban), sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SMA SMK MA
2. Alamat Sek :
3. Posisi Kepsek Guru Bendaharawan Komite/Orang Tua
Siswa
4. Petunjuk Pengisian angket ini, terdiri dari pilihan jawaban , antara lain :
 1. Tidak Pernah (TP)
 2. Jarang (JR)
 3. Kadang-kadang (KK)
 4. Sering (SR)
 5. Selalu (SL)

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PRODIRA DI SMA/SMK/MA

No.	PERNYATAAN	PILIHAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
1.	Peraturan daerah tentang kebijakan Prodira (pendidikan gratis)selaras dengan berbagai peraturan dan perundang-undang yang berlaku ditingkat nasional					
2.	Petunjuk Teknis (Juknis) Prodira memberikan informasi yang jelas dan dapat menghindari dari kesalahan pengelolaan					
3.	Kebijakan Prodira meningkatkan kesadaran pentingnya menempuh Pendidikan bagi stakeholder sampai jenjang tertinggi					
4.	Kebijakan Prodira memberikan layanan pemerataan pendidikan yang terjangkau, Semua Bisa Sekolah (SBS) SMA/SMK/MA					
5.	Kebijakan Prodira meringankan biaya pendidikan bagi orang tua siswa yang kurang mampu					
6.	Kebijakan Prodira memberikan kesempatan bagi warga melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi					
7.	Kebijakan Prodira menghilangkan atau mengurangi pungutan liar di sekolah					
8.	Kebijakan Prodira meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA/SMK/MA					
9.	Kebijakan Prodira meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa SMA/SMK/MA					
10.	Kebijakan Prodira meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA					
11.	Kebijakan Prodira meningkatkan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA tiap tahunnya					
12.	Kebijakan Prodira menurunkan Angka Putus Sekolah (DO) siswa SMA/SMK/MA					

13	Kebijakan Prodira menuntaskan buta aksara tingkat SMA/SMK/MA					
14	Kebijakan prodira menuntaskan wajib belajar 12 tahun					
15	Kebijakan Prodira Meningkatkan komitmen Partisipasi orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dalam pembiayaan Pendidikan					
16	Pembentukan tim pengelola PRODIRA merujuk pada Juknis PRODIRA					
17	Kelembagaan (struktur organisasi) tim manajemen Prodira di Provinsi, Kabupaten dan Kota bekerja baik					
18	Tim Manajemen mensosialisasikan kebijakan Prodira memenuhi kebutuhan biaya siswa (unit cost) setiap tahunnya					
19	Internalisasi kebijakan Prodira melalui Bimtek dan Pendidikan Pelatihan (Diklat) dilakukan secara periodic					
20	Tiap tahun ajaran baru sosialisasi kebijakan Prodira dipublikasikan melalui media cetak agar semua masyarakat mengetahuinya					
21	Sosialisasi Juknis dan ketentuan Prodira melalui Buku saku atau buku panduan tersedia secara memadai					
22	Tim manajemen prodira memberikan kemudahan akses data (pelayanan)					
23	Pengelolaan Prodira di sekolah dipersiapkan dengan format pembukuan yang standar (baku) untuk tertib administrasi (akuntabilitas)					
24	Pengelola prodira menyampaikan pelaporan datapelaksanaan secara periodik 2 kali setahun					
25	Pendistribusi dana Prodira tepat waktu sesuai dengan Juknis yang ada					
26	Tim manajemen Prodira menyiapkan instrumen pengaduan atau kontak telpon untuk mendapatkan informasi tentang layanan Prodira					
27	Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban dana Prodira per semester disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota					
28	Pengawasan pengelolaan dana Prodira di sekolah mencermati ketepatan tujuan, sasaran, dan tepat pengelolaan dana.					
29	Pemberian sanksi bagi oknum pengelola dana prodira di sekolah dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.					
30	Tim manajemen Prodir di Kabupaten dan Kota melakukan pembinaan pengelolaan keuangan (Asistensi) di sekolah guna mencegah penyimpangan					
31	Tim manajemen Prodira di sekolah melakukan pelatihan pengelolaan keuangan dana Prodira agar tertib administrasi					
32	Tim manajemen Prodira Kabupaten/Kota melakukan <i>umpan balik untuk pengembangan (Feedback for improvement)</i> pelaksanaan Prodira di sekolah					
33	Tim manajemen Prodira Kabupaten dan /atau Provinsi Gorontalo memberikan penghargaan bagi sekolah yang berhasil memaksimalkan pengelolaan Prodira di sekolah					

2. Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

No.	PERNYATAAN	PILIHAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
1	Masyarakat dan orang tua siswa pro aktif mendukung kebijakan pembiayaan pendidikan gratis berupa Program pendidikan untuk rakyat (Prodira) di sekolah					

2	Masyarakat dan orang tua siswa menyikapi pemenuhan pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 menuju 12 tahun dilakukan secara bertahap, kebijakan Prodira membantu biaya operasional sekolah SMA/SMK/MA adalah langkah percepatan yang tepat					
3	Masyarakat dan orang tua siswa memandang pencapaian sekolah yang unggul dan berkualitas disamping ada dana Prodira masih perlu dukungan biaya dari orang tua siswa dan masyarakat					
4	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Prodira di sekolah agar berjalan sesuai Juknis yang ada					
5	Masyarakat dan orang tua siswa memberikan solusi untuk keberhasilan implementasi kebijakan Prodira di sekolah					
6	Masyarakat dan orang tua siswa enggan untuk membantu biaya pendidikan di sekolah karena kebijakan pendidikan gratis (Prodira) sudah memenuhi seluruh kebutuhan biaya di sekolah					
7	Masyarakat dan orang tua siswa melapor jika ada sekolah meminta bantuan yang mewajibkan orang tua dan masyarakat lainnya					
8	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi memberikan beasiswa ataupun penghargaan kepada guru, yang berpartisipasi memajukan sekolah					
9	Masyarakat dan orang tua siswa berpartisipasi memberikan beasiswa ataupun penghargaan kepada siswa yang berprestasi, mengharumkan nama sekolah di tingkat daerah, provinsi maupun nasional					
10	Masyarakat dan orang tua siswa merasa nyaman membiayai pendidikan anak-anaknya di sekolah ini					
11	Masyarakat dan orang tua siswa membantu biaya pendidikan dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk membiayai pendidikan siswa yang kurang mampu					
12	Masyarakat dan orang tua siswa merasa tidak ada pungutan sekolah ini karena sudah ada dana Prodira					
13	Masyarakat dan orang tua siswa membantu membiayai pendidikan bagi anggota keluarganya yang kurang mampu.					
14	Masyarakat dan orang tua siswa membantu mencari solusi biaya pendidikan bagi keluarganya yang terdapat yang kurang mampu dari sisi ekonomi					
15	Masyarakat dan orang tua siswa membantu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan solusinya bagi orang lain yang kurang mampu dari sisi ekonomi					
16	Masyarakat dan orang tua siswa mendorong saling membantu dalam meringankan biaya pendidikan dengan " <i>Torang Samua Basaudara</i> "					
17	Masyarakat dan orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan biaya yang belum terpenuhi dari dana Prodira maupun dana Bantuan operasional sekolah (BOS) untuk mencapai mutu yang terbaik					
18	Komite sekolah berpartisipasi membangun sarana dan prasarana sekolah sesuai standar kualitas terbaik					
19	Komite sekolah membantu memberikan solusi bagi sekolah dalam memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah guna menggenjot prestasi dan reputasi sekolah					
20	Masyarakat dan orang tua siswa menghormati perbedaan status ekonomi orang tua siswa dalam membiayai pendidikan mereka yang kurang mampu diprioritaskan mendapatkan dana Prodira					

21	Masyarakat dan orang tua siswayang memiliki kelebihan rezeki senang membawakan makanan bagi guru dan siswa pada event-even yang dilaksanakan sekolah					
22	Masyarakat dan orang tua siswayang kurang mampu dari sisi ekonomi bersedia bekerja gotong royong membangun sekolah jika dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi kami membantu biaya pendidikan di sekolah					
23	Masyarakat dan orang tua siswaberpartisipasi menyediakan bahan bangunan sekolah jika belum tersedia anggarannya					
24	Masyarakat dan orang tua siswaberpartisipasi dalam berbagai event sekolah dengan mensponsori kegiatan sekolah					
25	Masyarakat dan orang tua siswabersemangat mencari donasi dari berbagai perusahaan atau badan hukum yang memiliki dana sosial untuk pendidikan (<i>corporate social responsibility</i>)					
26	Masyarakat dan orang tua siswaberpartisipasi dalam bentuk gotong royong membersihkan lingkungan sekolah guna mengurangi biaya operasional sekolah					
27	Masyarakat dan orang tua siswamengkritisi jika pengelolaan keuangan sekolah tidak transparan					
28	Masyarakat dan orang tua siswa aktif bermusyawarah dan berdiskusi membahas kemajuan sekolah.					

TERIMA KASIH

Lampiran IV Rekapitulasi Data Penelitian

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	140	74	19600	5476	10360
2	160	64	25600	4096	10240
3	147	75	21609	5625	11025
4	128	78	16384	6084	9984
5	143	90	20449	8100	12870
6	150	117	22500	13689	17550
7	152	81	23104	6561	12312
8	145	65	21025	4225	9425
9	103	81	10609	6561	8343
10	151	87	22801	7569	13137
11	157	64	24649	4096	10048
12	138	114	19044	12996	15732
13	169	92	28561	8464	15548
14	171	89	29241	7921	15219
15	126	84	15876	7056	10584
16	132	111	17424	12321	14652
17	135	82	18225	6724	11070
18	170	59	28900	3481	10030
19	135	95	18225	9025	12825
20	165	77	27225	5929	12705
21	162	59	26244	3481	9558
22	154	60	23716	3600	9240
23	147	69	21609	4761	10143
24	146	96	21316	9216	14016
25	177	80	31329	6400	14160
26	180	77	32400	5929	13860
27	165	81	27225	6561	13365
28	152	99	23104	9801	15048
29	164	79	26896	6241	12956
30	169	93	28561	8649	15717
31	177	92	31329	8464	16284
32	192	102	36864	10404	19584
33	158	76	24964	5776	12008
34	159	65	25281	4225	10335
35	184	53	33856	2809	9752
36	183	92	33489	8464	16836
37	165	50	27225	2500	8250
38	185	104	34225	10816	19240
39	197	73	38809	5329	14381
40	178	96	31684	9216	17088

41	188	69	35344	4761	12972
42	174	77	30276	5929	13398
43	172	62	29584	3844	10664
44	174	70	30276	4900	12180
45	154	57	23716	3249	8778
46	152	58	23104	3364	8816
47	149	60	22201	3600	8940
48	185	94	34225	8836	17390
49	194	74	37636	5476	14356
50	157	74	24649	5476	11618
51	176	97	30976	9409	17072
52	173	96	29929	9216	16608
53	189	76	35721	5776	14364
54	191	93	36481	8649	17763
55	210	81	44100	6561	17010
56	208	90	43264	8100	18720
57	211	84	44521	7056	17724
58	214	86	45796	7396	18404
59	209	88	43681	7744	18392
60	191	87	36481	7569	16617
61	184	74	33856	5476	13616
62	214	84	45796	7056	17976
63	195	93	38025	8649	18135
64	206	43	42436	1849	8858
65	200	66	40000	4356	13200
66	199	51	39601	2601	10149
67	213	63	45369	3969	13419
68	207	67	42849	4489	13869
69	201	46	40401	2116	9246
70	216	44	46656	1936	9504
71	231	41	53361	1681	9471
72	227	97	51529	9409	22019
73	221	137	48841	18769	30277
74	202	61	40804	3721	12322
75	210	43	44100	1849	9030
76	217	44	47089	1936	9548
77	209	61	43681	3721	12749
78	218	93	47524	8649	20274
79	197	75	38809	5625	14775
80	207	87	42849	7569	18009
81	216	112	46656	12544	24192
82	213	112	45369	12544	23856
83	240	104	57600	10816	24960
84	219	71	47961	5041	15549

85	232	73	53824	5329	16936
86	227	90	51529	8100	20430
87	233	82	54289	6724	19106
88	206	96	42436	9216	19776
89	195	84	38025	7056	16380
90	200	56	40000	3136	11200
91	209	78	43681	6084	16302
92	247	128	61009	16384	31616
93	236	92	55696	8464	21712
94	253	132	64009	17424	33396
95	251	109	63001	11881	27359
96	246	96	60516	9216	23616
97	251	93	63001	8649	23343
98	247	118	61009	13924	29146
99	234	97	54756	9409	22698
100	233	85	54289	7225	19805
101	240	105	57600	11025	25200
102	244	75	59536	5625	18300
103	204	52	41616	2704	10608
104	246	83	60516	6889	20418
105	235	81	55225	6561	19035
106	229	72	52441	5184	16488
107	234	68	54756	4624	15912
108	234	92	54756	8464	21528
109	247	74	61009	5476	18278
110	256	93	65536	8649	23808
111	237	68	56169	4624	16116
112	240	86	57600	7396	20640
113	244	95	59536	9025	23180
114	245	50	60025	2500	12250
115	251	86	63001	7396	21586
116	250	82	62500	6724	20500
Σ	22580	9388	4547192	803010	1838937
	X	Y	X²	Y²	XY

Lampiran V Distribusi Frekuensi Masing-masing

Perhitungan Distribusi Frekuensi dan klasifikasi skor masing-masing variabel

(Sudjana 1992:66-85)

N	Valid	116
	Missing	0
Mean		194.66
Std. Error of Mean		3.374
Median		197.00
Std. Deviation		36.341
Variance		1320.680
Skewness		-.150
Std. Error of Skewness		.225
Kurtosis		-.936
Std. Error of Kurtosis		.446
Range		153
Minimum		103
Maximum		256
Percentiles	25	165.00
	50	197.00
	75	227.00
	90	245.30

1. Variabel Efektivitas Kebijakan PRODIRA

Range = skor maksimum-skor minimum
 Range = 256-103 = 153

Banyak Kelas = $1 + 3,3 (\log N)$
 Banyak Kelas = $1 + 3,3 (\log 116) = 1 + 3,3 (2,065) = 1 + 6,83 = 7,83 = 8$

Panjang Kelas (i) = Range/Banyak Kelas
 Panjang Kelas (i) = $153/8 = 19$

Ci	f	Cumf	x	fx	Fx (x)
103-121	1	1	-5	-5	25
122-140	7	8	-4	-28	112
141-159	17	25	-3	-51	153
160-178	18	43	-2	-36	72
179-197	16	59	-1	-16	16
198-216	23	82	0	0	0
217-235	15	97	1	15	15
236-254	18	115	2	36	72
255-263	1	116	3	3	9
N=116				$\Sigma fx = -82$	$\Sigma fx^2 = 474$

Mean = $MT + (\frac{\Sigma fx^2}{N}) i = 208 + \frac{(-82)}{116} 19 = 208 - 13,43 = 194,57$

Median = $Bb + (\frac{1/2N - cfb}{f}) i = 197,5 + \frac{(58 - 59)}{18} 19 = 197,5 - 0,76 = 196,50 = 197$
 Fd = 23

$$\text{Modus} = 3 \text{ Median} - 2 \text{ Mean} = 3(197) - 2(194,57) = 591 - 389,14 = \mathbf{201,86}$$

$$\text{Standar Deviasi} = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{n} - \frac{(\sum fx)^2}{n^2}} = \sqrt{\frac{474}{116} - \frac{(82)^2}{116^2}} = \sqrt{4,09 - 57,96} = \sqrt{53,90} = 19 \times 1,72 = \mathbf{32,89}$$

2. Variabel Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan

Statistics

Partisipasi_Masyarakat_Budaya_Huyula
_dlm_Pembiayaan_Pendidikan

N	Valid	116
	Missing	0
Mean		80.93
Std. Error of Mean		1.800
Median		81.00
Std. Deviation		19.388
Variance		375.908
Skewness		.212
Std. Error of Skewness		.225
Kurtosis		.190
Std. Error of Kurtosis		.446
Range		96
Minimum		41
Maximum		137
Sum		9388
Percentiles	10	55.10
	25	68.00
	50	81.00
	75	93.00

$$\text{Range} = \text{skor maksimum} - \text{skor minimum}$$

$$\text{Range} = 137 - 41 = 96$$

$$\text{Banyak Kelas} = 1 + 3,3 (\log N)$$

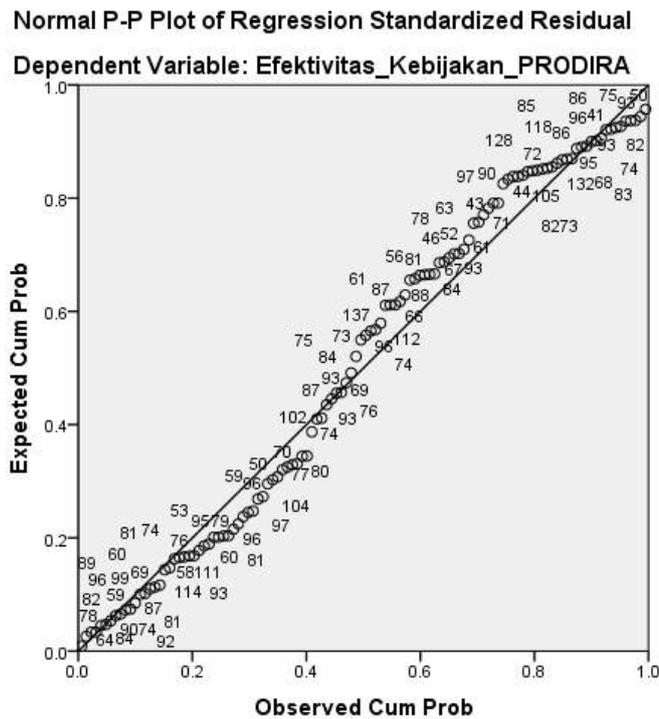
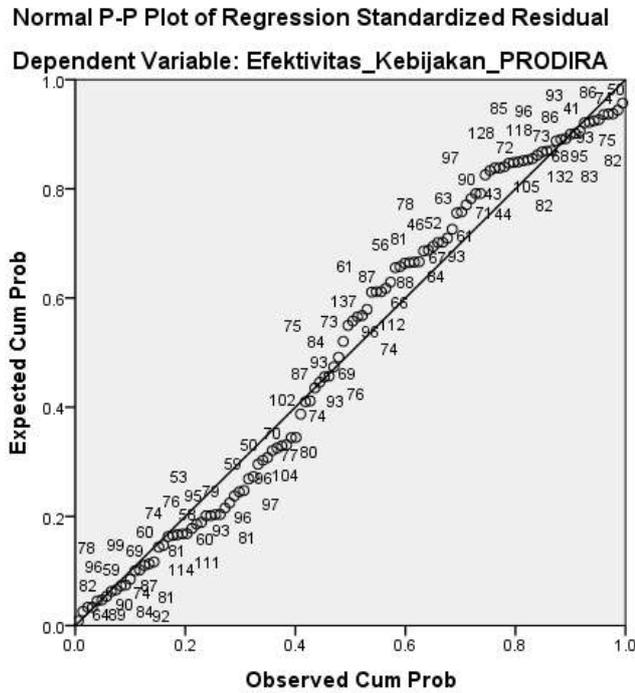
$$\text{Banyak Kelas} = 1 + 3,3 (2,065) = 1 + 6,83 = 7,83 = 8$$

Panjang Kelas (i) = Range/Banyak Kelas
 Panjang Kelas (i) = $96/8 = 12$

Ci	F	Cumf	X	fx	Fx (x)
41-52	10	10	-3	-30	90
53-64	14	24	-2	-28	56
65-76	23	47	-1	-23	23
77-88	28	75	0	0	0
89-100	27	102	1	27	27
101-112	8	110	2	16	32
113-124	3	113	3	9	17
125-136	2	115	4	8	32
137-148	1	116	5	5	25
N=166				$\Sigma fx = -16$	$\Sigma fx^2 = 302$

Lampiran VI Analisis Uji Persyaratan

Uji Normalitas



Lampiran VII : Perhitungan Bentuk Persamaan Regresi dan Uji Keberartian

No	X	Y	K	Ni	JK (e)
9	103	64	1	1	0
15	126	84	2	1	0
4	128	78	3	1	0
16	132	89	4	1	0
17	135	82	5	2	264.5
19	135	59			
12	138	92	6	1	0
1	140	74	7	1	0
5	143	90	8	1	0
8	145	65	9	1	0
24	146	96	10	1	0
3	147	75	11	2	18
23	147	69			
47	149	60	12	1	0
6	150	117	13	1	0
10	151	87	14	1	0
7	152	81	15	3	844.667
28	152	99			
46	152	58			
22	154	60	16	2	4.5
45	154	57			
11	157	64	17	2	50
50	157	74			
33	158	76	18	1	0
34	159	53	19	1	0
2	160	81	20	1	0
21	162	59	21	1	0
29	164	79	22	1	0
20	165	77	23	3	568.667
27	165	81			
37	165	50			
13	169	114	24	2	220.5
30	169	93			
18	170	95	25	1	0
14	171	111	26	1	0
43	172	62	27	1	0
52	173	96	28	1	0
42	174	77	29	2	24.5

44	174	70			
51	176	97	30	1	0
25	177	77	31	2	112.5
31	177	92			
40	178	96	32	1	0
26	180	80	33	1	0
36	183	92	34	1	0
35	184	65	35	2	40.5
61	184	74			
38	185	104	36	2	50
48	185	94			
41	188	69	37	1	0
53	189	76	38	1	0
54	191	93	39	2	18
60	191	87			
32	192	102	40	1	0
49	194	74	41	1	0
63	195	93	42	2	40.5
89	195	84			
39	197	73	43	2	2
79	197	75			
66	199	51	44	1	0
65	200	66	45	2	50
90	200	56			
69	201	46	46	1	0
74	202	61	47	1	0
103	204	52	48	1	0
64	206	43	49	2	1404.5
88	206	96			
68	207	67	50	2	200
80	207	87			
56	208	90	51	1	0
59	209	88	52	3	372.667
77	209	61			
91	209	78			
55	210	81	53	2	722
75	210	43			
57	211	84	54	1	0
67	213	63	55	2	1200.5
82	213	112			

58	214	86	56	2	2
62	214	84			
70	216	44	57	2	2312
81	216	112			
76	217	44	58	1	0
78	218	93	59	1	0
84	219	71	60	1	0
73	221	137	61	1	0
72	227	97	62	2	24.5
86	227	90			
106	229	72	63	1	0
71	231	41	64	1	0
85	232	73	65	1	0
87	233	82	66	2	4.5
100	233	85			
99	234	97	67	3	480.667
107	234	68			
108	234	92			
105	235	81	68	1	0
93	236	92	69	1	0
111	237	68	70	1	0
83	240	104	71	3	228.667
101	240	105			
112	240	86			
102	244	75	72	2	200
113	244	95			
114	245	50	73	1	0
96	246	96	74	2	84.5
104	246	83			
92	247	128	75	3	1650.67
98	247	118			
109	247	74			
116	250	82	76	1	0
95	251	109	77	3	278
97	251	93			
115	251	86			
94	253	132	78	1	0
110	256	93	79	1	0
Σ	22.580	9.388		116	11.474

Diketahui :

$$\Sigma X = 22580 \quad \Sigma Y = 9388 \quad \Sigma XY = 1.838.937$$

$$\Sigma X^2 = 4547192 \quad \Sigma Y^2 = 803010 \quad K = 79 \quad JK_{(E)} = 11.474$$

$$\text{Mean } X = 194,66 \quad \text{Mean } Y = 80,93$$

Rumus Regresi Linear Sederhana $\hat{Y} = a + bx$

$$\begin{aligned} a &= \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} = \frac{(9388)(4547192) - (22580)(1.839.937)}{116(4547192) - (22580)^2} \\ &= \frac{42.689.038.496 - 41.545.777.460}{527.474.272 - 509.856.400} \\ &= \frac{1.143.261.036}{17.617.872} = \mathbf{64,89} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} = \frac{(116)(1.828.937) - (22.580)(9.388)}{(116)(4.547.192) - (22.580)^2} \\ &= \frac{213.316.692 - 211.981.040}{527.474.272 - 509.856.400} = \frac{1.335.652}{17.617.872} = \mathbf{0,076} \end{aligned}$$

$$JK_{(total)} = \Sigma Y^2 = 803010$$

$$JK_{(a)} = \frac{(\Sigma Y)^2}{n} = \frac{(9388)^2}{116} = \frac{88.134.544}{116} = 759.780,552$$

$$\begin{aligned} JK_{(b/a)} &= b \left[(\Sigma XY) - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{n} \right] = 0,076 \left[(1.838.937) - \frac{(22580)(9388)}{116} \right] \\ &= 0,076 (1.838.937 - 1.827.422,759) = 0,076 (11.514,242) = 875,082 \end{aligned}$$

$$JK_{(s)} = JK_{(T)} - JK_{(a)} - JK_{(b/a)} = 803010 - 759.780,552 - 875,082 = 42.354,366$$

$$S^2 \text{ Reg} = \frac{JK_{(b/a)}}{1} = 875,082$$

$$S^2 \text{ Res} = \frac{JK_{(s)}}{n-2} = 42.354,366/114 = 371,529$$

$$F_{hitung} = S^2 \text{ Reg} / S^2 \text{ Res} = 875,082/371,529 = 2,355$$

$$F \text{ tabel } db1 ; 114 \text{ dan } \alpha = 0,05 = 3,92$$

$F_{hitung} < F_{tabel}$ = persamaan regresi $\hat{Y} = 64,89 + 0,076X$ adalah signifikan dalam taraf kepercayaan 95%

$$\begin{aligned} JK_{(res)} &= \Sigma Y^2 - JK_{(b/a)} - (\Sigma Y)^2/n = 803010 - 875,082 - (9388)^2/116 \\ &= 803010 - 875,082 - 759,781 = 801.375 \end{aligned}$$

$$JK_{(TC)} = JK_{res} - JK_{(E)} = 801.375 - 11.474 = 789,90$$

Lampiran VIII Analisis Pengujian Hipotesis

PERHITUNGAN KORELASI VARIABEL X DENGAN Y

Rumus yang digunakan adalah Kolerasi Pearson Product (Sudjana, 1996;368)

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{116 \sum 1843015 - (\sum 22580)(\sum 9388)}{\sqrt{116 \sum 4547192 - (\sum 22580)^2} \sqrt{116 \sum 803010 - (\sum 9388)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{213789740 - 211981040}{\sqrt{527474272 - 509856400} \sqrt{93149160 - 88134544}}$$

$$r_{xy} = \frac{1808700}{\sqrt{17614872} \sqrt{5014616}}$$

$$r_{xy} = \frac{1808700}{\sqrt{8833181896} \sqrt{9152}}$$

$$r_{xy} = \frac{1808700}{9398500}$$

$$r_{xy} = 0,192$$

Untuk Uji Keberartian dilakukan Uji t, sehingga diperoleh

$$t = \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-(r)^2}} =$$

$$t = \frac{0,192 \sqrt{(116-2)}}{\sqrt{1-(0,192)^2}} =$$

$$t = \frac{0,192 \cdot 10,68}{\sqrt{1-0,036864}} =$$

$$t = \frac{0,192 \cdot 10,68}{\sqrt{0,963136}} =$$

$$t = \frac{2,05}{0,98} = 2,09$$

$$t = 2,09$$

Lampiran IX Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/Minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. Arwildayanto, M.Pd	MP-FIP Universitas Negeri Gorontalo	Manajemen Pendidikan	60/25	<ul style="list-style-type: none"> - Mengorganisasikan kegiatan penelitian dan membagi tugas tim - Mengumpulkan data dilokasi Dinas pendidikan Provinsi Gorontalo, Dinas pendidikan kota, Komite Sekolah , Kepala Sekolah, bendahara dan siswa SMA Neg 1 Kota. - Validasi data - Analisis Data - Mengelola FGD - Mengikuti Diseminasi - Mengikuti seminar nasional - Mengikuti seminar internasional
2.	Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd	MP-FIP Universitas Negeri Gorontalo	Manajemen Pendidikan	60/25	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dilokasi Dinas pendidikan Kabupaten Gorontalo, SMA Neg 1 Kabupaten, Dinas Pendidikan Gorontalo Utara dan Komite Sekolah , Kepala Sekolah, bendahara dan siswa SMA Negeri I Kwandang Gorontalo Utara, Komite Sekolah , Kepala Sekolah, bendahara dan siswa SMA Negeri I Bone Bolango - Validasi Data - Analisis Data - Mengelola Seminar Hasil Penelitian - Mengikuti Studi Banding
3.	Warni Tune Sumar, S.Pd, M.Pd	MP-FIP Universitas Negeri Gorontalo	Manajemen Pendidikan	60/25	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dilokasi Dinas pendidikan Kabupaten Boalemo, Komite Sekolah , Kepala Sekolah, bendahara dan siswa SMA Neg 1 Boalemo , Dinas Pendidikan Pohuwato dan Komite Sekolah , Kepala Sekolah, bendahara dan siswa SMA Negeri I Pohuwato, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango - Mengelola Pelaporan Hasil Penelitian - Membuat Sinopsis Penelitian - Mengikuti Studi Banding - Menyiapkan surat menyurat

Gorontalo, 25 Mei 2016
Ketua Peneliti,

Dr. Arwildayanto, M.Pd)
NIP. 19750915 200812 1 001

LampiranX Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

IDENTITAS DIRI

Nama :Dr. Arwildayanto, M.Pd
 NIP/NIDN :197509152008121001/0015097511
 Tempat dan Tanggal Lahir :Tarok dan 15 September 1975
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : IIIId/Penata Utama Tingkat I
 Jabatan Akademik : Lektor
 TMT sebagai Dosen : 1 Desember 2008
 Status Dosen : Tetap Tidak Tetap
 Pendidikan Tertinggi : S3
 Fakultas : Ilmu Pendidikan
 Prodi/Jurusan : Maajemen Pendidikan
 Alamat kantor : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
 Telp./Faks. : 0435-821125, 0435-821752
 Alamat Rumah : Jl. Panca Krida samping kantor lurah Padebuolo, kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.
 Telp./Faks. : 0435-829408
 Alamat e-mail yg aktif : arwildayanto@ung.ac.id
 No. HP : 081244093774
 Alamat Facebook : https://www.facebook.com/arwildayanto.melayu
 Alamat blog/homepage/web:<http://dosen.ung.ac.id/arwildayanto/>

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TahunLulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi	Judul Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi
1998	Sarjana (S1)	IKIP Padang	Adm Pendidikan	Pengelolaan Pembiayaan Anggaran Rutin di SMU Negeri Se-Kotamadya Padang
2001	Magister (S2)	Univ. Neg. Padang (UNP)	Adm Pendidikan	Persepsi tentang Manajemen Konflik dan Kredibilitas Kepala Sekolah serta Kontri-businya terhadap Budaya Kerja Guru Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Tanah Datar
2011	Doktor (S3)	Univ. Neg. Jakarta (UNJ)	Manajemen Pendidikan	Budaya Kerja Dosen (Studi Kualitatif di Universitas Negeri Padang)

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
2011	Workshop Penelitian Kualitatif Menggunakan Software Caqdas NVIVO 9	UNG dan IKP University of	6-8 April 2011

		Malaysia	
2011	Training of trainers bagi dosen dan mahasiswa melalui program soft skill di lingkungan UNG	UNG	25 s/d 27 Juli 2011
2011	Diklat Pengelolaan Jurnal menuju Jurnal Terakreditasi	UNG	8 Desember 2011
2014	Diklat Meningkatkan Motivasi untuk Perubahan Menuju Sekolah Cemerlang	PPs UNG dan Dinas Pendidikan Kab Gorontalo Utara	21-25 Jan. 2014 di Aula Gerbang Emas Kab. Gorontalo Utara

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Sem/Tahun Akademik
Adm. Pembangunan	S1	Adm. Negara STIA LPPN Padang	Sem. 1/ 1999-2001
Filsafat Ilmu	S1	MP-FIP UNG	Sem. 2 2008-2009/
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan	S1	MP-FIP UNG	Sem. 2 2008-2009/
Assesmen	S1	PAUD-FIP UNG	Sem. 2 2008-2009/
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan	S1	MP-FIP UNG	Sem. 2 2009-2010
Manajemen Diklat	S1	MP-FIP UNG	Sem. 2 2009-2010
Filsafat Ilmu	S1	MP-FIP UNG	Sem. 2 2009-2010
Penulisan Karya Ilmiah	S1	MP-FIP UNG	Sem. 2 2009-2010
Metodologi Penelitian	S1	MP-FIP UNG	Sem. 2 2009-2010
Manajemen SDM	S1	MP-FIP UNG	Sem 1/ 2011-2012
Ekonomi Pendidikan	S1	MP-FIP UNG	Sem 1/ 2011-2012
Pengantar Manajemen	S1	Fak. Pertanian Univ. Muhammadiyah Gorontalo	Sem 1/ 2011-2012
Landasan Pendidikan	S2	MP-PPs UNG	Sem 2/ 2011-2012
Manajemen Diklat	S2	MP-PPs UNG	Sem 2/ 2011-2012
Teori Manajemen	S2	MP-PPs UNG	Sem 2/ 2011-2012
Penulisan Karya ilmiah	S1	MP FIP UNG	Sem 2/ 2011-2012
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan	S1	MP FIP UNG	Sem 2/ 2011-2012
Manajemen Diklat	S1	MP FIP UNG	Sem 2/ 2011-2012

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik
Manajemen SDM	S1	Media Pembelajaran	Sem 1 tahun 2009-2009
Metodologi Penelitian	S1	Perangkat Pembelajaran	Sem 2 tahun 2009-2010
Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	S1	Bahan Ajar	Sem 1/Tahun 2011-2012
Landasan Pendidikan	S2	Bahan Ajar	Sem 1/Tahun 2011-2012
Manajemen Diklat	S2	Bahan Ajar	Sem 1/Tahun 2011-2012
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan	S1	Bahan Ajar	Sem 1 Tahun 2012-2013
Kajian Mandiri Spesialisasi Pengelolaan	S2	Bahan Ajar	Sem. 1 Tahun 2012-2013
Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (diklat)	S1	Pratikum	Sem 1/tahun 2013-2014

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2009	Hubungan Persepsi Guru tentang Iklim Organisasi dan Supervisi Kelas dengan Motivasi Kerja Guru di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	Ketua Tim Kolaborasi dengan mahasiswa (Alan Saleh)	PNBP FIP UNG Rp. 5.000.000,-
2012	Pengembangan Model Principal Leadership of Quality Culture) di SMA/SMK Se- Kota Gorontalo	Anggota Tim	PNBP Lemlit UNG Rp. 25.000.000,-
2012	Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Gorontalo	Anggota Tim	PNBP PPs UNG Rp.15.000.000,-
2013	Budaya Kerja Pegawai Administrasi UNG dan Pengaruhnya Terhadap Ketercapaian Tugas Pokok dan Fungsi	Ketua Tim	DP2M Dikti Kemendikbud Rp. 50.000.000,-
2015	Kajian Budaya Kerja Champion Dosen dan Pegawai Administrasi FIP UNG dan Pengaruhnya Terhadap Tupoksi	Ketua	PNBP LPPM UNG Rp. 37.900.000,-

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
No 47/TH VI/ Oktober 1995	Deklarasi Padang di Uji Kebesarannya	Artikel,/Tabloid Ganto
No.49/TH VI/ Nov. 1995	Urgensi Gemar Membaca	Artikel,/Tabloid Ganto
No 74/TH X/ Maret/1998	Megawati	Artikel/Tabloid Ganto
18 November 2001	Reformasi Manajemen Pendidikan Tinggi	Artikel/Harian Umum Sumbar Mandiri
4 April 2002	Industri Pendidikan Alternatif Populer di Sumatera Barat	Artikel/Harian Umum Singgalang Sumbar

Edisi XII Tahun II 28 Juli-Agustus 2002	Refleksi Hasil Ujian Nasional Sumbar	Artikel/Tabloid Khatulistiwa	Bintang
Kamis 27 Oktober 2005	DPR terima Kompensasi BBM perkuat Pundi Hadapi Pemilu 2009	Artikel/Harian Singgalang Sumbar	Umum
24 November 2005	Budaya Kerja	Artikel/Harian Singgalang Sumbar	Umum
7 Desember 2005	Pendidikan Berbasis Kondisi Sosial Masyarakat	Artikel/Harian Singgalang Sumbar	Umum
19 Nov. 2007	Budaya Lisan Penumpulan Intelegualitas	Artikel/Harian Singgalang Sumbar	Umum
Senin 14 Juni 2010	Peran Kepala Sekolah-Guru pada Pendidikan Karakter	Artikel/Harian Umum Gorontalo Post	
Volume XVI/ 01/Febr./ 2012 ISSN:1410-3583	Kepemimpinan Nudge dalam Pengembangan Budaya Kerja Dosen (Studi Kualitatif di Universitas Negeri Padang)	Artikel/Jurnal Manajemen Univ. Tarumanagara Jakarta (Terakreditasi)	
Volume XVII/ 01/Febr/ 2013 ISSN:1410-3583	Pengembangan Model Principal Leadership of Quality Culture (PLQC) di Lembaga Pendidikan Kota Gorontalo	Artikel/Jurnal Manajemen Univ Tarumanagara (Terakreditasi)	
Volume 04/ Nomor 03 September 2013	Manajemen Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	Artikel/Jurnal Pedagogika Jurnal Ilmu Pendidikan UNG	
ISBN: 978-602- 7825-82-6	Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi; Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional	Buku-CV Alfabeta Bandung	
ISBN 602-258- 028-5	Manajemen Adat Basandi Syara'-syara' Basandi Kitabullah menjadi Perilaku Pendidik dalam Konstelasi Pewarisan Nilai-nilai Budaya Lokal	Buku- UNG Press	
ISBN 978-979- 1340-53-3	Jejak Perubahan 50 Tahun Universitas Negeri Gorontalo (1963-2013)	Buku UNG Press	
ISBN 979378122- X	Strategi Pengembangan Budaya Kerja Pegawai Administrasi UNG	Artikel, Prosiding Seminar Nasional Profesionalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia.	
ISBN 978-602- 99622-0-8	Berkat Do'anya Aku Jadi Begini	Editor, Ottobiografi H. Is Anwar Datuk Rajo Perak, SH- Jakarta	
ISBN 602280423- 9	Kepemimpinan Kependidikan dalam Pengembangan Budaya Mutu (<i>Principal Leadership Quality Culture</i>)	Buku-Penerbit Deepublish (CV Budi Utama) Yogyakarta	
ISBN 978-602- 17125-6-6	Ilmu Pendidikan Komtemporer Terlupakan, dan dibutuhkan Hadirkan Generasi Emas yang Berkarakter	Proceeding, 2014 Education International Seminar "Strengthening Teachers and Education Personnel Competence in Sour Change UNP-Padang	
ISBN 978-979- 1340-81-6	Konstruksi Manajemen Personalia Pendidikan di Sekolah Bermutu	Prosiding, 2014 Musyawarah Kerja APMAPI dan Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan, Gorontalo	
Sabtu, 21 Februari 2015	Fenomena Drilling Menjelang Ujian Nasional	Artikel/Gorontalo Post	
09-11 September 2015	<i>Transformative Pedagogical Competence of educators; Capital Connecting to Compete in the ERA of the ASEAN Economic Community</i>	Proceeding Scientific Forum- Faculty of Education Department of Science	

	(AEC)	Education (FIP-JIP) and The International Seminar, Gorontalo Indonesia,
Cat. Fotocopy/soft-file Abstrak atau Naskah lengkap mohon dilampirkan/diserahkan ke BPMA		

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2012	Kepemimpinan Nudge dalam Pengembangan Budaya Kerja Dosen	Lemlit UNG
2013	Manajemen Semangat Kewirausahaan Menuju Usaha Mandiri	Rumah Pembekalan Kerja Bersama Usaha Mandiri Kota Gorontalo
2013	Kontribusi Kepemimpinan Rektor dalam Pengembangan Budaya Kerja Dosen	BPMA UNG
2013	Mengembangkan karakter mahasiswa melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan	HMJ FIP UNG
2013	Managing the School Generasi Emas Pendidikan (Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Universal sebagai alternative strategic di Kabupaten Banggai)	Panitia Pelaksana Seminar di Kab. Banggai.

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Refleksi Pemikiran dan Pengalaman untuk Negeri (Sebuah AKuntabilitas Profesi) sebagai editor	CV. Lufhi Insan Mandiri
2011	Otobiografi, Pandangan Orang dan Pemikiran H. Is Anwar Datuk Rajo Perak, SH; Model Orang Minang "Four in One" (Wartawan, Pengusaha, Ninik Mamak, Politisi) sebagai Editor	CV Sapta Jaya
2013	50 Tahun Jejak Perubahan Universitas Negeri Gorontalo (Ketua Penulis)	UNG Press

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Lokal/ Nasional/ Internasional	Panitia/Peserta/Pembicara
14 Januari 2009	Seminar Pendidikan Nasional; "Sertifikasi Pengawas, Kepala Sekolah Guru dalam Peningkatan Profesionalisme".	Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG	Nasional	Sekretaris Panitia Pelaksana
22 April 2009	Seminar nasional pendidikan	Jurusan MP FIP UNG	Nasional	Ketua
8 -10 April 2011	Internasional Seminar & Conference ICEMAL (International Coference Educational Management,	Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG	International	Panitia Bidang Transportasi, dan akomodasi

	Administration & Leadership)			
13 Maret 2012	Seminar Pembelajaran Berbasis Karakter Bangsa	Program Pascasarjana UNG	Internasional	Seksi Persidangan
28-30 November 2014	Mukernas III APMAPI dan Temu Ilmiah Manajemen Pendidikan 2014	Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG dan Prodi Manajemen Pendidikan S2 PPs UNG	Nasional	Ketua
15 Desember 2014	Career Day Kenali Potensimu Tentukan Suksesmu	Himpunan Mahasiswa Jurusan BK FIP UNG	Lokal	Pemateri
23 Desember 2014	Sosialisasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI Koridor Sulawesi	Koordinator MP3EI Sulawesi dan Universitas Hasanuddin	Nasional	Peserta
Cat. Fotocopy/soft-file sertifikat, Abstrak atau Naskah lengkap mohon dilampirkan/diserahkan ke BPMA				

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Tempat
16 Juli 2009	Panitia Pelaksana, Kegiatan Silaturahmi dan Baksos Jurusan Manajemen Pendidikan	Di Kabupaten Pohuwato
27-29 Juli 2009	Pemateri; Strategi Kuliah di Perguruan Tinggi pada kegiatan Bakti Sosail dan LKMM Jur MP FIP UNG. Desa Marisa Kec Marisa Kab. Pohuwato	Pohuwato Gorontalo
4 Agustus 2009	Panitia Pelaksana Pengukuhan Guru Besar A.n Prof Drs. Welly Pangayow, M.Si, Ph.D dan Prof. Dr. H. Ansar, S.Pd, M.Si	Gorontalo
1 Oktober 2009	Panitia penyusun borang Evaluasi diri FIP UNG	MAN Cendikia Gorontalo
2-6 Nov 2009	Relawan Gempa Bumi di Sumbar	Padang
6 Oktober 2009	Pembimbing Mahasiswa MP FIP UNG pelaksanaan Magang/PKL	Gorontalo
29 Maret s/d 1 April 2010	Tim Pemantau Independen (TPI) pada Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP/MTs/SMPLB/ SMK SE PROVINSI GORONTALO	SMP 3 SATAP SUMALATA Gorontalo Utara
16 April 2010	Panitia Pelaksana Pameran Pendidikan FIP UNG	Gorontalo
6 Mei 2010	Panitia Pengawas Ujian Nasional Ulangan SMA/MA 2009-2010	Gorontalo
25 Agustus 2011	Sekretaris Panitia Ramah Tama Wisuda FIP 2010-2011	Gorontalo
10-14 Okt. 2011	Lokakarya Pengembangan Sistem Pusat Karir Mahasiswa	Makasar
31 Oktober	Moderator Workshop Pembentukan Pengelola	MAN Cendikia Gorontalo

2011	Kerjasama UNG	
17-21 Nov 2011	Raker Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI) tahun 2011	Palangkaraya
23 November 2011	Pembimbing Mahasiswa MP FIP UNG pelaksanaan Magang/PKL	Gorontalo
25-28 Januari 2012	Pemateri dan Peserta Musyawarah Kerja UNG di Sutan Raja Hotel	Manado
31 Januari 2012	Wakil Ketua Rama Tamah Wisuda FIP 2011/2012	Gorontalo
8 Februari 2012	Ketua Panitia Lokakarya perumusan Naskah SOP Kerja Dosen dan Staf Adm FIP UNG	Gorontalo
23-25 Feb 2012	Tim Pengendali Mutu dan Proses Penyelenggaraan Uji Kompetensi Awal Sertifikasi guru dalam jabatan Tahun 2012	Kab. Gorontalo Utara
5 April 2012	Sekretaris Tim Penyusunan SOP PPs UNG	PPs UNG Gorontalo
2012	Anggota Tim Penyelaras Penataan Kelembagaan Poligon	Politeknik Gorontalo
Maret 2010-2012	Penyunting Pelaksana Pedagogika Jurnal Ilmu Pendidikan FIP UNG	FIP UNG Gorontalo
18 Juni 2013	Kegiatan Praktikum MK Manajemen Pendidikan dan Pelatihan	FIP UNG
2013-2014	Ketua Revisi OTK/Statuta UNG	UNG
2014	Sekretaris Perubahan Nama UNG	UNG
2014	Pengembangan Penelitian Tindakan Kelas (Ptk) Bagi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kelompok Kerja Guru Manggis Gugus 2 Kecamatan Kota Timur-Kota Gorontalo	Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM UNG)

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ., Fak., Jur., Lab., Studio, dll)	Jangka waktu
Tim Penyusun Proposal	Program Pascasarjana Prodi S2 Manajemen Pendidikan	1 Tahun (2008)
Staf Khusus	Pembantu Rektor IV UNG	Okt. 2011-2014
Direktur	Career Development Center UNG	2012-2014
Staf	Penunjang Project IDB 7 in !	2013-sekarang
Sekretaris	Senat Fakultas Ilmu Pendidikan UNG	2013-2014
Anggota	Senat Fakultas Ilmu Pendidikan UNG	2014-Sekarang
Anggota	Senat Universitas Negeri Gorontalo	2014-Sekarang
Wakil Dekan I	Fakultas Ilmu Pendidikan	2014-Sekarang

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Peran	Tempat
3 s/d 5 Juli 2009	Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Baksos	Pemateri; Manajemen Keuangan lembaga Kemahasiswaan	Desa Bongo Batudaa Pantai Kab Gorontalo
6 Agustus	Pra Mimbar dan Mimbar	Panitia Penyelenggara	Gorontalo

2009	UNG		
20-22 Nov 2009	Latihan Dasar Kemahasiswaan dan Baksos Jur PAUD FIP UNG di Desa Molatabu Bone Bolango	Pemateri tentang Manajemen Keuangan Lembaga Kemahasiswaan	Gorontalo
11 Desember 2011	Training Organization HMJ MP FIP UNG di Desa Tupa Kec. Tapa	Pemateri: Teknik Pembuatan Pertanggungjawbn Keua. Org. Kem.	Gorontalo
13-15 Januari 2012	Bakti Akademik Mahasiswa Program Pasca Sarjana UNG	Pemateri	Pagimana Kab Banggai Sulteng

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
1997	Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Tingkat FIP IKIP Padang.	Dekan, SK No. 1072/PT37.H4.FIP/0.5/1997 tanggal 3 Mei 1997
1997	Juara II Mahasiswa Berprestasi Tingkat IKIP Padang.	Rektor IKP Padang, SK No. 079/PT37.H/0.5/1997, tanggal 30 Mei 1997.
1998	Lulus sarjana dengan predikat "Cumlaude" tahun 1998	Dekan FIP dan Rektor IKIP Padang
2013 dan 2014	Dosen Berprestasi I Tingkat FIP UNG	Dekan FIP UNG
2013 dan 2014	Dosen Berprestasi IV Tingkat UNG	Rektor UNG

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan
2011-Sekarang	Kerukunan Minang Tua Saiyo Provinsi Gorontalo	Ketua
2011-sekarang	Komite Sekolah Dasar Negeri 33 Kota Selatan Kota Gorontalo	Ketua
2013-2017	Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Wakil Direktur Eksekutif
2012-2017	DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Prov Gorontalo	Ketua Biro Peningkatan SDM dan Pendidikan
2015-2020	HIMPAUDI Provinsi Gorontalo	Koordinator Hubungan Masyarakat

PENGALAMAN MEMBIMBING TESIS/SKRIPSI/TA MAHASISWA

Semester/ Tahun Akademik	Judul	Pembimbing 1/ Pembimbing 2/ Penguji
Sem 2 tahun 2010-2011	Sikap Guru terhadap Budaya Mutu Sekolah di SD Inpres Karya Indah	Penguji
Sem 2 tahun 2010-2011	Evaluasi Program KKG di Kabupaten Pohuwato	Penguji
Sem 2 tahun 2010-2011	Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 4 Kab. Gorontalo	Penguji
Sem 2 tahun 2010-2011	Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam peningkatan Kinerja Guru dan staf di SMA di Kota Gorontalo	Penguji
Sem 2 tahun 2010-2011	Pelaksanaan Administrasi Kesiswaan di MTS Negeri Gorontalo	Penguji
Sem 2 tahun 2010-2011	Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam meningkatkan Kompetensi Guru di SMP Negeri Paguat	Penguji
Sem 2 tahun 2010-2011	Keefektifan Proses Pelaksanaan Supervisi Pengawas di SDN I Marisa Kab. Pohuwato	Penguji
Sem 2 tahun 2010-2011	Layanan Akademik Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNG	Penguji (S1 MP FIP UNG) An. Romi M. Dai
Sem 2 tahun 2010-2011	Penerapan Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dasar di Kab Bolang Mongondo Utara	Penguji S1 MP FIP UNGa.n. Winda S. Pontoh
Sem 2 tahun 2010-2011	Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SD se Kecamatan Wonosari Kab Boalemo	Penguji (MP FIP UNG) an. Yusuf Akuba
Sem 1 tahun 2011-2012	Kinerja Guru Tersertifikasi melalui Fortofolio di SDN I Iluta Kab. Gorontalo	Pembimbing 2
Sem 2 Tahun 2011-2012	Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SD di Kec. Wonosari Kab. Boalemo	Penguji
Sem 2 Tahun 2011-2012	Strategi Kepemimpinan Kepala Cabang Dinas Diknas dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kec. Wonosari Kab. Boalemo	Penguji
Sem 2 Tahun 2011-2012	Kemitraan kepala sekolah dengan masyarakat dalam meningkatkan karakter siswa (khususnya SMP 8 Satu Atap Wonosari	Penguji
Sem 2 Tahun 2011-2012	Pengaruh kreativitas Guru mengajar terhadap motivasi belajar siswa di SDN 03 Wonosari	Penguji
Sem. 1 Tahun 2012-2013	Otonomi Kepsek dalam pengembangan Mutu Pembelajaran di SDN 2 Botumoputi Kec. Tibawa Kab. Gorontalo	Penguji
Sem. 1 Tahun 2012-2013	Analisis Proses Rekrutmen Guru SD di Kab Gorontalo	Penguji (S1)
Sem 2 Tahun 2012-2013	Pengaruh Budaya Sekolah dan Komitmen Guru Terhadap Pengelolaan Pendidikan Karakter di SDN Se Kota Timur Kota Gorontalo	Penguji (S2)
Sem 2 tahun 2013-2014	Pengelolaan Soft Skill dalam Pembelajaran Jurusan Akuntansi pada SMK Negeri 1 Boalemo	Penguji II (PPs UNG) An. Asriani Umar
Sem 2 Tahun 2013-2014	Evaluasi Program Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Gorontalo	Pembimbing II

Sem 2 Tahun 2013-2014	Evaluasi Program Pengawas Sekolah Dasar di Kabupaten Gorontalo	Penguji II (PPs UNG) an. Hayati I. Miolo
Sem 2 Tahun 2013-2014	Pembinaan Kompetensi Kewirausahaan Siswa SMK Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo	Penguji II (PPs UNG) An. Nurhasana R.A. Dhanupoyo
Sem 2 Tahun 2013-2014	Persepsi Siswa Terhadap Kinerja Guru Hubungannya dengan Motivasi Belajar di SDN Se-Kecamatan Asparaga	Pembimbing II
Sem 2 Tahun 2013-2014	Pengelolaan Keuangan di SMA Negeri 1 Lamala Kabupaten Banggai	Penguji II (PPs UNG) an. Muh. Yunan Lahay
Sem 2 Tahun 2013-2014	Pengelolaan Sekolah pada Persyarikatan Muhammadiyah Luwuk Kab. Banggai	Pembimbing II (PPs UNG)
Sem 2 Tahun 2013-2014	Implikasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri Se Kecamatan Luwuk	Penguji (PPs UNG) an Nursito
Sem 2 Tahun 2013-2014	Penguatan Budaya Disiplin Guru (Studi Kasus pada Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri Masama di Kec. Masama Kab Banggai	Penguji (PPs UNG)
Sem 2 Tahun 2013-2014	Hubungan antara Pengendalian Diri Guru dan Komitmen Kepala Sekolah dengan Budaya Kerja Guru pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo	Penguji II (PPs UNG) An. Rohana Mobonggi
Sem 2 Tahun 2013-2014	Sinergitas Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual dalam Pengembangan Kultur Akademik dan Pengelolaan Konflik Mahasiswa UNG	Penguji I (PPs UNG) An. Sutrisno Dj Yunus
Sem 2 Tahun 2013-2014	Hubungan Keteladanan Kepala Sekolah dan Pemberian Reward dengan Disiplin Kerja Guru SMA Negeri Se-Kecamatan Luwuk	Pembimbing 2 (PPs UNG)
Sem 2 Tahun 2013-2014	Hubungan Komitmen Guru dan Lingkungan Kerja dengan Etos Kerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Nuho Kabupaten Banggai	Penguji I (PPs UNG) An. Rusnawati Sangketa
Sem 2 Tahun 2013-2014	Hubungan Kecerdasan Emosional Kepala Sekolah dan Pengelolaan Konflik dengan Stres Kerja Guru di Sekolah Dasar di Kecamatan Hulonthalangi	Penguji II (PPs UNG) An. Hijrah R. Hakim
Sem 2 tahun 2013-2014	Hubungan Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Budaya Kerja Guru Terhadap Mutu Pembelajaran di Gugus I SDN Kota Timur	Penguji II (PPs UNG) An. Herlina T. Ismail
Sem 2 tahun 2013-2014	Strategi Pengelolaan Konflik Guru dalam Menciptakan Semangat Kebersamaan di SMA Negeri 2 Luwuk Kab. Banggai	Pembimbing II (PPs UNG) an. Nur Sumiyarsih
Sem 2 Tahun 2013-2014	Dampak Kebijakan Prodira terhadap Pengelolaan Sekolah	Penguji I (PPs UNG) An. Hadijah Mootinelo
Sem 1 Tahun 2014-2015	Tata Kelola Program Akreditasi pada SMP Negeri di Kabupaten Gorontalo Utara	Penguji I (PPs UNG) An. Moh. Citra Yahya
Sem I tahun 2014-2015	Sistem Informasi Rencana Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato	Penguji II (PPs UNG) An. Moh. Iskandar Alulu
Sem I tahun 2014-2015	Hubungan Supervisi Akademik dan Pelatihan dengan Kemampuan Mengajar Guru SMP Kabupaten Pouhuwato	Penguji I (PPs UNG) An. Hendrita M. Sulila
Sem 1 Tahun 2014-2015	Hubungan Komunikasi Interpersonal dan Komitmen Guru dengan Pengelolaan Konflik di Sekolah Kabupaten Gorontalo	Penguji II (PPs UNG) an. Jumani
Sem 1 Tahun 2014-2015	Hubungan Komunikasi Sekolah dan Lingkungan Sosial dengan Partisipasi Masyarakat di SMA Negeri Pohuwato	Penguji II (PPs UNG) an. Suaib
Sem 1 Tahun 2014-2015	Kebijakan Pendidikan Gratis SMP Negeri 1 Masama Kabupaten Banggai	Pembimbing 2 PPs UNG an. Rivana Rahma
Sem 1 Tahun 2014-2015	Kepemimpinan Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pengelolaan Konflik Peserta Didik (Studi Kasus di SMK Negeri 2 Luwuk Kabupaten Banggai	Pembimbing II (PPs UNG) an. Sukmawati

PENGALAMAN SEBAGAI DOSEN PENASEHAT AKADEMIK

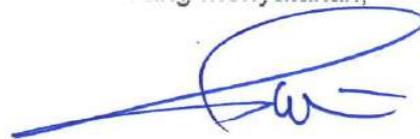
Semester/ Tahun Akademik	Jumlah mahasiswa bimbingan
Semester 1/tahun 2009-2010	23 mahasiswa

Semester 1/tahun 2011-2012	37 mahasiswa
Semester 1/tahun 2012-2013	37 mahasiswa
Semester 2/Tahun 2012-2013	37 mahasiswa
Semester 1/Tahun 2013-2014	43 mahasiswa
Semester 2/Tahun 2013-2014	43 mahasiswa

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Gorontalo September 2017

Yang menyatakan,



(Dr. Arwildayanto.M.Pd)

Curriculum Vitae Anggota Peneliti I : Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd

BIODATA

I. IDENTITAS DIRI

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Nina Lamatenggo SE, MPd
1.2	Gol./Jabatan Fungsional	IIIId/Lektor
1.3	NIP/NIK/No. Identitas lainnya	19661207200312 2001
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo 7-12-1966
1.5	Alamat Rumah	Jl. Kiay Modjo No 12 Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat.
1.6	Nomor Telepon/Faks	Telp. -
1.7	Nomor HP	HP. 081340551637
1.8	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No.06 Kampus UNG Kota Gorontalo
1.9	Nomor Telepon/Faks	
1.10	Alamat e-mail	lamatenggonina@yahoo.co.id
1.11.	Mata Kuliah yang di ampu	1. Dasar-Dasar manajemen 2. Manaj. Kearsipan 3. Kewirausahaan 4. Pengantar Kepemimpinan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program:	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	STIE	Univ Negeri Jakarta	Universitas Negeri Jakarta
2.3 Bidang Ilmu	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Manajemen Pendidikan	Manajemen Pendidikan
2.4 Tahun Masuk	1987	1998	2009
2.5. Tahun Lulus	1991	2001	2012
2.6 Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi		Penilaian Guru Tentang Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Motivasi Kerja Guru Dan Kinerja Guru Sekolah Dasar	Pengaruh Lingkungan Kerja, Partisipasi dalam Pelatihan KKG, Kompetensi Profesional, Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Guru sekolah Dasar Di Kecamatan Limboto Barat
2.7. Pembimbing / Promotor		Dr. Ida Sinambela, MPd Dr. Pashkalisi Riberu, MPd	Prof. Dr. H. Djaali, M.Pd Prof. Dr. H. Hamzah Uno, MPd

III. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah(juta Rp)
1'	2007	Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo.	DIPA UNG	Rp. 5.000.000,-
2.	2008	Pelaksanaan Koordinasi Tugas Oleh Kepala Sekolah Di SMA Negeri I Limboto	DIPA UNG	Rp. 5.000.000,-
3.	2011	Budaya Kerja Dosen Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo	RBA FIP	Rp. 5.000.000,-

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Status	Lembaga	Kota	Tahun
1	Anggota	SMA Negeri I Limboto Barat	Kabupaten Gorontalo	2007
2	Anggota	Yayasan Pendidikan Nurul Jannah	Kabupaten Gorontalo	2007
3	Anggota	SDN Di Kecamatan Limboto Barat	Kabupaten Gorontalo	2008
4	Anggota	Ibu-ibu PKK Desa Ombulo	Kabupaten Gorontalo	2009
5	Anggota	SMA Negeri I Limboto	Kabupaten Gorontalo	2010

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Gorontalo, 25 September 2017
Yang Menyatakan,

Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd
NIP. 19661207 2003 12 2 001

Curriculum Vitae Anggota Peneliti 2 : Warni Tune Sumar, S.Pd, M.Pd

BIODATA**II. IDENTITAS DIRI**

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Warni Tune Sumar SPd.MPd
1.2	Gol./Jabatan Fungsional	IIIb/ Asisten Ahli
1.3	NIP/NIK/No. Identitas lainnya	197003242008122001
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Telaga 24 Maret 1970
1.5	Alamat Rumah	Desa Bulaota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo
1.6	Nomor Telepon/Faks	-
1.7	Nomor HP	HP. 085341351433 atau 085256564799
1.8	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No.06 Kampus UNG Kota Gorontalo
1.9	Nomor Telepon/Faks	
1.10	Alamat e-mail	warnisumar@gmail.com
1.11. Mata Kuliah yang di ampu		5. Manajemen kurikulum dan pembelajaran 6. Perencanaan pembelajaran 7. Pengantar pendidikan 8. Strategi Pembelajaran 9. Pembinaan kompetensi mengajar 10. Belajar dan Pembelajaran

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program:	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	STIKIP Gorontalo	Univ Negeri Jakarta	-
2.3 Bidang Ilmu	Biologi	Manajemen Pendidikan	
2.4 Tahun Masuk	1997	2004	
2.5. Tahun Lulus	1999	2006	
2.6 Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Pengaruh pemberian pupuk anorganik terhadap pertumbuhan padi	Kinerja Kepala Sekolah dalam Rangka Manajemen Berbasis Sekolah	
2.7. Pembimbing / Promotor		Pembimbing I Dr.Paskhalis Riberu MPd Pembimbing II Prof .Dr. Ani Hasan MPd	

III. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah(juta Rp)
1.	2011	Hubungan Persepsi Guru terhadap pelatihan tenaga guru melalui KKG dan kemampuan guru di SDN se kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	PNBP UNG	Rp. 5.000.000,-

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Status	Lembaga	Kota	Tahun
1	Pelaksana	SDN se Kecamatan Kota Tengah	Kota Gorontalo	2012
2	Dosen Luar Biasa	Poltekes Gorontalo	Kota Gorontalo	2012

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1	2010	Penerapan Pendekatan ketrampilan proses dalam seting pembelajaran kooperatif STAD untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di SLTP	ISSN: 1412-985	
2	2011	Inovasi manajemen kurikulum	ISBN:979-337341-5	Pedagogika pres
3	2012	Pengelolaan desain pembelajaran berbasis pendidikan karaktet	ISSN-2086-4469	

VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

Urutkan judul HKI yang pernah diterbitkan 5-10 tahun terakhir.

No	Tahun	Judul Tema/Haki	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

VIII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya yang pernah dbuat/ditemukan selama 5 tahun terakhir.

No	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Gorontalo, 10 Agustus 2017

Yang menyatakan

Warni Tune Sumar SPd. MPd
NIP: 19700324 2008 2001

Lampiran XI : Surat Pernyataan Ketua Peneliti



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo ; 96128, Telepon (0435) 821125-831944,
Faximile (0435) 821751 Laman : <http://www.ung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Arwildayanto, M.Pd
NIDN : 0015097511
Pangkat / Golongan : Penata Tkt I/III d
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: *Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira) Kontribusinya terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*, yang diusulkan dalam skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, untuk tahun anggaran 2017 s/d 2018 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua LPPM UNG



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH, M.Hum
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 25 Mei 2016
Yang menyatakan,
Ketua Peneliti,



Dr. Arwildayanto, M.Pd
NIP. 19750915 200812 1 001

Lampiran XII Permohonan Rekomendasi Penelitian

Hal : Permohonan Rekomendasi

Gorontalo, 03 Februari 2017

Kepada Yth.**Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)****Universitas Negeri Gorontalo**

di

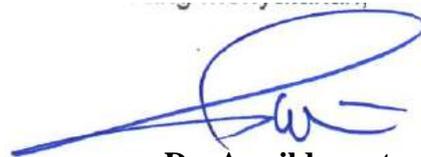
Gorontalo

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat nomor : 025/E3/2017 tentang penerima pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2017, maka saya memohon perkenan ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo untuk memberikan surat rekomendasi penelitian dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Kontribusinya Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Gorontalo”**. ditujukan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, Kepala Sekolah, Guru, Bendaharawan dan orang tua siswa atau Komite Sekolah SMA/SMK dan MA se Provinsi Gorontalo,

Demikian surat permohonan rekomendasi ini saya buat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,



Dr. Arwildayanto, M.Pd
NIP.19750915200812 1001

Lampiran XIII Surat Rekomendasi Dari LPPM UNG



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
JL. Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo - 96128
Telp : 0435. 821125-825424 Fax 0435. 821752

SURAT REKOMENDASI

No 154/UN47.D/LL/2017

Berdasarkan surat dari pemohon : Dr. Arwidayanto, M.Pd NIP: 197509152008121001 tanggal 06 Februari 2017 tentang Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Maka dengan ini Ketua LPPM UNG memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Dr. Arwidayanto, M.Pd
 NIP : 197509152008121001
 Jurusan : FIP
 Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan

Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul: ***"Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Kontribusinya Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Gorontalo"*** yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMA/SMK se Provinsi Gorontalo, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat atau Pemangku Agama.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Februari 2017

Mengetahui,
 Ketua LPPM, &

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH. M.Hum
 NIP. 196804091993032001

Lampiran XIV Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo



GUBERNUR GORONTALO

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesbangPol/584/2017

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- f. Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga - Lembaga Teknis Daerah
- g. Surat dari UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Nomor 154/UN47.D/LL/2017 Tanggal 06 Februari 2017 perihal Permohonan Izin penelitian.

2. Menimbang :

Bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengendalian dan pengembangan penelitian serta Stabilitas Daerah maka perlu memberikan Rekomendasi Penelitian berdasarkan Izin Penelitian.

GUBERNUR GORONTALO, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Dr. Arwidayanto, M.Pd**
- b. Alamat Peneliti : Jl. Pancakidra Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
- c. Untuk : 1) Melakukan penelitian dengan judul Proposal "*Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira) Kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*"
 - 2) Tujuan Penelitian : Bagaimana Proses perumusan proses kebijakan pembiayaan prodira pada tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo
 - 3) Lokasi Penelitian : SMA/SMA-LB/SMK/MA se-Provinsi Gorontalo
 - 4) Waktu Penelitian : 2017-2018

3. sebelum2

Lampiran XV Surat Pengantar Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jl. Moh. Thayeb Gobel Desa Tinelo Ayula Kec. Bulango Selatan, Bone bolango

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 420/DIKBUDPORA/1726 /SEK/V/2017

Kepada Yth

Kepala SMA/SMK Se-Provinsi Gorontalo

Di Tempat

Menindaklanjuti surat Gubernur Gorontalo Nomor:070/KesbangPol/852/2017, perihal Rekomendasi Penelitian, bersama ini kami kirimkan nama yang melakukan penelitian a.n. **Dr. Arwidayanto, M.Pd** dengan judul Proposal "*Efektifitas Kebijakan Program Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira) Kontribusinya Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula dalam Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 15 Mei 2017

a.n Kepala Dinas
 Sekretaris,

Drs. Hi. Yahya Dj. Ichsan, MA
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660326 199203 1 006

**Keynote Speaker dalam Forum Ilmiah Nasional
FORUM FIP-JIP 2017**



**EXAMINING THE EFFECTIVENESS OF PRODIRA
ON IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT INDEX
(A PROVINCE OF GORONTALO CASE)**

Oleh
Dr. Arwildayanto, M.Pd
Dosen Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Gorontalo

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
13-15 September 2017

Examining the Effectiveness of PRODIRA on Improving Human Development Index (HDI) (A Province of Gorontalo Case)

Arwildayanto
Faculty of Education
Universitas Negeri Gorontalo
Gorontalo, Indonesia
arwildayanto@ung.ac.id

Abstract—The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of an education program for the local people - *Program Pendidikan untuk Rakyat* (PRODIRA) in the improvement of Human Development Index (HDI) in the Province of Gorontalo. Through PRODIRA the local government has already issued the regional budget (APBD), which the impact of the budget allocation will be measured by the HDI. The research approach employed a qualitative method of semi-structured interview, observation, and focus group discussion on key informants, which involved in compilation and implementation of the PRODIRA in Gorontalo Province. The study result showed that the PRODIRA provided acceleration on educational equity for the population aged 16-18 years, which enrolled at the level of secondary education. PRODIRA has also significantly impact in increasing the Human Development Index of Gorontalo Province during 2012-2016, that it proved by the increasing the literacy rate from 95% to 99.81%, the average number of school years from 8 years to 12.88 years. The result also revealed that the PRODIRA is able to reduce levies in some schools and it increase acceleration of all education services to school age 16-18 years through accelerated national education service. The research recommended that the central government needs to encourage local governments to innovate in developing the PRODIRA in order to achieve the target of towards the nation of Indonesia is independent and highly competitive in 2025

Keywords—*PRODIRA; policy, acceleration, human development index*

I. INTRODUCTION

Education is an effort that can accelerate the development of human resources in carrying out the tasks assigned to him. Realizing that, the Indonesian government is committed to providing educational services, as stipulated in the 1945 Constitution of the Third Amendment of article 31 paragraphs 2, which every citizen is obliged to follow basic education and the state finances it [1]. The derivation is reinforced by Law Number 20 Year 2003 on National Education System, in article 34 states that the Government and regional governments guarantee the implementation of compulsory education at the minimum level of basic education without charging [2]. The mandate of this law provides consequences for the central and local governments to allocate funds for free basic education to improve the quality of human

resources in minimum standards. Free basic education policy so that every citizen of Indonesia has opportunity to complete the minimum education at the level of basic education in preparation his life free from illiteracy, as well as preparation to continue on higher education level.

The government's commitment, as evidenced by the development and improvement of the national education budget is moving up. This needs to be appreciated as a form of government's promise to pay attention to the quality of education. The increasing of budget allocation for education is seen as a strategic move to achieve quality education in line with Government Regulation No. 19/2005 providing the legal framework and vision of education standards and quality, which require clear strategic steps to make it happen [3].

The central government's commitment to free basic education is the foundation for conducting basic education as a whole no primary school-age children lack access to schools. In addition, provincial, district and municipal governments are given discretion to provide free education at a higher level towards free education at the secondary and higher education levels. As the statistical data, the 2015 budget of the central government prepares the financing of a 12-year compulsory education program. The 12 year compulsory education requires commitment and support of all parties, namely the center, local government, community and parents [4]. To respond to the increase in compulsory education programs held by the central government, the Province of Gorontalo has launched a Free Education Program policy "in the form of an education program for the people (PRODIRA) which is the flagship program of Gorontalo provincial government since 2012 until now [5]. This policy is based on several considerations, among others, that human resources is a very decisive asset for the retreat Gorontalo. Therefore, the development of human resources has become one of the priorities, and become the flagship program of Gorontalo Provincial Government.

Political will the provincial government of Gorontalo make educational programs for the people (PRODIRA) listed in the financing of regional income and expenditure budget (APBD) is inspired from the idea that education functions to develop ability an and shape the character and civilization of dignified nation in order to educate the nation 3 of RI Law No. 20 Year 2003 on National Education System). Local governments make pro-people policies, reducing the burden of the people in financing education. The political will of the

government is in line with efforts to improve the human development index (HDI) of Gorontalo province.

Contextually, the problem of low quality of education so far was due to the low source of education costs. This is evident from the 2004 Human Development Index report that placed Indonesia in 111th position under Malaysia 58, Thailand 76 and even Philippines 83 [6]. Specific circumstances at the primary level of education, seen from the results of a study conducted by the International Educational Achievement (IEA), which shows the reading ability of Indonesian Elementary School students are in the 38th out of 39 countries studied [7]. Gorontalo Provincial Government's policy as a form of commitment of provincial government of Gorontalo more accelerate the success of free education funding at high school/vocational school level by accommodating the burden of existing costs in the community and parents are given financial incentives from the budget of regional income and expenditure (APBD) Education program for the people (PRODIRA) which was launched by Gorontalo Governor Drs. Rusli Habibie, M.Ap. and Vice Governor Dr. Idris Rahim, MM [8].

The main objective of PRODIRA is to help parents not to burden with school lives that are operational and personnel. Arfan Arsyad (2012: 4) explained that PRODIRA is the work program of Gorontalo Provincial Government for the period 2012-2017 which is budgeted through the government budget, Gorontalo Provincial Government to encourage accelerated increase of human development index (IPM) in Gorontalo province [9].

II. THEORITICAL BASIS

A. Effectiveness of Prodira's Policy

Buhler, Patricia and Alpha define effectiveness as a measure of the targeted output level, or a measure of success for achieving output [10]. Robbins states effectiveness as a degree to which an organization or institution can realize its purpose [11]. Effectiveness becomes an essentially causal concept, in which the meaning to end relationship, and the cause-effect relationship. Yosuo T. Panggulu argues that the success of the organization, program is positively dependent on the effectiveness achieved. Therefore, effectiveness is quite important for the work unit, both government and private institutions in order to be able to provide the best service to its stakeholders, in the affairs of public services, in accordance with what has been planned and right on the target [12], as well as in managing PRODIRA. Prodira's policy is an integral part of the free education program mandated expressly in the 1945 Amendment III Law of Article 31 paragraph 2 which stated, every citizen is obliged to follow Basic Education and the State to finance it. The derivation of Law Number 20 Year 2003 Article 34 affirms that the Government and Local Government guarantee the implementation of compulsory education at the minimum level of Basic Education without collecting fees. To achieve these objectives, the state shall provide free quality education services in accordance with the interests and talents of its citizens irrespective of social, racial, ethnic, religious, and gender status, efforts to carry out the mandate [13].

Puluhulawa and Puluhulawa stated that the policy of free education program is one of the central government policy from elementary level to junior high school, which regulated as compulsory education (WAJAR) 9 years through school operational fund (BOS). In addition, it is also one the central government's efforts in implementing the constitution on the right of the citizen in obtaining education. However, the free education program that implemented widely in Indonesia has not yet reached the education of Senior High School (SMA) or equivalent so that it becomes a problem for the people who cannot afford [14].

Based on Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, article 13 states that it has decentralized some obligatory matters of provinces and districts/municipalities, among others, concerning education [15]. The decentralization policy of education affairs to the government provides the discretion of managing education based on local regulations (PERDA) respectively. One of Gorontalo Local Government's policies is Free Education can be exceeded from the national policy of 9-year compulsory education. Gorontalo Province has the initiative to implement education program policies for the people from primary to secondary school level or equivalent, regulated by Local Regulation No. 7 of 2012, on the implementation of the PRODIRA policy, in the general provision it is explained that the Free Education Service (FES) is an education service that complimentary participants students, parents or guardians from the levy of operational costs of education units at secondary education level [16]. Gorontalo Provincial Government is committed to implement free education program for people who send their sons and daughters in high school level or equal. Local government policy on free education is one of the flagship programs of Gorontalo Governor. The free education program has been implemented since January 2012 is expected to provide educational services for the underprivileged/less favoured to complete education up to senior high school level or equivalent.

FES program up to senior high school level is also regulated by Gorontalo Governor Regulation No. 08/2012 on Guidance of Grant Fund Management for School Operational Fund (BOS) of Senior High School, Senior High Vocational School (SMK) and Senior High Islamic School (MA) in the Framework of Free Education Program of Gorontalo Province [17]. Subsequently changed to the Education Program for the People (PRODIRA) as outlined in Gorontalo Provincial Regional Regulation No. 2 of 2012 on Regional Development Plans of Gorontalo Province in 2012-2017 which makes education for the people and free health become the leading program [18].

The conception of PRODIRA has been fully explained in the Regional Regulation No. 7 of 2012 on the Implementation of Education for the People (PRODIRA) in Chapter I General provisions of Article 1 states that PRODIRA is the implementation of educational programs that complimentary learners, parents or guardians from the levy of operating expenses on the unit secondary education except for International Standard Schools (RSBI), International Standard

Schools (SBI), and community-managed education units, as well as providing quality improvement costs at primary education and incentives for PAUD educators [19].

The function of the implementation of the policy of PRODIRA by the government of Gorontalo province can be observed in the PRODIRA guideline (Juknis PRODIRA), namely: a) as an effort of expanding and equalizing the opportunity to obtain free, affordable, quality and justice for all citizens, b) as supporting national education programs Universal secondary education held jointly by the Regional Government, and the Education Unit [20].

The objective of the PRODIRA Policy is in accordance with the Decree of Head of Province District Education Office (Dikbudpora) No.188.4/Dikbudpora/ 172.a/Dikmen/I/2014, among others: a) increase the participation rate of early childhood education, primary and secondary education, b) improve services at all levels of education for the quality and relevance of education, c) Free of charge for all students of SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, and SMA/SMALB/MA/ SMK, both state and private school to the operational cost of education unit. From Prodira's goal it is clear that Prodira's policies are in line with efforts to increase the Human Development Index (HDI) of Gorontalo [21].

B. Human Development Index (HDI).

The Human Development Index (HDI) is a comparative measure of life expectancy, literacy, education and living standards for all countries in the world (Bureau of Statistics and UNDP, 1997) [22]. HDI is used to classify whether a country or region is in an advanced, developed or underdeveloped category and also to measure the influence of economic policy on quality of life [23]. HDI is an important indicator to measure success in building the quality of human life or community/population [24]. IPM explains how people can access development outcomes in obtaining income, health, education, and so on. The HDI introduced by UNDP in 1990 underwent a change in the method of calculation in 2010. Where the Indonesian Statistic Bureau (BPS) is adopted a new methodology change of HDI calculation in 2014 and back casting since 2010 [25].

HDI is formed by three basic dimensions, namely longevity and healthy life (a long and healthy life), knowledge (knowledge), and decent standard of living (decent standard of living). Longevity and healthy living are illustrated by Life Expectancy at Birth (AHH), the number of years expected by newborns to live, assuming that the pattern of death rates by age at birth is the same throughout the age of the infant. Knowledge is measured through the average indicator of Age/Old School and School Expectation. Average School Length (RLS) is the average length (years) of population aged 25 years and over in formal education. School Long Expectancy (HLS) is defined as the length of (year) formal school that is expected to be felt by the child at a certain age in the future.[26]

HDI is an indicator used to view development progress in the long term, including in seeing the effectiveness of PRODIRa Program implemented by the local government of Gorontalo Province. To see the progress of human

development in Gorontalo Province, there are two aspects to note, namely the speed and status of achievement of PRODIRA Program. In Law no. 33 of 2004 on regional financial balances states that the government, both central and local, should allocate 20 percent of the budget for education outside of salaries and official fees. Thus, the educational budget referred to here is included in the development budget category because it does not include routine budgets in the form of salaries and others [27].

III. RESEARCH METHODOLOGY

The study used a combined method of quantitative and qualitative methods (mixed methods). Creswell states that mixed method is an approach to inquiry that combines or qualitative quantitative forms of research [28]. The purpose of combining methods together, or sequentially in a study, obtained a comprehensive data, valid, reliable and objective [29]. In this research used combination research method (mixed) with design or concurrent embedded model (unbalanced mixture). According to Sugiyono, the combination model or concurrent embedded method is a research method that combines both quantitative and qualitative research by mixing [30]. Where both quantitative and qualitative methods are used are not balanced. Because this study is the first year, the dominant method used is in quantitative form in qualitative support. The target population is distributed according to the quantitative method established as the primary method in the first year. The survey was conducted at 144 SMA/SMK/MA. The sample calculation is proportionally based on the representation of each regency and city region as Gorontalo Province, as much as 20% of the existing SMA.SMK/and MA population. Obtained as many as 29 school units. Respondents who fill the instrument consist of principals, treasurers, teachers, and parents (school committee) so the number of respondents of each school's study there are 4 people x 29 schools as many as 116 people.

IV. FINDING AND DISCUSSIONS

From 116 respondents who gave answers obtained information about the policy of PRODIRA according to Principal, Teachers, Treasurer and Parents Students of SMA/SMK/MA in Gorontalo Province able to increase Human Development Index (IPM) Gorontalo Province.

Table 1. Prodira's policy in improving Human Development Index (HDI) of Gorontalo Province :

NO	Assessing items	Category
1	Production policy increased the participation rate of rough (APK) of SMA / SMK / MA	76.90 Good
2	Prodira's policies increase the Net Enrollment Rate (APM) of SMA / SMK / MA	77.76 Good
3.	Prodira's policies increase School Enrollment Rate (APS) SMA / SMK / MA	79.31 Good
4.	Policy Prodira increase the Graduation rate (AL) SMA/ SMK / MA each year	75,52 Good
5.	Prodira policy lowers dropout rates (DO) students SMA / SMK / MA	82.07 Good
6	Policies Prodira completed illiteracy level SMA / SMK/ MA	80,52 Good
7	The prodira policy completes the 12-year compulsory education of	86.56 Good

Table 2: PRODIRA Allocation Budget from the Year 2011-2016 [34]



Sumber: Dikbudpora Provinsi Gorontalo, 2016

PRODIRA budget allocation (see table 2) is contributed to the increase of Human Development Index of Gorontalo, according to the report of Gorontalo Provincial Central Statistics Agency which stated that HDI is supported from the knowledge aspect, consisting of two indicators namely Average School Length (RLS) and School Expectation (HLS), as illustrated in the graph below.

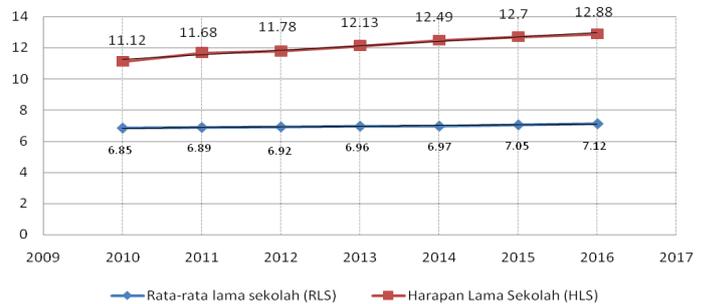


Figure 2 Trend of Average School Length (RLS) and School Expectation (HLS) Of Gorontalo Province from 2010-2016. (Source: Report BPS Gorontalo Province, 2017) [35]

Table 1 showed that the contribution of Prodira's financing policy is in the "Good" category in completing the 12-year compulsory education. In general, policy of PRODIRA supports the increase of Human Development Index by Average = $625,89/8 = 78.24\%$ (good). This is also confirmed by the interview with one of the principals of SMA Negeri 1 Telaga Biru Gorontalo Regency, PRODIRA which was implemented by Governor Rusli Habibie is a commitment in the effort to build the quality of education, when compared with the previous years are still below. After this PRODIRA is rolled out it looks increasing especially from the number of Human Development Index Gorontalo reach 71,76. This PRODIRA policy has been growing public trust to school, in term of transparency for instance [W/E/A/1/11/2016] dalam Warni T. Sumar [31]

The increasing trend of HDI in Gorontalo Province can be seen from the report of Gorontalo Central Bureau of Statistics 2017, as illustrated in the graph below.

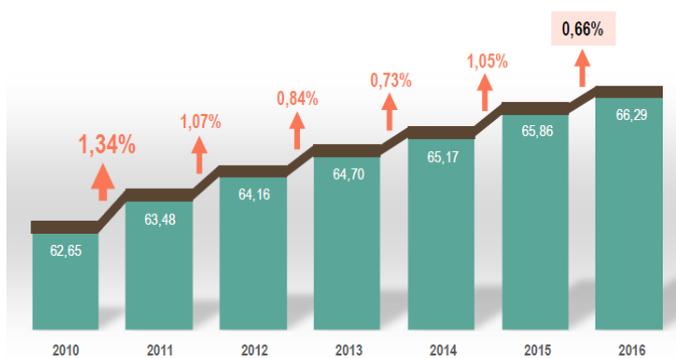


Figure 1 Trend of Increase in Human Development Index (HDI) of Gorontalo Province from 2010-2016 (Source: Report BPS Gorontalo Province, 2017) [32]

The graph showed that, the Human Development Index of Gorontalo Province continues to progress during the period 2010 to 2016 HDI Gorontalo Province increased from 62.65 in 2010 to 66.29 in 2016. During that period, HDI in Gorontalo Province grew on average by 0, 73% per year. In terms of rate increase has not showed significant figures but in terms of commitment to promote education sector in improving education is felt and evident from the flagship program of the provincial government of Gorontalo. As stated by the Provincial Secretary of Gorontalo that in 2017 the budget for APBD in the education sector rose to 28%. Since 2012, the provincial government of Gorontalo is also prepared budget for PRODIRA in order to accelerate the development of human resources. The total amount of PRODIRA funds for SMA/SMK/MA/LB depends on the total of BOS funds. Before the BOS funds for SMA/SMK/MA/LB were rolled out by the central government, education funding in Gorontalo province was almost assisted by PRODIRA funds from 2011 to present [33]. The amount of PRODIRA funds varies every year following BOS funds and BOS funds that are rolled out by the central government.

In accordance with the research report Warni T. Sumar, explained that the implementation of PRODIRA in selected Senior High School in Gorontalo Province is seen from several indicators, such as education condition, 75% support, education index 63% support, Gorontalo provincial superior program 72% support [36]. This is also stated by the Head of Dikbudpora Gorontalo Province Weny Liputo explaining, Contribution Prodira in increasing HDI Gorontalo seen from aspect of average of school length have significant increase which year 2011 about 8,2 year. Then, Central Bureau of Statistics (BPS) data in 2015, the average school rate in Gorontalo is estimated to be 12.88, it means that it continues to increase, and is already above the national rate of 9.2 [37]. Similar things are supported by research Meylina Nikensari and Kuncara, concluded that the level of local government spending on the education sector has a significant influence on HDI, where every change occurs On regional government spending on the education sector will be followed by changes in HDI. From t test, from the results of his research calculations concluded partially the variables of local government spending on education sector have an effect on

the HDI (T count 3.023 > t table 1, 674116), while the local government spending on the health sector has no effect on the HDI (t hitung 0,412 < t table 1.674116) [38]. This is proven BPS of Gorontalo Province acknowledged the increase of RLS and HLS positive impact of the government's development in education several years ago. Seen also his contribution to the population aged 15 years and over can read and write has reached 98.44%. Residents aged 16-18 years as many as 7 out of 10 people still in school. This is of course from the support of PRODIRA funds prepared by Gorontalo Provincial Government [39].

The same thing was also explained by Ekosiswoyo, Kardoyo, and Raharjo that the economic benefits of educational investment (rate of return) such as the PRODIRA policy, were higher than physical investment with an average ratio of 15.3% and 9.1% [40]. So the investment of Gorontalo provincial government through PRODIRA fund policy is the right choice to make investment in the field of education very profitable Gorontalo generation forward more and productive in work

Dwi Atmanti and Hastarini explained that investment policy through PRODIRA by Gorontalo Provincial Government is also in line with the basic assumption of Human Capital theory which states that one can increase their income through education improvement. Each additional one year of school means, improving work ability, productivity and income levels, as well as delaying receipt of income for one year in education [41].

The PRODIRA policy which frees up the operational costs of the students up to the SMA/SMK/MA/LB level certainly contributes greatly in increasing the public interest to continue the level of SMA/SMK/MA/LB even to universities. Since government policies such as this certainly change the public mindset of the importance of government stimulus providing education financing through PRODIRA policy is a long-term macro investment, the benefits of this investment can only be felt after decades [42].

Psacharopoulos, George., This is in line with the World Bank's recommendations since 1960 that define four criteria for human resource development investment, including 1) the need for skilled labor in vocational and technological fields; 2) the expansion of primary and secondary education, Rate of return) with respect to lower costs. 4) justice and equity which shows the importance of the distribution of educational opportunities and other forms of human resource development, both geographically, socially and economically [43]. Thus, Gorontalo Provincial Government is already on the right track to put education as a superior program

It is clear that the policy of PRODIRA at SMA/SMK/MA level contributes to the improvement of Human Development Index in Gorontalo Province. Moreover, if followed by increased awareness of the community participate in the financing of the acceleration that can be achieved will exceed if only sourced from the central government and local governments only. It requires the participation of people who have a strong economy to support local government efforts and programs to innovate in

developing the PRODIRA in order to achieve the target of Towards the nation of Indonesia is independent and highly competitive in 2025 [44] and the Indonesian Education Outlook 2025: toward a sustainable world class quality level [45]. It is expected that there is a breakthrough to boost the economic potential of the community to help finance education for the underprivileged while improving the expected quality .

V. CONCLUSIONS

Based on the research findings and theoretical description above are concluded as follows:

1. The success of education development is in need of financing from various sources, especially from central and local government. The stimulus of education financing through PRODIRA policy by Gorontalo Provincial Government is able to accelerate the achievement of better human development index (HDI) target. This can be seen from the school's expectation number (HLS) growing above the national rate.
2. To maximize the policy of PRODIRA this certainly need support all education stakeholders. Including ensuring this PRODIRA policy can be included in Gorontalo Province *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022* for the smoothness of its budgeting.
3. With the commitment of all parties believe Gorontalo Province can advance regional development beyond national development through acceleration of education development by implementing the policy of PRODIRA more effective and efficient.
4. Thanks to all those who have given the opportunity to realize this research and publications, especially to *Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek Dikti RI* and *Universitas Negeri Gorontalo* for funding this research.

References

- [1] Undang-undang-Dasar Tahun 1945. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor, 14.
- [2] Tim Penyusun, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.*
- [3] Indonesia, Presiden Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. *Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2005; p.3.*
- [4] Mohamad, Rika. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara)*. Diss. Universitas Negeri Gorontalo, 2014; p.8
- [5] Yusuf, Maslan. *Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Dalam Menjalankan Tugas Pembantuan (Studi Kasus Implementasi Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat)*. Diss. UNG, 2015, p.5.
- [6] Widayati, Ani. "Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 6.1 2008.
- [7] Hadiyanto. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 204; p.5.
- [8] Gorontalo Post, *Program Pendidikan untuk Rakyat, Gorontalo Post*, Senin 20 Februari 2012. Gorontalo
- [9] Arfan Aryad, Influence of Knowledge of Management, Principals' Attitude, And Effectiveness of Prodira Towards School Performance In Gorontalo Provincial, *Jurnal Ilmiah Education Management*, Vol. 7 Nomor 1 Desember 2016; pp. 1186-1204.

- [10] Buhler, Patricia. *Alpha Teach Yourself; Managemen Skill in 24 Hour* Jakarta; Prenada, 1998; p. 3.
- [11] Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. *Perilaku organisasi.*" Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006; p.137.
- [12] Panggulu, Yosua T. "Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud." *JURNAL ACTA DIURNA* 2.4 (2013), p.
- [13] Tim Penyusun, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional*, 2003..
- [14] Jusdin Puluhulawa dan Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus Di Provinsi Gorontalo)*, UNG Press, Gorontalo, 2013; pp. 43-47.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia. "Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2004)*.
- [16] Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Rakyat, *Pemerintah Provinsi Gorontalo*, 2012
- [17] Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK dan MA dalam Rangka Program Pendidikan Gratis Provinsi Gorontalo, *Pemerintah Provinsi Gorontalo*, 2012
- [18] Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, *Pemerintah Provinsi Gorontalo*, 2012
- [19] Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Rakyat, *Pemerintah Provinsi Gorontalo*, 2012
- [20] Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/Dikbudpora/172.a/ Dikmen/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan untuk Rakyat Tahun Anggaran 2014. Gorontalo; *Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo*, Dikbudpora Gorontalo Press, 2014.
- [21] Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, *Juknis Program Pendidikan Gratis, Dikpora Provinsi Gorontalo*, Gorontalo,2012; p. 17
- [22] Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam Angka (Gorontalo Provinve In Figures 2016, BPS Gorontalo, 2017; p. 87.
- [23] Anand, Sudhir, and Amartya Sen. "The income component of the human development index." *Journal of human development* 1.1 (2000): 83-106.
- [24] Sagar, Ambuj D., and Adil Najam. "The human development index: a critical review." *Ecological economics* 25.3 (1998): 249-264.
- [25] Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2010-2016*, BPS Gorontalo, 2017; p.5
- [26] Kumalasari, Merna, and Dwisetia Poerwono. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah.* Diss. Universitas Diponegoro, 2011.pp.13-14
- [27] Undang-Undang. "tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah." *Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia* (33).
- [28] Creswell, John W. *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* Sage publications, 2013; p. 2
- [29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinas (mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung; 2016; p.16.
- [30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinas (mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung; 2016; p.537.
- [31] Warni Tune Sumar, *Evaluasi Implementasi Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira)di SMA Se Provinsi Gorontalo*, Disertasi, 2017; p. 212
- [32] Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Ikhtisan Bulanan Data Strategis Provinsi Gorontalo Edisi 30 Juli 2017, BPS Gorontalo, 2017; p 81.
- [33] Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo, *Profil Provinsi Gto Tahun 2016, UPTB Data dan Analisis Pembangunan Bappeda Provinsi Gorontalo*, dipublikasikan tanggal 8 Februari 2017. Sumber; https://issuu.com/fachrymusa/docs/buku_profil_2016_final_revisi_iv, 2017; pp. 2-5.
- [34] Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo, *Profil Provinsi Gto Tahun 2016, UPTB Data dan Analisis Pembangunan Bappeda Provinsi Gorontalo*, dipublikasikan tanggal 8 Februari 2017. Sumber; https://issuu.com/fachrymusa/docs/buku_profil_2016_final_revisi_iv, 2017; pp. 2-6
- [35] Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2010-2016*, BPS Gorontalo, 2017; p 7
- [36] Warni Tune Sumar, *Evaluasi Implementasi Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira)di SMA Se Provinsi Gorontalo*, Disertasi, 2017; p. 202
- [37] Gorontalo Post, *Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Gorontalo Melebihi Nasional*, Gorontalo Post; Gorontalo, 2016; p. 2
- [38] Astri, Meylina, Sri Indah Nikensari, and Harya Kuncara. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)* 1.1 (2013): pp. 77-102.
- [39] Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, *Indikator Pendidikan Gorontalo 2016*, Grafika Karya, Gorontalo, p. 16
- [40] Rasdi Ekosiswoyo, Kardoyo, Tri Joko Raharjo. Strategi Akselerasi Pencapaian Ipm Bidang Pendidikan Untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang, *Riptek*, Vol.2, No.2, Tahun 2008, Hal.: 1 - 6
- [41] Dwi Atmanti, Hastarini. "Investasi sumber daya manusia Melalui pendidikan." *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)* 2.Nomor 1 (2005): 30-39.
- [42] Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77-102
- [43] Psacharopoulos, George. "Returns to investment in education: A global update." *World development* 22.9 (1994): 1325-1343.
- [44] Ali, Mohammad. *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi.* Grasindo, 2009, p. 1
- [45] Suryadi, A. "Outlook 2025 Pembangunan Pendidikan Indonesia: Menuju Kualitas Yang Berdaya Saing Secara Global (The Indonesian Education Outlook 2025: Toward A Sustainable World Class Quality Level)." Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012).

**Review Artikel di Jurnal Terakreditasi Nasional
SK No. 36/B/E/KPT/2016, ditetapkan tanggal
25 Mei 2016 JURNAL KEBIJAKAN ADMINISTRASI
PUBLIK (JKAP) UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION PROGRAM FOR THE
PEOPLE (PRODIRA) POLICY IN ACCELERATING THE QUALITY
PERFORMANCE OF SENIOR HIGH SCHOOL EDUCATION IN
GORONTALO PROVINCE**

Oleh

Dr. Arwildayanto, M.Pd

**Dosen Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Gorontalo**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

November 2017



Menu

[HOME](#) | [ABOUT](#) | [USER HOME](#) | [SEARCH](#) | [CURRENT](#) | [ARCHIVES](#) | [ANNOUNCEMENTS](#) | [INDEXING & ABSTRACTING](#) | [EDIT](#)

Home > User > Author > Active Submissions

Active Submissions

[ACTIVE](#) | [ARCHIVE](#)

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
29973	—	ART	arwildayanto	UNTITLED	Incomplete DELETE
29974	—	ART	arwildayanto	UNTITLED	Incomplete DELETE
29975	—	ART	arwildayanto	UNTITLED	Incomplete DELETE
29976	11-05	ART	arwildayanto	THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION PROGRAM FOR THE PEOPLE...	IN REVIEW

1 - 4 of 4 Items

Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

Refbacs

[ALL](#) | [NEW](#) | [PUBLISHED](#) | [IGNORED](#)

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
<i>There are currently no refbacs.</i>						

[Publish](#) | [Ignore](#) | [Delete](#) | [Select All](#)

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Indexed by:



Copyright of JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online)



Arwil Dayanto <arwildayanto@ung.ac.id>

[JKAP] Submission Acknowledgement

1 pesan

Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP <igpa@ugm.ac.id>

5 November 2017 13.02

Kepada: hay arwildayanto arwildayanto arwildayanto <arwildayanto@ung.ac.id>

hay arwildayanto arwildayanto arwildayanto:

Thank you for submitting the manuscript, "The Effectiveness of Education Program for the People (PRODIRA) Policy in Accelerating the Quality Performance of Senior High School Education in Gorontalo Province" to JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://journal.ugm.ac.id/jkap/author/submission/29976>
Username: arwildayanto

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)

Wahyudi Kumorotomo
Editor in Chief
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
<http://journal.ugm.ac.id/jkap>

The Effectiveness of Education Program for the People (PRODIRA) Policy in Accelerating the Quality Performance of Senior High School Education in Gorontalo Province

Arwildayanto
Department of Education Management, Faculty of Education Sciences
Universitas Negeri Gorontalo
arwildayanto@ung.ac.id

Abstract

This study is intended to determine the effectiveness of education program for the people (PRODIRA). It employed a mixing method with concurrent embedded combination model of the qualitative and quantitative method. The data were collected from the questionnaire from 155 senior high schools, vocational and Islamic senior high schools (SMA/SMK/MA) in Gorontalo Province in which 32 schools were selected as the samples for this study. This study involved the headmasters, teachers, exchequers, students' parents and the school committee members as the respondents. From simple random sampling, there were 116 respondents selected as the sample that were interviewed starting from the key informant and then continued by using snowball sampling with PRODIRA management team supported by observation and documentation. The results reveal that the policy of PRODIRA implemented by the Provincial Government of Gorontalo has run effectively and there is a quality performance acceleration of senior high school education in Gorontalo Province that can be seen from the increased human development index (IPM), the availability of SMA/SMK/MA that is getting better, the percentage of the good schools' condition and the decreased dropout rates.

Keywords: policy effectiveness; PRODIRA; quality performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA). Metode Penelitian yang digunakan *mixing method*, yakni *kombinasi metode* kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan tidak seimbang (*concurrent embedded*). Pengumpulan data menggunakan angket dari 155 SMA, SMK dan MA se Provinsi Gorontalo, ditetapkan 32 sekolah. Responden terdiri kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa atau komite sekolah diambil secara acak sederhana (*simple random sampling*) terpilih 116 orang sebagai sampel penelitian, wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) diawali dari key informan terus dilanjutkan secara *snowball sampling* dengan tim manajemen PRODIRA didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjalan dengan efektif dan terjadinya akselerasi kinerja mutu jenjang pendidikan menengah atas di Provinsi Gorontalo ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), rasio ketersediaan SMA/SMK/MA semakin membaik, persentase sekolah kondisi baik jenjang SMA/MA dan SMK, angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/dan MA menurun.

Kata Kunci: efektivitas kebijakan; PRODIRA; kinerja mutu

INTRODUCTION

Based on the Article 34 of the Law Number 20 of 2003 on National Education System, it states that (1) Every citizen at the age of six can enroll in a compulsory basic education program, (2) The government and local government guarantee the implementation of compulsory education at least for basic education free of cost, (3) Compulsory education is the State's responsibility provided by the government, the local government, and the community (Ali, M.; 2009). This regulation is definitely giving a consequence for the central and local governments to provide the funds in implementing the nine-year compulsory education in Regional Long-Term Development Plan (RPJP), Regional Medium-Term Development Plan (RPJM), Strategic Plan (RENSTRA), Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and Local Government Work Plan (RKPD) of Education Field in every local government (Ashari, M. 2016). This is in line with the Government Regulation Number 47 of 2008 on Compulsory Education as the minimal education program for every Indonesian citizen.

The policy of basic education cost is to improve the quality of Indonesian human resources in minimum standard formulated in the Government Regulation Number 19 of 2005 on National Education Standard (SNP). It presents the law and vision frameworks about the standard and quality of education which require the strategic and concrete steps to create it, including the political will of the government and local government in implementing the compulsory primary education. (Karding, A. K.;2008). In the context of public policy implementation of the nine-year compulsory education provided by the government, Provincial Government of Gorontalo implements the 12-year compulsory education as formulated in Government Regulation Number 47 of 2008 on Compulsory Education in Article 7 Paragraph (4) that the local government can assign the policy to enhance the compulsory secondary education, and Paragraph (5) states that Gorontalo Provincial Government takes the accelerative steps and is committed to offering compulsory secondary education as written in the Regional RPJP document in Gorontalo Province in 2007-2025 with the vision of Advanced and Independent Gorontalo. One of the primary development visions is to create the reliable human resources in Gorontalo. The implementation is in Regional Regulation Number 2 of 2012 on RPJM in Gorontalo Province 2012-2017 that the education priority program provided by the Gorontalo Province Agency of Education, Culture, Youth and Sport (DIKBUDPORA) is completing the nine-year compulsory education program and pioneering the 12-year compulsory education assigned by the Governor Regulation Number 9a of 2012 on Free Education Implementation for Senior High School students with the label of PRODIRA.

PRODIRA policy is established by providing an operational funding for senior high schools supported by the Regional Regulation of Gorontalo Province Number 6 of 2015 on Education Implementation in which the philosophical bases of PRODIRA policy on secondary education are given to the Provincial Government, and basic education is offered to the Government of the Regency and the City (Handayani, T.;2012). Therefore, the main task and function of secondary education services have become the Gorontalo Provincial Government's responsibility with various obstacles as explained by the former Head of DIKBUDPORA Gorontalo Province, Arfan Arsyad, on Friday 16 December 2016 that there was a limited access to secondary education in remote areas, low School Participation Rate (APS), increased secondary education dropouts rate, and inadequate educational scholarship programs for low-income communities, so that they had limited access to education services. PRODIRA policy is implemented due to those objective conditions. The same thing was also explained by the Head of DIKBUPORA Gorontalo Province, Dr. Wenni Liputo, MM (Thursday, March 23, 2017) that the policy of PRODIRA was the provincial government's desire to make pro-people policies, reducing the burden of the people in educational financing. In many areas, it has been identified

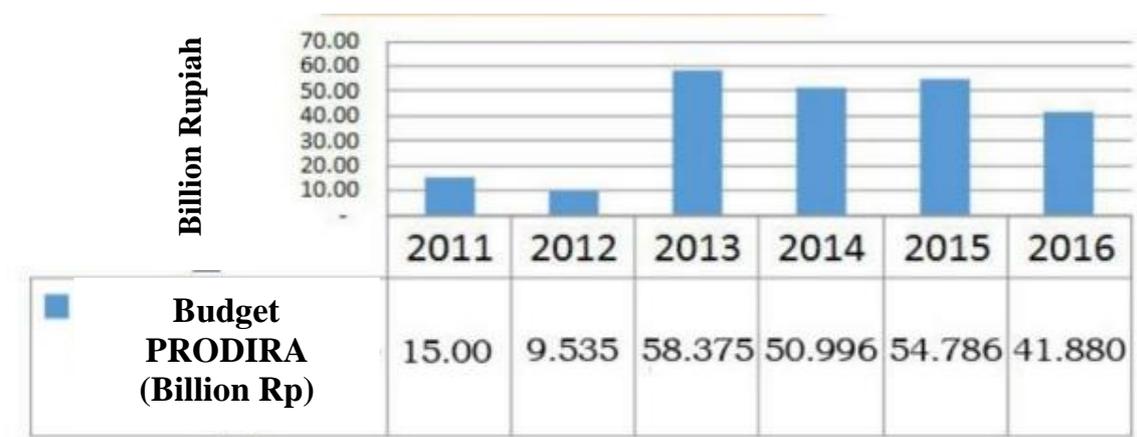
that low policy alignment for the poor causes the bad quality of education (Suprastowo, P.;2014). This policy should be able to eliminate cost barriers for students' parents in order to increase the number of students from low-income families to undertake secondary education, and therefore the 12-year compulsory education can be completed earlier by the Provincial Government of Gorontalo. Besides, it is proven that the low-income family's obstacles in education are the operating unit cost of education, personal cost and investment cost charged to them. PRODIRA policy attempts to minimize the cost barriers of the poor families, so that all high school-age children are getting the targeted minimum services. Based on the law mandate and political will as well as the discretion, Provincial Government of Gorontalo is very interesting to be observed regarding the effectiveness of PRODIRA in accelerating the quality performance of secondary education in Gorontalo Province.

Understanding the effectiveness of PRODIRA is an action that leads to the achievement of specific goals with different procedures and strategies reinforced by the rules to solve the problem. The services to be provided are accompanied by the prepared budget and reports that will be evaluated (Soehartono, 2007:36). PRODIRA is fully described in Regional Regulation Number 7 of 2012 on the Implementation of PRODIRA in Chapter I General Provision of Article 1 stating that PRODIRA is the implementation of education program which frees the students from the operational costs of the secondary education units except the International School Stubs (RSBI), International Standard School (SBI), and educational units managed by the community.

The purposes of PRODIRA policy is based on the Decree of the Head of DIKBUDPORA Gorontalo Province Number 188.4 / Dikbudpora / 172.a / Secondary Education / I / 2014 are a) providing education services for the entire community of Gorontalo Province starting from early childhood education (PAUD), primary education, and secondary education so as to develop their potential to be independent and to continue their education to the higher level, b) increasing the participation rate of early childhood education, primary and secondary education, c) improving the services at all levels of education in order to create the quality and relevance of education, d) free of charge to the operational cost of education unit for all of the students (DIKBUDPORA, 2014).

The amount of APBD spent for five years to implement the policy of PRODIRA shows that the education sector has become the leading sector of the Provincial Government of Gorontalo. The amount of APBD is shown in below table 1.

Table 1 The Budget of PRODIRA Policy from 2011 to 2016



Source: DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo

The budget amount of the PRODIRA policy must be effectively managed to achieve the expected goals and targets. It is necessary to conduct an in-depth study to measure the success or failure of PRODIRA policy by analyzing its effectiveness in accelerating the quality performance of education. It can enable the policy makers to systematically consider the impact of the costs on different alternatives in making a feasible decision that is in line with the costs incurred (Sri, E., 2014). It is expected that the cost of education can have an impact on improving the quality performance of education (Putri, K. P., & Ratnawati, I., 2011).

The often-witnessed phenomenon is that few people can maximize the effectiveness in accordance with the concept, thus, the effectiveness only becomes an exclusive meaning. Consequently, the effectiveness of policy implemented by the organization or educational institution has a different meaning for each person, depending on the terms of reference it uses.

Carl Friedrich in Wahab (2004: 3) notes that an effective policy is when an action leads to the goals proposed by a person, group/government in a particular environment as well as looking for opportunities to achieve the goals or actualize the desired target. Moreover, Mahmudi (2005) in Adhayani dan Kusumah (2015:38) states that the bigger the output towards the goal achievement is, the more efficient the organization, program or activity will be. In relation to goal achievement, Robbins (1990: 49) also defines effectiveness as a level at which an organization or institution can realize its objectives.

Siagian (2001) in Edi S (2012: 86), on the other hand, defines effectiveness as an utilization of certain predetermined amounts of resources, facilities, and infrastructure to generate targets for the number of goods or services of activities it carries on. Effectiveness indicates success in terms of whether or not the target has been achieved and determined. If the outcome of the activity is closer to the target, it means that it arrives at its effectiveness.

From above description, it can be concluded that the effectiveness of PRODIRA policy is the policy alignment with various existing regulations and national education objectives in order to achieve the targets formulated in the form of human development index (IPM). On that ground, it can give an impact on the improvement of education quality performance, living standard and commitment as well as to boost public participation in educational funding. Its implementation is paying attention to the required cost components, socialization, and transparency in order to avoid deviations conducted by the supervisors in monitoring, evaluation and follow-up program.

METHOD OF STUDY

This study employed mixing method of the qualitative and quantitative method (Frianti, 2012). It is a concurrent embedded combination model. Sugiyono (2016; 537) describes that concurrent embedded design is a research strategy that combines quantitative and qualitative research by mixing 70% of the quantitative method and 30% of the qualitative method or vice versa, as shown in figure 1.

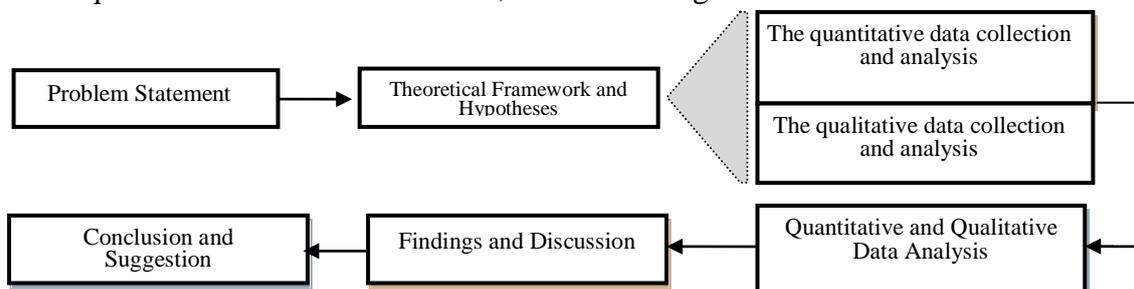


Figure 1 : Combined Research Method of *Concurrent Embedded*, Sugiyono (2016;538).

The population in this study involved the headmasters, teachers, exchequers, students' parents or school committee members from 155 SMA/SMK/MA in Gorontalo Province. Sample-taking was using "probability sampling" technique that provided equal opportunity for every member of the population (Sugiyono, 2016; 300). This study had selected 32 schools from 20% of the population (Setiawan, I., & Hariyono; 2013). From simple random sampling, there were 116 respondents selected as the sample that were interviewed starting from the key informant and then continued by using snowball sampling with PRODIRA management team supported by observation and documentation.

Instrument validity test was done by using Pearson Product Moment formula with SPSS version 20.00 with the correlation term of each positive factor and magnitude of 0.361 and above is a strong construction and good validity. In addition, reliability test was done by employing *Alpha Cronbach* formula with SPSS version 20.00. The results of reliability test are $r = 0.961$ refers to the coefficient of reliability, reliable and applicable.

Data analysis included a number of stages, including 1) statistical analysis 2) descriptive analysis. The statistical analysis consists of 1) data selection and classification, 2) data processing, data organizing by calculating the total score of instrument item, and the respondents' score was calculated by using Weighted Means Scores (WMS) as explained by Sudjana (2008;67):

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{N}$$

Information:

\bar{X} = Average Score

X_i = Total aggregated score (frequency result with the score item for each alternative answer)

N = Total respondents

The next step is calculating the percentage (%) of each indicator with (%) formula:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% \text{ and converted to}$$

$$X = \frac{\sum (F.X)}{N} \times 100\%$$

Information:

P = percentage

X = Average

F = Frequency

N = Total Respondent

$\sum (F.X)$ = The Score of Answer Category

The researcher correlated with the benchmark of giving meaning for each respondents' alternative answer in accordance with the criteria with the following range 86-100% = very good, 76-85% = good, 60-75% = fair, 45-59% = poor and < 45% = very poor (Sudjana, 2005).

FINDINGS AND DISCUSSION

The results reveal that the variable data scores of the effectiveness of PRODIRA policy are: maximum score = 256, minimum score = 103, mean = 194, percentage of average score and maximum score comparison = $194/256 \times 100 = 75,78\%$, mode = 152, median = 197, sample variance = 132,68, deviation standard = 36,34 and range = 153. Variable frequency distribution of the effectiveness of PRODIRA policy can be observed in below table 2.

Table 2 Variable Score Frequency Distribution of the Effectiveness of PRODIRA Policy

No	Interval	Absolute Frequency (Fa)	Relative Frequency (Fr)	X	Fx	Fx (x)
1	103-121	1	0,9	-5	-5	25
2	122-140	7	6,0	-4	-28	112
3	141-159	17	14,7	-3	-51	153
4	160-178	18	15,5	-2	-36	72
5	179-197	16	13,8	-1	-16	16
6	198-216	23	19,8	0	0	0
7	217-235	15	12,9	1	15	15
8	236-254	18	15,5	2	36	72
9	255-263	1	0,9	3	3	9
N=116					$\Sigma fx = -82$	$\Sigma fx^2 = 474$

The absolute frequency data of effectiveness of PRODIRA policy are 23 respondents (19,9%) in average group, 15 respondents (12,9%) above average group, and 16 respondents (13,8%) below the average group. The score distribution is displayed in the figure 2 below.

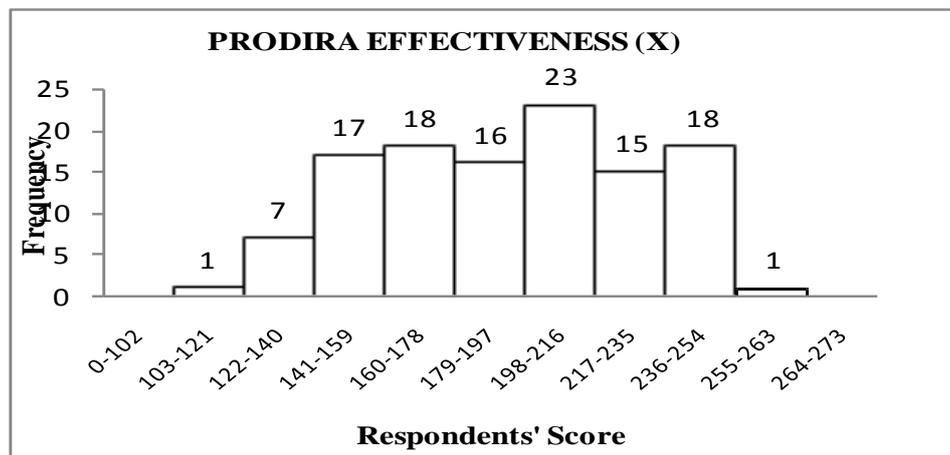


Figure 2 the Histogram of PRODIRA Effectiveness

The variable data recapitulation of PRODIRA effectiveness reaches the percentage of 82,72% or in a good category as shown in table 3.

Table 3: the Score Recapitulation of PRODIRA Effectiveness

No	Aspect	Quantitative Analysis Result	Qualitative Analysis Result
1	The Equality of PRODIRA Policy	89, 19 (Very Good)	The regulations governing PRODIRA policy are Technical Guidance, Regional Regulation, Governor's Regulation and it is in accordance with the law
2	Target Achievements	78,24 (Good)	The achievements to improve the Human Development Index, is from the increase of APK, APM, APS, Graduation rate, dropout rate (DO), completing illiteracy and completing the 12-year compulsory education
3	Management	81,17 (Good)	Management has referred to the Technical Guidance and is given flexibility in the use or target of PRODIRA funds from eight national education standard
4	Monitoring	82,26 (Good)	Monitoring through evaluation and monitoring actions have run well according to the technical guidance of PRODIRA
Average Score		$339,86/4=82,72$ (Good)	Qualitatively, the policy of PRODIRA runs well based on the regulation in achieving the determined targets and objectives, managing and monitoring in accordance with the technical guidance.

The effectiveness of PRODIRA policy contributes to the improvement of secondary education performance in Gorontalo Province as stated by some figures, such as the head of SMA Negeri 1 Telaga Biru in Gorontalo Regency.

PRODIRA, as proclaimed by Rusli Habibie, the Governor of Gorontalo, is an effort to improve the quality of education in which compared to the previous year was still in below average. By this program, the quality of education has increased that can be proven by the number of IPM Gorontalo during the period of leadership of Drs. Rusli Habibie in 2013 who set the IPM target up to 71,76. PRODIRA can emerge people's confidence towards the school in managing the PRODIRA funding (RDWK/TC/2017 adopted from Warni T. Sumar's Dissertation, 2017)

The results of this study are also in line with the research findings by Warni T. Sumar (2017) that the implementation of PRODIRA in selected high schools in Gorontalo Province is able to improve the education condition with 75% of support, education index with 63% of support, and superior program of Gorontalo province with 72% of support. Similarly, the Head of DIKBUDPORA Gorontalo Province, Weny Liputo (2016; 2) confirms that PRODIRA policy in increasing IPM Gorontalo is viewed by the aspect of school length average which experiences a significant increase in 2011 for about 8.2 years. Further, the data from the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2015 has reached an average of 12.88 years and is already above the national rate of 9.2 years. This is also in compliance with the study conducted by Meylina Nikensari and Kuncara (2013) that the level of local government expenditure on education sector has a significant effect on the improvement of education quality performance in which the

changes in local government expenditure on education sector will be followed by the changes of education quality performance. From the t-test, it is concluded that some variables of local government expenditure on education sector have a significant effect on the education quality performance (T count 3,023 > t table 1, 674116).

Ekosiswoyo Raharjo (2008: 1-6) explains that the economic benefits of educational investment (rate of return) such as PRODIRA policy are higher than a physical investment with an average ratio of 15.3% and 9.1%. Thus, the investment of Provincial Government of Gorontalo through PRODIRA funding policy is the right choice to invest in Gorontalo education which is very beneficial for the next generation to be more productive in work. Dwi Atmanti and Hastarini (2005: 30-39) claim that investment policy through PRODIRA by Provincial Government of Gorontalo is also in line with the basic assumption of Human Capital theory which states that one can increase their income through education. Each additional one-year school facility is able to improve work skills, productivity, and income levels as well as to postpone the one-year revenue in the education sector.

The effectiveness of PRODIRA policy which frees the operational costs for SMA/SMK/MA students has provided a significant contribution to improving the secondary education quality performance proven by some indications of change to the better direction, including:

1. The Increase of Human Development Index (IPM)

The effectiveness of PRODIRA policy has increased the IPM in Gorontalo Province that gets a score of 78.24. This means that it is in the good category in providing 12-year compulsory education services (Arwildayanto, 2017). This is supported by the Trend of increasing IPM which experiences a significant increase as shown in Figure 3.

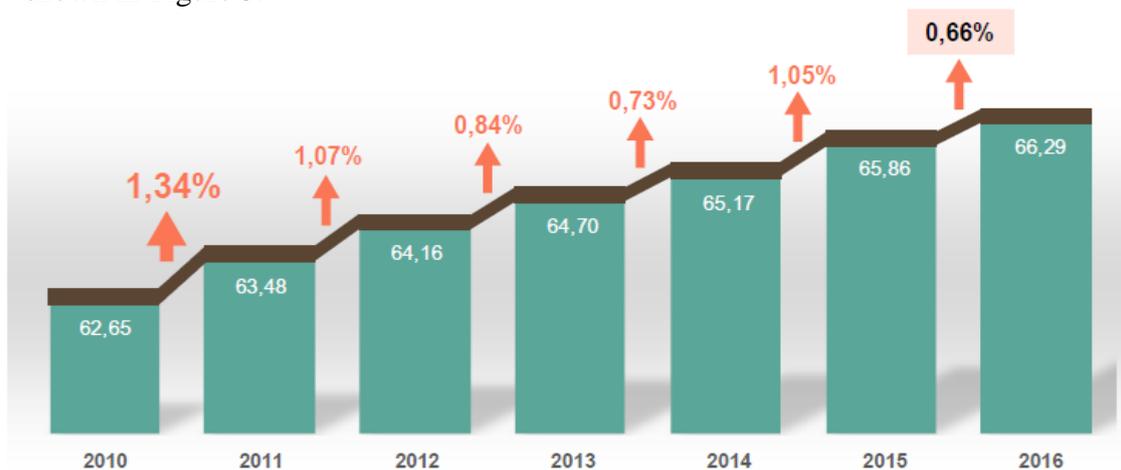


Figure 3. The Trend of Increasing Human Development Index in Gorontalo Province (Source :BPS Gorontalo, 2017)

Additionally, BPS Gorontalo (2017) reports that the increase of IPM or IPM Gorontalo is supported by the increasing knowledge of the people which consists of two indicators including the increase of School Average Duration (RLS) and School Expectation (HLS) (Arwildayanto, 2017). It is illustrated in below figure 4.

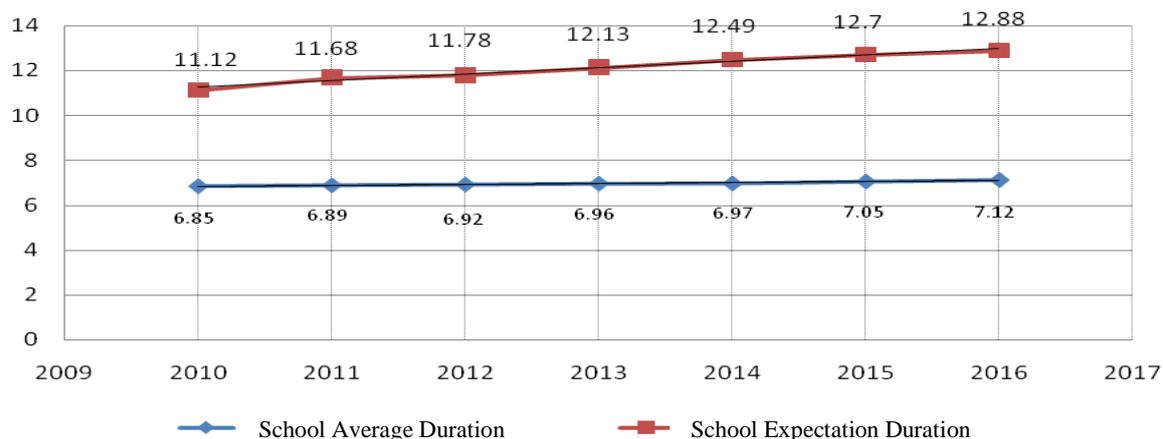


Figure 4. The Trend of the Increase of RLS and HLS in Gorontalo Province in 2010-2016 (Source :BPS Gorontalo, 2017)

2. Better Availability Ratio of Senior High School (SMA), Vocational School (SMK) and Islamic High School (MA)

School availability ratio towards the SMA/MA/MK in accommodating the people with 16 - 18 years of age is defined as the number of schools based on the education level per 10,000 population of education age. From 2012 to 2016, the ratio of school availability of SMA / MA / SMK has increased. In 2016, the comparison of school availability in Gorontalo Province is 1: 26,51. This number indicates that one school can accommodate 27 students.

From the target in 2016 about the school-age ratio of 15.75 students, it can obtain 26,51 or 27 students for each school. By this school availability ratio, there is a positive impact for as many as 7 out of 10 the people with 16-18 years of age that have education in school. This is certainly supported by the financial support of PRODIRA prepared by Provincial Government of Gorontalo (BPS Gorontalo, 2016; 16).

3. The Percentage of Good Schools' Condition of SMA/SMK

The percentage of good schools' condition of SMA/SMK has revealed a positive trend. This is evidenced by DIKBUDPORA's performance report (2016) in which they have reached the target of 93% in order that the condition of SMA / MA is getting better. This achievement exceeds the predetermined target of 91% with the percentage of performance achievement is 102.20%. The achievement towards the end

of RPJMD in 2017 has arrived at the target of 92% or the achievement result of 101.09%. It is in contrast with the achievements in 2014 and 2015 which are 90.28% and 91.22% respectively. Figure 5 shows the detail of good schools' condition percentage from 2012 to 2016.

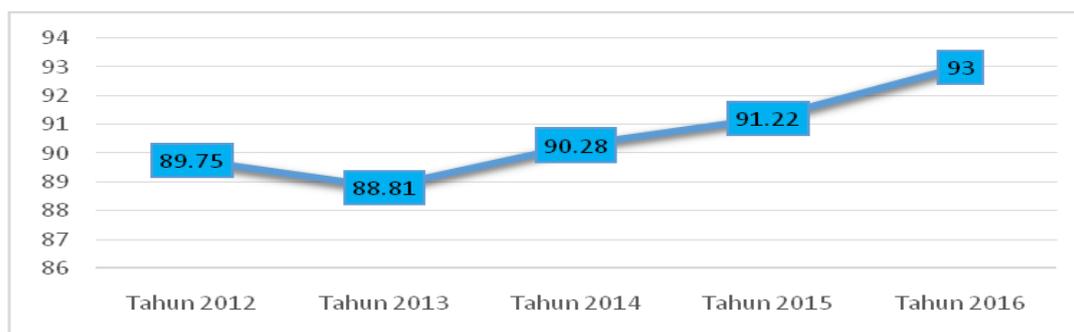


Figure 5 The Percentage of Good Schools' Condition from 2012 to 2016

4. The Percentage of SMK with a Good Schools' Condition

The quality performance of secondary education can be seen from the percentage of good condition at SMK level. In 2016, the target had been reached with the percentage of 93.6%. This achievement exceeded the predetermined target of 87% with the percentage of performance achievement is 107.59%. The achievements towards the end of RPJMD in 2017 have exceeded the target of 88% or the achievement result of 101.09%. It is in contrast with the achievements in 2014 and 2015 which were 93.73% and 94.52% respectively. This number was below achievement, but it had exceeded the target in 2016, as shown in below figure.

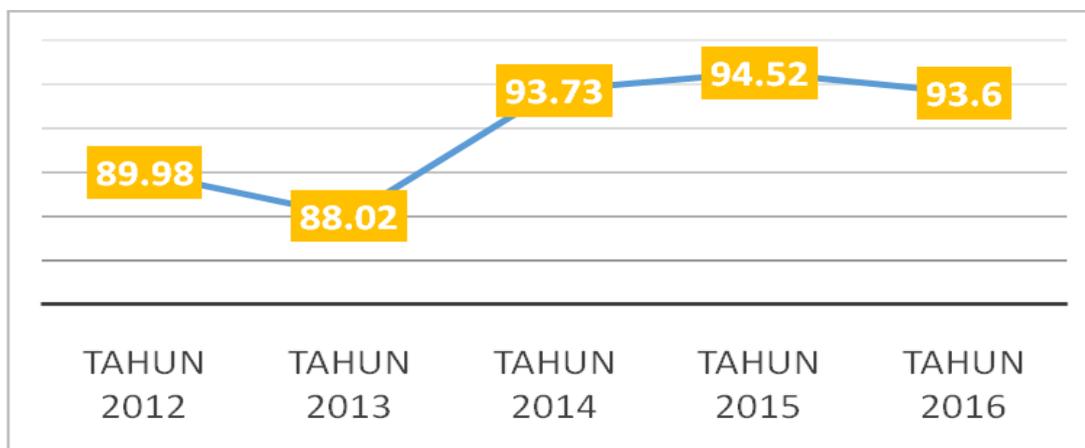


Figure 6. The Percentage of Good Schools' Condition of SMK Level from 2013 to 2016 (Source: Performance Accountability Report of Government Agencies (LAKIP) of DIKBUDPORA, Gorontalo Province, 2016).

5. The Decreased Dropouts Rate of SMA/MA/SMK

The quality performance of secondary education is also evident by the percentage of high school dropout that the target was 0.01% of the predetermined target of 0.02% in 2015 with the performance achievement of 200%. The programs that decrease the high school dropout rates are School Operational Assistance Program (BOS-SM), Low-Income Student Assistance (BSM), high school equivalency education program and PRODIRA.

The dropout rate of secondary education students over the past five years had decreased continuously from 0.70% in 2012, 0.31% in 2013, 0.14% in 2014, 0.01% in 2015 and 0.01% in 2016. Below is a graph of the decreased dropouts' rate of secondary education students from 2012 to 2016.

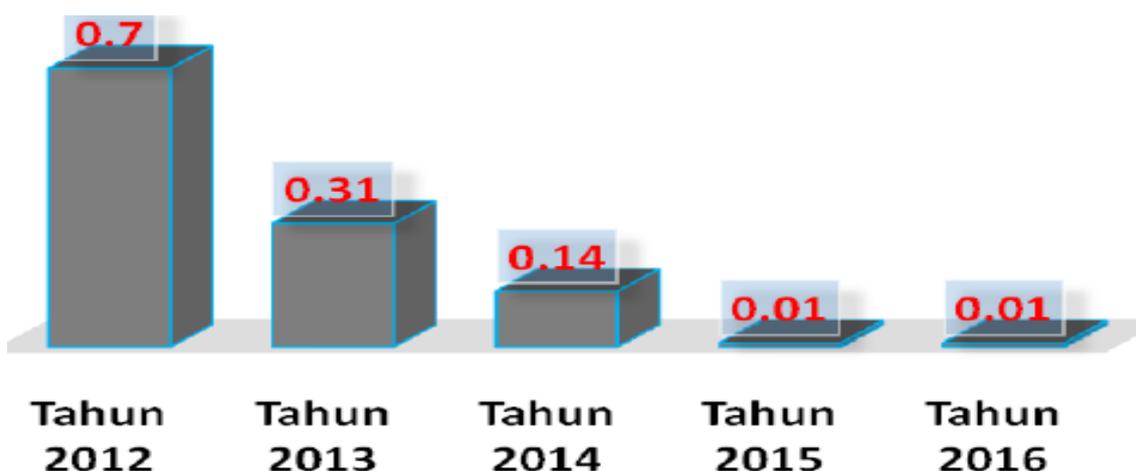


Figure 7 The Trend of the Decreased Dropouts Rate of SMA/SMK/MA in Gorontalo Province from 2012 to 2016 (Source: LAKIP of DIKBUDPORA Gorontalo, 2016)

6. The Increased Percentage of Continuing Education to SMA/SMK and MA Levels

The percentage of continuing education to SMA / MA / SMK also reveals a good trend in which the target in 2016 is 65,76%. However, the percentage increased up to 0,04% that it becomes 65, and 80% in its achievement. This condition shows that Gorontalo people are more enthusiastic to continue and finish their secondary education. People's interest to continue their secondary education also gives an impact on going to university level. This government policy has changed people's way of thinking about the importance of education for the future. Gorontalo provincial government's stimulus with PRODIRA's policy of providing education finance is a long-term macro investment in which the benefits of this investment can only be used after several decades (Astri, Nikensari, and Kuncara, 2013).

This is in compliance with the World Bank's recommendation since 1960. It sets out four criteria for human resources development, including 1) the needs of skilled workers in vocational and technological fields; 2) the expansion of primary and secondary education; 3) the rate of return related to the lower costs; 4) justice that shows the importance of educational opportunities distribution and other forms of human resources development geographically, socially and economically (Psacharopoulos, George, 1994).

In addition to those indicators that indicate an encouraging trend, the effectiveness of PRODIRA policy also contributes to the improvement of school performance. As explained by Arfan Arsyad (2016; 1194), the effectiveness of PRODIRA had direct positive effect on school performance because it was known that PRODIRA was oriented towards the provision of educational resources such as operational, learning, human resources development, and student affairs funds as well as the Creative House of State-owned Enterprise and Management funds. If the people participate in education financing, the contribution of PRODIRA will be more accelerated in advancing and improving the quality of education. It was because the potential financing of education from the society offered a great effect. Further, the budget provided by the government and local government is very limited to achieve the quality of education. Based on the calculation of the secondary education needs, the cost of non-personnel operations for each student in a year is Rp. 3.000.000 (Billy Antoro, 2015). However, the central government is now only able to provide Rp 1.4 million through School Operational Assistance (BOS) for each student in a year. Therefore, PRODIRA policy to fulfil the needs of the students' fees in obtaining education services is appropriate to improve the education quality performance in Gorontalo Province.

CONCLUSION AND SUGGESTION

PRODIRA policy in Gorontalo Province has been effective in achieving predetermined targets so that it can improve the quality performance of education. At the level of secondary education, there is an acceleration of quality performance improvement from the national scale. This success is at the discretion of Gorontalo Provincial Government in implementing political will in providing the stimulus of education financing. This can provide the access to educational services for the poor parents to keep their children able to continue their education to secondary education and university.

The relevant suggestions put forward are the increase of people's participation to support the educational financing. The development of UNG's quality performance is recently achieving a good term. If it is supported by the community, the acceleration of the education quality performance in Gorontalo Province will be more successful.

For that reason, further research is required to develop the model of increasing people's and parents' participation in educational financing so that the improvement of the education quality performance can be created as well as can develop and educate Indonesian people.

REFERENCES

- Adhayani, M., & Kusumah, R. (2015). *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak (Survei pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara)* [The Effect of Effectiveness and The Contribution of Implementing the Government Regulation Number 46 of 2013 on Tax Revenue (Survey in Tax Office (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara)]
- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi* [Education for national development: heading to independent and competitive Indonesian nation]. Grasindo.
- Antara, (Selasa, 8 Juli 2014) *Pemprov Gorontalo Evaluasi PRODIRA* [Gorontalo Provincial Government, PRODIRA Evaluation], <http://www.antaragorontalo.com/berita/6699/pemprov-gorontalo-evaluasi-prodira>
- Arfan Arsyad. (2016). The Influence of Knowledge of Management, Principals Attitude and Effectiveness of PRODIRA Toward school Performance in Gorontalo Province, *Jurnal Ilmiah Education Management* Volume 7 Nomor 1 Desember 2016. Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Arfan Aryad. (2012). *Pemerintah Kabupaten Teken MoU Terkait Program Pendidikan Gratis* [Regency Government has Taken MOU on Free Education Program], Gorontalo Post, Senin 13 Desember 2012. Gorontalo
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* [Research Procedures; A Practice Approach], Jakarta: Rineka Cipta.
- Arwildayanto, (2017), Examining the Effectiveness of Prodira on Improving Human Development Index (A Province of Gorontalo Case), *Proceeding the 9th International Conference for Science Educators and Teachers (ICSET)*, Semarang: Semarang State University, September 13-15, 2017.
- Ashari, M. (2016). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013) [The Analysis of Regional Development Plan in North Lombok Regency (A Case Study on Participative Plan in 2009-2013)]. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 163-180.

- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia [The Influence of Regional Government Expenditure on Education and Health Sector towards Indonesian Human Development Index]. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77-102
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2010-2016 [Human Development Index of Gorontalo Province in 2010-2016]*, Grafika Karya: Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2017). *Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo 2016 [Education Indicator of Gorontalo Province]*. Grafika Karya: Gorontalo .
- Billy Antoro. (2015). Janji Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Gratis, Pemda Harus Siapkan Anggaran Pendidikan dari APBD [Promises to Have 12-year Compulsory Education Program, Regional Government should prepare the Education Budget from APBD], <http://www.dadangsn.com/2015/05/janji-wajib-belajar-wajar-12-tahun.html>, diakses 23 September 2017
- Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo, (2016). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016 [Performance Accountability Report of Government Institution, DIKBUDPORA Gorontalo Province in 2016], Gorontalo: DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo;
- Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo. (2012). *Juknis Program Pendidikan Gratis [Technical Guidance of Free Education Program]*, Gorontalo. DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo,
- Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo. (2014), *Petunjuk Teknis Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)[Technical Guidance of PRODIRA]*, Gorontalo.: DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo,
- Dwi Atmanti dan Hastarini. (2009). Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan [Investing Human Resources through Education]. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2 (Nomor 1), 30-39.
- Ekosiswoyo, R. (2016). Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif kunci pencapaian kualitas pendidikan [Effective headmaster's leadership is the key of achieving education quality]. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2).
- Frianti, I. E. (2012). Keefektifan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dalam Rangka Pencapaian Standar Kompetensi pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Bontang [The Effectiveness of the Implementation of Industrial Work Practices in terms of Competency Standard Achievement in Competence of Engineering Expertise at Engineering Department, SMK Negeri 1 Bontang]. (Tesis). *DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM*
- Gorontalo Post, (2012), *Program Pendidikan untuk Rakyat [Education Program for the People]*, *Gorontalo Post*, Senin 20 Februari 2012. Gorontalo
- Gorontalo Post. (2017). *Theasury Award, Potret Kinerja Keuangan Negara [Theasury Award, Portrait of State Financial Performance]*, *Gorontalo Post*, Jumat, 25 Agustus 2017. Gorontalo
- Hadidjah Mootinelo. (2015). *Dampak Kebijakan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) terhadap Pengelolaan Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo*

[*The Impact of PRODIRA Policy on the School Management at SMA Negeri 3 Gorontalo City*], Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

- Handayani, T. (2012). Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun [Universal Secondary Education Policy: Lessons Learned from Nine-Year Compulsory Basic Education]. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(1), 39-56.
- Jusdin Puluhulawa, dan Moh. Rusdiyanto Puluhulawa. (2013). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo) [Implementation of Free Education Policy (Case Study in Gorontalo Province)]*, FIS UNG: Gorontalo.
- Karding, A. K. (2008). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang [Evaluation of School Operational Assistance Program Implementation of Junior High School in Semarang City]* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Psacharopoulos, G. (2007). Returns to investment in education: A global update. *World development*, 22(9), 1325-1343.
- Putri, K. P., & RATNAWATI, I. (2011). *Analisis Pengaruh Brand Image, Biaya Pendidikan, dan Fasilitas Pendidikan terhadap Keputusan Mahasiswa Melanjutkan Studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang [Analysis of the Influence of Brand Image, Education Cost, and Education Facilities towards Students' Decision to Continue Their Study at Diploma III Program Economics Faculty in Diponegoro University of Semarang]* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Robbin, Stephen P., (1990), *Organization Theory, Structure, Design, and Application*, third edition, USA: Prentice Hall, Inc.
- Setiawan, I., & Hariyono, W. (2013). Hubungan Masa Kerja dengan Kapasitas Vital Paru Operator Empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Yogyakarta [the Relationship between Working Period and Vital Capacity of Operators in Four Filling Stations, Yogyakarta City]. *Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 5(3).
- Soehartono, Irawan. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik [Social Policy as the Public Policy]*. Alfabeta: Bandung,
- Sondang P, Siagian. (2007). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi [Basic Framework of Administration Sciences]*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri, E. (2014). *Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 Di Smp Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [The Implementation of Poor Student Assistance Policy in the Academic Year of 2012/2013 at SMP Negeri 15 Yogyakarta]* (Doctoral dissertation, UNY).
- Sudjana. (2008). *Metode Statistika [Statistical Method]*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D [Qualitative and Quantitative Research Method and Research Development]*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suprastowo, P. (2014). Kontribusi Bantuan Siswa Miskin terhadap Keberlangsungan dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa [Contribution of Poor Student Assistance to the

Sustainability of Students' Education]. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2), 149-172.

Wahab, S., Abdul. (2007). *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara [Introduction to the Study on Country's Policy Analysis]*, Jakarta: Rineka Cipta.

Laws. :

Constitution 1945 of the Republic of Indonesia. Secretariat General of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia.

Law Number 22 of 1999 on Regional Government. Provincial Government of Jakarta, Bureau of Inter-City and Regional Cooperation.

Law Number 20 of 2003 on National Education System (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 78 of 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4301)

Law Number 23 of 2014 on Regional Government

Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 on Regional Government. *Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.*

Government Regulation Number 19 of 2005 on National Education Standard (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 41 of 2005, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4496). Presidential Instruction Number 7 of 2014

The Implementation of Prosperous Family Deposit Program, Smart Indonesia Program, and Healthy Indonesia Program to Create a Productive Family

Government Regulation Number 47 of 2008 on Compulsory Education. Jakarta: Depdiknas.

Gorontalo Provincial Regulation Number 2 of 2012 on Medium-Term Development Plan of Gorontalo Province from 2012 to 2017.

Gorontalo Provincial Regulation Number 7 of 2012 on the Implementation of PRODIRA

Gorontalo Provincial Regulation Number 9a of 2012 on Free Education.

Gorontalo Provincial Regulation Number 6 of 2015 on Education Implementation.

Governor Regulation Number 8 of 2012 on the Guideline of Funding Management for School Operational Assistance in SMA/SMK/MA for Free Education Program in Gorontalo Province.

Governor Regulation Number 15 of 2013 on the Guidelines for Funding Management of the Education Implementation for the People in Secondary Schools, Gorontalo Province

Decree of Gorontalo Governor Number 186/07/VI/2013 on the Creator of Management Team

Decree of the Head of DIKBUDPORA Gorontalo Province Number 188.4/DIKPORA/23.B/SEK/2013 on the Technical Guidance of PRODIRA Implementation. Gorontalo; Dikbudpora Gorontalo Press.

Decree of the Head of DIKBUDPORA Gorontalo Province Number 188.4/Dikbudpora/172.a/Secondary Education/I/2014 on the Technical Guidance

of PRODIRA Implementation Budget Year of 2014. Gorontalo; Dikbudpora
Gorontalo Press

**SURAT PERNYATAAN KASLIAN NASKAH DAN
PERNYATAAN PENYERAHAN HAK CIPTA NASKAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama* : Arwildayanto
: .Nina Lamatenggo
: Warni Tune Sumar
Institusi* : Universitas Negeri Gorontalo
Email* : arwildayanto@ung.ac.id
Tempat Tanggal : Tarok, Pesisir Selatan Sumbar/15 September 1975
Lahir*
Alamat* : Jalan Panca Krida Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur
Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Judul Artikel : The Effectiveness of Education Program for the People
(PRODIRA) Policy in Accelerating the Quality Performance
of
Senior High School Education in Gorontalo Province
Artikel diterima : tanggal 5 bulan November 2017

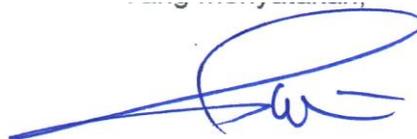
Saya menyatakan bahwa artikel tersebut di atas merupakan naskah asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan/ saduran, dan belum pernah di publikasikan di media apapun. Saya bersedia bertanggung jawab jika kelak terdapat pihak tertentu yang merasa dirugikan secara pribadi dan atau tuntutan hukum atas diterbitkannya artikel ini.

Saya juga menyerahkan hak milik atas naskah tersebut kepada JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) dan oleh karenanya redaksi berhak memperbanyak dan mempublikasikan sebagian atau keseluruhannya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo. 5 November 2017

Penulis



(Arwildayanto)

*Tuliskan data penulis utama